



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

**(AUDITED)
TAHUN ANGGARAN 2024**



BUPATI MANGGARAI TIMUR

Nomor : BU.900/340 /V/2025 Borong, 22 Mei 2025

Lampiran : ---

Perihal : Surat Representasi Manajemen Kepada:
Yth. Kepala BPK RI Perwakilan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Di
Kupang

Sehubungan dengan akan dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi NTT atas Laporan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami memberikan surat representasi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, 31 Desember 2024 dan 2023, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami persiapkan untuk diserahkan ke BPK RI sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.

3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 atau sepanjang tahun 2024 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.

15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.





BUPATI MANGGARAI TIMUR

KATA PENGANTAR

Sesuai semangat dan jiwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan mendayagunakan semua sumber daya ekonomi yang dimiliki. Aspek terpenting yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan konsep otonomi daerah antara lain aspek pengelolaan keuangan daerah. Adapun cakupan dari pengelolaan keuangan daerah dimaksud meliputi keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah, setiap Kepala Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan sebagai tolak ukur dan dasar dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD yang akan diserahkan kepada DPRD setelah diaudit oleh BPK RI.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Atas dasar hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai PP No. 71 tahun 2010. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas dibidang Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kepada para pihak terkait.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk melakukan perbaikan hal-hal yang diperlukan demi penyempurnaan dalam Laporan Keuangan ini. Harapannya, semoga Laporan Keuangan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak terkait (*stakeholders*), secara khusus yang ada pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Borong, 22 Mei 2025





BUPATI MANGGARAI TIMUR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Borong, 22 Mei 2025

Bupati Manggarai Timur 6

Agas Andreas, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	4
NERACA	5
LAPORAN OPERASIONAL	7
LAPORAN ARUS KAS	9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Umum.....	12
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
1.4 Sistematika Penulisan CALK.....	15
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....	17
2.1 Ekonomi Makro.....	17
2.2 Kebijakan Keuangan.....	24
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	27
3.1 Pendapatan Daerah	27
3.2 Belanja Daerah.....	28
3.3 Belanja Transfer	36
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	37
4.1 Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.....	37
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	37
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	39
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	55
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	57
5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	57
5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL.....	81
5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca.....	82
5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional.....	121

5.5	Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas.....	148
5.6	Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	158
BAB VI	PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	162
BAB VII	PENUTUP.....	165

DAFTAR LAMPIRAN

1	Lampiran 1	:	Rincian Belanja Operasi Per OPD
2	Lampiran 2	:	Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Pegawai
3	Lampiran 3	:	Rincian Belanja Barang Dan Jasa
4	Lampiran 4	:	Rincian Belanja Hibah
5	Lampiran 5	:	Rincian Belanja Modal
6	Lampiran 6	:	Rincian Belanja Tidak Terduga
7	Lampiran 7a	:	Sisa Kas Pada Bendahara Penerimaan
8	Lampiran 7a	:	Sisa Kas Pada Bendahara Pengeluaran
9	Lampiran 8	:	Rincian Saldo Akhir Kas Bendahara Bos SD,SMP Dan BOSPAUD
10	Lampiran 9a	:	Rincian Saldo Akhir Kas Bendahara Puskesmas Dana BOK
11	Lampiran 9b	:	Rincian Saldo Akhir Kas Bendahara Puskesmas Dana Kapitasi
12	Lampiran 10	:	Rincian Kas Lainnya Atas Utang PFK
13	Lampiran 11 a	:	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel
14	Lampiran 11 b	:	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan
15	Lampiran 11 c	:	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam
16	Lampiran 11 d	:	Beban Penyisihan Piutang PBB
17	Lampiran 11 e	:	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar
18	Lampiran 11 f	:	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
19	Lampiran 11 g	:	Beban Penyisihan Piutang Reklame
20	Lampiran 11 h	:	Beban Penyisihan Piutang Air Dan Non Air BLUD SPAM
21	Lampiran 11 i	:	Piutang Dan Penyisihan Pajak Hiburan
22	Lampiran 11 j	:	Piutang Pajak Penerangan Jalan
23	Lampiran 11 k	:	Piutang Dan Penyisihan UPTD RSUD
24	Lampiran 12	:	Daftar Persediaan Rusak
25	Lampiran 13	:	Investasi Permanen Jangka Panjang
26	Lampiran 14 a	:	Rincian Pendapatan Hibah Aset Tetap Tanah

27	Lampiran 14 b	:	Pendapatan Hibah Aset Peralatan Dan Mesin
28	Lampiran 14 c	:	Pendapatan Hibah Aset Tetap Gedung Dan Bangunan
29	Lampiran 14 d	:	Pendapatan Hibah Aset Tetap JIJ
30	Lampiran 15	:	Saldo Akhir Aset Tetap
31	Lampiran 16	:	Perhitungan Jumlah Aset Tetap Tanah
32	Lampiran 17	:	Perhitungan Jumlah Aset Tetap Peralatan Mesin
33	Lampiran 18	:	Perhitungan Jumlah Aset Tetap Gedung Dan Bangunan
34	Lampiran 19	:	Perhitungan Jumlah Aset Tetap Jaringan Irigasi Dan Jalan
35	Lampiran 20	:	Perhitungan Jumlah Aset Tetap Aset Tetap Lainnya
36	Lampiran 21	:	Perhitungan Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
37	Lampiran 22	:	Daftar Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
38	Lampiran 23	:	Perhitungan Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud
39	Lampiran 24a	:	Rincian Aset Lain-Lain-Rusak Berat
39	Lampiran 24b	:	Rincian Aset Lain-Lain-Tidak Dioperasionalkan
40	Lampiran 25	:	Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud
41	Lampiran 26	:	Pengakuan Utang Kepada Pihak Ketiga Atas Pengadaan Aset Tetap
42	Lampiran 27a	:	Rincian Beban Barang Persediaan
43	Lampiran 27b	:	Rincian Beban Barang Dan Jasa
44	Lampiran 27c	:	Rincian Beban Persediaan

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	25.314.300.952,00	15.055.200.365,00	59,47	18.996.984.197,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	4.404.687.400,00	3.213.542.363,00	72,96	2.826.406.463,20
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	4.654.873.033,00	4.654.873.033,00	100,00	10.065.795.251,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	23.735.679.061,00	18.533.029.453,39	78,08	15.578.158.226,53
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)		58.109.540.446,00	41.456.645.214,39	71,34	47.467.344.137,73
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	2.666.963.000,00	3.137.961.600,00	117,66	3.687.686.436,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	1.862.962.000,00	1.939.469.400,00	104,11	2.037.406.600,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	578.943.104.000,00	578.835.877.278,00	99,98	522.531.134.657,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	383.872.685.569,00	387.087.568.788,00	100,84	415.807.576.182,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d 13)		967.345.714.569,00	971.000.877.066,00	100,38	944.063.803.875,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.1.1.2.2				
16	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	27.470.913.000,00
17	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	156.619.814.000,00	156.619.814.000,00	100,00	157.447.150.500,00
18	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.3	19.587.672.000,00	19.587.672.000,00	100,00	0,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16 s.d 18)		176.207.486.000,00	176.207.486.000,00	100,00	184.918.063.500,00
20	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	33.808.663.608,00	29.091.770.910,00	86,05	26.949.730.232,00
22	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (21 s.d 22)		34.058.663.608,00	29.341.770.910,00	86,15	26.949.730.232,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 19 + 23)		1.177.611.864.177,00	1.176.550.133.976,00	99,91	1.155.931.597.607,00
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
26	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	251.000.000,00	32.000.000,00	12,75	70.180.000,00
27	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	13.703.329.056,00	13.952.572.592,20	101,82	13.642.392.180,00

No.	Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
28	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (26 s.d 27)		13.954.329.056,00	13.984.572.592,20	100,22	13.712.572.180,00
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 24 + 28)		1.249.675.733.679,00	1.231.991.351.782,59	98,58	1.217.111.513.924,73
30	BELANJA DAERAH	5.1.2				
31	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
32	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	475.980.972.549,00	429.193.586.037,00	90,17	357.673.767.875,00
33	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	286.261.276.674,00	266.584.651.960,74	93,13	250.174.150.039,29
34	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	1.260.000.000,00	1.256.013.228,82	99,68	2.675.666.416,29
35	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	62.276.231.506,00	61.920.437.361,00	99,43	19.960.286.802,00
36	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	12.964.193.661,00
37	Jumlah Belanja Operasi (32 s.d 36)		825.778.480.729,00	758.954.688.587,56	91,91	643.448.064.793,58
38	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
39	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	57.800.309.867,00	55.800.276.096,00	96,54	57.499.818.824,00
41	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	93.742.687.207,00	84.562.513.574,00	90,21	79.522.079.374,00
42	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.4	89.203.633.749,00	86.216.452.076,00	96,65	213.233.845.684,87
43	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	8.149.361.872,00	6.453.439.003,00	79,19	6.627.338.997,00
44	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1.353.700.000,00	1.209.000.000,00	89,31	2.476.285.115,00
45	Jumlah Belanja Modal (39 s.d 44)		250.249.692.695,00	234.241.680.749,00	93,60	359.359.367.994,87
46	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
47	Belanja Tidak Terduga		1.138.860.254,00	653.200.277,00	57,36	367.796.702,00
48	Jumlah Belanja Tidak Terduga (47)		1.138.860.254,00	653.200.277,00	57,36	367.796.702,00
49	JUMLAH BELANJA (37 + 45 + 48)		1.077.167.033.678,00	993.849.569.613,56	92,27	1.003.175.229.490,45
50	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
51	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	5.1.2.4.1				
52	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.1.1	3.268.441.762,00	737.011.667,00	22,55	946.064.539,00
53	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.1.2	464.158.740,00	23.179.500,00	4,99	204.573.000,00
54	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa (52 s.d 53)		3.732.600.502,00	760.191.167,00	20,37	1.150.637.539,00
55	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.4.2				
56	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2.1	216.239.709.888,00	215.665.634.413,00	99,73	210.503.868.790,00
57	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (56)		216.239.709.888,00	215.665.634.413,00	99,73	210.503.868.790,00
58	JUMLAH TRANSFER (54 + 57)		219.972.310.390,00	216.425.825.580,00	98,39	211.654.506.329,00
59	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (49 + 58)		1.297.139.344.068,00	1.210.275.395.193,56	93,30	1.214.829.735.819,45
60	SURPLUS/DEFISIT (29 + 59)	5.1.3	(47.463.610.389,00)	21.715.956.589,03	(45,75)	2.281.778.105,28
61	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4				
62	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
63	Pengunaan SILPA		94.979.964.389,00	94.992.334.457,90	100,01	49.181.832.283,29
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	98.686.195.700,00
65	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (63 s.d 64)		94.979.964.389,00	94.992.334.457,90	100,01	147.868.027.983,29

No.	Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
66	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
67	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		47.516.354.000,00	47.516.354.000,00	100,00	51.169.841.700,00
69	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (67 s.d 68)		47.516.354.000,00	47.516.354.000,00	100,00	55.169.841.700,00
70	PEMBIAYAAN NETTO (65 + 69)	5.1.4.3	47.463.610.389,00	47.475.980.457,90	100,03	92.698.186.283,29
71	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (60 + 70)	5.1.5	0,00	69.191.937.046,93	100,00	94.979.964.388,57

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	94.979.964.388,57	49.138.954.928,29
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	94.992.334.457,90	49.181.832.283,29
3	Subtotal (1 - 2)		(12.370.069,33)	(42.877.355,00)
4	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	69.191.937.046,93	94.979.964.388,57
5	Subtotal (3 + 4)		69.179.566.977,60	94.937.087.033,57
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	12.370.069,33	42.877.355,00
7	Lain-Lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	5.2.5	69.191.937.046,93	94.979.964.388,57

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



III. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	58.227.112.260,11	83.318.769.144,28
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.3	28.408.453,53	71.975.793,51
6	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.1.4	1.401.194.027,02	1.203.692.417,56
7	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.1.5	135.927.632,00	127.197.739,00
8	Kas di Bendahara BOK	5.3.1.1.1.6	6.614.604.913,00	8.070.200.394,00
9	Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.1.7	2.772.276.792,04	2.188.128.900,22
10	Kas Lainnya dan Setara Kas	5.3.1.1.1.8	24.384.859,10	27.387.225,00
11	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2	10.762.833.434,88	9.816.556.196,03
12	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3	704.869.806,00	753.097.806,00
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.4	6.065.269.253,99	7.213.609.407,00
14	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.5	2.363.843.747,04	5.099.206.213,00
15	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.6	(11.222.313.918,13)	(10.650.280.863,73)
16	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.7	6.504.434.398,00	7.500.000,00
17	Persediaan	5.3.1.1.8	20.207.913.195,05	18.729.823.938,02
18	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 17)		104.590.758.853,64	125.976.864.309,89
19	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
20	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.1		
21	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1.1	100.582.820.000,00	100.582.820.000,00
22	Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.2	0,00	464.071.394,89
23	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (21 s.d 22)		100.582.820.000,00	101.046.891.394,89
24	ASET TETAP	5.3.1.3		
25	Tanah	5.3.1.3.1	164.448.202.903,08	168.659.725.353,27
26	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	469.530.877.890,13	418.297.951.557,74
27	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	853.450.919.682,50	754.370.548.057,99
28	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.802.527.266.512,89	1.850.307.027.998,23
29	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	34.947.502.376,64	31.088.084.649,78
30	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	19.617.209.339,19	35.661.291.801,56

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
31	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.394.391.848.732,21)	(1.307.147.448.342,85)
32	Jumlah Aset Tetap (25 s.d 31)		1.950.130.129.972,22	1.951.237.181.075,72
33	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4		
34	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.4.1	524.404.920,00	0,00
35	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.2	(86.663.115,00)	0,00
36	Jumlah Properti Investasi (34 s.d 35)		437.741.805,00	0,00
37	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
38	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.5.1	0,00	48.341.640,69
39	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	31.527.629.987,43	29.704.769.148,43
40	Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	195.014.994.484,87	36.146.918.475,08
41	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	(22.466.395.411,17)	(19.892.304.664,67)
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.5	(118.078.660.690,64)	(28.923.372.396,60)
43	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	5.3.1.5.6	181.735.000,00	549.954.000,00
44	Jumlah Aset Lainnya (38 s.d 43)		86.179.303.370,49	17.634.306.202,93
45	JUMLAH ASET (18 + 23 + 32 + 36 + 44)		2.241.920.754.001,34	2.195.895.242.983,43
46	KEWAJIBAN	5.3.2		
47	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
48	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	11.971.889,87	27.387.225,00
49	Utang Bunga	5.3.2.1.2	0,00	1.256.013.228,82
50	Utang Pinjaman Jangka Pendek	5.3.2.1.3	0,00	47.516.354.000,00
51	Utang Belanja	5.3.2.1.4	6.659.743.327,68	1.584.483.704,71
52	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (48 s.d 51)		6.671.715.217,55	50.384.238.158,53
53	JUMLAH KEWAJIBAN (52)		6.671.715.217,55	50.384.238.158,53
54	EKUITAS	5.3.3		
55	EKUITAS		2.235.249.038.783,79	2.145.511.004.824,90
56	JUMLAH EKUITAS (55)		2.235.249.038.783,79	2.145.511.004.824,90
57	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (53 + 56)		2.241.920.754.001,34	2.195.895.242.983,43

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



IV. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN	5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.4.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	16.001.477.603,85	20.587.916.201,20	(4.586.438.597,35)	(22,28)
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	3.227.414.363,00	2.857.758.463,20	369.655.899,80	12,94
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	4.654.873.033,00	10.065.795.251,00	(5.410.922.218,00)	(53,76)
7	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.4.1.1.4	16.298.825.119,40	18.129.758.288,49	(1.830.933.169,09)	(10,10)
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d 7)		40.182.590.119,25	51.641.228.203,89	(11.458.638.084,64)	(22,19)
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.1.1	2.841.993.000,00	3.073.497.000,00	(231.504.000,00)	(7,53)
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.1.2.1.2	1.867.219.000,00	2.114.520.000,00	(247.301.000,00)	(11,70)
13	Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1.3	578.835.877.278,00	522.531.134.657,00	56.304.742.621,00	10,78
14	Dana Alokasi Khusus	5.4.1.2.1.4	387.087.568.788,00	415.807.576.182,00	(28.720.007.394,00)	(6,91)
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (11 s.d 14)		970.632.658.066,00	943.526.727.839,00	27.105.930.227,00	2,87
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.2.2				
17	Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	27.470.913.000,00	(27.470.913.000,00)	(100,00)
18	Insentif Fiskal		19.587.672.000,00	0,00	19.587.672.000,00	100,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (17 s.d 18)		19.587.672.000,00	27.470.913.000,00	(7.883.241.000,00)	100,00
20	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA	5.4.1.2.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil		26.356.408.444,04	25.294.527.305,00	1.061.881.139,04	4,20
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	100,00
23	Jumlah Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya (21 s.d 22)		26.606.408.444,04	25.294.527.305,00	1.311.881.139,04	5,19
24	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 19 + 23)		1.016.826.738.510,04	996.292.168.144,00	20.534.570.366,04	2,06
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.3				
26	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	1.003.248.206,00	4.964.300.181,00	(3.961.051.975,00)	(79,79)
27	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.4.1.3.2	13.952.572.592,20	13.642.392.180,00	310.180.412,20	2,27

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
28	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (22 S.d 23)		14.955.820.798,20	18.606.692.361,00	(3.650.871.562,80)	(19,62)
29	JUMLAH PENDAPATAN (8 + 24 + 28)		1.071.965.149.427,49	1.066.540.088.708,89	5.425.060.718,60	0,51
30	BEBAN	5.4.2				
31	Beban Pegawai	5.4.2.1	428.763.382.173,00	357.449.923.575,00	71.313.458.598,00	19,95
32	Beban Barang	5.4.2.2	126.305.634.205,18	116.043.881.353,99	10.261.752.851,19	8,84
33	Beban Jasa	5.4.2.3	98.338.712.076,14	97.195.020.811,71	1.143.691.264,43	1,18
34	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	5.312.146.259,08	4.783.686.399,00	528.459.860,08	11,05
35	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	30.891.084.546,00	31.763.868.495,00	(872.783.949,00)	(2,75)
36	Beban Hibah	5.4.2.6	56.381.490.164,07	21.971.361.399,00	34.410.128.765,07	156,61
37	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.7	0,00	12.964.193.661,00	(12.964.193.661,00)	(100,00)
38	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.8	176.918.403.356,86	168.842.164.346,54	8.076.239.010,32	4,78
39	Beban Penyisihan	5.4.2.9	866.021.700,63	2.032.344.258,65	(1.166.322.558,02)	(57,39)
40	Beban Transfer	5.4.2.10	59.806.011.580,00	54.207.355.829,00	5.598.655.751,00	10,33
41	Jumlah Beban (31 s.d 40)		983.582.886.060,96	867.253.800.128,89	116.329.085.932,06	13,41
42	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		88.382.263.366,53	199.286.288.580,00	(110.904.025.213,46)	(55,65)
43	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
44	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.1	37.307.077,75	90.110.281,75	(52.803.204,00)	(58,60)
45	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.2	1.480.577.578,84	935.599.993,73	544.977.585,11	58,25
46	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (44 s.d 45)		(1.443.270.501,09)	(845.489.711,98)	(597.780.789,11)	70,70
47	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (42 + 46)		86.938.992.865,44	198.440.798.868,02	(111.501.806.002,57)	(56,19)
48	POS LUAR BIASA	5.4.4				
49	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	-
50	Beban Luar Biasa		653.200.277,00	0,00	653.200.277,00	100,00
51	JUMLAH POS LUAR BIASA (49 s.d 50)		(653.200.277,00)	0,00	(653.200.277,00)	100,00
52	SURPLUS/DEFISIT	5.4.5	86.285.792.588,44	198.440.798.868,02	(112.155.006.279,57)	(56,52)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Manggarai Timur 6



V. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		15.055.200.365,00	18.996.984.197,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		3.213.542.363,00	2.826.406.463,20
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.654.873.033,00	10.065.795.251,00
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		18.465.035.953,39	15.536.758.226,53
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		5.077.431.000,00	5.725.093.036,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		578.835.877.278,00	522.531.134.657,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		209.715.773.244,00	238.941.839.387,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		177.371.795.544,00	176.865.736.795,00
11	Penerimaan Dana Insentif		0,00	27.470.913.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		156.619.814.000,00	157.447.150.500,00
13	Penerimaan Insentif Fiskal		19.587.672.000,00	0,00
14	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		29.091.770.910,00	26.949.730.232,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan		250.000.000,00	0,00
16	Penerimaan Hibah		32.000.000,00	70.180.000,00
17	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		13.952.572.592,20	13.642.392.180,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi (3 s.d. 17)		1.231.923.358.282,59	1.217.070.113.924,73
19	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
20	Pembayaran Pegawai		429.193.586.037,00	357.673.767.875,00
21	Pembayaran Barang dan Jasa		266.584.651.960,74	250.174.150.039,29
22	Pembayaran Bunga		1.256.013.228,82	2.675.666.416,29
23	Pembayaran Belanja Hibah		61.920.437.361,00	19.960.286.802,00
24	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		0,00	12.964.193.661,00
25	Pembayaran Tak Terduga		653.200.277,00	367.796.702,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		760.191.167,00	1.150.637.539,00
27	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		215.665.634.413,00	210.503.868.790,00
28	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi (20 s.d. 27)		976.033.714.444,56	855.470.367.824,58
29	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (18 – 28)	5.5.1.3	255.889.643.838,03	361.599.746.100,15
30	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
31	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
32	Penjualan Aset Tetap Lainnya		65.200.000,00	41.400.000,00
33	Penjualan Aset Lain-Lain		2.793.500,00	0,00

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
34	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi (32 s.d. 33)		67.993.500,00	41.400.000,00
35	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
36	Perolehan Peralatan dan Mesin		55.800.276.096,00	57.499.818.824,00
37	Perolehan Gedung dan Bangunan		84.562.513.574,00	79.522.079.374,00
38	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		86.216.452.076,00	213.233.845.684,87
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.453.439.003,00	6.627.338.997,00
40	Perolehan Aset Lainnya		1.209.000.000,00	2.476.285.115,00
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	4.000.000.000,00
42	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi (36 s.d. 41)		234.241.680.749,00	363.359.367.994,87
43	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (34 – 42)	5.5.2.3	(234.173.687.249,00)	(363.317.967.994,87)
44	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
45	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
46	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	98.686.195.700,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan (46)		0,00	98.686.195.700,00
48	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
49	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		47.516.354.000,00	51.169.841.700,00
50	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan (49)		47.516.354.000,00	51.169.841.700,00
51	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (47 – 50)	5.5.3.3	(47.516.354.000,00)	47.516.354.000,00
52	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
53	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		11.971.889,87	81.152.058.473,14
55	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris (54)		11.971.889,87	81.152.058.473,14
56	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
57	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		27.387.225,00	81.291.886.174,14
58	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris (57)		27.387.225,00	81.291.886.174,14
59	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (55 – 58)	5.5.4.3	(15.415.335,13)	(139.827.701,00)
60	Kenaikan/Penurunan Kas (29 + 43 + 51 + 59)	5.5.5	(25.815.812.746,10)	45.658.304.404,28
61	Saldo Awal Kas	5.5.6	95.007.351.613,57	49.306.169.854,29
62	Koreksi SiLPA	5.5.7	12.370.069,33	42.877.355,00
63	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	5.5.8	95.019.721.682,90	49.349.047.209,29
64	Saldo Akhir Kas (60 + 63)	5.5.9	69.203.908.936,80	95.007.351.613,57

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	2.145.511.004.824,90	1.929.843.740.936,24
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	86.285.792.588,44	198.440.798.868,02
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	3.452.241.370,45	17.226.465.020,64
4	Koreksi Ekuitas - Kas	5.6.3.1	12.370.069,33	0,00
5	Koreksi Ekuitas - Piutang	5.6.3.2	(91.108.436,00)	(6.861.000,00)
6	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	5.6.3.3	256.681.568,48	3.430.500,00
7	Koreksi Ekuitas - Persediaan	5.6.3.4	(28.349.403,11)	2.108.846.835,06
8	Koreksi Ekuitas- Aset Tetap Tanah	5.6.3.5	1.010.054.640,00	14.734.710.000,00
9	Koreksi Ekuitas- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	5.6.3.6	0,00	431.200.000,00
10	Koreksi Ekuitas- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.6.3.7	4.274.848.700,00	375.669.254,55
11	Koreksi Ekuitas- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.3.8	244.000.000,00	0,00
12	Koreksi Ekuitas- Akumulasi Penyusutan	5.6.3.9	(2.300.696.037,31)	(420.530.569,13)
13	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	5.6.3.10	576.057,94	0,16
14	Koreksi Ekuitas Aset Lainnya - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.6.3.11	(6.382.900,00)	0,00
15	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	5.6.3.12	80.247.111,12	0,00
16	EKUITAS AKHIR (1 + 2 + 3)	5.6.4	2.235.249.038.783,79	2.145.511.004.824,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Manggarai Timur *[Signature]*





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Salah satu unsur penting dan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan tersebut adalah menyelesaikan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Laporan dimaksud harus disajikan tepat waktu dan memenuhi prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan sesuai kaidah atau norma-norma penyusunan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya dalam Pasal 32 Undang-Undang dimaksud menegaskan, bahwa bentuk dan isi laporan keuangan dimaksud disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah dimaksud sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan di Kabupaten Manggarai Timur telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, yang juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan, yang berisikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur selama satu periode pelaporan, secara khusus Laporan Keuangan TA 2024, yang meliputi 7 (tujuh) komponen laporan yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tak terpisah kan dari kesatuan laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, serta Laporan Perubahan Ekuitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah. Format Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas serta Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan melakukan konversi/penyesuaian realisasi APBD dalam format berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini agar tersedianya dokumen laporan keuangan yang menyajikan informasi yang relevan terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
4. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
5. Menyajikan informasi terkait perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang mewajibkan Kepala Daerah menyusun Laporan Keuangan untuk diperiksa oleh BPK sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada DPRD.
2. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat), dimana Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama periode pelaporan Tahun 2024.
3. Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam periode TA 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4. Bagi Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan ini juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta sebagai bahan penting dalam menentukan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya agar lebih berdaya guna dan berhasil untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.
5. Laporan Keuangan ini juga untuk memenuhi kepentingan pemeriksaan oleh BPK RI, apakah penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan yang telah dibuat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- o. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
- p. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
- q. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024.
- r. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

1.1 Umum

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab III Kebijakan Akuntansi

3.1 Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Bab IV Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

4.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

4.3. Penjelasan Akun-Akun Neraca

4.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

4.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

4.6. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab V Pengungkapan Informasi Penting Lainnya.

5.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Manggarai Timur



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.2 Pemerintahan

Bab VI Penutup

Lampiran - Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Menurut Investopedia, ekonomi makro mempelajari seluruh sistem pasar dalam skala yang besar. Contoh fenomena makro ekonomi yang pernah terjadi adalah inflasi, tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB), dan fenomena pengangguran. Ekonomi makro juga berkaitan dengan kinerja, struktur dan behaviour ekonomi, hal ini berbeda dengan ekonomi mikro yang lebih fokus dengan keputusan yang dibuat pelaku politik seperti masyarakat, industri, dan perusahaan.

Secara umum ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Arah kecenderungan ekonomi makro Manggarai Timur paling tidak dapat tergambar dari angka-angka indikator komponen sebagai berikut:

- a. Tingkat Kemiskinan
- b. Tingkat Pengangguran
- c. Gini Ratio
- d. Indeks Pembangunan Manusia
- e. Pertumbuhan Ekonomi
- f. Inflasi
- g. PDRB

a. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan – kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak; jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Yang perlu dicermati pula adalah Tingkat Kedalaman dan Tingkat Keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari Pemerintah Daerah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai Timur

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Manggarai Timur (%)	26,50	25,35	25,06	24,90	(0,16)
2	Provinsi NTT (%)	20,44	20,05	19,96	19,02	(0,94)
3	Nasional (%)	9,71	7,53	9,36	8,57	(0,79)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT dan BPS Pusat

Secara garis besar persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2024 sebesar 25,06% mengalami penurunan sebesar 0,16%, jika dibandingkan pada Tahun 2023 dimana persentase penduduk miskin sebesar 25,06%. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan tersebut sudah berada diatas persentase penurunan penduduk miskin rata-rata secara propinsi sebesar 19,02% atau mengalami penurunan 0,94% dari tahun 2023, dan berada di bawah secara nasional mengalami penurunan, dimana pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin secara nasional sebesar 9,36% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 8,57% atau turun sebesar 0,79% dari tahun 2023.

Dari segi Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan diketahui semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berikut disajikan tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur:

Tabel 2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	4,96	5,27	5,57	5,14	(0,43)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	3,96	3,63	3,32	3,57	(0,25)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	2,25	1,56	-	-	-

Sumber Data: BPS Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT dan BPS Pusat

Indikator kedalaman kemiskinan:

1. 0 – 3 ringan;
2. 4 – 6 sedang
3. 7 – 9 berat.

Tabel 2 menggambarkan bahwa Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,43% bila dibandingkan dengan Tingkat Kedalaman Kemiskinan pada Tahun 2023 sebesar 5,57%, atau jika dilihat dan pada tahun 2024 tingkat kedalaman kemiskinan turun hingga menembus angka 5,14%. Artinya jika disandingkan dengan indikator kedalaman kemiskinan yang berada pada rentang 4 – 6, maka tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 masih termasuk kategori sedang seperti tahun 2023 atau tidak jauh dari garis kemiskinan.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Sedangkan Tingkat Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	1,32	1,50	1,49	1,49	-
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	1,05	0,93	0,79	0,96	0,17
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	1,56	-	-	-

Sumber Data: BPS Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT dan BPS Pusat

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 Tingkat Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur tidak berubah.

Kondisi ini disebabkan antara lain karena faktor pendapatan masyarakat Manggarai Timur dari sektor pertanian seperti persawahan dan perkebunan seperti kopi dan cengkeh yang relatif menurun akibat dari fluktuasi harga yang tidak menentu. Hal-hal tersebut mengakibatkan belanja/ pengeluaran masyarakat mengalami ketimpangan sehingga tingkat keparahan kemiskinan bergerak naik. Berbagai intervensi dari Pemerintah sudah dilakukan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Pemerintah Desa pada tahun 2024 melalui Bantuan Sosial Langsung Tunai (BLT) telah dilakukan, sehingga diharapkan kedepan angka ketimpangan tersebut bergerak menurun.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan,
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab Manggarai Timur (%)	1,89	2,08	3,02	0,94
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,54	3,27	3,17	(0,1)
3	Tingkat Nasional	5,86	5,32	4,91	(0,41)

Sumber Data BPS Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT dan Pusat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Manggarai Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir terus bergerak menurun. Pada tahun 2023 berdasarkan pada data



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kabupaten Manggarai Timur Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur 2024 menyebutkan pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka naik sebesar 3,02% dari sebelumnya pada tahun 2023 TPT Kabupaten Manggarai Timur sebesar 2,08%.

c. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
2. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Tabel 5. Gini Ratio Kabupaten Manggarai Timur

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	-	-	-
2	Tingkat Provinsi	0,325	0,316	(0,009)
3	Tingkat Nasional	0,388	0,381	(0,007)

Sumber Data: BPS Provinsi NTT dan BPS Pusat

Mencermati Tabel 5 di atas, Indeks Gini untuk Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 tidak dapat ditampilkan karena datanya sampai dengan saat ini belum disediakan Badan Statistik Kabupaten Manggarai Timur. Namun demikian, bila mencermati Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara terimplisit tergambar pula Gini Ratio Kabupaten Manggarai Timur, yang menjelaskan bahwa tingkat distribusi pendapatan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk masyarakat Kabupaten Manggarai Timur belum merata karena belum mencapai angka 0. Sepintas kita melihat nilai Indeks Gini Ratio Provinsi NTT bergerak turun 0,009%, atau tingkat distribusi pendapatan masyarakat secara perlahan bergerak mendekati merata di hampir semua masyarakat atau tingkat ketimpangannya sedikit berkurang.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), harapan lama sekolah, Rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1. Rendah (< 60)
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
4. Sangat Tinggi (>80).

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	61,37	62,30	63,24	66,03	2,79
2	Provinsi	65,28	65,90	66,68	69,14	2,46
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	74,39	75,02	0,63

Sumber Data BPS Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT dan BPS Pusat

Secara garis besar realisasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 sebesar 66,03, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 63,24 atau naik 2,79 persen.

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi.

Kabupaten Manggarai Timur pada TA 2024 menghitung laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar Harga Konstan 2010 menurut pengeluaran dengan indikator Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventory. Rata-rata PDRB Kabupaten Manggarai Timur TA 2024 belum tersedia di data statistik.

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota

No	Uraian	Kabupaten/Kota			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	2.086.841,81	2.165.247,03	2.240,83	-
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,31	3,74	3,49	3,93

Sumber Data: BPS Kabupaten Manggarai Timur



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

f. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*Creeping Inflation*); Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*);

Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tabel 8. Tingkat Inflasi Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Manggarai Timur (%)	-	-	-	
2	Provinsi NTT (%)	6,65	2,42	1,19	(1,23)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57	(1,04)

Sumber Data: BPS Provinsi NTT dan BPS Pusat

Dengan berbagai intervensi yang sudah dijalankan, maka secara umum tingkat inflasi baik Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun tingkat nasional masih berada dalam kategori rendah. Artinya daya beli masyarakat masih dapat menjangkau harga-harga kebutuhan pokok dan secara umum pemerintah dapat mengendalikan ekonomi makro melalui berbagai kebijakan moneter dan sektor riil.

g. Struktur Perekonomian Kabupaten Manggarai Timur

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 9. PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.679.205,25	1.830.815,85	1.965.602,0
2	Pertambangan dan Penggalian	100.191,06	106.828,74	108.674,3
3	Industri Pengolahan	20.006,27	21.978,43	24.197,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	862,27	965,79	1.125,6
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	177,01	183,65	189,3
6	Konstruksi	206.669,21	223.422,09	233.192,7
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	483.223,99	545.170,12	607.155,9
8	Transportasi dan Pergudangan	23.447,74	25.402,59	29.043,2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.860,29	4.416,18	5.002,6
10	Informasi dan Komunikasi	362.284,94	371.180,76	380.431,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.759,37	15.217,07	15.968,5
12	<i>Real Estate</i>	43.803,09	45.697,10	46.726,3
13	Jasa Perusahaan	0	0	-
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	495.784,73	517.914,46	606.179,3
15	Jasa Pendidikan	93.810,18	99.069,16	108.044,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	112.824,75	119.845,41	127.541,3
17	Jasa lainnya	8.769,99	9.400,25	9.881,0
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		3.649.680,14	3.937.507,65	4.268.955,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Manggarai Timur

Data pada tabel di atas menunjukkan angka PDRB Kabupaten Manggarai Timur cenderung bergerak meningkat dari tahun ketahun. Meskipun inflasi secara nasional bergerak naik yang sangat signifikan pengaruh naiknya BBM pada periode September 2023 yang secara otomatis sedikit mengganggu pertumbuhan ekonomi, namun secara keseluruhan PDRB Kabupaten Manggarai Timur masih dibilang stabil. Hal ini terlihat pada angka pergerakan beberapa sektor perdagangan bergerak secara positif atau terus naik. Hal ini dapat kita lihat pada tahun 2022 PDRB Manggarai Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha senilai Rp3.649.529,30 tahun 2023 senilai Rp3.936.879,30 tahun 2024 senilai Rp4.268.954,90 atau mengalami



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

kenaikan senilai Rp331.447,35, dari tahun 2023. Penyumbang kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai Timur adalah dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan terendah pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Stabilnya angka PDRB Kabupaten Manggarai Timur.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam mengelola keuangan daerah, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menetapkan baik berkaitan dengan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah secara umum sebagai berikut:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan peningkatan pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur diarahkan pada:

1. Optimalisasi penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan lebih menitikberatkan pada (1) potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) tidak memberatkan masyarakat; (3) tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan dan dilaksanakan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten. Kebijakan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada perdagangan dan jasa.
2. Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah sesuai dengan regulasi perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2024 diarahkan pada empat hal yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

1. Belanja Operasi, adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Secara umum belanja operasi adalah merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari:
 - a) Belanja pegawai, adalah pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pengoptimalan belanja pegawai diarahkan untuk:
 - 1) Kenaikan gaji pokok;
 - 2) Pemberian gaji bulan ke 13 dan 14;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 3) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dibayar hanya enam bulan mulai dari januari sampai dengan juni, sedangkan untuk guru tidak diberikan TPP; dan
 - 4) Anggaran untuk pembayaran kurang bayar tunjangan profesi guru.
2. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
3. Belanja bunga tahun 2024 digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang berasal dari pembayaran atas kewajiban pokok utang pinjaman kepada Bank NTT.
4. Belanja bantuan sosial pada tahun 2024 digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang kepada individu/ keluarga yang tergolong ke dalam data kemiskinan ekstrim, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Manggarai Timur TA 2024 didasarkan pada tingkat kebutuhan dan urgensi tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam rangka mengurangi angka jumlah penduduk yang miskin ekstrim, membantu masyarakat yang tidak mampu dalam urusan pelayanan kesehatan, serta bantuan sosial untuk beasiswa kedokteran, yang dilakukan secara jelas, selektif atau tidak mengikat, rasional dan jumlahnya dibatasi.
5. Belanja modal pada tahun 2024, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal terdiri dari belanja modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan Bangunan, belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, belanja modal Aset Tetap Lainnya.
6. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2024, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya seperti bantuan berupa uang untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.
7. Belanja Transfer, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Belanja Bagi Hasil tahun 2024, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 2) Belanja Bantuan Keuangan tahun 2024, diberikan kepada Pemerintah Desa berupa Dana Desa, Alokasi dana Desa dan Pamsimas, dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam mengelola keuangan daerah, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menetapkan baik berkaitan dengan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah.

Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai SKPD yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah sesuai dengan regulasi perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada SKPD sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

3.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2024, target Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2024 ditetapkan senilai Rp1.249.675.733,679,00 dan yang terealisasi sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp1.231.991.351.782,59 atau 98,58%. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menjadi 3 kelompok akun yakni: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah-LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2024 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai senilai Rp41.456.645.214,39 atau 71,34% dari target senilai Rp58.109.540.446,00 Adapun SKPD yang mengelola pendapatan Asli Daerah sebanyak 12 SKPD, 1 BLUD dari 40 SKPD yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada 13 SKPD

No	SKPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2023
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1	Dinas Kesehatan	3.487.743.400,00	2.544.052.500,00	72,94	(943.690.900,00)	2.187.613.300,20
2	BLUD RSUD	8.000.000.000,00	9.137.864.044,82	114,22	1.137.864.044,82	6.149.519.796,90
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.816.435.000,00	3.128.972.000,00	81,99	(687.463.000,00)	3.253.320.098,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	221.100.000,00	37.443.500,00	16,94	(183.656.500,00)	63.085.500,00
5	Dinas Perhubungan	66.892.125,00	52.939.388,00	79,14	(13.952.737,00)	23.191.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	-	-	121.500.000,00
7	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	450.000.000,00	503.150.800,00	111,81	53.150.800,00	243.954.700,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	11.343.000,00	0,00		(11.343.000,00)	-
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	123.000.000,00	24.700.000,00	20,08	(98.300.000,00)	53.500.000,00
10	Dinas Pertanian	67.000.000,00	58.700.000,00	87,61	(8.300.000,00)	41.400.000,00
11	Dinas Peternakan	107.208.000,00	17.910.000,00	16,71	(89.298.000,00)	18.300.000,00
12	Sekretariat Daerah	73.463.544,00	55.176.350,00	75,11	(18.287.194,00)	43.873.336,00
13	Badan Keuangan (SKPD)	41.685.355.377,00	25.895.736.631,00	62,12	(15.789.618.746,00)	35.268.086.406,63
	Jumlah	58.109.540.446,00	41.456.645.213,82	71,34	(16.652.895.232,18)	47.467.344.137,73



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Sedangkan Pendapatan Transfer pada tahun 2024 terealisasi senilai Rp1.176.550.133.976,00 dari target anggaran senilai Rp1.177.611.864.177,00 serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi senilai Rp13.984.572.592,20 dari target anggaran senilai Rp13.954.329.056,00.

Pada Penerimaan Transfer Tahun 2024 terdapat Penerimaan yang bersifat diterima langsung oleh perangkat Daerah/unit perangkat daerah berupa Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Paud dan Kesetaraan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Desa. Sedangkan pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdapat penerimaan yang diterima langsung pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berupa pendapatan Dana Kapitasi Jasa Kesehatan Nasional. Adapun realisasi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai berikut:

Tabel 11. Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024

No	Jenis Transfer	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	PENDAPATAN TRANSFER	1.177.611.864.177,00	1.176.550.133.976,00	(1.061.730.201,00)
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.143.553.200.569,00	1.147.208.363.066,00	3.655.162.497,00
1	Dana Perimbangan	967.345.714.569,00	971.000.877.066,00	3.655.162.497,00
a	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4.529.925.000,00	5.077.431.000,00	547.506.000,00
b	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	578.943.104.000,00	578.835.877.278,00	(107.226.722,00)
c	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	209.741.773.244,00	209.715.773.244,00	(26.000.000,00)
d	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	174.130.912.325,00	177.371.795.544,00	3.240.883.219,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	-
3	Dana Desa	156.619.814.000,00	156.619.814.000,00	-
B	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.058.663.608,00	29.341.770.910,00	(4.716.892.698,00)
1	Pendapatan Bagi Hasil	33.808.663.608,00	29.091.770.910,00	(4.716.892.698,00)
2	Bantuan Keuangan	250.000.000,00	250.000.000,00	-
2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.954.329.056,00	13.984.572.592,20	30.243.536,20
a	Pendapatan Hibah	251.000.000,00	32.000.000,00	(219.000.000,00)
	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	251.000.000,00	32.000.000,00	(219.000.000,00)
b	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.703.329.056,00	13.952.572.592,20	249.243.536,20
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.703.329.056,00	13.952.572.592,20	249.243.536,20

3.2 Belanja Daerah

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dilaksanakan oleh 40 SKPD. Sesuai ketentuan dalam Permendagri No 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Keuangan Daerah hanya sebagai SKPD sehingga terdapat 42 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan (termasuk BLUD SPAM dan BLUD RSUD Borong) untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manggarai Timur TA 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2024, Target Belanja Daerah Tahun 2024 ditetapkan senilai Rp1.297.139.344.068,00 dan terealisasi senilai Rp1.210.275.395.193,56 atau 93,30%. Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun anggaran 2024 diklasifikasi menjadi 4 kelompok akun yakni Belanja Operasi dengan target senilai Rp825.778.480.729,00, terealisasi senilai Rp758.954.688.587,56, Belanja modal dengan target senilai Rp250.249.692.695,00, terealisasi senilai Rp234.241.680.749 Belanja Tidak Terduga ditargetkan senilai Rp1.138.860.254,00, terealisasi senilai Rp653.200.277,00 Belanja Transfer ditargetkan senilai Rp219.972.310.390,00, dan terealisasi senilai Rp216.425.825.580,00.

Rincian Belanja Daerah berdasarkan kelompok akun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Rekapan Belanja Operasi SKPD

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	356.887.828.410,00	328.755.442.770,00
2	DINAS KESEHATAN	176.128.648.693,00	158.180.090.702,74
3	UPTD RSUD BORONG	35.877.220.403	30.338.634.383,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	25.336.710.351,00	23.892.773.503,00
5	UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.040.996.098	3.000.892.767,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.256.838.874,00	3.170.719.897,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.096.325.395,00	2.011.431.704,00
8	DINAS SOSIAL	3.422.658.146,00	3.185.239.269,00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.661.751.364,00	2.559.869.340,00
10	DINAS P2KBP3A	9.597.801.875,00	9.342.096.543,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	4.038.181.969,00	3.498.287.411,00
12	DINAS PERTANAHAN	1.573.945.648,00	1.344.029.329,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.053.123.187,00	2.592.186.776,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.563.215.114,00	2.490.364.395,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.731.394.793,00	2.594.467.879,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	3.074.385.273,00	2.893.229.544,00
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.169.844.311,00	2.056.740.501,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.530.067.193,00	2.360.728.137,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.011.266.764,00	1.947.668.493,00
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2.864.566.086,00	2.766.322.105,00
21	DINAS PERTANIAN	31.641.092.082,00	31.066.374.369,00
22	DINAS PETERNAKAN	3.244.967.617,00	3.004.250.410,00
23	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.323.348.179,00	4.791.405.497,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	17.551.805.379,00	16.853.008.404,00
25	SEKRETARIAT DEWAN	23.590.232.946,00	21.734.585.803,00
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.625.704.514,00	4.413.474.843,00
27	BADAN KEUANGAN DAERAH	16.607.214.228,00	12.543.142.977,82
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	4.410.545.852,00	3.870.504.300,00
29	INSPEKTORAT	5.182.422.286,00	4.973.782.473,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI
30	KECAMATAN BORONG	3.107.639.401,00	3.009.744.787,00
31	KECAMATAN RANA MESE	1.662.512.458,00	1.546.500.570,00
32	KECAMATAN KOTA KOMBA	3.091.842.756,00	2.930.760.225,00
33	KECAMATAN LAMBA LEDA SELATAN	3.854.884.109,00	3.607.558.640,00
34	KECAMATAN LAMBA LEDA	1.281.375.274,00	1.199.206.637,00
35	KECAMATAN SAMBI RAMPAS	3.163.363.103,00	2.984.817.978,00
36	KECAMATAN ELAR SELATAN	1.344.384.586,00	1.181.241.422,00
37	KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR	1.202.329.788,00	1.081.640.128,00
38	KECAMATAN ELAR	2.010.958.478,00	1.865.792.257,00
39	KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA	981.626.135,00	805.320.231,00
40	KECAMATAN CONGKAR	1.960.212.891,00	1.806.456.622,00
41	KECAMATAN LAMBA LEDA UTARA	1.155.283.419,00	1.023.949.165,00
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	43.867.965.301,00	43.679.955.400,00
	TOTAL	825.778.480.729,00	758.954.688.587,56

Tabel 13. Rekapan Belanja Modal SKPD

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	71.077.650.263,00	65.453.140.173,00
2	DINAS KESEHATAN	25.212.564.109,00	22.636.425.438,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	76.619.771.648,00	73.612.582.002,00
	BLUD SPAM	120.000.000,00	109.408.400,00
4	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	185.500.000,00	185.500.000,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000,00	150.000.000,00
6	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	4.263.000,00	0,00
7	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	342.418.000,00	342.338.000,00
8	DPMPTSP	89.000.000,00	88.786.680,00
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	94.465.500,00	91.000.000,00
10	DINAS PERTANIAN	1.034.550.000,00	1.034.124.000,00
11	DINAS PETERNAKAN	333.803.000,00	330.496.700,00
12	SEKRETARIAT DAERAH	209.453.400,00	208.092.600,00
13	SEKRETARIAT DPRD	745.548.000,00	744.179.000,00
14	BADAN KEUANGAN DAERAH	120.825.000,00	119.825.000,00
15	BKPSDM	8.526.000,00	8.509.256,00
16	KECAMATAN ELAR	39.278.000,00	29.124.000,00
17	KECAMATAN BORONG	16.712.000,00	16.712.000,00
18	KECAMATAN ELAR SELATAN	5.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI
19	KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR	13.227.000,00	13.227.000,00
20	KECAMATAN SAMBI RAMPAS	92.292.100,00	92.292.100,00
21	KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA	1.025.000,00	0,00
22	KECAMATAN CONGKAR	12.584.000,00	12.584.000,00
23	BAKESBANGPOL	25.410.500,00	25.410.500,00
24	RSUD BORONG	73.695.826.175,00	68.937.923.900,00
TOTAL		250.249.692.695,00	234.241.680.749,00

Tabel 14. Rekapan Belanja Tidak Terduga

NO	SKPD PENGELOLA BELANJA TAK TERDUGA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
		BELANJA TIDAK TERDUGA	1.138.860.254,00	667.430.277,00
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bantuan dana untuk korban kebakaran rumah di Kecamatan Sambi Rampas		Rp10.500.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU RKB Pendropingan Logistik Bencana Banjir Bandang di Kec. Lamba Leda Utara		Rp10.721.700,00
3	Dinas Sosial	Belanja TU BTT RKB Korban Banjir Bandang di Kec. Lamba Leda Utara & Sambi Rampas		Rp40.697.000,00
4	PEMKESRA	Belanja TU BTT RKB Bansos yang Tidak Direncanakan dari Nining Astriyani		Rp16.850.000,00
5	Badan Keuangan Daerah	Pembayaran Pengembalian Setoran Pajak MBLB ke Rekening Giro Bank NTT dengan Nomor Rekening Giro: 00601130014891 atas nama CV. Ntala Gregorio dengan alasan Pendobelan Pembayaran		Rp13.298.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT RKB Bagi Bencana Korban Angin Puting Daerah Beliung Di Desa Satar Kampas, Kec. Lamba Leda Utara		Rp16.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT RKB bagi Korban Kebakaran Rumah di Desa Golo Ngawan Kec. Congkar		Rp10.500.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT RKB Bagi Korban Kebakaran Rumah Di Desa Golo Meleng, Kec. Rana Mese		Rp10.500.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT RKB Bagi Korban Kebakaran Tempat Usaha di Tengku Leda Kec. Lamba Leda		Rp10.500.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Rumah Di Desa Satar Punda Kec. Lamba Leda Utara		Rp5.500.000,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT RKB Bagi Korban Rumah Longsor Daerah Di Kel. Tanah Rata Kec. Kota Komba		Rp10.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	SKPD PENGELOLA BELANJA TAK TERDUGA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Daerah Rumah Di Desa Compang Wunis Kec. Lamba Leda Timur		Rp5.500.000,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Daerah Rumah Di Kel. Lempang Paji Kec. Elar Selatan		Rp10.500.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Daerah Rumah Di Gunung Baru Kec. Kota Komba Utara		Rp10.500.000,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Daerah Rumah Di Golo Lebo Kec. Elar		Rp10.500.000,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT RKB bagi Korban Kebakaran Rumah di Kel. Kota Ndora, Kec. Borong		Rp10.500.000,00
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Rumah Di Desa Satar Nawang Kec. Congkar		Rp5.500.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Rumah Di Desa Lenang Kec. Lamba Leda Selatan		Rp5.500.000,00
19	Dinas Peternakan	Belanja TU BTT RKB untuk Pengelolaan KLB Rabies di Kab. Manggarai Timur		Rp171.971.000,00
20	PEMKESRA(SETDA)	Belanja Langsung (LS) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) atas BTT Bantuan Sosial yang Tidak direncanakan dari Aloysius Mawong dan Sebastianus Darwin		Rp11.855.000,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Rumah Di Desa Nanga Puun Kec. Elar Selatan		Rp10.500.000,00
22	PEMKESRA(SETDA)	Belanja Langsung Pembayaran Pasien Tidak Mampu a.n. Sarbela Bamut Natalia, Frederikus Roga dan Asgarius Masten Gelang TA 2024		Rp15.801.833,00
23	PEMKESRA(SETDA)	Belanja Langsung (LS) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) atas BTT Bantuan Sosial yang Tidak direncanakan dari Stefanus Sudirman Laus, Robert Fredi Rumondor, Said Daeng Pelalo dan Edison Nggawang		Rp67.694.744,00
24	PUPR	Belanja TU BTT untuk penanganan Bencana Alam Akibat Gelombang Ekstrim di Dermaga Borong, Kel. Kota Ndora, Kab. Manggarai Timur		Rp30.000.000,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT bagi Korban Kebakaran Rumah di Desa Satar Padut Kec. Lamba Leda Utara		Rp26.500.000,00
26	PUPR	Belanja TU BTT Kegiatan Tanggap Darurat Ruas Jalan Waelengga Lete, Kab. Manggarai Timur TA 2024		Rp66.541.000,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT bagi Korban Kebakaran Rumah di Desa Mokel, Kec. Kota Komba Utara		Rp21.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	SKPD PENGELOLA BELANJA TAK TERDUGA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja TU BTT bagi korban Kebakaran Rumah di Dusun Pau, Desa Ruan, Kec. Kota Komba, Kab. Manggarai Timur		Rp31.500.000,00

Tabel 15. Belanja Transfer

NO	BELANJA TRANSFER	ANGGARAN	REALISASI	RASIO	LEBIH/KURANG
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.268.441.762,00	737.011.667,00	22,55	(2.531.430.095,00)
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	464.158.740,00	23.179.500,00	4,99	(440.979.240,00)
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	216.239.709.888,00	215.665.634.413,00	99,73	(574.075.475,00)
	Jumlah	219.972.310.390,00	216.425.825.580,00	98,39	(3.546.484.810,00)

a. *Mandatory Spending* Dalam Postur APBD

1. *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah .

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan juga mendukung kelancaran operasional 14 Paud Negeri, 229 SD Negeri/Inpres, 128 SMP Negeri, 1 pendidikan kesetaraan (SKB), 1 Perpustakaan Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Juga berdampak kepada tenaga pendidik meliputi guru 3.761 orang dan jumlah peserta didik 39.573 siswa. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 16. Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI
1.	a.	Urusan Bidang Pendidikan, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga:	437.803.961.707,00	308.766.973.433,00
	1)	Belanja Operasi:	365.139.038.055,00	243.313.833.260,00
		a. belanja pegawai;	280.391.494.152,00	242.423.466.900,00
		b. belanja barang dan jasa;	65.469.083.903,00	407.634.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI
		c. belanja hibah;	19.278.460.000,00	482.732.360,00
	2)	Belanja Modal;	72.664.923.652,00	65.453.140.173,00
		a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.766.809.200,00	10.384.886.744,00
		b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.391.796.452,00	44.802.471.852,00
		c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.811.049.000,00	3.903.342.574,00
		d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.695.269.000,00	6.362.439.003,00
b.		Urusan Bidang Kebudayaan	2.920.228.236,00	2.681.822.105,00
	1)	Belanja Operasi:	2.910.228.236,00	2.671.822.105,00
		a. belanja pegawai;	2.443.568.036,00	2.253.331.936,00
		b. belanja barang dan jasa;	466.660.200,00	418.490.169,00
	2)	Belanja Modal;	10.000.000,00	10.000.000,00
c.		Urusan Bidang Perpustakaan	1.754.829.948,00	1.966.475.043,00
	1)	Belanja Operasi:	1.708.364.448,00	1.875.475.043,00
		a. belanja pegawai;	1.403.161.778,00	1.472.372.142,00
		b. belanja barang dan jasa;	305.202.670,00	403.102.901,00
	2)	Belanja Modal;	46.465.500,00	91.000.000,00
		a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-
		b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-
		d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	46.465.500,00	91.000.000,00
d.		Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan	3.075.047.300,00	1.701.640.581,00
		Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang		
		menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		
	1.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten /Kota BPBD	100.000.000,00	99.989.750,00
	2.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Dinas Nakertrans	762.037.300,00	343.994.500,00
	3.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas P2KBP3A	150.000.000,00	143.527.500,00
	4.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta BKPSDM	38.010.000,00	38.010.000,00
	5.	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	225.000.000,00	224.860.034,00
	6.	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil DKPP	300.000.000,00	-
	7.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	350.000.000,00	25.979.797,00
	8.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	350.000.000,00	25.279.000,00
	9.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	250.000.000,00	250.000.000,00
	10.	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	50.000.000,00	50.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI
	11.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Beasiswa) Pada Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	500.000.000,00	500.000.000,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d)		445.554.067.191,00	315.116.911.162,00
3.	Total Belanja Daerah		1.297.139.344.068,00	1.210.275.395.192,82
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		34,35	26,04

2. *Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur*

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah adanya pembangunan jalan ruas kabupaten yang bersumber dari Dana DAU, DAK untuk pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan ruang kelas dan sarana pendukungnya, belanja meubeler di RSUD Borong dan fasilitas kesehatan lainnya, pembangunan jaringan irigasi kabupaten dan air minum, serta belanja pemeliharaan gedung, jalan dan jembatan.

Tabel 17. Alokasi Anggaran Fungsi Infrastruktur Daerah

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	a) Belanja Modal:	244.646.790.803,00	234.241.680.749,00
	1) tanah;	-	
	2) peralatan dan mesin;	53.873.214.420,00	55.800.276.096,00
	3) bangunan dan gedung;	92.861.433.385,00	84.562.513.574,00
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	88.046.708.498,00	86.216.452.076,00
	5) aset tetap lainnya;	8.741.734.500,00	6.453.439.003,00
	6) aset lainnya.	1.123.700.000,00	1.209.000.000,00
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment).	250.000.000,00	250.000.000,00
	c) Belanja Pemeliharaan	9.602.127.000,00	9.054.770.266,00
	d) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.747.957.800,00	803.175.000,00
	e) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.146.665.821,00	
	Jumlah	293.393.541.424,00	244.349.626.015,00
2.	a) Belanja Hibah	1.397.000.000,00	61.920.437.361,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	-	
	Jumlah	1.397.000.000,00	61.920.437.361,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	294.790.541.424,00	306.270.063.376,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 18. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI
1.	Total Belanja Daerah	1.297.139.344.068,00	1.210.275.395.192,82
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a. belanja bagi hasil	2.865.265.395,00	760.191.167,00
	b. bantuan keuangan	211.100.036.900,00	215.665.634.413,00
	Jumlah (a+b)	213.965.302.295,00	216.425.825.580,00
3.	Selisih (1-2)	1.083.174.041.773,00	993.849.569.612,82
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	433.269.616.709,20	397.539.827.845,13

3.3 Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan.

Keuangan. Pada tahun anggaran 2024 jumlah realisasi belanja transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur adalah senilai Rp216.425.825.580,00 dari anggaran senilai Rp219.972.310.390,00 atau terealisasi sebesar 98,39%. Secara rinci realisasi belanja transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Alokasi Belanja Transfer Pemerintah Kab. Manggarai Timur TA. 2023

URAIAN	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
BELANJA TRANSFER	219.972.310.390,00	216.425.825.580,00	(3.546.484.810,00)	98,39
Belanja Bagi Hasil	3.732.600.502,00	760.191.167,00	(2.972.409.335,00)	20,37
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.268.441.762,00	737.011.667,00	(2.531.430.095,00)	22,55
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	464.158.740,00	23.179.500,00	(440.979.240,00)	4,99
Belanja Bantuan Keuangan	216.239.709.888,00	215.665.634.413,00	(574.075.475,00)	99,73
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	216.239.709.888,00	215.665.634.413,00	(574.075.475,00)	99,73



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu

- a. Entitas Akuntansi adalah seluruh Kepala SKPD lingkup Kabupaten Manggarai Timur yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi pada Kabupaten Manggarai Timur ada 42 SKPD.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Badan Keuangan). Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah **Daerah** Tahun 2021 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Normal
- e. Prinsip Periodisasi
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Neraca, Laporan Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/ dibayar oleh kas daerah. Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

- b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menerapkan nilai historis karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

c. Realisasi (*Realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.3

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut:

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan-LRA diakui pada saat: Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD; dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya Pendapatan atas jasa giro.
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assessment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
5. Sistem administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa didahului adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan dari Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal
3. Belanja Tak Terduga
4. Belanja Transfer

c. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; Saat terjadinya konsumsi aset; dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/ kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemda Kabupaten Manggarai Timur dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

1. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
2. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
3. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
4. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/ periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
5. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan; dan
6. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

d. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi.
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/ desa.

Pengukuran Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Pengukuran Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dalam pos SiLPA/SiKPA.

f. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Klasifikasi Kas dan Setara Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
2. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

g. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dikategorikan sebagai investasi jangka pendek.
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
3. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran investasi jangka pendek terdiri dari:

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

h. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Yang termasuk dalam investasi ini di Kabupaten Manggarai Timur adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kepada kelompok masyarakat UKM dan Koperasi di Wilayah Kabupaten Manggarai Timur.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang terdiri dari:

1. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2. Investasi jangka panjang non-permanen:
 - a) Investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang non-permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

i. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi;
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi; dan
4. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/ atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

j. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1. Persediaan diakui pada saat:
 - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b) Diterima atau hak kepemilikannya dan atau ke penguasaannya berpindah.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- c) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
2. Pengakuan persediaan dilakukan dengan cara:
 - a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir.
 - b) Persediaan disajikan sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
 - c) Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang – barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

k. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

l. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/ potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

m. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/ Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih Revaluasi Aset Tetap, dan lain lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

n. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Ruang Lingkup Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas pemerintah daerah tidak termasuk BUMD. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:

1. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
2. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:

1. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
4. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
5. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
 - b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

A. PROPERTI INVESTASI

1. Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
 - b. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
2. Pemerintah daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila pemerintah daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
3. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
4. Berikut ini adalah contoh properti investasi:
 - a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- c. bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

5. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:

- a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- c. properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
- e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
- f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
- g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

6. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:
 - a. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
 - b. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
7. Pemerintah daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
8. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Penyajian aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.
9. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

B. PENGAKUAN

1. Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
 - a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4

Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur antara lain sebagai berikut:

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/ cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

c. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata – rata pada



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

bulan akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap Aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus. Kegiatan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) merupakan bagian dari Aset tidak berwujud.

d. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/ efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
3. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan
4. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
2. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset; dan
3. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

e. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS -POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.231.991.351.782,59	1.217.111.513.924,73

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Satker yang digunakan secara langsung. Pendapatan Daerah diklasifikasi berdasarkan sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2024 dan TA. 2023 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 20. Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	58.109.540.446,00	41.456.645.214,39	71,34	(16.652.895.231,61)	47.467.344.137,73
2	Pendapatan Transfer	1.177.611.864.177,00	1.176.550.133.976,00	99,91	(1.061.730.201,00)	1.155.931.597.607,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.954.329.056,00	13.984.572.592,20	100,22	30.243.536,20	13.712.572.180,00
	Jumlah	1.249.675.733.679,00	1.231.991.351.782,59	98,58	(17.684.381.896,41)	1.217.111.513.924,73

Berdasarkan tabel di atas, Anggaran Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 senilai Rp1.249.675.733.679,00 dan terealisasi senilai Rp1.231.991.351.782,59 atau 98,58%. Sedangkan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 senilai Rp1.217.111.513.924,73 yang berarti mengalami kenaikan senilai Rp14.879.837.857,86. Realisasi pendapatan daerah berdasarkan Jenis akun lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
41.456.645.214,39	47.467.344.137,73

Realisasi yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2024 dan 2023 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 21. Realisasi PAD Tahun 2024 dan 2023

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	25.314.300.952,00	15.055.200.365,00	59,47	(10.259.100.587,00)	18.996.984.197,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.404.687.400,00	3.213.542.363,00	72,96	(1.191.145.037,00)	2.826.406.463,20



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.654.873.033,00	4.654.873.033,00	100,00	0,00	10.065.795.251,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	23.735.679.061,00	18.533.029.453,39	78,08	(5.202.649.607,61)	15.578.158.226,53
	Jumlah	58.109.540.446,00	41.456.645.214,39	71,34	(16.652.895.231,61)	47.467.344.137,73

Berdasarkan data tabel di atas, Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 senilai Rp41.456.645.214,39 atau 71,34% dari target Anggaran Pendapatan Asli Daerah TA2024 senilai Rp58.109.540.446,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp47.467.344.137,73 maka Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengalami penurunan senilai Rp6.010.698.923,34 dari tahun sebelumnya. Penurunan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan pada tahun 2024 terjadi pada komponen Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan. Secara terinci PAD akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan jenis akun sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
15.055.200.365,00	18.996.984.197,00

Pajak Daerah merupakan Pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Timur. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 22. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Pajak Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	2.115.000,00	2.115.000,00	100,00	0,00	69.593.000,00
2	Pajak Restoran	40.789.300,00	34.425.800,00	84,40	(6.363.500,00)	1.611.334.738,00
3	Pajak Reklame	91.000.000,00	96.087.275,00	105,59	5.087.275,00	75.955.400,00
4	Pajak Air Tanah	2.000.000,00	1.387.000,00	69,35	(613.000,00)	2.111.000,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.772.408.348,00	6.050.979.465,00	40,96	(8.721.428.883,00)	10.182.644.355,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	5.000.000.000,00	4.114.333.450,00	82,29	(885.666.550,00)	3.604.251.730,00
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	270.862.130,00	218.810.698,00	80,78	(52.051.432,00)	205.232.081,00
8	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.135.126.174,00	4.537.061.677,00	88,35	(598.064.497,00)	3.245.861.893,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Pajak Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Jumlah	25.314.300.952,00	15.055.200.365,00	59,47	(10.259.100.587,00)	18.996.984.197,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan Pajak daerah TA 2024 senilai Rp25.314.300.952,00, yang terealisasi senilai Rp15.055.200.365,00 atau 59,47%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp18.996.984.197,00, Pajak Daerah mengalami penurunan senilai Rp3.941.783.832,00. Penurunan realisasi pajak daerah yang paling signifikan terjadi pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
3.213.542.363,00	2.826.406.463,20

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Secara garis besar retribusi daerah dapat dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 23. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Jasa Umum	4.188.843.400,00	3.090.476.800,00	73,78	(1.098.366.600,00)	2.617.653.500,20
2	Jasa Usaha	201.408.000,00	82.327.263,00	40,88	(119.080.737,00)	93.491.000,00
3	Perizinan Tertentu	14.436.000,00	40.738.300,00	282,20	26.302.300,00	115.261.963,00
	Jumlah	4.404.687.400,00	3.213.542.363,00	72,96	(1.191.145.037,00)	2.826.406.463,20

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 senilai Rp4.404.687.400,00 yang terealisasi senilai Rp3.213.542.363,00 atau 72,96%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp2.826.406.463,20, Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan senilai Rp387.135.899,80. Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

31 Desember 2024	31 Desember 2023
3.090.476.800,00	2.617.653.500,20

Retribusi jasa umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Retribusi ini dapat dirinci seperti pada tabel berikut:

Tabel 24. Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Retribusi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.487.743.400,00	2.544.052.500,00	72,94	(943.690.900,00)	2.187.613.300,20



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Retribusi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	221.100.000,00	37.443.500,00	16,94	(183.656.500,00)	63.085.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.000.000,00	5.830.000,00	19,43	(24.170.000,00)	1.500.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	450.000.000,00	503.150.800,00	111,81	53.150.800,00	243.954.700,00
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500.000,00
	Jumlah	4.188.843.400,00	3.090.476.800,00	73,78	(1.098.366.600,00)	2.617.653.500,20

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024 senilai Rp4.188.843.400,00 terealisasi senilai Rp3.090.476.800,00 atau 73,78%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp2.617.653.500,20, maka retribusi jasa umum mengalami peningkatan senilai Rp472.823.299,80. Realisasi terendah pada komponen Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar 16,94% dan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebesar 19,43%.

2) Retribusi Jasa Usaha

31 Desember 2024	31 Desember 2023
82.327.263,00	93.491.000,00

Retribusi jasa usaha merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah, rincian realisasi retribusi jasa usaha diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 25. Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Retribusi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Terminal	36.000.000,00	46.217.263,00	128,38	10.217.263,00	21.691.000,00
2	Retribusi Rumah Potong Hewan	42.408.000,00	11.410.000,00	26,91	(30.998.000,00)	18.300.000,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	123.000.000,00	24.700.000,00	20,08	(98.300.000,00)	53.500.000,00
	Jumlah	201.408.000,00	82.327.263,00	40,88	(119.080.737,00)	93.491.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan retribusi jasa usaha TA 2024 senilai Rp201.408.000,00 terealisasi senilai Rp82.327.263,00 atau 40,88%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp93.491.000,00, realisasi retribusi jasa usaha pada tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp11.163.737,00. Penurunan realisasi pada retribusi Jasa Usaha yang signifikan terjadi pada komponen Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga senilai Rp28.800.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3) Retribusi Perizinan Tertentu

31 Desember 2024	31 Desember 2023
40.738.300,00	115.261.963,00

Retribusi perizinan tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi perizinan tertentu merupakan sumber PAD. Anggaran penerimaan retribusi perizinan tertentu TA 2024 senilai Rp14.436.000,00 dan realisasinya senilai Rp40.738.300,00 atau 282,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp115.261.963,00, maka retribusi ini mengalami penurunan senilai Rp74.523.663,00. Penurunannya cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2023, namun realisasinya cukup tinggi bila dibandingkan dengan target anggaran tahun 2024.

5.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.654.873.033,00	10.065.795.251,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada Badan Usaha Milik Daerah yakni pada PT Bank NTT. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan realisasi TA 2024 dan 2023 dan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023

No	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.654.873.033,00	4.654.873.033,00	100,00	0,00	10.065.795.251,00
	Jumlah	4.654.873.033,00	4.654.873.033,00	100,00	0,00	10.065.795.251,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 senilai Rp4.654.873.033,00 dan terealisasi senilai Rp4.654.873.033,00 atau 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp10.065.795.251,00, mengalami penurunan senilai Rp5.410.922.218,00. Penetapan realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada Bank NTT.

5.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
18.533.029.453,39	15.578.158.226,53

Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan penerimaan dari SKPD Kabupaten Manggarai Timur yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini BLUD SPAM, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Penerimaan lain-lain PAD yang sah untuk periode TA 2024 dan tahun 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 27. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Lain-lain PAD Yang Sah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	143.730.500,00	67.993.500,00	47,31	(75.737.000,00)	41.400.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	831.964.544,00	117.676.350,00	14,14	(714.288.194,00)	301.023.336,00
3	Jasa Giro	535.708.326,00	622.435.275,59	116,19	86.726.949,59	349.620.336,50
4	Pendapatan Bunga	4.514.670.100,00	2.746.596.964,91	60,84	(1.768.073.135,09)	3.846.722.346,85
5	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	66.520.006,00	72.988.916,00	109,72	6.468.910,00	20.480.267,14
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	892.463.330,00	1.305.278.440,87	146,26	412.815.110,87	266.334.108,73
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	99.429.525,00	161.826.586,34	162,76	62.397.061,34	69.381.660,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	892.125,00	892.125,00	100,00	0,00	
9	Pendapatan dari Pengembalian	5.544.302.605,00	1.211.243.549,86	21,85	(4.333.059.055,14)	1.563.624.368,41
10	Pendapatan BLUD	11.100.000.000,00	12.220.099.744,82	110,09	1.120.099.744,82	9.092.927.931,90
11	Remunerasi	0,00	0,00	0,00	0,00	26.643.871,00
12	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	5.998.000,00	5.998.000,00	100,00	0,00	0,00
	Jumlah	23.735.679.061,00	18.533.029.453,39	78,08	(5.202.649.607,61)	15.578.158.226,53

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 senilai Rp23.735.679.061,00 dengan realisasi senilai Rp18.533.029.453,39 atau 78,08%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp15.578.158.226,53 mengalami kenaikan senilai Rp2.954.871.226,86. Realisasi terendah Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 terjadi pada komponen Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yaitu sebesar 14,14% dan realisasi tertinggi terjadi pada Pendapatan Denda Pajak Daerah yaitu sebesar 162,76%.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.176.550.133.976,00	1.155.931.597.607,00

Secara umum kelompok Pendapatan Transfer akan digambarkan sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 28. Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Pendapatan Transfer	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	967.345.714.569,00	971.000.877.066,00	100,38	3.655.162.497,00	944.063.803.875,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	176.207.486.000,00	176.207.486.000,00	100,00	0,00	184.918.063.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Pendapatan Transfer	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.058.663.608,00	29.341.770.910,00	86,15	(4.716.892.698,00)	26.949.730.232,00
	Jumlah	1.177.611.864.177,00	1.176.550.133.976,00	99,91	(1.061.730.201,00)	1.155.931.597.607,00

Tabel di atas menunjukkan jumlah anggaran dan realisasi pendapatan transfer untuk periode TA 2024 dan TA 2023, di mana anggaran Pendapatan Transfer tahun 2024 senilai Rp1.177.611.864.177,00 dan terealisasi senilai Rp1.176.550.133.976,00 atau 99,91%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp1.155.931.597.607,00, maka pendapatan transfer mengalami kenaikan senilai Rp20.618.536.369,00. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut dalam rinciannya sebagai berikut:

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
971.000.877.066,00	944.063.803.875,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk periode TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 29. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No	Transfer Pemerintah Pusat: Dana Perimbangan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4.529.925.000,00	5.077.431.000,00	112,09	547.506.000,00	5.725.093.036,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	578.943.104.000,00	578.835.877.278,00	99,98	(107.226.722,00)	522.531.134.657,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	209.741.773.244,00	209.715.773.244,00	99,99	(26.000.000,00)	238.941.839.387,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	174.130.912.325,00	177.371.795.544,00	101,86	3.240.883.219,00	176.865.736.795,00
	Jumlah	967.345.714.569,00	971.000.877.066,00	100,38	3.655.162.497,00	944.063.803.875,00

Pendapatan Dana Transfer Pusat-Dana Perimbangan dianggarkan senilai Rp967.345.714.569,00 dengan realisasi senilai Rp971.000.877.066,00 atau 100,38%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp944.063.803.875,00, realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan senilai Rp26.937.073.191,00.

Dana Bagi Hasil

31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.077.431.000,00	5.725.093.036,00

Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil tahun 2024 dianggarkan senilai Rp4.529.925.000,00 dengan realisasi senilai Rp5.077.431.000,00 atau 112,09%. Jika dibandingkan dengan realisasi transfer tahun 2023 senilai senilai Rp5.725.093.036,00, realisasi transfer Dana Bagi Hasil mengalami penurunan senilai Rp647.662.036,00. Namun



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

apabila dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan, realisasinya mencapai 112,09%. Dana Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil akan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 30. Dana Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Pajak

No	Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil PBB	567.968.000,00	684.809.600,00	120,57	116.841.600,00	1.705.003.436,00
2	Bagi Hasil PPh 21	1.965.795.000,00	2.236.821.000,00	113,79	271.026.000,00	1.816.273.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	0,00	97.615.000,00	0,00	97.615.000,00	
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	133.200.000,00	118.716.000,00	89,13	(14.484.000,00)	166.410.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	165.961.000,00	235.787.400,00	142,07	69.826.400,00	184.181.600,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	712.000,00	7.393.000,00	1.038,34	6.681.000,00	19.989.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.696.289.000,00	1.696.289.000,00	100,00	0,00	1.833.236.000,00
	Jumlah	4.529.925.000,00	5.077.431.000,00	112,09	547.506.000,00	5.725.093.036,00

Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2024 dianggarkan senilai Rp4.529.925.000,00 dengan realisasi senilai Rp5.077.431.000,00 atau 112,09%. Jika dibandingkan dengan realisasi transfer tahun 2023 senilai Rp5.725.093.036,00, realisasi transfer Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan senilai Rp547.506.000,00. Namun apabila dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan, realisasinya mencapai 112,09%.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi pendapatan transfer Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 senilai Rp3.137.961.600,00 atau 117,66 % dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp2.666.963.000,00.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi pendapatan transfer Dana Bagi Hasil sumber daya alam Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 senilai Rp1.939.469.400,00 atau 104,11% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.862.962.000,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

31 Desember 2024	31 Desember 2023
578.835.877.278,00	522.531.134.657,00

Pendapatan Dana Transfer Pusat – Dana Alokasi Umum akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 31. Pendapatan Dana Transfer Pusat – Dana Alokasi Umum

No	DAU	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	427.582.906.000,00	427.582.906.000,00	100,00	0,00	522.531.134.657,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	100,00	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	DAU	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	31.979.016.000,00	31.871.789.278,00	99,66	(107.226.722,00)	
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	60.795.249.000,00	60.795.249.000,00	100,00	0,00	
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	28.397.071.000,00	28.397.071.000,00	100,00	0,00	
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	26.788.862.000,00	26.788.862.000,00	100,00	0,00	
	Jumlah	578.943.104.000,00	578.835.877.278,00	99,98	(107.226.722,00)	522.531.134.657,00

Pendapatan Dana Transfer Pusat – Dana Alokasi Umum dianggarkan senilai Rp578.943.104.000,00 dengan realisasi senilai Rp578.835.877.278,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, mengalami kenaikan senilai Rp56.304.742.621,00.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

31 Desember 2024	31 Desember 2023
387.087.568.788,00	415.807.576.182,00

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik berjumlah senilai Rp383.872.685.569,00, dengan realisasi senilai Rp387.087.568.788,00 atau 100,84%. Dibandingkan realisasi TA 2023 senilai Rp415.807.576.182,00, DAK tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp28.720.007.394,00.

Adapun realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan DAK Fisik TA 2024 senilai Rp209.715.773.244,00 dan dapat rincikan dalam tabel berikut:

Tabel 32. Realisasi DAK Fisik Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis DAK Fisik	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Reguler					
	Pendidikan	47.968.072.669,00	47.968.072.669,00	100,00	0,00	42.571.047.923,00
	Kesehatan dan KB	87.809.648.275,00	87.809.548.275,00	100,00	(100.000,00)	82.585.660.630,00
	Jalan	35.053.550.000,00	35.053.550.000,00	100,00	0,00	64.599.404.000,00
	Air Minum	4.499.187.000,00	4.499.187.000,00	100,00	0,00	10.506.652.350,00
	Sanitasi	8.531.809.000,00	8.531.809.000,00	100,00	0,00	8.462.892.000,00
2	DAK Penugasan					
	Kesehatan dan KB	647.150.000,00	647.150.000,00	100,00	0,00	1.989.080.484,00
	Pertanian	12.973.843.200,00	12.973.843.200,00	100,00	0,00	14.640.287.000,00
	Irigasi	4.040.570.100,00	4.040.570.100,00	100,00	0,00	5.153.733.000,00
3	DAK Afirmasi					
	Transportasi Perdesaan	8.217.943.000,00	8.192.043.000,00	99,68	(25.900.000,00)	8.433.082.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis DAK Fisik	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Jumlah	209.741.773.244,00	209.715.773.244,00	99,99	(26.000.000,00)	238.941.839.387,00

b) Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik TA 2024 senilai Rp177.371.795.544,00 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 33. Realisasi DAK Non Fisik TA 2024

No	Jenis DAK Non Fisik	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	54.760.780.000,00	54.812.375.883,00	100,09	51.595.883,00	55.905.052.610,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.940.000.000,00	2.917.500.000,00	99,23	(22.500.000,00)	3.105.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	50.713.986.200,00	54.449.451.000,00	107,37	3.735.464.800,00	44.174.535.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.220.157.000,00	2.169.000.000,00	177,76	948.843.000,00	1.478.500.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	17.821.230.254,00	16.208.951.000,00	90,95	(1.612.279.254,00)	19.427.927.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	232.690.000,00	221.540.000,00	95,21	(11.150.000,00)	219.227.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	35.209.994.901,00	35.523.295.901,00	100,89	313.301.000,00	41.511.554.580,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	313.301.000,00	0,00	0,00	(313.301.000,00)	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.791.283.970,00	5.076.104.970,00	105,94	284.821.000,00	6.752.135.600,00
9	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	397.530.000,00	397.530.000,00	100,00	0,00	859.520.200,00
10	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	780.000.000,00	778.010.000,00	99,74	(1.990.000,00)	609.364.500,00
11	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00	1.972.760.000,00	100,00	0,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.932.199.000,00	2.815.276.790,00	96,01	(116.922.210,00)	2.822.920.305,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	30.000.000,00	66,67	(15.000.000,00)	0,00
	Jumlah	174.130.912.325,00	177.371.795.544,00	101,86	3.240.883.219,00	176.865.736.795,00

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	27.470.913.000,00

Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah akan diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 34. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah

No	Transfer Pemerintah Pusat: Dana Insentif Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.470.913.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Transfer Pemerintah Pusat: Dana Insentif Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	27.470.913.000,00

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kab. Manggarai Timur tidak menerima alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID). Berbeda dengan Tahun Anggaran 2023 di mana Pemerintah Kab. Manggarai Timur mendapatkan realisasi DID senilai Rp27.470.913.000,00. Realisasi dana transfer DID berdasarkan alokasi perhitungan dari Kementerian Keuangan.

5.1.1.2.2.2 Dana Desa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
156.619.814.000,00	157.447.150.500,00

Anggaran dan realisasi pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa pada tahun 2023 dan 2024 mengalami perbedaan di mana pada tahun 2023 terealisasi senilai Rp157.447.150.500,00 sedangkan pada tahun 2024 terealisasi senilai Rp156.619.814.000,00, atau berkurang senilai Rp827.336.500,00 akan diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 35. Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa

No	Transfer Pemerintah Pusat : Dana Desa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Desa (DD)	156.619.814.000,00	156.619.814.000,00	100,00	0,00	157.447.150.500,00
	Jumlah	156.619.814.000,00	156.619.814.000,00	100,00	0,00	157.447.150.500,00

5.1.1.2.2.3 Insentif Fiskal

31 Desember 2024	31 Desember 2023
19.587.672.000,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kab. Manggarai Timur mendapatkan alokasi dana Insentif Fiskal yang terealisasi senilai Rp19.587.672.000,00. Secara rinci Dana Insentif Fiskal akan diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 36. Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat – Insentif Fiskal

No	Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Insentif Fiskal	19.587.672.000,00	19.587.672.000,00	100,00	0,00	0,00
	Jumlah	19.587.672.000,00	19.587.672.000,00	100,00	0,00	0,00

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
29.341.770.910,00	26.949.730.232,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024 anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah senilai Rp34.058.663.608,00 dengan realisasi senilai Rp29.341.770.910,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp26.949.730.232,00, realisasi tahun



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2024 bertambah senilai Rp2.392.040.678,00.

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

31 Desember 2024	31 Desember 2023
29.091.770.910,00	26.949.730.232,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil tahun 2024 yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi senilai Rp29.091.770.910,00, dari target anggaran senilai Rp33.808.663.608,00 atau terealisasi 86,05% dan mengalami kenaikan senilai Rp2.142.040.678,00 bila dibandingkan realisasi tahun 2023 senilai Rp26.949.730.232,00. Rinciannya tertuang pada tabel berikut:

Tabel 37. Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2024

No	Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.390.066.621,00	4.592.472.689,00	71,87	(1.797.593.932,00)	2.602.345.239,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.101.388.730,00	2.426.809.993,00	78,25	(674.578.737,00)	2.702.354.141,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.566.875.353,00	7.070.292.857,00	82,53	(1.496.582.496,00)	7.114.242.712,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	24.166.763,00	19.141.425,00	79,21	(5.025.338,00)	12.900.856,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.726.166.141,00	14.983.053.946,00	95,27	(743.112.195,00)	14.517.887.284,00
Jumlah		33.808.663.608,00	29.091.770.910,00	86,05	(4.716.892.698,00)	26.949.730.232,00

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
250.000.000,00	0,00

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi NTT senilai Rp250.000.000,00. Berbeda dengan tahun 2023 di mana Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tidak memperoleh Bantuan Keuangan. Rinciannya tertuang pada tabel berikut:

Tabel 38. Rincian Bantuan Keuangan Tahun 2024

No	Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus -BLT Kemiskinan Ekstrim	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Jumlah		250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00	0,00

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

31 Desember 2024	31 Desember 2023
13.984.572.592,20	13.712.572.180,00

Anggaran pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA 2024 adalah senilai Rp13.954.329.056,00 dan terealisasi senilai Rp13.984.572.592,20. Pendapatan ini bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga pada Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang dianggarkan senilai Rp251.000.000,00 dan terealisasi senilai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp32.000.000,00 atau 12,75%. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dianggarkan senilai Rp13.703.329.056,00, terealisasi senilai Rp13.952.572.592,20, atau 101,82%.

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
32.000.000,00	70.180.000,00

Realisasi pendapatan hibah pada tahun 2024 pada akun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp32.000.000,00 dari target anggaran senilai Rp251.000.000,00 atau terealisasi 12,75%. Pendapatan hibah ini bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi pendapatan hibah ini turun senilai Rp38.180.000,00.

Tabel 39. Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2024

No	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-Hibah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	251.000.000,00	32.000.000,00	12,75	(219.000.000,00)	70.180.000,00
	Jumlah	250.000.000,00	32.000.000,00	12,75	(219.000.000,00)	70.180.000,00

5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
13.952.572.592,20	13.642.392.180,00

Pada tahun 2024, Pendapatan Lainnya pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP saja dengan realisasi senilai Rp13.952.572.592,20 dari target yang dianggarkan senilai Rp13.703.329.056,00 atau terealisasi 101,82%.

Tabel 40. Rincian Pendapatan Lainnya

No	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-Lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.703.329.056,00	13.952.572.592,20	101,82	249.243.536,20	13.642.392.180,00
	Jumlah	13.703.329.056,00	13.952.572.592,20	101,82	249.243.536,20	13.642.392.180,00

5.1.2. BELANJA DAN TRANSFER

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.210.275.395.193,56	1.214.829.735.819,45

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada periode Tahun Anggaran 2024 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur TA 2024 serta realisasi TA 2023 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 41. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	825.778.480.729,00	758.954.688.587,56	91,91	(66.823.792.141,44)	643.448.064.793,58
2	Belanja Modal	250.249.692.695,00	234.241.680.749,00	93,60	(16.008.011.946,00)	359.359.367.994,87
3	Belanja Tidak Terduga	1.138.860.254,00	653.200.277,00	57,36	(485.659.977,00)	367.796.702,00
4	Belanja Transfer	219.972.310.390,00	216.425.825.580,00	98,39	(3.546.484.810,00)	211.654.506.329,00
	Jumlah	1.297.139.344.068,00	1.210.275.395.193,56	93,30	(86.863.948.874,44)	1.214.829.735.819,45

Dari data tabel di atas dapat simpulkan bahwa realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.210.275.395.193,56 telah mengalami penurunan senilai Rp4.554.340.625,89 jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.214.829.735.819,45. Berdasarkan klasifikasi secara ekonomi jenis belanja tersebut lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

31 Desember 2024	31 Desember 2023
758.954.688.587,56	643.448.064.793,58

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, yang secara rinci akan diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 42. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Operasi	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	475.980.972.549,00	429.193.586.037,00	90,17	(46.787.386.512,00)	357.673.767.875,00
2	Belanja Barang dan Jasa	286.261.276.674,00	266.584.651.960,74	93,13	(19.676.624.713,26)	250.174.150.039,29
3	Belanja Bunga	1.260.000.000,00	1.256.013.228,82	99,68	(3.986.771,18)	2.675.666.416,29
3	Belanja Hibah	62.276.231.506,00	61.920.437.361,00	99,43	(355.794.145,00)	19.960.286.802,00
4	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	12.964.193.661,00
	Jumlah	825.778.480.729,00	758.954.688.587,56	91,91	(66.823.792.141,44)	643.448.064.793,58

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja operasi TA 2024 senilai Rp825.778.480.729,00, dengan realisasi senilai Rp758.954.688.587,56 atau 91,91%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp643.448.064.793,58, maka belanja operasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp115.506.623.793,98. Rincian Belanja Operasi per SKPD disajikan dalam **Lampiran 1**.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi akan disajikan sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

31 Desember 2024	31 Desember 2023
429.193.586.037,00	357.673.767.875,00

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

KDH/WKDH, dan Belanja Pegawai BLUD. Rincian anggaran dan realisasi berdasarkan SKPD TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat dalam tabel pada **Lampiran 2**.

Anggaran belanja pegawai pada APBD TA 2024 senilai Rp475.980.972.549,00, dengan realisasi senilai Rp429.193.586.037,00 atau 90,17%. Adapun rincian jenis belanjanya tertuang pada tabel berikut:

Tabel 43. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	366.279.384.995,00	325.073.021.333,00	88,75	(41.206.363.662,00)	267.202.313.467,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	19.809.687.166,00	18.239.791.558,00	92,08	(1.569.895.608,00)	8.521.238.528,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.997.967.124,00	73.587.054.805,00	95,57	(3.410.912.319,00)	69.604.919.558,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.931.904.736,00	11.532.289.192,00	96,65	(399.615.544,00)	11.381.808.885,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	162.668.528,00	23.256.154,00	14,30	(139.412.374,00)	226.421.562,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	529.360.000,00	469.876.000,00	88,76	(59.484.000,00)	510.880.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	270.000.000,00	268.296.995,00	99,37	(1.703.005,00)	226.185.875,00
	Jumlah	475.980.972.549,00	429.193.586.037,00	90,17	(46.787.386.512,00)	357.673.767.875,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
266.584.651.960,74	250.174.150.039,29

Anggaran belanja barang dan jasa TA 2024 senilai Rp286.261.276.674,00 dengan realisasi senilai Rp266.584.651.960,74 atau 93,13%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp250.174.150.039,29, realisasi belanja barang dan jasa mengalami kenaikan senilai Rp16.410.501.921,45. Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk masing-masing SKPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur TA 2024 tertuang dalam tabel pada **Lampiran 3**.

1) Belanja Barang/Persediaan

Belanja barang/ persediaan berupa belanja barang habis pakai, barang tak habis pakai misalnya, ATK, persediaan obat dan jenis barang yang pemanfaatannya tidak lebih dari 12 bulan (bukan belanja modal). Realisasi belanja barang tahun 2024 senilai Rp79.138.228.410,08 dari anggaran senilai Rp85.625.490.603,12.

2) Belanja Jasa

Belanja jasa pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berupa jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, jasa konsultansi konstruksi, jasa konsultansi non konstruksi, beasiswa pendidikan PNS,



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, dan belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah. Realisasi belanja jasa tahun 2024 senilai Rp104.750.838.902,58 dari anggaran senilai Rp115.048.773.851,98.

3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan berupa pemeliharaan tanah, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, dan pemeliharaan aset tidak berwujud. Realisasi belanja pemeliharaan tahun 2024 senilai Rp9.054.770.266,08 dari anggaran senilai Rp9.694.165.525,00.

4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas dirinci menurut perjalanan dinas dalam negeri, yang pada tahun 2024 terealisasi senilai Rp31.031.130.104,00 dari anggaran senilai Rp34.391.882.199,90.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat berupa hadiah perlombaan, penghargaan suatu prestasi, beasiswa, dan belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2024 belanja tersebut terealisasi senilai Rp803.175.000,00 dari anggaran senilai Rp841.300.000,00.

6) Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja barang dan Jasa BOS pada tahun 2024 terealisasi senilai Rp31.479.868.593,00 dari anggaran senilai Rp29.346.011.294,00.

7) Belanja Barang dan Jasa BOSP

Belanja barang dan Jasa BOSP pada tahun 2024 terealisasi senilai Rp406.399.700,00 dari anggaran senilai Rp415.524.300,00.

8) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja barang dan jasa BLUD terdiri dari BLUD SPAM dan BLUD RSUD Borong, dengan terealisasi anggaran pada tahun 2024 senilai Rp9.920.240.985,00 dari anggaran senilai Rp10.898.128.900,00.

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	1.256.013.228,82	2.675.666.416,29

Belanja Bunga pada tahun 2024 diarahkan pada pembayaran bunga utang pinjaman kepada Bank NTT senilai Rp1.256.013.228,82.

Tabel 44. Realisasi Belanja Bunga TA 2024

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bunga Utang Pinjaman kepada PT Bank NTT	1.260.000.000,00	1.256.013.228,82	99,68	(3.986.771,18)	2.675.666.416,29
	Jumlah	1.260.000.000,00	1.256.013.228,82	99,68	(3.986.771,18)	2.675.666.416,29



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
61.920.437.361,00	19.960.286.802,00

Realisasi Belanja hibah TA 2024 senilai Rp61.920.437.361,00 dari anggaran senilai Rp62.276.231.506,00 atau 99,43% merupakan hibah kepada Pemerintah Pusat dan hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 senilai Rp19.960.286.802,00, belanja hibah ini mengalami peningkatan realisasi senilai Rp41.960.150.559,00. Anggaran belanja hibah per SKPD akan disajikan pada **Lampiran 4**. Secara rinci data realisasi belanja hibah TA 2024 dan TA 2023 akan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 45. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Belanja Hibah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	40.775.000.000,00	40.703.000.000,00	99,82	(72.000.000,00)	17.454.032.748,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00	432.732.360,00	86,55	(67.267.640,00)	917.997.000,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.017.000.000,00	1.982.000.000,00	98,26	(35.000.000,00)	928.258.414,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sat Dikdas Swasta	12.563.254.144,00	12.551.294.300,00	99,90	(11.959.844,00)	0,00
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sat Dikmen Swasta	3.085.400.000,00	3.080.846.050,00	99,85	(4.553.950,00)	0,00
7	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	584.517.362,00	562.779.761,00	96,28	(21.737.601,00)	559.998.640,00
8	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.732.460.000,00	2.598.484.890,00	95,10	(133.975.110,00)	0,00
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	18.600.000,00	9.300.000,00	50,00	(9.300.000,00)	0,00
	Jumlah	62.276.231.506,00	61.920.437.361,00	99,43	(355.794.145,00)	19.960.286.802,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	12.964.193.661,00

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kab. Manggarai Timur tidak menganggarkan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Bantuan sosial adalah pengeluaran dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat yang diproses melalui SKPD yang memiliki fungsi sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 Senilai Rp12.964.193.661,00 adalah belanja bantuan sosial sebagai modal usaha bagi 856 orang tenaga harian lepas yang tidak diperpanjang masa kerjanya tahun 2024. Belanja bantuan sosial ini sesuai dengan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 107 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial sebagai Modal Usaha bagi Tenaga Harian Lepas yang Tidak Diperpanjang Masa Kerjanya Tahun 2024 dan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/18/Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial sebagai Modal Usaha bagi Tenaga Harian Lepas yang Tidak Diperpanjang Masa Kerjanya Tahun 2024. Belanja bantuan sosial ini dianggarkan senilai Rp12.964.193.661,00 dengan realisasi senilai Rp12.964.193.661,00 atau 100%.

5.1.2.2 BELANJA MODAL

31 Desember 2024	31 Desember 2023
234.241.680.749,00	359.359.367.994,87

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur TA 2024 meliputi pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2024 serta realisasi TA 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 46. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.800.309.867,00	55.800.276.096,00	96,54	(2.000.033.771,00)	57.499.818.824,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.742.687.207,00	84.562.513.574,00	90,21	(9.180.173.633,00)	79.522.079.374,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	89.203.633.749,00	86.216.452.076,00	96,65	(2.987.181.673,00)	213.233.845.684,87
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.149.361.872,00	6.453.439.003,00	79,19	(1.695.922.869,00)	6.627.338.997,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.353.700.000,00	1.209.000.000,00	89,31	(144.700.000,00)	2.476.285.115,00
	Jumlah	250.249.692.695,00	234.241.680.749,00	93,60	(16.008.011.946,00)	359.359.367.994,87

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal TA 2024 senilai Rp250.249.692.695,00 dengan realisasi senilai Rp234.241.680.749,00 atau 93,60%. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 senilai Rp359.359.367.994,87 berarti mengalami penurunan senilai Rp125.117.687.245,87. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal TA 2024 dan realisasi TA 2023 menurut SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

Anggaran belanja modal Tanah tahun 2024 senilai Rp0,00, namun terealisasi hanya senilai Rp0,00 atau 0,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp0,00, realisasi belanja modal Tanah mengalami penurunan senilai Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024	31 Desember 2023
55.800.276.096,00	57.499.818.824,00

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 senilai Rp57.800.309.867,00, namun terealisasi hanya senilai Rp55.800.276.096,00 atau 96,54%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp57.499.818.824,00, realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami penurunan senilai Rp1.699.542.728,00 atau 2,96%.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
84.562.513.574,00	79.522.079.374,00

Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 senilai Rp93.742.687.207,00, namun terealisasi hanya senilai Rp84.562.513.574,00 atau 90,21%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp79.522.079.374,00, realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan senilai Rp 5.040.434.200,00 atau 6,34%.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
86.216.452.076,00	213.233.845.684,87

Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2024 senilai Rp89.203.633.749,00, namun terealisasi hanya senilai Rp86.216.452.076,00 atau 96,65%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp213.233.845.684,87, realisasi belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami penurunan senilai Rp127.017.393.608,87 atau 59,57%.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
6.453.439.003,00	6.627.338.997,00

Anggaran belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 senilai Rp8.149.361.872,00, namun terealisasi hanya senilai Rp6.453.439.003,00 atau 79,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp6.627.338.997,00, realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan senilai Rp173.899.994,00 atau 2,62%.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1.209.000.000,00	2.476.285.115,00
------------------	------------------

Anggaran belanja modal Aset Lainnya tahun 2024 senilai Rp1.353.700.000,00, namun terealisasi hanya senilai Rp1.209.000.000,00 atau 89,31%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp2.476.285.115,00, realisasi belanja modal Aset Lainnya mengalami penurunan senilai Rp1.267.285.115,00 atau 51,18%.

5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

31 Desember 2024	31 Desember 2023
653.200.277,00	367.796.702,00

Pada APBD Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur TA 2024 Belanja Tidak Terduga dianggarkan senilai Rp1.138.860.254,00 dengan realisasi senilai Rp653.200.277,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada TA 2023 senilai Rp367.796.702,00, dan realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp285.403.575,00 pada tahun 2024. Realisasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD TA 2024 digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Adapun kegiatan yang pembbiayaannya bersumber dari belanja tidak terduga adalah penanganan bencana alam, pembayaran pengembalian setoran Pajak MBLB, penanganan kasus rabies, penanganan kebakaran rumah dan tempat usaha, Kegiatan Tanggap Darurat Ruas Jalan Waelengga Lete, dan bantuan sosial. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga tertuang dalam *Lampiran 6*.

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

31 Desember 2024	31 Desember 2023
216.425.825.580,00	211.654.506.329,00

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi untuk Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah, Transfer Bantuan Keuangan kepada desa berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Transfer bantuan keuangan lainnya. Rincian anggaran dan realisasi TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 47. Realisasi Transfer Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Transfer	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintahan Kepada Pemerintah Desa	3.268.441.762,00	737.011.667,00	22,55	(2.531.430.095,00)	946.064.539,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	464.158.740,00	23.179.500,00	4,99	(440.979.240,00)	204.573.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	216.239.709.888,00	215.665.634.413,00	99,73	(574.075.475,00)	210.503.868.790,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Belanja Transfer	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Jumlah	219.972.310.390,00	216.425.825.580,00	98,39	(3.546.484.810,00)	211.654.506.329,00

Realisasi transfer pada TA 2024 untuk 159 Desa di Kabupaten Manggarai Timur senilai Rp216.425.825.580,00 dari target anggaran senilai Rp219.972.310.390,00 atau 98,39%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp211.654.506.329,00, terjadi kenaikan realisasi senilai Rp4.771.319.251,00. Kenaikan realisasi ini terjadi pada komponen Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang naik senilai Rp5.161.765.623,00. Sementara itu, untuk komponen Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa mengalami penurunan yang cukup signifikan. Total penggunaannya adalah senilai Rp390.446.372,00, Rp209.052.872,00 untuk komponen Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Rp181.393.500,00 untuk komponen Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Penurunan realisasi pada kedua komponen Belanja Bagi Hasil ini terjadi karena anggaran yang sudah dialokasikan untuk 159 Desa di Tahun 2024 tidak jadi disalurkan ke setiap Desa. Penyalurannya baru akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Realisasi yang terjadi pada tahun 2024 adalah alokasi komponen Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada Tahun 2024. Penganggaran belanja dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/135/TAHUN 2024 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Pada setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023.

5.1.2.4.1 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

5.1.2.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
737.011.667,00	946.064.539,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa TA 2024 senilai Rp737.011.667,00 atau 22,55% dari anggaran senilai Rp3.268.441.762,00, mengalami penurunan senilai Rp209.052.872,00 bila dibandingkan realisasi TA 2023 senilai Rp946.064.539,00.

5.1.2.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
23.179.500,00	204.573.000,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa TA 2024 senilai Rp23.179.500,00 atau 4,99% dari anggaran senilai Rp464.158.740,00, mengalami penurunan senilai Rp181.393.500,00 bila dibandingkan realisasi TA 2023 senilai Rp204.573.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.4.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
215.665.634.413,00	210.503.868.790,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada TA 2024 senilai Rp215.665.634.413,00 atau 99,73% dari anggaran senilai 216.239.709.888,00, mengalami kenaikan senilai Rp5.161.765.623,00, dari realisasi tahun 2023 senilai Rp210.503.868.790,00.

5.1.3 SURPLUS/ DEFISIT

31 Desember 2024	31 Desember 2023
21.715.956.589,03	2.281.778.105,28

Surplus/defisit realisasi anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 menggambarkan kondisi surplus Anggaran senilai Rp21.715.956.589,03. Surplus anggaran terjadi karena selisih lebih antara realisasi Pendapatan Daerah senilai Rp1.231.991.351.782,59 dengan realisasi Belanja Daerah senilai Rp1.210.275.395.193,56 pada periode pelaporan Tahun 2024. Pada periode pelaporan Tahun 2023, Pemerintah Manggarai Timur juga mengalami kondisi Surplus Anggaran senilai Rp2.281.778.105,28. Kondisi ini secara umum menggambarkan Pemerintah Manggarai Timur tidak mengalami kendala pada potensi capaian realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024.

5.1.4 PEMBIAYAAN DAERAH

31 Desember 2024	31 Desember 2023
47.475.980.457,90	92.698.186.283,29

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 48. Realisasi Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

No	Pembiayaan Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	94.979.964.389,00	94.992.334.457,90	100,01	12.370.068,90	147.868.027.983,29
2	Pengeluaran Pembiayaan	47.516.354.000,00	47.516.354.000,00	100,00	0,00	55.169.841.700,00
	Jumlah	47.463.610.389,00	47.475.980.457,90	100,03	12.370.068,90	92.698.186.283,29

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pembiayaan Netto TA 2024 senilai Rp47.475.980.457,90 atau 100,03% dari target senilai Rp47.463.610.389,00. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 senilai Rp92.698.186.283,29 mengalami penurunan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

senilai Rp45.222.205.825,39. Adapun realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

31 Desember 2024	31 Desember 2023
94.992.334.457,90	147.868.027.983,29

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, yang dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 49. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	94.979.964.389,00	94.992.334.457,90	100,01	12.370.068,90	49.181.832.283,29
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	98.686.195.700,00
	Jumlah	94.979.964.389,00	94.992.334.457,90	100,01	12.370.068,90	147.868.027.983,29

Tabel di atas menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan senilai Rp94.992.334.457,90 atau 100,01% dari target anggaran penerimaan pembiayaan senilai Rp94.979.964.389,00. Realisasi penggunaan SiLPA pada tahun 2024 melampaui target disebabkan karena terdapat koreksi kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya senilai Rp12.370.068,90. Jika dibandingkan realisasi TA 2023 senilai Rp147.868.027.983,29 mengalami penurunan senilai Rp52.875.693.525,39.

5.1.4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

31 Desember 2024	31 Desember 2023
47.516.354.000,00	55.169.841.700,00

Pengeluaran pembiayaan daerah pada kabupaten Manggarai Timur TA 2024 dianggarkan untuk penyertaan modal daerah dan pembayaran pinjaman Daerah. Rincian anggaran dan realisasi pada tabel berikut:

Tabel 50. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

No	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
2	Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo	47.516.354.000,00	47.516.354.000,00	100,00	0,00	51.169.841.700,00
	Jumlah	47.516.354.000,00	47.516.354.000,00	100,00	0,00	55.169.841.700,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2024 adalah senilai Rp47.516.354.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp47.516.354.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yang senilai Rp55.169.841.700,00, pembiayaan Tahun 2024 turun senilai Rp7.653.487.700,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 tidak ada realisasi penyertaan modal daerah ke PT Bank NTT. Hanya ada Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo senilai Rp4.000.000.000,00 dan Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo senilai Rp47.516.354.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo ini merupakan cicilan pokok utang kepada PT Bank NTT



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

atas pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Besaran pembayaran cicilan pokok utang tersebut merupakan kesepakatan bersama melalui mekanisme *Standby Loan* antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan Bank NTT sebagai akibat dari penerimaan pinjaman tahun 2024 sebesar cicilan pokok utang.

5.1.4.3 PEMBIAYAAN NETO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
47.475.980.457,90	92.698.186.283,29

Pembiayaan netto merupakan selisih perhitungan dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rincian anggaran dan realisasi TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 51. Pembiayaan Netto Tahun 2024 dan 2023

No	Pembiayaan Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	94.979.964.389,00	94.992.334.457,90	100,01	12.370.068,90	147.868.027.983,29
2	Pengeluaran Pembiayaan	47.516.354.000,00	47.516.354.000,00	100,00	0,00	55.169.841.700,00
	Jumlah	47.463.610.389,00	47.475.980.457,90	100,03	12.370.068,90	92.698.186.283,29

Tabel di atas menunjukkan realisasi penerimaan pembiayaan TA 2024 senilai Rp94.992.334.457,90 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp47.516.354.000,00 sehingga diperoleh realisasi pembiayaan netto senilai Rp47.475.980.457,90 atau 100,03% dari Anggaran Pembiayaan netto senilai Rp47.463.610.389,00. Pembiayaan netto mengalami penurunan senilai Rp45.222.205.825,39 jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan netto TA 2023 senilai Rp92.698.186.283,29.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
69.191.937.046,93	94.979.964.388,57

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 52. SiLPA Tahun 2024

No	Perhitungan APBD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio (%)	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	1.249.675.733.679,00	1.231.991.351.782,59	98,58	(17.684.381.896,41)	1.217.111.513.924,73
2	Belanja dan Transfer Daerah	1.297.139.344.068,00	1.210.275.395.193,56	93,30	(86.863.948.874,44)	1.214.829.735.819,45
3	Surplus / (Defisit)	(47.463.610.389,00)	21.715.956.589,03	(45,75)	69.179.566.978,03	2.281.778.105,28
4	Penerimaan Pembiayaan	94.979.964.389,00	94.992.334.457,90	100,01	12.370.068,90	147.868.027.983,29
5	Pengeluaran Pembiayaan	47.516.354.000,00	47.516.354.000,00	100,00	-	55.169.841.700,00
6	Pembiayaan Netto	47.463.610.389,00	47.475.980.457,90	100,03	12.370.068,90	92.698.186.283,29
	SiLPA / SiKPA (3+6)	-	69.191.937.046,93	-	69.191.937.046,93	94.979.964.388,57



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 senilai Rp69.191.937.046,93 mengalami penurunan senilai Rp25.788.027.341,64 dari realisasi SiLPA TA 2023 senilai Rp94.979.964.388,57.

5.2 PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

31 Desember 2024	31 Desember 2023
94.979.964.388,57	49.138.954.928,29

Saldo anggaran lebih awal merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun sebelumnya. Saldo anggaran Lebih Awal Tahun 2024 senilai Rp94.979.964.388,57 mengalami kenaikan senilai Rp45.841.009.460,28 atau 93,29% dari Tahun 2023 senilai Rp49.138.954.928,29.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
94.992.334.457,90	49.181.832.283,29

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan senilai Rp94.992.334.457,90 mengalami kenaikan senilai Rp45.810.502.174,61 atau 93,15% dari Penggunaan SAL TA 2023 senilai Rp49.181.832.283,29.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
69.191.937.046,93	94.979.964.388,57

SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja & Transfer serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA tahun 2024 senilai 69.191.937.046,93 atau turun senilai Rp25.788.027.341,64 dari Tahun 2023 senilai Rp94.979.964.388,57.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
12.370.069,33	42.877.355,00

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp12.370.069,33 yang disebabkan saldo rekening yang tidak terdapat pada SK pada 59 sekolah dan kelurahan.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

31 Desember 2024	31 Desember 2023
69.191.937.046,93	94.979.964.388,57

Saldo Anggaran lebih Akhir tahun 2024 senilai Rp69.191.937.046,93 mengalami penurunan senilai Rp25.788.027.341,64 dari Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 senilai Rp94.979.964.388,57 dari terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 53. Rincian SAL Akhir Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	58.227.112.260,11	83.318.769.144,28	(25.091.656.884,17)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	28.408.453,53	71.975.793,51	(43.567.339,98)
3	Kas di Bendahara FKTP	1.401.194.027,02	1.203.692.417,56	197.501.609,46
4	Kas di Bendahara BOS	135.927.632,00	127.197.739,00	8.729.893,00
5	Kas di Bendahara BOK	6.614.604.913,00	8.070.200.394,00	(1.455.595.481,00)
6	Kas di Bendahara BLUD	2.772.276.792,04	2.188.128.900,22	584.147.891,82
7	Kas Lainnya dan Setara Kas	12.412.969,23	0,00	12.412.969,23
	Jumlah	69.191.937.046,93	94.979.964.388,57	-25.788.027.341,64

Rincian pada tabel di atas diuraikan lebih lanjut pada Neraca Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur periode 31 Desember 2024.

5.3

PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode 31 Desember 2024. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
Aset	2.241.920.754.001,34	2.195.895.242.983,43	46.025.511.017,91	2,10
Kewajiban	6.671.715.217,55	50.384.238.158,53	(43.712.522.940,98)	(86,76)
Ekuitas	2.235.249.038.783,79	2.145.511.004.824,90	89.738.033.958,89	4,18

Neraca Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Total Aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.241.920.754.001,34 meningkat senilai Rp46.025.511.017,92 atau 2,10% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.195.895.242.983,43. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp6.671.715.217,55 mengalami penurunan senilai Rp43.712.522.940,98 atau 86,76% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp50.384.238.158,53. Dengan demikian kekayaan bersih yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan periode 31 Desember 2024 senilai Rp2.235.249.038.783,79 mengalami peningkatan senilai Rp89.738.033.958,89 atau 4,18% dibandingkan kekayaan bersih per 31 Desember 2023 senilai Rp2.145.511.004.824,90.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1 ASET

5.3.1.1 ASET LANCAR

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/ (Berkurang)	Tren %
104.590.758.853,64	125.976.864.309,89	(21.386.105.456,25)	(16,98)

Klasifikasi pada Aset Lancar diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) termasuk Bendahara BLUD SPAM, BLUD RSUD Borong, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Dana JKN dan Bendahara Dana BOS, Bendahara BOP PAUD dan Kesetaraan Negeri serta Bendahara Dana BOK pada Puskesmas, baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas Daerah dan Kas Lainnya., selain kas terdapat juga piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan. Namun tidak termasuk persediaan yang kadaluarsa/usang/rusak. Persediaan yang rusak/usang/kadaluarsa dapat diuraikan lebih lanjut pada persediaan. Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam uraian tabel berikut:

Tabel 55. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
	Aset lancar terdiri dari:				
1	Kas di Kas Daerah	58.227.112.260,11	83.318.769.144,28	(25.091.656.884,17)	(30,12)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
3	Kas di Bendahara Penerimaan	28.408.453,53	71.975.793,51	(43.567.339,98)	(60,53)
4	Kas di Bendahara FKTP	1.401.194.027,02	1.203.692.417,56	197.501.609,46	16,41
5	Kas di Bendahara BOS	135.927.632,00	127.197.739,00	8.729.893,00	6,86
6	Kas di Bendahara BOK	6.614.604.913,00	8.070.200.394,00	(1.455.595.481,00)	(18,04)
7	Kas di Bendahara BLUD	2.772.276.792,04	2.188.128.900,22	584.147.891,82	26,70
8	Kas Lainnya dan Setara Kas	24.384.859,10	27.387.225,00	(3.002.365,90)	(10,96)
9	Piutang Pajak Daerah	10.762.833.434,88	9.816.556.196,03	946.277.238,85	9,64
10	Piutang Retribusi Daerah	704.869.806,00	753.097.806,00	(48.228.000,00)	(6,40)
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.065.269.253,99	7.213.609.407,00	(1.148.340.153,01)	(15,92)
12	Piutang Transfer Antar Daerah	2.363.843.747,04	5.099.206.213,00	(2.735.362.465,96)	(53,64)
13	Penyisihan Piutang	(11.222.313.918,13)	(10.650.280.863,73)	(572.033.054,40)	5,37
14	Beban Dibayar Dimuka	6.504.434.398,00	7.500.000,00	6.496.934.398,00	86.625,79
15	Persediaan	20.207.913.195,05	18.729.823.938,02	1.478.089.257,03	7,89



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
	Jumlah	104.590.758.853,64	125.976.864.309,89	(21.386.105.456,25)	(16,98)

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/ (Berkurang)	Tren %
58.227.112.260,11	83.318.769.144,28	(25.091.656.884,17)	(30,12)

Kas di Kas Daerah merupakan uang daerah yang dikuasai oleh bendahara Umum Daerah yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Bupati Manggarai Timur telah menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai Bank Persepsi untuk menampung RKUD. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah membuka Rekening giro Nomor 036.01.04.000001-9 pada PT BPD NTT cabang Borong sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/177/Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024, yang akan digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan.

Saldo Kas tercatat pada RKUD Nomor 036.01.04.000001-9 Kabupaten Manggarai Timur per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp58.227.112.260,11 selaras dengan kas di kas daerah yang disajikan dalam Laporan Neraca per 31 Desember 2024 senilai Rp58.227.112.260,11, Kas di Kas Daerah pada Neraca per 31 Desember 2024 senilai Rp58.227.112.260,11 mengalami penurunan senilai Rp25.091.656.884,17 atau 30,12% dari Kas Daerah Tahun 2023 senilai Rp83.318.769.144,28. Penurunan Kas Daerah pada RKUD senilai Rp25.091.656.884,17 terjadi karena kondisi berikut:

- 1) Total STS dan dokumen yang dipersamakan pada BUD Penerimaan Daerah pada RKUD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 senilai Rp961.584.418.104,14, yang terdiri dari:
 - a) STS dan/atau Dokumen yang dipersamakan Pendapatan Daerah senilai Rp959.523.251.813,14
 - b) STS Pengembalian belanja tahun berjalan senilai Rp1.742.890.287,99
 - c) STS pengembalian GU Nihil senilai Rp318.276.003,00
 - d) Silpa pada tahun 2024 senilai Rp83.318.769.144,28
- 2) Total register SP2D atas pengeluaran daerah pada RKUD Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 senilai Rp986.728.632.781,82, yang terdiri dari:
 - a) Nilai SP2D UP tahun 2024 senilai Rp4.457.549.641,00
 - b) Nilai SP2D GU tahun 2024 senilai Rp46.257.658.320,00
 - c) Nilai SP2D TU tahun 2024 senilai Rp9.983.091.960,00
 - d) Nilai SP2D LS belanja dan transfer tahun 2024 senilai Rp878.513.978.860,82,



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

e) Nilai SP2D LS Pembiayaan tahun 2024 senilai Rp47.516.354.000,00

Dengan demikian proses pengelolaan keuangan pada RKUD Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2024 mengalami Surplus karena penerimaan Daerah lebih tinggi dari Pengeluaran Daerah.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/ (Berkurang)	Tren %
0,00	0,00	0,00	0,00

Pada Bendahara pengeluaran tidak terdapat saldo Kas baik saldo kas pada Bank maupun saldo Kas Tunai hingga 31 Desember 2024 atas pengelolaan keuangan melalui mekanisme UP/GU/TU. Besaran Uang Persediaan (UP) pada bendahara pengeluaran senilai Rp4.457.549.641,00, yang telah dipertanggungjawabkan dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan nihil (GU Nihil) senilai Rp4.077.416.641,00 dan Sisa nilai uang persediaan tahun 2024 yang telah disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah pada bulan Desember tahun 2024 senilai Rp380.133.000,00. Sedangkan pengelolaan keuangan pada bendahara pengeluaran melalui mekanisme TU senilai Rp9.983.091.960,00 telah dipertanggungjawabkan melalui TU Nihil senilai Rp9.431.541.027,00 dan sisa uang atas permintaan TU telah disetorkan Kembali ke Rekening Kas Umum Daerah pada bulan Desember Tahun 2024 senilai Rp551.550.933,00.

Rincian perhitungan kas di Bendahara pengeluaran dapat dilihat pada *Lampiran 7a.*

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/ (Berkurang)	Tren %
Rp28.408.453,53	Rp71.975.793,51	Rp43.567.339,98	0,00

Pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 masih terdapat Kas bendahara penerimaan atas penerimaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Rana Gapang, dan Pajak Makan dan Minum yang dipungut Bendahara pengelola Dana Non RKUD serta jasa giro pada rekening Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Bendahara Umum pada RKUD senilai Rp28.408.453,53 mengalami penurunan senilai Rp43.567.339,98 atau 60,53% dari tahun 2023 yang sejumlah senilai Rp71.975.793,51. Rincian Kas bendahara penerimaan Tahun 2024 antara lain:

- 1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah Desa Rana Gapang senilai Rp20.754.415,00,
- 2) Penerimaan Jasa Giro pada rekening Bendahara Penerimaan senilai Rp12.938,53
- 3) Penerimaan pajak atas belanja Makan dan Minum yang terlambat disetorkan ke RKUD dengan total senilai Rp7.641.100,00.

Dengan demikian, saldo Kas bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 senilai Rp28.408.453,53 dan telah menjadi hak pemerintah daerah sebagai pendapatan Tahun 2024, rincian kas di bendahara penerimaan dapat dilihat pada *Lampiran 7b.*



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara FKTP

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/ (Berkurang)	Tren %
1.401.194.027,02	1.203.692.417,56	197.501.609,46	16,41

Saldo kas pada Bendahara Kapitasi Puskesmas per 31 Desember 2024 senilai Rp1.401.194.027,02 yang merupakan sisa penggunaan belanja Dana yang terealisasi senilai Rp13.755.070.982,72 dari Penggunaan Dana SiLPA Kapitasi Tahun 2023 senilai Rp1.203.692.417,56 dan penerimaan Dana Kapitasi Tahun 2024 senilai Rp13.952.572.572,20. Saldo Kas di bendahara Kapitasi Puskesmas FKTP merupakan saldo non tunai atau saldo yang ada pada bank dapat dilihat pada *Lampiran 8*.

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
135.927.632,00	127.197.739,00	8.729.893,00	6,86

Kas di Bendahara BOS merupakan gunggungan Saldo Kas yang berada dalam penguasaan bendahara transaksi non RKUD yang terdiri dari Kas di Bendahara BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Kas di Bendahara BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Kas di Bendahara BOS Sekolah PAUD/Kesetaraan Negeri yang bersumber dari pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah per 31 Desember 2024 senilai Rp135.927.632,00.

Klasifikasi saldo kas di bendahara BOSP per 31 Desember 2024 yakni:

1) Kas Dana BOS

Saldo kas Dana BOS pada Bendahara BOS per 31 Desember 2023 senilai Rp129.809.132,00 yang merupakan sisa pengelolaan Dana BOS Tahun 2024 yang bersumber dari Alokasi Dana BOS Tahun 2024 dan Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pada sekolah Negeri senilai Rp121.836.739,00. Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik berupa Dana BOS Tahun 2024 senilai Rp42.108.195.533,00 yang terdiri dari penerimaan Dana BOS Sekolah Dasar Negeri senilai Rp23.236.648.536,00, Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp18.871.546.997,00.

Pengeluaran atas pemanfaatan Dana BOS pada Tahun 2024 senilai Rp42.100.223.140,00 yang terdiri dari Pengeluaran Sekolah Dasar Negeri senilai Rp23.250.428.283,00, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp18.849.794.857,00. Dengan Demikian Sisa Belanja Tahun 2024 senilai Rp129.809.132,00 yang terdiri dari Sisa Dana BOS Sekolah Dasar Negeri senilai Rp105.105.948,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp24.703.184,00. Rincian saldo Bendahara Dana BOS SD dan SMP dapat dilihat pada *Lampiran 9*.

2) Kas Dana BOSP

Saldo kas Dana BOP pada BOP per 31 Desember 2024 senilai Rp6.118.500,00 yang merupakan sisa pengelolaan Dana BOP Tahun 2024 yang bersumber dari Alokasi dana BOP Tahun 2024 dan Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pada BOP Negeri senilai Rp5.361.000,00. Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik berupa Dana BOP Tahun 2024 senilai Rp3.066.816.790,00 yang terdiri dari penerimaan Dana BOP PAUD Negeri senilai Rp2.845.276.790,00, BOP Kesetaraan Negeri senilai Rp221.540.000,00 dan penerimaan Dana BOP PAUD & Kesetaraan Sekolah Swasta



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

senilai Rp2.598.484.890,00.

Pengeluaran atas pemanfaatan Dana BOP pada Tahun 2024 senilai Rp3.066.816.790,00 yang terdiri dari Pengeluaran BOP PAUD Negeri senilai Rp2.839.158.290,00, Sekolah BOP Kesetaraan Negeri senilai Rp221.540.000,00, dan pengeluaran hibah ke BOP PAUD & Kesetaraan Swasta senilai Rp3.060.698.290,00. Dengan demikian sisa belanja Tahun 2024 senilai Rp6.118.500,00 yang terdiri dari Sisa Dana BOP PAUD Negeri senilai Rp6.078.500,00 dan Dana BOP Kesetaraan Negeri senilai Rp40.000,00. Rincian saldo Bendahara Dana BOSP Paud & Kesetaraan dapat dilihat pada *Lampiran 9*.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOK

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
6.614.604.913,00	8.070.200.394,00	(1.455.595.481,00)	(18,04)

Saldo kas pada Bendahara BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 senilai Rp6.614.604.913,00 yang merupakan sisa penggunaan belanja kegiatan BOK yang terealisasi senilai Rp30.306.065.087,00 dari realisasi BOK salur Puskesmas dari kementerian senilai Rp36.920.670.000,00 sepanjang tahun 2024. Penurunan kas di bendahara BOK Puskesmas tahun 2024 sebesar 18,04% dari tahun sebelumnya karena pengelolaan Dana BOK tahun 2024 langsung disalurkan ke puskesmas. Rincian kas Bendahara Puskesmas dana BOK dapat dilihat pada *Lampiran 10*.

5.3.1.1.7 Kas di Bendahara BLUD

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
2.772.276.792,04	2.188.128.900,22	584.147.891,82	26,70

Kas di Bendahara BLUD terdiri dari:

1) Kas di Bendahara BLUD pada UPTD SPAM

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
32.930.631,00	60.996.098,00	(28.065.467,00)	(46,01)

Kas pada Rek BLUD SPAM per 31 Desember 2024 yang ditempatkan pada Bank NTT Cabang Borong dengan No Rek. 036.01.05.000445.9 senilai Rp32.930.631,00 mengalami penurunan senilai Rp28.065.467,00 atau 46,01% dari tahun 2023 senilai Rp60.996.098,00.

2) Kas di Bendahara BLUD pada RSUD Borong

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
2.739.346.161,04	2.127.132.802,22	612.213.358,82	28,78

Kas pada Rek BLUD RSUD Borong per 31 Desember 2023 yang ditempatkan pada Bank NTT Cabang Borong dengan No Rek. 2504107461 senilai Rp2.739.346.161,04 mengalami kenaikan senilai Rp612.213.358,82 atau 28,78% dari tahun 2023 senilai Rp2.127.132.802,22.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1.8 Kas Lainnya dan Setara Kas

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
24.384.859,10	27.387.225,00	(3.002.365,90)	(10,96)

Kas lainnya yang tersaji pada neraca per 31 Desember 2024 merupakan utang perhitungan fihak ketiga dalam hal ini Pajak Negara yang telah dipungut oleh bendaharawan pengelola Dana Non RKUD belum disetorkan kas Negara. Utang tersebut tersebar di bendahara pengelola Dana Non RKUD yakni:

- 1) Kas atas Utang Pajak pada Bendahara pengelola Dana BOS Sekolah Dasar senilai Rp8.393.934,00
- 2) Kas atas Utang Pajak pada Bendahara pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama senilai Rp1.151.700,00
- 3) Kas atas Utang Pajak pada Bendahara pengelola Dana BOK Puskesmas senilai Rp2.426.255,87
- 4) Koreksi atas Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya senilai Rp12.370.069,33
- 5) Reklasifikasi dari saldo Kas Bendahara Penerimaan senilai Rp42.899,90

Dalam Bultek 14 tentang Kas dalam penjelasan Kas Bendahara Pengeluaran terdapat paragraf “Dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak Pemerintah seperti PPh 21 dan PPN, dimana uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran”.

Kas lainnya juga ini mencatat atas pengakuan atas penerimaan dan pengeluaran tertentu lainnya karena penyelenggaran pemerintahan. Kas lain dimaksud untuk menyajikan atas pengelolaan dana secara langsung pada SKPD atau unit tertentu dalam SKPD. Hal ini untuk menjawab kondisi yang belum ditunjangi regulasi khusus, namun dana tersebut tetap disajikan dalam neraca. hal ini juga menafsirkan atas Bultek 14 tentang kas pada paragraf Kas Lainnya. Rincian Kas Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 10a**.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
10.762.833.434,88	9.816.556.196,03	946.277.238,85	9,64

Saldo Piutang pajak terjadi dikarenakan adanya surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Bidang Pendapatan Badan Keuangan, sampai dengan batas tanggal tertentu Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah. Saldo piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur TA 2024 senilai Rp10.722.297.313,88 mengalami kenaikan senilai Rp946.277.238,85 atau 9,64% dari jumlah piutang pajak tahun 2023 senilai Rp9.816.556.196,03 dengan rincian dan mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 56. Piutang Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo Awal	MUTASI			Saldo akhir
			Koreksi Saldo Awal	Pelunasan	Piutang Baru	
1	Pajak Hotel	5.360.000,00	0,00	3.855.000,00	4.075.000,00	5.580.000,00
2	Pajak Restoran	74.402.000,00	0,00	20.830.000,00	13.254.300,00	66.826.300,00
3	Pajak Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.079.465.070,57	0,00	646.540.083,00	720.846.804,25	2.153.771.791,82
4	PBB (Official)	7.336.642.318,46	0,00	776.333.158,40	1.619.324.030,00	8.179.633.190,06
5	Pajak Air Tanah (Official)	1.562.000,00	0,00	70.000,00	420.000,00	1.912.000,00
6	Pajak Reklame PAPAN (Official)	715.000,00	0,00	585.000,00	1.900.000,00	2.030.000,00
7	Pajak Reklame Kain	10.692.500,00	0,00	10.692.500,00	4.788.125,00	4.788.125,00
8	Pajak Reklame Stiker	6.300,00	0,00	6.300,00	144.900,00	144.900,00
9	Pajak Hiburan	1.250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.150.000,00
10	Pajak Penerangan Jalan	306.461.007,00	0,00	306.461.007,00	346.997.128,00	346.997.128,00
	TOTAL PIUTANG PAJAK DAERAH	9.816.556.196,03	0,00	1.765.473.048,40	2.711.750.287,25	10.762.833.434,88

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
704.869.806,00	753.097.806,00	(48.228.000,00)	(6,40)

Saldo Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait yang sampai dengan tanggal neraca tertentu belum dibayar oleh wajib Retribusi Daerah.

Saldo piutang retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2024 berupa Retribusi Pasar yang di bawah pengelolaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp704.869.806,00, mengalami penurunan senilai Rp48.228.000,00 atau 6,40% dari tahun 2023 senilai Rp753.097.806,00. Penurunan ini terjadi disebabkan pada kondisi sebagai berikut:

- 1) Adanya penetapan Piutang tahun 2024 yang belum dilunasi oleh wajib Retribusi senilai Rp20.184.000,00
- 2) Adanya Pelunasan atas Piutang Tahun 2023 dan sebelumnya senilai Rp68.412.000,00.

Rincian Piutang Retribusi Daerah berdasarkan objek dan pergerakan Piutang Retribusi dari tahun 2024 sampai dengan neraca periode 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 57. Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Saldo akhir
			Pelunasan	Piutang Baru	
1	Retribusi Pelataran	4.416.500,00	0,00	1.980.000,00	6.396.500,00
3	Retribusi Kios	31.692.000,00	6.312.000,00	15.300.000,00	40.680.000,00
4	Retribusi Los	654.889.306,00	0,00	2.904.000,00	657.793.306,00
5	Retribusi Menara Telekomunikasi	62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL PIUTANG RETRIBUSI		753.097.806,00	68.412.000,00	20.184.000,00	704.869.806,00

5.3.1.1.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
6.065.269.253,99	7.213.609.407,00	(1.148.340.153,01)	(15,92)

Piutang lain-lain PAD yang sah terdiri dari:

1. Piutang BLUD SPAM

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
4.737.320.028,00	4.726.352.978,00	10.967.050,00	0,23

Piutang BLUD SPAM per 31 Desember 2024 senilai Rp4.737.320.028,00 mengalami kenaikan senilai Rp10.967.050,00 dari tahun 2023 senilai Rp4.726.352.978,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya timbul piutang baru tahun 2024 senilai Rp376.827.250,00, sedangkan Piutang tahun sebelumnya yang dilunasi pada tahun 2024 senilai Rp365.860.200,00.

2. Piutang BLUD RSUD Borong

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
664.558.800,00	2.475.621.736,00	(1.811.062.936,00)	(73,16)

Piutang BLUD RSUD Borong per 31 Desember 2024 senilai Rp664.558.800,00 berkurang senilai Rp1.811.062.936,00 dari tahun 2023 senilai Rp2.475.621.736,00. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya Koreksi Saldo Awal senilai Rp91.108.436,00, dan pelunasan piutang tahun 2023 senilai Rp2.099.078.400,00, sedangkan piutang baru tahun 2024 senilai Rp379.123.900,00.

3. Piutang Pendapatan dari Pengembalian

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
663.390.425,99	11.634.693,00	651.755.732,99	57,02

Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2024 senilai Rp663.390.425,99 terdiri dari piutang atas temuan kurang volume penggerjaan senilai Rp468.302.149,13, denda keterlambatan penggerjaan Rp142.595.716,86 dan temuan atas



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung Bangunan yang di PHK pada Dinas PPO dan jaminan pelaksanaan belum dicairkan senilai Rp52.492.560,00.

5.3.1.1.5 Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren%
2.363.843.747,04	5.099.206.213,00	(2.735.362.465,96)	46,36

Piutang Transfer antara Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp2.363.843.747 yang terdiri dari Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp208.577.215, Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp368.279.844 dan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp1.786.986.689.

5.3.1.1.6 Penyisihan Piutang

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
11.222.313.918,13	10.650.280.863,73	572.033.054,40	5,37

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable Value/NRV*). Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang. Penyisihan piutang tak tertagih tahun 2024 senilai Rp11.222.313.918,13, mengalami kenaikan senilai Rp572.033.054,40 atau 5,37% dari tahun 2023 senilai Rp10.650.280.863,73. Kenaikan penyisihan Piutang menggambarkan resiko tidak tertagih semakin tinggi. Rincian Penyisihan Piutang berdasarkan jenis Piutang sebagai berikut:

Tabel 58. Nilai *Net Realizable Value/NRV*

Uraian	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Lain-Lain PAD yang Sah
Nilai Bruto Piutang	10.762.833.434,88	704.869.806,00	6.065.269.253,99
Penyisihan per 31 Des 2024	5.772.528.840,75	694.777.806,00	4.755.007.271,38
Net Realizable Value (NRV)	4.990.304.594,13	10.092.000,00	1.310.261.982,61

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel 59. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Saldo Awal (Des 2023)	Koreksi Ekuitas SA	Surplus atas Pelunasan Pokok	Penyisihan Tahun Berjalan	Saldo Akhir (Des 2024)
1	Pajak Hotel	1.505.000,00	0,00	0,00	20.375,00	1.525.375,00
2	Pajak Restoran	47.739.250,00	0,00	106.250,00	527.771,50	48.160.771,50
3	Pajak MBLB	1.314.763.012,57	(256.620.618,48)	4.288.000,00	0,00	1.053.854.394,09
4	PBB	4.608.298.617,16	0,00	2.107.302,75	61.608.020,62	4.667.799.335,03



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo Awal (Des 2023)	Koreksi Ekuitas SA	Surplus atas Pelunasan Pokok	Penyisihan Tahun Berjalan	Saldo Akhir (Des 2024)
5	Pajak Air Tanah	970.750,00	(60.950,00)	0,00	0,00	909.800,00
6	Pajak Reklame Papan	130.000,00	0,00	0,00	34.165,13	139.500,00
7	Reklame Kain	0,00	0,00	0,00	23.940,63	23.940,63
8	Reklame Sticker	0,00	0,00	0,00	724,50	724,50
9	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	TOTAL	5.973.341.629,73	(256.681.568,48)	6.501.552,75	62.370.332,25	5.772.553.505,85

Penyisihan Piutang pajak Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp5.772.528.840,75 mengalami penurunan senilai Rp200.812.788,98 atau 3,36% dari nilai penyisihan Tahun 2023 senilai Rp5.973.341.629,73. Kondisi ini disebabkan adanya koreksi Saldo Awal penyisihan piutang Pajak MBLB dan piutang Pajak Air Tanah yang timbul karena perubahan kebijakan akuntansi senilai Rp256.681.568,48. Sedangkan beban penyisihan baru tahun 2024 senilai Rp62.370.332,25. Sementara itu pada tahun 2024 adanya keuntungan/surplus kegiatan non operasional atas nilai penyisihan piutang tahun sebelumnya yang dilunasi pokok piutang secara bruto oleh Wajib Pajak senilai Rp6.501.552,75.

2. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Tabel 60. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No	Uraian	Saldo Awal	Surplus atas Pelunasan Pokok	Penyisihan Tahun Berjalan	Saldo Akhir
1	Retribusi Pasar LOS	614.914.306,00	0,00	41.346.000,00	656.260.306,00
2	Retribusi Pasar KIOS	4.650.000,00	0,00	28.461.000,00	33.111.000,00
3	Retribusi Pasar PELATARAN	103.125,00	0,00	5.303.375,00	5.406.500,00
	TOTAL	619.667.431,00		75.110.375,00	694.777.806,00

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp694.777.806,00 mengalami kenaikan senilai Rp75.110.375,00 atau 12,12% dari nilai penyisihan Tahun 2023 senilai Rp619.667.431,00. Kondisi ini disebabkan adanya beban penyisihan baru Tahun 2023 senilai Rp75.110.375,00 atas peningkatan umur piutang.

3. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
4.755.007.271,38	4.057.271.803,00	697.735.468,38	17,20

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah terdiri dari:

- Penyisihan Piutang BLUD SPAM BLUD RSUD Borong per 31 Desember 2024 senilai Rp4.428.343.029,25 mengalami kenaikan senilai Rp371.071.226,25 dari tahun 2023 senilai Rp4.057.271.803,00. Kenaikan tersebut disebabkan adanya timbul beban penyisihan tahun 2024 senilai Rp401.876.751,25 sedangkan adanya pelunasan pokok yang menyebabkan mengurangi penyisihan pada tahun 2024 sebesar Rp30.805.525,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 2) Penyisihan Piutang BLUD RSUD Borong per 31 Desember 2024 senilai Rp323.347.290,00 yang timbul karena ada beban penyisihan piutang senilai Rp323.347.290,00 di tahun 2024.
- 3) Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2024 senilai Rp3.316.952,13 yang timbul karena beban penyisihan piutang senilai Rp3.316.952,13 di tahun 2024.

Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang dapat dilihat pada *lampiran 11a-k*

5.3.1.7 Beban Dibayar di muka

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren %
6.504.434.398,00	7.500.000,00	6.496.934.398,00	500

Beban dibayar dimuka senilai Rp6.504.434.398,00 merupakan Pengembalian atas Dana Hibah dari KPU dan Bawaslu atas ND No.319/ND/XIX/05/2025 senilai Rp6.459.434.398,00 dan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya pada SMPN SATAP BONGGIRITA yang telah dibayarkan sebesar uang muka 25% namun belum ada realisasi fisik pekerjaan per 31 Desember 2024 dan Pihak Ketiga yang melakukan pekerjaan sudah di PHK. Kenaikan senilai Rp6.496.934.398,00 atas pengembalian Dana Hibah dari KPU dan Bawaslu dan Pekerjaan atas Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN SATAP BONGGIRITA yang pekerjaan fisik masih 0%.

5.3.1.8 Persediaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/ (Berkurang)	Tren (%)
20.207.913.195,05	18.729.823.938,02	1.478.089.257,03	7,89

Saldo pada rekening persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di satuan kerja. Saldo persediaan tersebut per 31 Desember 2024 senilai Rp20.207.913.195,05 bertambah senilai Rp1.478.089.257,03 atau 7,89% dari tahun 2023 senilai Rp18.729.823.938,02. Nilai Aset persediaan per 31 Desember 2024 tidak termasuk Aset kadaluwarsa/rusak/usang senilai Rp20.207.913.195,05 yang terdapat pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.461.435.289,07, RSUD Borong Rp160.802.095,50, Dinas Peternakan atas Obat vaksin Rabies Senilai Rp54.000.000, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) senilai Rp8.712.640,00, Blanko Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah yang tidak terpakai dan rusak Rp10.485.000,00 dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas kartu Kuning sebanyak 500 lembar senilai Rp599.000 serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) senilai Rp138.624,00. Sedangkan persediaan bahan makanan senilai Rp4.440.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Persediaan kadaluwarsa/rusak dapat dilihat pada *lampiran 12*. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bahwa metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode fisik dengan metode penilaian yang digunakan adalah metode masuk pertama keluar pertama (FIFO) dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 61. Sisa Persediaan

No	Nama SKPD	SISA PERSEDIAAN 2024				
		ATK	OBAT-OBATAN	BLANGKO, KARCIS dan SKP/R	PERSEDIAAN PAKAI HABIS LAINNYA	Total
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	-	-	c	140.160,00	140.160,00
2	Dinas Kesehatan	-	14.024.944.059,41	278.560.000,00	426.593.993,50	14.730.098.052,91
3	UPTD RSUD BORONG	7.042.800,00	2.969.067.306,14	-	33.949.300,00	3.010.059.406,14
4	Dinas PUPR	2.500.000,00	-	-	680.930.000,00	683.430.000,00
5	UPTD SPAM	-	-	-	109.017.423,00	109.017.423,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	14.445.343,00	14.445.343,00
7	Dinas Sosial	-	-	-	1.488.000,00	1.488.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	675.000,00	-	675.000,00
9	DP2KBP3A	-	781.328.123,00	-	-	781.328.123,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	-	-	189.387.200,00	189.387.200,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	1.925.000,00	-	1.925.000,00
12	Dispenduk Capil	-	-	439.888.920,00	-	439.888.920,00
13	Dinas Perhubungan	-	-	45.981.000,00	2.637.500,00	48.618.500,00
14	DPMPTSP	-	-	3.882.760,00	-	3.882.760,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	3.886.725,00	108.473.000,00	112.359.725,00
16	Dinas Pertanian	-	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00
17	Dinas Peternakan	-	5.664.000,00	-	39.000.000,00	44.664.000,00
18	DPKUKM	-	-	4.127.232,00	-	4.127.232,00
19	Sekretariat Daerah	161.000,00	-	-	-	161.000,00
20	Badan Keuangan Daerah	-	-	7.217.350,00	-	7.217.350,00
	TOTAL	9.703.800,00	17.806.003.488,55	786.143.987,00	1.606.061.919,50	20.207.913.195,05

Berdasarkan informasi pada tabel di atas dapat diketahui rincian Persediaan masing-masing SKPD.

Persediaan per 31 Desember 2024 yang bertambah senilai Rp1.478.089.257,03 dari tahun 2023. Kenaikan nilai persediaan pada laporan Neraca dapat ketahui sebab-sebabnya sebagai berikut:

Mutasi Tambah

1. Pendapatan hibah persediaan tahun berjalan senilai Rp576.392.456,00
2. Pencatatan Persediaan dari pengadaan tahun berjalan senilai Rp19.613.189.189,05

Mutasi Kurang :

1. Koreksi lebih saji/catat pada Persediaan Awal RSUD Borong pada tahun sebelumnya senilai Rp28.349.403,11
2. Penyesuaian penggunaan atas Persediaan Awal setelah dikoreksi yang menjadi beban persediaan tahun berjalan senilai Rp18.540.672.439,41



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/ (Berkurang)	Tren (%)
100.582.820.000,00	101.046.891.394,89	(464.071.394,89)	(0,46)

Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2024 Investasi Jangka Panjang senilai Rp100.582.820.000,00 mengalami penurunan Rp464.071.394,89 atau 0,46% dari tahun 2023 senilai Rp101.046.891.394,89

Investasi Jangka Panjang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

Tabel 62. Investasi Permanen- Jangka Panjang

NO	Jenis	31 Desember 24	31 Desember 23	Bertambah/ (Berkurang)	Tren (%)
1	Penyertaan Modal (Saham)	100.582.820.000,00	100.582.820.000,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	464.071.394,89	(464.071.394,89)	(100)
2a	Properti Investasi Tanah	0,00	13.219.466,89	13.219.466,89	(100)
2b	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00	524.404.920,00	524.404.920,00	(100)
2c	Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi	0,00	(73.552.992,00)	(73.552.992,00)	(100)
Jumlah Investasi Jk Panjang		100.582.820.000,00	101.046.891.394,89	464.071.394,89	0,46

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/ (Berkurang)	Tren (%)
100.582.820.000,00	100.582.820.000,00	0,00	0,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2024 senilai Rp100.582.820.000,00, nilai tersebut masih sama dengan nilai Investasi Jangka Panjang tahun 2023 senilai Rp100.582.820.000,00, berupa penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada *lampiran 13*.

5.3.1.2.1.2 Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen lainnya terdiri dari Properti Investasi Tanah dan Properti Investasi Gedung beserta Akumulasi Penyusutannya pada tahun 2024 di sajikan pada kelompok Aset Tetap Tanah dan Aset Properti Investasi.

5.3.1.3 ASET TETAP

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
1.950.130.129.972,22	1.951.237.181.075,72	(1.107.051.103,50)	(0,06)

Nilai buku Aset tetap pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tercatat jumlah aset tetap pada neraca per 31 Desember 2024 senilai Rp1.950.130.129.972,22, mengalami penurunan senilai Rp1.107.051.103,50 atau 0,06% dibandingkan nilai buku



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

aset tetap tahun 2023 senilai Rp1.951.237.181.075,72. Berikut uraian keadaan nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2024;

NILAI PEROLEHAN ASET TETAP KAB. MANGGARAI TIMUR			
31 Desember 2024	31 Desember 2023	Lebih/(Kurang)	%
3.344.521.978.704,43	3.258.384.629.418,57	86.137.349.285,86	2,64

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2024. Nilai saldo Aset tetap Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.344.521.978.704,43 dan mengalami kenaikan senilai Rp86.137.349.285,86 atau 2,64% dari saldo Aset Tetap tahun 2023, yaitu senilai Rp3.258.384.629.418,57. Aset Tetap yang dimiliki/dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2023 diklasifikasi ke dalam 6 (Enam) Jenis antara lain:

Tabel 63. Nilai Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2024

No	Jenis Aset Tetap	1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
1	TANAH	168.659.725.353,27	4.975.805.006,78	9.187.327.456,97	164.448.202.903,08
2	PERALATAN DAN MESIN	418.297.951.557,74	58.002.221.332,13	6.769.294.999,74	469.530.877.890,13
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	754.370.548.057,99	106.554.313.213,48	7.473.941.588,97	853.450.919.682,50
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.850.307.027.998,23	137.589.865.906,53	185.369.627.391,87	1.802.527.266.512,89
5	ASET TETAP LAINNYA	31.088.084.649,78	6.495.687.319,00	2.636.269.592,14	34.947.502.376,64
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERAJAAN	35.661.291.801,56	11.877.281.239,69	27.921.363.702,06	19.617.209.339,19
Total Nilai Perolehan		3.258.384.629.418,57	325.495.174.017,61	239.357.824.731,75	3.344.521.978.704,43

Aset Tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur telah mengalami penurunan nilai ekonomis/penyusutan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.394.391.848.732,21 mengalami kenaikan senilai Rp87.244.400.389,36 atau 6,67% dari penyusutan Tahun 2023 senilai Rp1.307.147.448.342,85. Secara umum perubahan nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 diperoleh dari:

Tabel 64. Perubahan Nilai Aset Tetap Pemerintah Kab. Manggarai Timur tahun 2024

NO	Uraian	NILAI ASET TETAP
	<i>Saldo Awal</i>	3.258.384.629.418,57
	<i>Mutasi Aset Tetap Tahun Berjalan</i>	0,00
A	<i>Penambahan</i>	0,00
1	Penambahan Aset Tetap dari Realisasi Belanja Modal 2024	233.032.680.749,00
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	322.635.525,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung & Bangunan	6.032.780.233,13
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.378.854.884,60
5	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	275.171.650,00
6	Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerajan	27.882.979.117,01
7	Reklasifikasi dari Properti Investasi	13.219.466,89
8	Pendapatan Hibah Aset Tetap	352.692.200,00
9	Koreksi Nilai/Aset Tetap Baru ditemukan Saat Inventarisasi	4.720.429.340,00
10	Kapitalisasi dari Beban Pegawai	378.009.161,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	Uraian	NILAI ASET TETAP
11	Kapitalisasi Barang	200.890.000,00
12	Kapitalisasi dari Beban Jasa	243.125.000,00
13	Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	2.830.922.468,00
14	Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	2.919.002.300,00
15	Kapitalisasi dari Pemeliharaan	3.647.374.007,00
16	Reklasifikasi dari Beban Hibah	832.306.000,00
	Kapitalisasi Nilai Kewajiban kepada Pihak ke 3/ Retensi	6.007.538.635,09
	Jumlah Penambahan	295.070.610.736,72
B	Pengurangan	0,00
1	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.104.446.075,13
2	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung & Bangunan	11.520.085.103,48
3	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.967.704.222,53
4	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	37.708.316,00
5	Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan	9.251.214.935,00
6	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat)	159.938.124.835,78
7	Reklasifikasi ke Aset Lainnya aset lain-lain (<i>Kurvol</i>)	468.302.149,13
8	Reklasifikasi ke Beban Barang Habis Pakai	439.045.338,00
9	Reklasifikasi ke Barang Extracomptable	6.746.732.485,88
10	Aset Tetap yang dihibahkan ke Pihak/Lembaga Lain	1.062.994.343,93
11	Penghapusan Aset Tetap	139.000.000,00
12	Penyesuaian Realisasi Belanja Modal atas pelunasan kewajiban kepada Pihak ketiga terhadap pengakuan pengadaan Aset Tetap yang telah diselesaikan pengerjaannya pada tahun sebelumnya	193.264.626,00
14	Beban Bayar di muka (aset lain-Lain)	45.000.000,00
15	Reklasifikasi ke aset lain-lain (kelebihan bayar atas Belanja Modal	19.639.020,00
	Jumlah Pengurangan	208.933.261.450,86
	Saldo Per 31 Desember 2024	3.344.521.978.704,43

Berdasarkan tabel diatas realisasi belanja modal atas pengadaan Aset tetap tahun 2024 senilai Rp233.032.680.749,00 atau 93,57% dari Anggaran Belanja Modal Aset Tetap pada APBD Tahun 2024 senilai Rp249.040.692.695,00, namun setelah dilakukan penelusuran dari realisasi Belanja Modal atas pengadaan Aset tetap tahun 2024 ditemukan belanja modal yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi berupa mutasi kurang dengan direklasifikasi ke Barang habis Pakai senilai Rp439.045.338,00, reklasifikasi ke barang ekstrakomptabel senilai Rp6.746.732.485,88, dan pengadaan Belanja Modal yang diserahkan ke Pihak Sekolah Swasta dan kelompok usaha tani Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur senilai Rp1.062.994.343,93. Pada perolehan Aset Tetap juga terdapat adanya hibah Masuk dapat dilihat sebagaimana termuat dalam **Lampiran 14a-d**.

Nilai Aset Tetap Tahun 2024 tidak termasuk 3 unit kendaraan *Ambulance* pada Dinas Kesehatan yang belum memiliki dokumen bukti serah terima atas bantuan dari 1 unit PT Askes dan 2 unit dari Kementerian Kesehatan dan 1 unit kendaraan yang belum diketahui dokumen sumbernya (masih dalam proses penelusuran).



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 65. Daftar Kendaraan yang Belum Tercatat

No.	Nama Lokasi	Nama Barang	Merk / Type	Tahun	Nomor			Keterangan
					Rangka	Mesin	Polisi	
1	Puskesmas Borong	Mobil Ambulance	mitsubishi L300	2013	MHMLOW Y39DK008 332	4D56CI80 420	B 1266 PIX	Merupakan Mobil dari PT ASKES PUSAT yang sampai sekarang belum dicatat karena belum terdapat dokumen HIBAH dari PT . ASKES
2	Puskesmas Borong	Mobil Ambulance	SUZUKI APV GC	2007	MHYGDN4 1V7J15778 0	G15AID-161782	B 7332 QK	Merupakan Mobil dari Kementerian Kesehatan yang sampai sekarang belum dicatat karena belum terdapat dokumen HIBAH
3	Puskesmas Borong	Mobil Ambulance	SUZUKI APV GX	2016	MHYGDN4 2VGJ4084 16	G15AID-387284	B 1774 SHX	Merupakan Mobil dari Kementerian Kesehatan yang sampai sekarang belum dicatat karena belum terdapat dokumen HIBAH

Laporan konsolidasi mutasi aset tetap per SKPD TA 2024 dapat dilihat pada *Lampiran 15*.

Keenam jenis aset Tetap Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur beserta perhitungan penurunan nilai ekonomis dari setiap jenis aset yang ada dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
164.448.202.903,08	168.659.725.353,27	(4.211.522.450,19)	(2,50)

Saldo Aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp164.448.202.903,08 mengalami penurunan senilai Rp4.211.522.450,19 atau 2,50% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp168.659.725.353,27.

Perubahan nilai Aset Tetap Tanah pada Tahun 2023 diuraikan dalam 2 (dua) kondisi yakni:

a) Penambahan

Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya hibah Tanah dari Masyarakat sebesar pada tahun 2024 dengan nilai total senilai Rp34.006.200,00. Rincian dapat dilihat pada *lampiran 14a*.
2. Koreksi atas nilai aset tetap yang baru ditemukan saat inventarisasi pada Kecamatan Sambi Rampas berupa 2 bidang tanah senilai Rp1.010.054.640,00
3. Adanya Reklasifikasi pengakuan Nilai Aset Tanah Hasil penelusuran realisasi belanja Barang dan Jasa pada rincian obyek Belanja Pemeliharaan Tanah diperoleh adanya kegiatan pekerjaan Penggalian/Perataan Tanah Lapangan Upacara/Kegiatan di 29 Sekolah Negeri Dinas PPO senilai Rp3.472.484.301,00
4. Kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan pembelanjaan Penggalian/Perataan Tanah Lapangan Upacara/Kegiatan di 29 Sekolah Negeri senilai Rp120.240.000,00
5. Kapitalisasi dari Beban Jasa pembelanjaan pekerjaan Penggalian/Perataan Tanah Lapangan Upacara/Kegiatan di 20 Sekolah Negeri Dinas PPO senilai Rp95.250.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

6. Reklasifikasi nilai tanah dari nilai Properti Investasi Tanah senilai Rp13.219.466,89 pada Kecamatan Lamba Leda senilai Rp11.189.466,89 dan pada Sekretariat Daerah senilai Rp2.030.000,00.
7. Kapitalisasi Nilai Kewajiban kepada Pihak ke 3/Retensi pihak ketiga senilai Rp193.498.932,00 atas pengadaan Aset Tahun 2024 yang telah diselesaikan proses pekerjaan fisik 100% per 31 Desember 2024, namun realisasi keuangan belum terealisasi 100%, sehingga Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Timur memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada Pihak ketiga dengan dianggarkan terlebih dahulu pada APBD di tahun berikutnya.
8. Reklasifikasi nilai tanah dari Beban Hibah senilai Rp23.832.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa tanah bangunan SDN Kembur.

b) Pengurangan

1. Berkurangnya nilai Aset Tanah Pada Tahun 2024 disebabkan adanya Reklasifikasi Aset Tanah di bawah jalan ke Aset Lain-lain senilai Rp9.149.544.000,00. Aset Tanah tersebut akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun belum ada SK Penghapusan sehingga masih tercatat pada aset lain-lain Kabupaten Manggarai Timur.
2. Reklasifikasi dari beban hibah senilai Rp24.563.990,08 pada Sekretariat Daerah berupa hibah tanah ke Kodim.

Tabel 66. Rekapitulasi Aset Tetap Tanah

NO	Uraian	Jumlah Bidang	Satuan	Nilai Tanah
	TOTAL BIDANG TANAH:	1839	bidang	164.448.202.903,08
1.	TANAH BERSERTIFIKAT	356	bidang	52.860.300.211,88
A	Tanah Bersertifikat di bawah Penguasaan PEMDA	356	bidang	52.860.300.211,88
B	Tanah Bersertifikat Properti Investasi Pihak Ketiga (ASET LAINNYA)			
2.	TANAH BELUM BERSERTIFIKAT	1483	bidang	111.587.902.691,20
A	TANAH DALAM PENGUASAAN DENGAN DOKUMEN PENYERAHAN	85	bidang	13.520.992.792,93
B	TANAH DALAM PENGUASAAN TANPA DOKUMEN	316	bidang	24.589.702.636,07
C	TANAH DI BAWAH IRIGASI (tidak dapat disertifikatkan)	829	jaringan	3.996.916.223,60
D	TANAH DI BAWAH JALAN (tidak dapat disertifikatkan)	253	ruas	69.480.291.038,60

Terkait dengan aset tanah, masih terdapat Aset dalam proses sengketa dengan masyarakat. Berdasarkan hasil telaah atas KIB A Tanah diketahui terdapat empat bidang tanah yang dalam proses sengketa dengan masyarakat. Rincian aset tetap tanah yang dalam proses sengketa dengan masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Satu bidang Tanah seluas 256.750 M2 di kelurahan Tiwukondo Kecamatan Elar senilai Rp758.623.000,00; berdasarkan keputusan MA nomor 351/B/99/1439 K/PDT/1998, Jakarta 25 Oktober 1999 telah sah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, namun belum ada eksekusi atas bangunan masyarakat diatasnya.
2. Satu bidang Tanah seluas 760.000 M2 di Kalang Maghit Kecamatan Kota Komba senilai Rp1.000.000.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3. Satu bidang tanah seluas 12.000 M2 yang digunakan untuk Lapangan Wae Bobo, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong senilai Rp576.000.000,00; dan
4. Tanah SDN Pocong seluas 3.526 M2 senilai Rp48.000.000, telah diklaim oleh masyarakat atas sebagai nama ahli waris.
5. Tanah SDN Pota seluas 20.000 m2 senilai Rp32.250.000, telah diklaim oleh masyarakat atas nama sebagai ahli waris.
6. Tanah SDI Golo Cigir seluas 10.000 m2 senilai Rp22.700.000, telah diklaim oleh masyarakat atas nama sebagai ahli waris.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
469.530.877.890,13	418.297.951.557,74	51.232.926.332,39	12,25

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 senilai Rp469.530.877.890,13 mengalami kenaikan senilai Rp51.232.926.332,39 atau 12,25% dari saldo aset tetap per 31 Desember 2023 senilai Rp418.297.951.557,74. Perubahan Mutasi Aset Peralatan dan Mesin disajikan sebagai berikut:

Tabel 67. Tabel Mutasi Aset Tetap Peralatan & Mesin

NO	Uraian	PERALATAN DAN MESIN
	<i>Saldo Awal</i>	418.297.951.557,74
	<i>Mutasi Aset Tetap Tahun Berjalan</i>	0
A	<i>Penambahan</i>	0
1	Penambahan Aset Tetap dari Realisasi Belanja Modal 2024	55.800.276.096,00
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung & Bangunan	1.840.192.425,13
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	264.253.650,00
4	Pendapatan Hibah Aset Tetap	11.500.000,00
5	Kapitalisasi dari Beban Pegawai	81.399.161,00
6	Kapitalisasi dari Beban Barang	4.600.000,00
	<i>Jumlah Penambahan</i>	58.002.221.332,13
B	<i>Pengurangan</i>	0
1	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung & Bangunan	160.161.609,00
2	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	124.765.600,00
3	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	37.708.316,00
4	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat)	1.460.703.088,00
5	Reklasifikasi ke Beban Barang Habis Pakai	172.454.539,00
6	Reklasifikasi ke Barang Extracomptable	4.197.836.767,74
7	Aset Tetap yang dihibahkan ke Pihak/Lembaga Lain	615.665.080,00
	<i>Jumlah Pengurangan</i>	6.769.294.999,74
	<i>Saldo Per 31 Desember 2024</i>	469.530.877.890,13

Berdasarkan informasi pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penambahan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1. Pendapatan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Desa Golo Meni senilai Rp11.500.000
2. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD TA 2024 senilai Rp55.800.276.096,00 atau 96,54% dari anggaran senilai Rp57.800.309.867,00.
3. Reklasifikasi aset terjadi karena kesalahan dalam prosedur penganggaran yang tidak sesuai dengan karakter/sifat Asetnya pada tahun 2024 senilai Rp1.840.192.425,13 dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp264.253.650,00 dari Aset Tetap Lainnya.
4. Kapitalisasi atas honorarium pegawai yang berkaitan dengan proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 senilai Rp81.399.161,00.
5. Kapitalisasi atas beban barang yang berkaitan dengan proses pengadaan belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 senilai Rp4.600.000,00.

b) Pengurangan

1. Reklasifikasi aset ini terjadi karena sudah ada perubahan kondisi dan tidak memenuhi syarat dan karakter/sifat dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagaimana tertuang dalam kebijakan Akuntansi senilai Rp1.783.338.613,00.
2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi syarat Kapitalisasi dan diakui sebagai Barang Habis Pakai senilai Rp172.454.539,00 dan barang ekstrakomptabel senilai Rp4.197.836.767,74
3. Aset Tetap yang dihibahkan merupakan pengadaan Belanja Modal tahun 2024 yang diserahkan ke Sekolah Swasta senilai Rp615.665.080,00.

Rincian aset Perlatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 17**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
853.450.919.682,50	754.370.548.057,99	99.080.371.624,51	13,13

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp853.450.919.682,50 mengalami kenaikan senilai Rp99.080.371.624,51 atau 13,13% dari saldo tahun 2023 senilai Rp754.370.548.057,99.

Pergerakan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada TA. 2024 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 68. Pergerakan Aset Tetap Gedung Bangunan

NO	Uraian	GEDUNG DAN BANGUNAN
	<i>Saldo Awal</i>	754.370.548.057,99
	<i>Mutasi Aset Tetap Tahun Berjalan</i>	0
A	<i>Penambahan</i>	0



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	Uraian	GEDUNG DAN BANGUNAN
1	Penambahan Aset Tetap dari Realisasi Belanja Modal 2024	84.562.513.574,00
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	160.161.609,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.900.000,00
4	Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan	11.356.023.494,48
5	Pendapatan Hibah Aset Tetap	116.000.000,00
6	Koreksi Nilai/Aset Tetap Baru ditemukan Saat Inventarisasi	4.274.848.700,00
7	Kapitalisasi dari Beban Pegawai	157.130.000,00
8	Kapitalisasi dari beban Barang	196.290.000,00
9	Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	706.100.000,00
10	Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	818.555.500,00
11	Kapitalisasi dari Pemeliharaan	114.140.000,00
12	Kapitalisasi Nilai Kewajiban kepada Pihak ke 3/ Retensi	3.877.650.336,00
	Jumlah Penambahan	106.343.313.213,48
B	Pengurangan	0
1	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.840.192.425,13
2	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	305.065.000,00
3	Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan	3.887.522.808,00
4	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat)	367.421.166,67
5	Reklasifikasi ke Aset Lainnya aset lain-lain (<i>Kurvol</i>)	114.645.193,32
6	Reklasifikasi ke Barang Extracomptable	46.219.576,00
7	Aset Tetap yang dihibahkan ke Pihak/Lembaga Lain	419.765.273,85
8	Penghapusan Aset Tetap	139.000.000,00
9	Penyesuaian Realisasi Belanja Modal atas pelunasan kewajiban kepada Pihak ketiga terhadap pengakuan pengadaan Aset Tetap yang telah diselesaikan pengerjaannya pada tahun sebelumnya	78.471.126,00
10	Beban Bayar di muka (aset lain-Lain)	45.000.000,00
11	Reklasifikasi ke aset lain-lain (kelebihan bayar atas Belanja Modal	19.639.020,00
	Jumlah Pengurangan	7.262.941.588,97
	Saldo Per 31 Desember 2024	853.450.919.682,50

Berdasarkan informasi pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penambahan

1. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD TA 2024 senilai Rp84.562.513.574,00 atau 90,21% dari anggaran senilai Rp93.742.687.207,00.
2. Reklasifikasi aset terjadi karena kesalahan dalam prosedur penganggaran yang tidak sesuai dengan karakter/sifat Asetnya pada tahun 2024 senilai Rp3.900.000,00 dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.
3. Reklasifikasi aset ini terjadi karena sudah ada perubahan kondisi dan tidak memenuhi syarat dan karakter/sifat dari Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp160.161.609,00 dan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp11.356.023.494,48 sebagaimana tertuang dalam kebijakan Akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4. Pendapatan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Desa Golo Meni ke Dinas Kesehatan senilai Rp116.000.000,00
5. Koreksi atas nilai aset tetap yang baru ditemukan saat inventarisasi pada Kecamatan Sambi Rampas berupa 2 Gedung senilai Rp204.460.000,00 dan 15 Gedung pada 5 sekolah Dinas PPO senilai Rp4.070.388.700,00
6. Kapitalisasi atas realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan Jasa pada Tahun 2024 yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada harga perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan baik yang berkaitan dengan proses pengadaan belanja modal TA 2024 maupun Intervensi terhadap Aset Tetap yang sudah ada senilai Rp1.992.215.500,00.
7. Kapitalisasi nilai utang kepada pihak ketiga senilai Rp3.877.650.336,00 atas pengadaan Aset Tahun 2024 yang telah diselesaikan proses pembangunan fisik 100% per 31 Desember 2024, namun keuangan belum terealisasi 100%, sehingga Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Timur memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada Pihak ketiga dengan dianggarkan terlebih dahulu pada APBD di tahun berikutnya.

b) Pengurangan

1. Reklasifikasi aset terjadi karena kesalahan dalam prosedur penganggaran yang tidak sesuai dengan karakter/sifat Asetnya pada tahun 2024 ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.840.192.425,13, ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp305.065.000,00, dan ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp3.887.522.808,00.
2. Reklasifikasi aset ini terjadi karena sudah ada perubahan kondisi dan tidak memenuhi syarat dan karakter/sifat dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana tertuang dalam kebijakan Akuntansi senilai Rp367.421.166,67.
3. Reklasifikasi aset ini terjadi karena terdapat temuan kurang volume gedung bangunan pada 21 paket pekerjaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp46.351.758,27 dan pada BLUD RSUD Borong senilai Rp68.293.435,05.
4. Perolehan Gedung dan Bangunan tahun 2024 yang tidak memenuhi nilai Kapitalisasi dan direklasifikasi ke barang ekstrakomptabel senilai Rp46.219.576,00.
5. Aset Tetap yang dihibahkan merupakan pengadaan Belanja Modal Bangunan tahun 2024, namun secara substansi Bangunan tersebut diserahkan ke Sekolah Swasta senilai Rp419.765.273,85.
6. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp139.000.000,00 karena rusak berat dan akan dibangun gedung baru berupa gedung perpustakaan SDI Kembang Lala.
7. Penyelesaian kewajiban pemerintah Daerah kabupaten Manggarai Timur kepada Pihak ketiga atas pengakuan full perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun sebelumnya pada Dinas PPO senilai Rp78.471.126,00. Penyelesaian kewajiban ini melalui terlebih dahulu dianggarkan kembali pada APBD sesuai dengan kode rekening belanja modal berkenaan atas perolehan aset tersebut pada saat pengakuan secara full Aset Tetap. Berdasarkan hal tersebut, pada saat penyelesaian kewajiban akan terdapat realisasi belanja modal fisik namun tidak



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

disertai dengan penambahan aset riil, karena ini hanya mekanisme cara membayar kewajiban atas perolehan aset tahun sebelumnya.

8. Beban dibayar dimuka (Gedung dan Bangunan) senilai Rp45.000.000,00 merupakan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya pada SMPN SATAP BONGGIRITA yang telah dibayarkan uang muka sebesar 25% dari nilai kontrak, namun belum ada realisasi fisik pekerjaan per 31 Desember 2024 dan Pihak Ketiga yang melakukan pekerjaan sudah di PHK.
9. Kelebihan Pembayaran Belanja Modal senilai Rp19.639.020,00 atas pekerjaan penambahan ruang kelas baru, jasa pengawasan ruang laboratorium dan rehabilitasi ruang UKS pada Dinas PPO.

Mutasi Aset Gedung dan bangunan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
1.802.527.266.512,89	1.850.307.027.998,23	(47.779.761.485,34)	(2,58)

Saldo Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.802.527.266.512,89 mengalami penurunan senilai Rp47.779.761.485,34 atau 2,58% dibandingkan saldo tahun 2023 senilai Rp1.850.307.027.998,23. Pergerakan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 69. Pergerakan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	Uraian	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
	<i>Saldo Awal</i>	1.850.307.027.998,23
	<i>Mutasi Aset Tetap Tahun Berjalan</i>	
A	<i>Penambahan</i>	
1	Penambahan Aset Tetap dari Realisasi Belanja Modal 2024	86.216.452.076,00
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	124.765.600,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung & Bangunan	305.065.000,00
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	10.918.000,00
5	Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan	16.526.955.622,53
6	Pendapatan Hibah Aset Tetap	191.186.000,00
7	Koreksi Nilai/Aset Tetap Baru ditemukan Saat Inventarisasi	244.000.000,00
8	Kapitalisasi dari Beban Pegawai	115.969.181,00
9	Kapitalisasi dari Beban Jasa	126.235.094,00
10	Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	1.220.932.768,00
11	Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1.606.206.800,00
12	Kapitalisasi dari Pemeliharaan	60.749.706,00
13	Kapitalisasi Nilai Kewajiban kepada Pihak ke 3/ Retensi	640.086.245,00
	Jumlah Penambahan	107.389.522.092,53
B	<i>Pengurangan</i>	0
1	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung & Bangunan	3.900.000,00
2	Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan	5.363.692.127,00
3	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat)	148.960.456.581,11
4	Reklasifikasi ke Aset Lainnya aset lain-lain (<i>Kurvol</i>)	343.272.370,76



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	Uraian	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
5	Reklasifikasi ke Beban Barang Habis Pakai	202.021.399,00
6	Reklasifikasi ke Barang Extracomptable	178.147.600,00
7	Aset Tetap yang dihibahkan ke Pihak/Lembaga Lain	3.000.000,00
8	Penyesuaian Realisasi Belanja Modal atas pelunasan kewajiban kepada Pihak ketiga terhadap pengakuan pengadaan Aset Tetap yang telah diselesaikan pengerjaannya pada tahun sebelumnya	114.793.500,00
	Jumlah Pengurangan	155.169.283.577,87
	<i>Saldo Per 31 Desember 2024</i>	1.802.527.266.512,89

Berdasarkan informasi pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penambahan

1. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada APBD TA 2024 senilai Rp86.216.452.076,00 atau 96,65% dari anggaran senilai Rp89.203.633.749,00.
2. Reklasifikasi aset terjadi karena kesalahan dalam prosedur penganggaran yang tidak sesuai dengan karakter/sifat Asetnya pada tahun 2024 senilai Rp16.967.704.222,53.
3. Pendapatan Hibah Barang berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya senilai Rp191.186.000,00 dari Yayasan Pelita Khatulistiwa pada Dinas Kesehatan.
4. Kapitalisasi atas realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada Tahun 2024 yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada harga perolehan Aset baik yang berkaitan dengan proses pengadaan belanja modal TA 2024 maupun intervensi terhadap Aset Tetap yang sudah ada senilai Rp3.069.343.843,00.
5. Kapitalisasi dari pemeliharaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp60.749.706,00.
6. Kapitalisasi nilai utang kepada Pihak ketiga senilai Rp640.086.245,00 atas pengadaan Aset Tahun 2024 yang telah diselesaikan proses pembangunan fisik 100% per 31 Desember 2024, namun keuangan belum terealisasi 100%, sehingga Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Timur memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada Pihak ketiga dengan dianggarkan terlebih dahulu pada APBD di tahun berikutnya.

b) Pengurangan

1. Reklasifikasi aset terjadi karena kesalahan dalam prosedur penganggaran yang tidak sesuai dengan karakter/sifat Asetnya pada tahun 2024 senilai Rp3.900.000,00 ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
2. Reklasifikasi aset ini terjadi karena sudah ada perubahan kondisi dan tidak memenuhi syarat dan karakter/sifat dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerajan sebagaimana tertuang dalam kebijakan Akuntansi senilai Rp5.363.692.127,00.
3. Reklasifikasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset lain-lain Pada Tahun 2024 senilai Rp148.960.456.581,11. Aset tersebut akan diserahkan ke Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan SK Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun belum ada SK Penghapusan sehingga masih tercatat pada aset lain-lain Kabupaten Manggarai Timur.

4. Reklasifikasi Aset ini ke aset lain-lain terjadi karena terdapat temuan kurang volume Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp343.272.370,76 pada 2 paket pekerjaan Dinas PUPR.
5. Aset tetap Jalan yang tidak memenuhi syarat Kapitalisasi dan diakui sebagai Barang Habis Pakai senilai Rp202.021.399,00 dan barang ekstrakomptabel senilai Rp178.147.600,00
6. Penyelesaian kewajiban pemerintah Daerah kabupaten Manggarai Timur kepada Pihak ketiga atas pengakuan Full perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun sebelumnya senilai Rp114.793.500,00. Penyelesaian kewajiban ini melalui terlebih dahulu dianggarkan kembali pada APBD sesuai dengan kode rekening belanja Modal berkenaan atas perolehan Aset tersebut pada saat pengakuan secara full Aset Tetap. Berdasarkan hal tersebut, pada saat penyelesaian kewajiban akan terdapat realisasi belanja modal fisik namun tidak disertai dengan penambahan aset riil, karena ini hanya mekanisme cara membayar kewajiban atas perolehan aset tahun sebelumnya.

Nilai Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
34.947.502.376,64	31.088.084.649,78	3.859.417.726,86	12,41

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp34.947.502.376,64. mengalami kenaikan senilai Rp3.859.417.726,86 atau 12,41% dibandingkan realisasi 2023 senilai Rp31.088.084.649,78. Pergerakan Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 70. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

NO	Uraian	ASET TETAP LAINNYA
	Saldo Awal	31.088.084.649,78
	Mutasi Aset Tetap Tahun Berjalan	
A	Penambahan	
1	Penambahan Aset Tetap dari Realisasi Belanja Modal 2024	6.453.439.003,00
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	37.708.316,00
3	Kapitalisasi dari Beban Pegawai	4.540.000,00
	Jumlah Penambahan	6.495.687.319,00
B	Pengurangan	0,00
1	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	264.253.650,00
2	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.918.000,00
3	Reklasifikasi ke Beban Barang Habis Pakai	36.569.400,00
4	Reklasifikasi ke Barang Extracomptable	2.324.528.542,14



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	Uraian	ASET TETAP LAINNYA
	Jumlah Pengurangan	2.636.269.592,14
	<i>Saldo Per 31 Desember 2024</i>	34.947.502.376,64

Berdasarkan informasi pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penambahan

1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya pada APBD TA 2024 senilai Rp6.453.439.003,00 atau 79,19% dari anggaran APBD senilai Rp8.149.361.872,00.
2. Reklasifikasi aset terjadi karena kesalahan dalam prosedur penganggaran yang tidak sesuai dengan karakter/sifat Asetnya pada tahun 2023 senilai Rp37.708.316,00.
3. Kapitalisasi atas realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada Tahun 2024 yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada harga perolehan Aset baik yang berkaitan dengan proses pengadaan belanja modal TA 2024 maupun intervensi terhadap Aset Tetap yang sudah ada senilai Rp4.540.000,00.

b) Pengurangan

1. Reklasifikasi aset ini terjadi karena sudah ada perubahan kondisi dan tidak memenuhi syarat dan karakter/sifat Aset Tetap Lainnya sebagaimana tertuang dalam kebijakan Akuntansi senilai Rp275.171.650,00.
2. Aset Tetap lainnya yang tidak memenuhi syarat Kapitalisasi dan diakui sebagai Barang Habis Pakai senilai Rp36.569.400,00 dan barang ekstrakomptabel senilai Rp2.324.528.542,14.

Nilai Mutasi aset tetap lainnya masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Penggerjaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
19.617.209.339,19	35.661.291.801,56	(16.044.082.462,37)	(44,99)

Saldo Aset tetap konstruksi dalam penggerjaan per 31 Desember 2024 senilai Rp19.617.209.339,19 mengalami penurunan senilai Rp16.044.082.462,37 atau 44,99% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp35.661.291.801,56.

Pergerakan Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 71. Pergerakan Aset Konstruksi Dalam Penggerjaan

NO	Uraian	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
	<i>Saldo Awal</i>	35.661.291.801,56



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	Uraian	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Mutasi Aset Tetap Tahun Berjalan		
A Penambahan		
1	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung & Bangunan	3.887.522.808,00
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.363.692.127,00
3	Kapitalisasi dari Beban Pegawai	18.970.819,00
4	Kapitalisasi dari Beban Jasa	21.639.906,00
5	Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	903.889.700,00
6	Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	374.000.000,00
7	Kapitalisasi Nilai Kewajiban kepada Pihak ke 3/ Retensi	1.307.565.879,69
Jumlah Penambahan		11.877.281.239,69
B Pengurangan		
1	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung & Bangunan	11.356.023.494,48
2	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.526.955.622,53
3	Reklasifikasi ke Aset Lainnya aset lain-lain (Kurvol)	10.384.585,05
4	Reklasifikasi ke Beban Barang Habis Pakai	28.000.000,00
Jumlah Pengurangan		27.921.363.702,06
Saldo Per 31 Desember 2024		19.617.209.339,19

Berdasarkan informasi pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penambahan

1. Pada Tahun 2024 terdapat pembangunan baru yang belum selesai hingga periode Neraca 31 Desember 2024 berupa jenis aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp5.363.692.127,00 dan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp3.887.522.808,00.
2. Nilai kapitalisasi yang dapat diatribusikan secara langsung dalam perolehan Aset tersebut senilai Rp1.318.500.425,00.
3. Penyelesaian kewajiban pemerintah Daerah kabupaten Manggarai Timur kepada Pihak Ketiga atas pengakuan full perolehan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun sebelumnya senilai Rp1.307.565.879,69 Penyelesaian kewajiban ini melalui terlebih dahulu dianggarkan kembali pada APBD sesuai dengan kode rekening belanja Modal berkenaan atas perolehan Aset tersebut pada saat pengakuan secara full Aset Tetap. Berdasarkan hal tersebut, pada saat penyelesaian kewajiban akan terdapat realisasi belanja modal fisik namun tidak disertai dengan penambahan aset riil, karena ini hanya mekanisme cara membayar kewajiban atas perolehan aset tahun sebelumnya.

b) Pengurangan

Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat dipahami bahwa pada tahun 2024 terdapat Aset yang semula tercatat di Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun sebelumnya sudah mengalami progress fisik 100% dan telah diklasifikasi ke kelompok Aset sebenarnya senilai Rp27.910.979.117,01, yang diklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Bangunan senilai Rp11.356.023.494,48 dan diklasifikasi ke Aset Jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp16.526.955.622,53, diklasifikasikan pada Beban Habis Pakai senilai Rp28.000.000,00, serta terdapat temuan kurang volume KDP atas Belanja Modal Gedung Bangunan pada penggerjaan pembangunan saran gedung CSSD RSUD Borong senilai Rp10.384.585,05.

Rincian KDP dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
(1.394.391.848.732,21)	(1.307.147.448.342,85)	(87.244.400.389,36)	6,67

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain Tanah dan KDP. Total Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.394.391.848.732,21 mengalami kenaikan senilai Rp87.244.400.389,36 atau 6,67% dari nilai penyusutan TA 2023 senilai Rp1.307.147.448.342,85. Kebijakan penyusutan dituangkan dalam Kebijakan Akuntansi kabupaten Manggarai Timur yang menganut metode garis lurus dengan rumus:

$$\text{Penyusutan per periode} = \text{Nilai Perolehan}/\text{Penilaian dibagi Masa Manfaat}$$

Secara keseluruhan kenaikan akumulasi penyusutan Tahun 2024 disebabkan dengan beberapa kondisi berikut:

a) Penambahan

1. Adanya kenaikan akibat penurunan nilai ekonomis atau beban penyusutan Aset Tetap tahun berjalan senilai Rp174.330.626.429,42.
2. Koreksi atas Aset Tetap baru yang ditemukan saat inventarisasi senilai Rp2.492.157.894,43.
3. Koreksi atas kesalahan perhitungan tahun sebelumnya yang menyebabkan kurang saji senilai Rp356.100.290,08.

b) Pengurangan

1. Reklasifikasi akumulasi penyusutan ke aset Lain-Lain- Aset Rusak berat berdasarkan reklasifikasi atas harga perolehan yang disebabkan karena adanya perubahan fisik barang senilai Rp89.345.222.077,37.
2. Koreksi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya atas kesalahan perhitungan yang menyebabkan lebih saji senilai Rp547.562.147,20.
3. Koreksi akumulasi penyusutan karena penghapusan aset tetap senilai Rp41.700.000,00.

Akumulasi penyusutan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 dikelompokan menjadi 4 kategori, yang terdiri dari;

1. **Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
(362.702.133.643,26)	(309.318.030.467,94)	(53.384.103.175,32)	17,26

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 senilai Rp362.702.133.643,26 mengalami kenaikan senilai Rp53.384.103.175,32 atau 17,26% dibandingkan realisasi 2023 senilai Rp309.318.030.467,94. Pergerakan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 72. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Peralatan Dan Mesin
	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	309.318.030.467,94
	Mutasi Akm. Penyusutan Aset Tetap Tahun Berjalan	
A	Penambahan	
1	Beban Penyusutan Januari s.d 31 Desember 2024	54.831.944.663,32
	Jumlah Penambahan	54.831.944.663,32
B	Pengurangan	
1	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat)	1.447.841.488,00
	Jumlah Pengurangan	1.447.841.488,00
	Saldo Akm Penyusutan Per 31 Desember 2024	362.702.133.643,26

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
(170.597.892.053,50)	(148.296.369.427,42)	(22.301.522.626,08)	15,04

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp170.597.892.053,50 mengalami kenaikan senilai Rp22.301.522.626,08 atau 15,04% dibandingkan realisasi 2023 senilai Rp148.296.369.427,42. Pergerakan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 73. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Gedung dan Bangunan
	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	148.296.369.427,42
	Mutasi Akm. Penyusutan Aset Tetap Tahun Berjalan	
A	Penambahan	
1	Beban penyusutan Januari s.d 31 Desember 2024	20.779.154.984,78
2	Koreksi nilai/aset tetap baru ditemukan saat inventarisasi	1.680.159.905,00
3	Koreksi nilai atas kesalahan perhitungan sebelumnya	31.393.769,63
	Jumlah Penambahan	22.490.708.659,41
B	Pengurangan	
1	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat)	147.486.033,33



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Gedung dan Bangunan
2	Penghapusan Aset Tetap	41.700.000,00
	Jumlah Pengurangan	189.186.033,33
	<i>Saldo Akm Penyusutan Per 31 Desember 2024</i>	170.597.892.053,50

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
(860.638.455.007,46)	(849.079.680.419,49)	(11.558.774.587,64)	1,36

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai Rp860.638.455.007,46 mengalami kenaikan senilai Rp11.558.774.587,97. atau 1,36% dibandingkan realisasi 2023 senilai Rp849.079.680.419,49. Pergerakan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 74. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Jalan, Irigasi dan Jaringan
	<i>Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	849.079.680.419,49
	<i>Mutasi Akm. Penyusutan Aset Tetap Tahun Berjalan</i>	
A	Penambahan	
1	Beban Penyusutan Januari s.d 31 Desember 2024	98.719.526.781,33
2	Koreksi Nilai/Aset Tetap Baru ditemukan saat inventarisasi	811.997.989,43
3	Koreksi Nilai atas Kesalahan Perhitungan sebelumnya	324.706.520,45
	Jumlah Penambahan	99.856.231.291,21
B	Pengurangan	
1	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat)	87.749.894.556,04
2	Koreksi Nilai atas Kesalahan Perhitungan sebelumnya	547.562.147,20
	Jumlah Pengurangan	88.297.456.703,24
	<i>Saldo Akm Penyusutan Per 31 Desember 2024</i>	860.638.455.007,46

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
(453.368.028,00)	(453.368.028,00)	-	-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp453.368.028,00 tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Per SKPD dapat dilihat pada lampiran 22.

5.3.1.4

PROPERTI INVESTASI

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
Properti Investasi Gedung	524.404.920,00	0,00	524.404.920,00	100,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(86.663.115,00)	0,00	(86.663.115,00)	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Aset Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur merupakan pemanfaatan aset berupa sewa dengan pihak lain. Pemanfaatan Aset berupa Tanah dan Bangunan milik pemerintah Kabupaten Manggarai Timur di sewakan oleh Pihak PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang termuat dalam surat perjanjian Kerjasama sewa. Perjanjian Kerjasama sewa antara pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan PT BPD NTT Cabang Borong terdiri dari dua dokumen perjanjian yakni:

- 1) Perjanjian sewa Tanah dan Gedung dan bangunan di Benteng Jawa Kecamatan Lamba Leda dengan Nomor perjanjian BKD.900/1254/XI/2020. Dalam perjanjian tersebut memuat klausul sewa dengan nilai senilai Rp29.000.000 per Tahun untuk periodesitas sewa selama 5 tahun, terhitung mulai tanggal 11 November 2020 sampai dengan 11 November 2025.
- 2) Perjanjian sewa Tanah dan Gedung dan bangunan di Lehong Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong dengan Nomor perjanjian BKD.900/1544/X/2021. Dalam perjanjian tersebut memuat klausul sewa dengan nilai senilai Rp33.500.000 per Tahun untuk periodesitas sewa selama 5 tahun, terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 14 Oktober 2026.

Aset yang diklasifikasikan sebagai Aset Properti Investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.4.1 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan bangunan yang disewakan ke pihak lain meliputi:

- a) Gedung dan Bangunan yang berlokasi di kecamatan lamba ledra senilai Rp281.500.000,00.
- b) Gedung dan Bangunan permanen yang berlokasi di Lehong Desa Gurung Liwut senilai Rp188.059.920,00.
- c) Bangunan Tempat Parkir yang berlokasi di lehong Desa Gurung Liwut senilai Rp54.845.000,00.

Aset Properti Investasi Gedung dan Bangunan diatas sebelumnya pada tahun 2023 telah disajikan pada Investasi Permanen Jangka Panjang.

5.3.1.4.2 Akumulasi Penyusutan – Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 senilai Rp86.663.115,00. penurunan nilai ekonomis tersebut disebabkan karena adanya beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024 senilai Rp13.110.123,00 dan adanya penambahan dari Reklasifikasi Akumulasi penyusutan Aset Properti Investasi Gedung dan Bangun senilai Rp73.552.992,00 dari penyajian tahun 2023 yang dikelompokan dalam akumulasi penyusutan Aset Properti Investasi Gedung pada Investasi Jangka Panjang.

5.3.1.5 ASET LAINNYA

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
86.179.303.370,49	17.634.306.202,93	68.544.997.167,56	388,70



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang tidak termasuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Nilai yang tercatat merupakan Nilai bersih Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 senilai Rp86.179.303.370,49, mengalami kenaikan senilai Rp68.544.997.167,56 atau 388,70% dari tahun 2023. Jenis Aset lainnya diuraikan lebih lanjut sebagai berikut;

5.3.1.5.1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
0,00	48.341.640,69	(48.341.640,69)	100%

Saldo nilai Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2024 senilai Rp0,00, mengalami penurunan dari tahun 2023 senilai Rp48.341.640,69. Penurunan tersebut disebabkan karena nilai Tuntutan Ganti Rugi pada Pekerjaan Pembangunan RKB beserta Perabotnya SDI Wae Kembek oleh **CV. Kasih Murni** di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2022 dengan nomor kontrak 411/DPPO-PPK.SD/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 senilai Rp387.857.538,00 yang belum diselesaikan proses pengembaliamnya atas kekurangan volume yang ditemukan oleh BPK pada pemeriksaan tahun 2022 senilai Rp48.341.640,69 telah direklasifikasi penyajiannya ke aset lain-lain yang tidak dioperasionalkan.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
31.527.629.987,43	29.704.769.148,43	1.822.860.839,00	6,14

Harga perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 senilai Rp31.527.629.987,43 terjadi kenaikan senilai Rp1.822.860.839,00 atau 6,14% dari jumlah Aset Tidak berwujud pada tahun 2023 yaitu senilai Rp29.704.769.148,43. Kenaikan aset dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 75. Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Nilai Konsolidasi
1	Saldo Awal	29.704.769.148,43
2	Mutasi Aset Tetap Tahun Berjalan	
A	Penambahan	
1	Penambahan Aset Tetap dari Realisasi Belanja Modal 2024	1.209.000.000,00
2	Kapitalisasi dari Beban Pegawai	13.860.839,00
3	Kapitalisasi dari Beban Jasa	400.000.000,00
4	Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00
	Jumlah Penambahan	1.822.860.839,00
	Saldo Per 31 Desember 2024	31.527.629.987,43

Berdasarkan tabel di atas terdapat realisasi pengadaan aset tidak berwujud senilai Rp1.209.000.000,00 atau 89,31% dari anggaran APBD TA. 2024 senilai Rp1.353.700.000,00. Kapitalisasi atas honorarium pengadaan Barang dan Jasa yang



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

diatribusikan secara langsung senilai Rp613.860.839,00. Rincian pergerakan aset tidak berwujud per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
195.014.994.484,87	36.146.918.475,08	158.868.076.009,79	439,51

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 tercatat sebesar Nilai Perolehan senilai Rp195.014.994.484,87.

Tabel 76. Mutasi Aset Lain-Lain

NO	Uraian	Nilai Perolehan
1	Saldo Awal	36.146.918.475,09
2	Penambahan	-
1	Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	9.149.544.000,00
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.460.703.088,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung & Bangunan	387.060.186,67
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	148.960.456.581,11
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Kurvol)	48.341.640,69
6	Kelebihan Pembayaran pada Perjalanan Dinas	140.045.558,00
7	Kelebihan Pembayaran pada Honorarium	121.827.500,00
8	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional, Tunjangan Anak dan Beras	38.333.864,00
9	Kelebihan Pembayaran Belanja Lembur	80.580.000,00
10	Kelebihan Pembayaran Belanja Tagihan Listrik	36.416.000,00
11	Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan FKTP	510.130.225,84
Jumlah Penambahan		160.933.438.644,31
3	Pengurangan	-
1	Pembayaran kurvol oleh Pihak ketiga	646.570.467,86
2	Penghapusan Aset Tetap	1.418.792.166,67
Jumlah Pengurangan		2.065.362.634,53
4	Saldo Per 31 Desember 2024	195.014.994.484,87

Aset lain-lain diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yakni:

1. Aset lain-lain Rusak Berat/ Usang

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
35.767.641.430,71	34.787.630.322,70	980.011.108,01	2,82

Saldo aset lain-lain atas barang rusak berat per 31 Desember 2024 merupakan Nilai Perolehan senilai Rp35.767.641.430,71. Saldo ini merupakan jumlah aset tetap yang kondisinya rusak berat/tidak bisa dipakai lagi untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan barang yang tidak diketahui keberadaannya. Daftar Aset Lain-Lain rusak berat/using Per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 24a**.

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
159.247.353.054,16	1.359.288.152,38	157.888.064.901,78	11.615,50



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo aset lain-lain atas tidak dioperasionalkan per 31 Desember 2024 merupakan Nilai Perolehan senilai Rp159.247.353.054,16 yang terdiri dari:

- 1) Hibah Tanah di bawah Jalan dan Jalan ke propinsi NTT sebagaimana termuat dalam SK Ruas Jalan yang belum tuntas mengurus BAST senilai Rp158.110.000.581,11
- 2) Temuan kekurangan Volume pekerjaan senilai Rp210.019.325,21
- 3) Kelebihan pembayaran belanja Pegawai senilai Rp38.333.864,00
- 4) Kelebihan pembayaran barang dan jasa senilai Rp888.999.283,84

Saldo ini merupakan jumlah aset tetap yang tidak digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Daftar Aset Lain-Lain tidak dioperasionalkan Per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 24b**.

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
(22.466.395.411,17)	(19.892.304.664,67)	(2.574.090.746,50)	12,94

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2024 senilai Rp22.466.395.411,17 mengalami kenaikan senilai Rp2.574.090.746,50 atau 12,94% dibandingkan Tahun 2023 senilai Rp19.892.304.664,67. Kenaikan ini disebabkan pengurangan karena adanya beban amortisasi Tahun 2024 senilai Rp2.574.666.804,44 yang merupakan alokasi sistematis terhadap penurunan nilai berdasarkan umur ekonomis Aset tidak berwujud dan penambahan atas koreksi lebih saji senilai Rp576.057,94.

Rincian Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2024 senilai Rp118.078.660.690,64 mengalami kenaikan senilai Rp89.155.288.294,04 atau 308,25% dari tahun 2023 senilai Rp28.923.372.396,60. Kenaikan ini terjadi karena yakni:

- a) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.447.841.488,00
- b) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung & Bangunan senilai Rp147.486.033,33
- c) Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi & Jaringan senilai Rp87.749.894.556,04
- d) Koreksi kurang catat tahun sebelumnya senilai Rp6.382.900,00

Yang menyebabkan pengurangan nilai akumulasi penyusutan terjadi karena penghapusan aset rusak berat sehingga nilai akumulasinya dikeluarkan dari pencatatan senilai Rp196.316.683,33.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.5.6 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)*

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	Tren (%)
181.735.000,00	549.954.000,00	(368.219.000,00)	(66,95)

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memiliki Dana *Treasury Deposit Facility (TDF)* di Bank Indonesia atas Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 senilai Rp181.735.000,00, mengalami penurunan senilai Rp368.219.000,00 atau 66,95% dari nilai neraca per 31 Desember 2023 yang ditempatkan pada Dana *Treasury Deposit Facility (TDF)* senilai Rp549.954.000,00.

Penurunan nilai tersebut karena telah ditransfer pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam tabel berikut berdasarkan Informasi pencatatan dalam RKUD sebagai berikut:

Tabel 77. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)*

Tanggal RKUD	Uraian	Nilai Bersih
30-12-2023	611111 DBH PPh Pasal 21	336.400.000
30-12-2023	611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP	2.808.000
30-12-2023	611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	2.053.000
30-12-2023	611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	83.650.000
30-12-2023	611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	12.972.000
30-12-2023	611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	34.000
30-12-2023	611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	2.230.000
30-12-2023	611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	748.000
30-12-2023	612311 DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	6.257.000
30-12-2023	612312 DBH SDA Minerba – Royalti	424.000
30-12-2023	612412 DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	28.948.000
30-12-2023	612413 DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	42.596.000
29-12-2023	611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP	29.433.000
29-12-2023	611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	279.000
29-12-2023	611214 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	12.000
29-12-2023	612413 DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	504.000
29-12-2023	612512 DBH SDA Kehutanan – PSDH	606.000
TOTAL		549.954.000

5.3.2 KEWAJIBAN

31 Desember 24	31 Desember 2023	Lebih/Kurang	Tren (%)
6.671.715.217,55	50.384.238.158,53	(43.712.522.940,98)	(86,76)

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 24	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
6.671.715.217,55	50.384.238.158,53	(43.712.522.940,98)	(86,76)

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Manggarai timur Tahun Anggaran 2024 senilai Rp6.671.715.217,55, terdiri dari

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
11.971.889,87	27.387.225,00	(15.415.335,13)	(56,29)%

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2024 senilai Rp11.971.889,87 mengalami penurunan senilai Rp15.415.335,13 atau 56,29% dari Tahun 2023 senilai Rp27.387.225,00. Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 78. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)

Utang Pajak TA. 2024				
Pemungut/Pemotong	PPN	PPh 21	PPh 23	Jumlah
Bendahara BOP	0,00	0,00	0,00	0,00
Bendahara BOS SD	5.998.118,00	18.000,00	2.377.816,00	8.393.934,00
Bendahara BOS SMP		510.500,00	641.200,00	1.151.700,00
Bendahara BOK FKTP	0,00	1.848.022,87	578.233,00	2.426.255,87
Total Utang	5.998.118,00	2.376.522,87	3.597.249,00	11.971.889,87

Rincian Lembaga yang memiliki utang PFK atas pengelolaan Dana Non RKUD dapat dilihat pada *Lampiran 10*.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
0,00	1.256.013.228,82	(1.256.013.228,82)	(100,00)

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melunasi Utang Pinjaman Jangka Pendek beserta Utang Bunganya, sehingga terjadi penurunan 100% pada Utang Bunga yang sebelumnya senilai Rp1.256.013.228,82 pada tahun 2023 menjadi Rp0,00 pada neraca per 31 Desember 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.2.1.3 Utang Pinjaman Jangka Pendek

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
0,00	47.516.354.000,00	(47.516.354.000,00)	(100,00)

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melakukan pengadaan Perjanjian Pinjaman Daerah Jangka Menengah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dihadapan Notaris pada hari Rabu, 15 Juni 2022, yang telah tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No 36. Tujuan Pembiayaan ini adalah Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Manggarai Timur. Bentuk kredit yang tertuang dalam perjanjian kredit ini adalah kredit modal kerja **Standby Loan** Konversi-kredit modal kerja Jadwal Pembayaran. Berdasarkan bentuk perjanjian kredit modal kerja **Standby Loan** nilai maksimum pinjaman daerah Kabupaten Manggarai Timur senilai Rp103.000.000.000 (seratus tiga miliar) dengan jangka waktu kredit adalah 22 bulan/atau 1 tahun 10 (sepuluh) bulan, sejak tanggal 15 Juni 2022 dan dilunasi selambat-lambatnya 15 April 2024. Bunga Kredit atas Pinjaman tersebut sebesar 7,5% per tahun dan Biaya *Commitment Fee* adalah 0,50% atau senilai Rp515.000.000 yang dihitung dari maksimum kredit telah dibayarkan pada tahun 2022. Biaya *Commitment Fee* dibayar diawal dan tidak dapat ditarik Kembali. sedangkan Biaya Bunga akan dihitung sejak tanggal penarikan kredit. Jangka Waktu bunga yang berlaku terhadap kredit adalah dihitung harian dari saldo pemakaian.

Sebagai Pelaksanaan atas Perjanjian kredit dengan Bentuk kredit *Stand By Loan*, Pihak PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur membuka rekening koran Giro tersendiri atas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Rekening Giro dimaksud untuk menampung nilai maksimum atas Perjanjian Kredit. Penyelenggara rekening giro tersebut dikuasai penuh oleh Pihak Bank. Hal ini tertuang dalam akta Notaris no 32 pasal 12 tentang Penyelenggaraan Rekening Pinjaman yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Sebagai pelaksanaan Perjanjian ini, Kreditur membuka rekening koran tersendiri atas nama Debitur.
- 2) Penyelenggaraan rekening koran Pinjaman tersebut dilakukan oleh Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD-NTT) cabang Borong.
- 3) Untuk keperluan administrasi, kreditur mewajibkan debitur membuka rekening giro pada perseroan terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD-NTT).
- 4) Dalam menggunakan Rekening Pinjaman tersebut, Debitur tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai rekening koran pada Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD-NTT).

Berdasarkan pasal 12 dimaksud di atas, dalam pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum mengenai rekening koran pada Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD-NTT) membuka rekening koran Giro dengan Account **2505154633 PEMDA KAB MANGGARAI TIMUR** dengan mencantumkan nilai Plafon Pinjaman Daerah Senilai Rp103.000.000.000 (seratus tiga miliar rupiah) dan bersaldo Rp**0,00 (NOL)**, Namun nilai dana Pinjaman sebagaimana disebutkan dalam perjanjian sebagai nilai maksimum pada rekening giro Pinjaman dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

bukan menjadi saldo awal Pinjaman Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada rekening Khusus rekening koran Giro dengan Account **2505154633 PEMDA KAB MANGGARAI TIMUR**. Dana pinjaman tersebut masih dalam penggunaan penuh oleh pihak PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, sehingga belum timbul adanya kewajiban pengembalian pokok dan biaya bunga. Berdasarkan Perjanjian *Stand By loan*, Dana Pinjaman Daerah yang menjadi terutang oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur terbentuk bukan pada saat penandatanganan perjanjian kontrak pada 15 Juni tahun 2022, tapi pada saat adanya penarikan dana kredit dari Rekening Giro status *Stand By Loan* ke Rekening Kas Umum Daerah **PEMDA KAB MANGGARAI TIMUR**. Penarikan dana tersebut dengan memberi Kuasa Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD-NTT) untuk melakukan pemindahbukuan ke RKUD dan Jumlah penarikan tidak melebihi Nilai Maksimum Kredit sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 tentang Maksimum kredit yang berbunyi: “Maksimum kredit yang diberikan kreditur ke Debitur adalah senilai **Rp103.000.000.000** (seratus tiga miliar rupiah).”

Pemerintah kabupaten Manggarai Timur telah melakukan Penarikan Dana Pinjaman Daerah dari Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD-NTT) dengan Pemindahbukuan senilai Rp2.520.000.000,00 dari rekening koran Giro dengan Account **2505154633 PEMDA KAB MANGGARAI TIMUR** ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Selama Tahun 2022 pada tanggal 2 November 2022. Dana Pinjaman tersebut masuk ke RKUD Pemda Manggarai Timur pada tanggal 2 november 2022, maka pada saat itu juga terbentuknya Utang Pinjaman Daerah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya, pada tanggal 21 Desember 2022, pemerintah Kabupaten Manggarai timur menerbitkan SP2D dengan nomor 3960/LS/2022 atas pengembalian Pokok Pinjaman daerah senilai Rp2.520.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta) beserta pembayaran bunga pinjaman sejumlah Rp24.912.250,00 dengan SP2D nomor 3977/LS/2022 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur selaku pemberi Pinjaman/Kreditur. Pada saat bersamaan dengan adanya aliran kas dari RKUD ke Kreditur maka utang atas Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Timur menjadi Rp0,00 (Nol). Dengan demikian atas adanya aliran dan Pengembalian Pinjaman Tahun 2022, Utang Pinjaman Daerah atas Neraca Per 31 Desember 2022 menjadi Rp0,00 (NOL).

Selanjutnya, Pada Tahun 2023 Pemerintah kabupaten Manggarai Timur telah melakukan Penarikan Dana Pinjaman Daerah dari Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD-NTT) dengan Pemindahbukuan dengan total senilai Rp98.686.195.700 dari rekening koran Giro dengan Account **2505154633 PEMDA KAB MANGGARAI TIMUR** ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, maka pada saat itu juga terbentuknya Utang Pinjaman Daerah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya, pada tanggal 27 Desember 2023, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menerbitkan SP2D dengan nomor 3861/LS/2023 atas pengembalian Pokok Pinjaman daerah senilai Rp51.169.841.700,00 beserta pembayaran bunga pinjaman selama tahun 2023 sejumlah Rp2.675.666.416,29 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur selaku pemberi Pinjaman/Kreditur. Pada saat adanya pengembalian pokok pinjaman bersamaan dengan adanya aliran kas dari RKUD ke Kreditur maka utang atas Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Timur pada Neraca Per 31 Desember 2023 senilai **Rp47.516.354.000,00**.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk membiayai Infrastruktur sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Jalan Simpang Tangkul - Benteng Jawa
- 2) Peningkatan Jalan Dangka Mangkang - Watu Nggong
- 3) Peningkatan Jalan Kembur - Paka – Nceang
- 4) Peningkatan Jalan Benteng Jawa - Satar Teu
- 5) Peningkatan Jalan Sok - Wae Care
- 6) Peningkatan Jalan Simpang Kembur - Watu Ngiung – Metuk

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sudah melunasi utang tersebut dengan pembayaran terakhir pada tanggal 16 April 2024. Sehingga saldo utang pinjaman jangka pendek Pemda Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2024 menjadi Rp0,00 dalam neraca atau dengan kata lain Pemda Kabupaten Manggarai Timur tidak memiliki kewajiban utang pinjaman jangka pendek per 31 Desember 2024.

5.3.2.1.4 Utang Belanja

- 1) Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren (%)
271.532.318,00	1.045.761.129,12	(774.228.811,12)	(74,03)

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp271.532.318,00, mengalami penurunan senilai Rp774.228.811,12 dari saldo utang per 31 Desember 2023 senilai Rp1.045.761.129,12. Hal tersebut jadi karena adanya koreksi dan pelunasan serta pengakuan utang baru tahun 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pelunasan Sewa Kantor BLUD IKK Watunggong pada UPTD SPAM senilai Rp6.000.000,00
- Pelunasan dan Koreksi Utang pada UPTD RSUD Borong senilai Rp919.878.371,12
- Pengakuan Utang baru tahun 2024 UPTD RSUD Borong senilai Rp151.649.560,00

- 2) Utang Belanja Barang dan Jasa -Jasa Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2024 terdapat jasa pelayanan kesehatan pada FKTP bersumber dari Dana Kapitasi belum dibayarkan senilai Rp23.951.667,40.

- 3) Utang Belanja Modal

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren
Utang Belanja Modal Tanah	193.498.932,00	0,00	193.498.932,00	100,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.774.693.732,09	103.928.293,00	4.670.765.439,09	4.494,22
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.396.066.678,19	434.794.282,59	961.272.395,60	221,09



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Bertambah/(Berkurang)	Tren
Jumlah	6.364.259.342,28	538.722.575,59	5.825.536.766,69	1.081,36

a) Utang Belanja Modal Tanah.

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp193.498.932,00, mengalami peningkatan sebesar 100% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya pengakuan utang baru belanja modal tanah pada Dinas PPO senilai Rp193.498.932,00.

b) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp4.774.693.732,09, mengalami peningkatan sebesar 4.494,22 % dari tahun sebelumnya, yang terdiri dari Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor senilai Rp4.627.693.732,09 dan Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman senilai Rp147.000.000,00.

c) Utang Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo utang belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 Rp1.396.066.678,19, mengalami peningkatan senilai Rp961.272.395,60 atau 221,09% dari tahun sebelumnya.

Rincian Utang belanja dapat dilihat pada *lampiran 26*

5.3.3

EKUITAS

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
2.235.249.038.783,79	2.145.511.004.824,90	89.738.033.958,89	4,18

Saldo Ekuitas/Kekayaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2024 senilai Rp2.235.249.038.783,79 mengalami kenaikan senilai Rp89.738.033.958,89 atau 4,18% dari kondisi per 31 Desember 2023 senilai Rp2.145.511.004.824,90. Kenaikan ini bersumber dari surplus laporan operasional tahun 2024 senilai Rp86.285.792.588,44 dan koreksi ekuitas sebagai dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2024 senilai Rp3.452.241.370,45.

5.4

PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1

PENDAPATAN - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
1.071.965.149.427,49	1.066.540.088.708,89	5.425.060.718,60	0,51

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Pendapatan ini disajikan dengan basis akrual yang pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Klasifikasi sumber pendapatan menurut asal dan jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, rincian Pendapatan LO Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 79. Sumber Pendapatan LO

No	Pendapatan LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan Rp	Tren %
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40.182.590.119,25	51.641.228.203,89	(11.458.638.084,64)	(22,19)
2	Pendapatan Transfer	1.016.826.738.510,04	996.292.168.144,00	20.534.570.366,04	2,06
3	Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14.955.820.798,20	18.606.692.361,00	(3.650.871.562,80)	(19,62)
	Jumlah	1.071.965.149.427,49	1.066.540.088.708,89	5.425.060.718,60	0,51

Pendapatan Daerah tahun 2024 senilai Rp1.071.965.149.427,49 mengalami kenaikan senilai Rp5.425.060.718,60 atau 0,51% dari Pendapatan tahun 2023 senilai Rp1.066.540.088.708,89. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan yang cukup besar, sedangkan Pendapatan Transfer mengalami kenaikan senilai 2,06% di mana transfer dari Pemerintah Pusat menyesuaikan dengan sisa kas di kas daerah tahun sebelumnya seperti transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Jenis-jenis pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
40.182.590.119,25	51.641.228.203,89	(11.458.638.084,64)	(22,19)

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk periode yang berakhir Tahun 2024 senilai Rp40.182.590.119,25 mengalami penurunan senilai Rp11.458.638.084,64 dibandingkan tahun 2023 yang senilai Rp51.641.228.203,89. Rincian PAD sebagai berikut:

Tabel 80. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan Rp	Tren %
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	16.001.477.603,85	20.587.916.201,20	(4.586.438.597,35)	(22,28)
2	Pendapatan Retribusi Daerah -LO	3.227.414.363,00	2.857.758.463,20	369.655.899,80	12,94
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -LO	4.654.873.033,00	10.065.795.251,00	(5.410.922.218,00)	(53,76)
4	Lain-lain PAD Yang Sah -LO	16.298.825.119,40	18.129.758.288,49	(1.830.933.169,09)	(10,10)
	Jumlah	40.182.590.119,25	51.641.228.203,89	(11.458.638.084,64)	(22,19)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
16.001.477.603,85	20.587.916.201,20	(4.586.438.597,35)	(22,28)

Pajak Daerah adalah pendapatan asli daerah bersifat wajib, yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pajak TA 2024 sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah realisasi Kas yang diterima atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 81. Kelompok Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan Rp	Tren %
1	Pajak Hotel-LO	2.335.000,00	67.295.000,00	(64.960.000,00)	(96,53)
2	Pajak Restoran-LO	26.850.100,00	1.627.296.738,00	(1.600.446.638,00)	(98,35)
3	Pajak Reklame-LO	91.636.500,00	81.509.200,00	10.127.300,00	12,42
4	Pajak Air Tanah-LO	1.737.000,00	1.679.000,00	58.000,00	3,45
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	6.125.286.186,25	9.955.401.913,00	(3.830.115.726,75)	(38,47)
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	4.957.324.321,60	5.095.929.369,20	(138.605.047,60)	(2,72)
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	218.810.698,00	205.232.081,00	13.578.617,00	6,62
8	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	4.577.497.798,00	3.553.572.900,00	1.023.924.898,00	28,81
	Jumlah	16.001.477.603,85	20.587.916.201,20	(4.586.438.597,35)	(22,28)

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
3.227.414.363,00	2.857.758.463,20	369.655.899,80	12,94

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat Pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas daerah. Retribusi dipungut dan dikelola oleh 10 (sepuluh) SKPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang didasarkan atas Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan retribusi pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur merupakan realisasi kas yang diterima pemerintah atas pelayanan kepada masyarakat ditambah dengan timbulnya hak atas pelayanan berupa retribusi atas Pasar yang



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

belum terbayarkan. Pendapatan retribusi daerah pada tahun 2024 senilai Rp3.227.414.363,00 mengalami kenaikan senilai Rp369.655.899,80 atau 12,94% dibandingkan tahun lalu senilai Rp2.857.758.463,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82. Rincian Pendapatan Retribusi Tahun 2024 dan 2023

NO	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan Rp	Tren %
	Retribusi Jasa Umum	3.104.348.800,00	2.649.005.500,20	455.343.299,80	17,19
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.544.052.500,00	2.187.613.300,20	356.439.199,80	16,29
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	37.443.500,00	63.085.500,00	(25.642.000,00)	(40,65)
3	Pelayanan Parkir tepi jalan umum	5.830.000,00	1.500.000,00	4.330.000,00	288,67
4	Pelayanan Pasar	517.022.800,00	267.206.700,00	249.816.100,00	93,49
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	129.600.000,00	(129.600.000,00)	(100,00)
	Retribusi Jasa Usaha-LO	82.327.263,00	93.491.000,00	(11.163.737,00)	(11,94)
1	Retribusi Terminal-LO	46.217.263,00	21.691.000,00	24.526.263,00	113,07
2	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	11.410.000,00	18.300.000,00	(6.890.000,00)	(37,65)
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	24.700.000,00	53.500.000,00	(28.800.000,00)	(53,83)
	Retribusi Perizinan Tertentu	40.738.300,00	115.261.963,00	(74.523.663,00)	(64,66)
1	Retribusi Izin mendirikan bangunan	40.738.300,00	115.261.963,00	(74.523.663,00)	(64,66)
	Jumlah	3.227.414.363,00	2.857.758.463,20	369.655.899,80	12,94

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
4.654.873.033,00	10.065.795.251,00	(5.410.922.218,00)	(53,76)

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada PT Bank NTT. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan Daerah. Pada tahun 2024 pendapatan ini senilai Rp4.654.873.033,00 mengalami penurunan senilai Rp5.410.922.218,00 atau 53,76% dari pendapatan tahun 2023 yang senilai Rp10.065.795.251,00.

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
16.298.825.119,40	18.129.758.288,49	(1.830.933.169,09)	(10,10)

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Rincian lain lain PAD untuk periode TA 2024 dan 2023 digambarkan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 83. Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah-LO	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan Rp	Tren %
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	67.993.500,00	41.400.000,00	26.593.500,00	64,24
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	117.676.350,00	301.023.336,00	(183.346.986,00)	(60,91)
3	Jasa Giro-LO	622.435.275,59	376.000.569,50	246.434.706,09	65,54
4	Pendapatan Bunga-LO	2.734.962.271,91	3.858.357.039,85	(1.123.394.767,94)	(29,12)
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	10.888.916,00	20.480.267,14	(9.591.351,14)	(46,83)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.447.874.157,73	266.334.108,73	1.181.540.049,00	443,63
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	161.826.586,34	69.381.660,00	92.444.926,34	133,24
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	892.125,00	0,00	892.125,00	100,00
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	617.165.642,01	1.369.005.589,37	(751.839.947,36)	(54,92)
10	Pendapatan dari BLUD-LO	10.511.112.294,82	11.827.775.717,90	(1.316.663.423,08)	(11,13)
11	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	5.998.000,00	0,00	5.998.000,00	100,00
Jumlah		16.298.825.119,40	18.129.758.288,49	(1.830.933.169,09)	(10,10)

Berdasarkan data tabel di atas, Pendapatan lain-lain PAD yang sah tahun 2024 senilai Rp16.298.825.119,40 mengalami penurunan senilai Rp1.830.933.169,09 dari Pendapatan tahun 2023 senilai Rp18.129.758.288,49. Pendapatan ini juga mencakupi pendapatan pada BLUD SPAM senilai Rp3.093.202.750,00 dan BLUD RSUD senilai Rp7.417.909.544,82. Pada Pendapatan LO BLUD SPAM dan RSUD diakui secara akrual, sehingga penerimaan BLUD merupakan realisasi Kas Tahun 2024 atas pelayanan tahun 2024 Senilai Rp10.511.112.294,82.

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
1.016.826.738.510,04	996.292.168.144,00	20.534.570.366,04	2,06

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Adapun pendapatan Transfer TA 2024 yang terealisasi senilai Rp1.016.826.738.510,04 mengalami kenaikan senilai Rp20.534.366,04,00 atau 2,06% dibandingkan pengakuan pendapatan Tahun 2023 senilai Rp996.292.168.144,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
970.632.658.066,00	943.526.727.839,00	27.105.930.227,00	2,87

5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak merupakan Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based Of Actual Revenue* yaitu berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dan *Treasury Facility Deposite*. Adapun pendapatan transfer DBH yang diterima oleh Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2024 yaitu senilai Rp2.841.993.000,00 mengalami penurunan Rp231.504.000,00 atau 7,53% dibanding tahun lalu senilai Rp3.073.497.000,00. Pencairan Dana TDF tahun 2023 senilai Rp473.446.600,00 tidak diakui sebagai pendapatan Operasional Tahun 2024. Namun terdapat pengakuan Dana TDF tahun 2024 senilai Rp177.478.000,00 sebagai Pendapatan Operasional.

Tabel 84. Pergerakan pengakuan Pendapatan DBH Pajak_LO

NO	Uraian	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	DBH PPh Pasal 21	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Total
1	Pendapatan DBH Pajak-LRA	684.809.600,00	2.236.821.000,00	97.615.000,00	118.716.000,00	3.137.961.600,00
2	Pencairan TDF 2023 (non Pendapatan LO)	104.805.600,00	368.641.000,00	0,00	0,00	473.446.600,00
3	Pengakuan TDF tahun 2024 (non realisasi)	39.043.000,00	125.805.000,00	12.630.000,00	0,00	177.478.000,00
4	Pendapatan DBH Pajak_LO (1-2+3)	619.047.000,00	1.993.985.000,00	110.245.000,00	118.716.000,00	2.841.993.000,00

5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil SDA merupakan Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based Of Actual Revenue* yaitu berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dan *Treasury Facility Deposite*. Adapun pendapatan transfer DBH yang diterima oleh Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2024 yaitu senilai Rp1.867.219.000,00 mengalami penurunan Rp247.301.000,00 dibanding tahun lalu senilai Rp2.114.520.000,00

Tabel 85. Pergerakan Pengakuan DBH SDA_LO

No	Uraian	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	DBH Kehutanan	Total
1	Pendapatan DBH Pajak-LRA	235.787.400,00	7.393.000,00	1.696.289.000,00	0,00	1.939.469.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	DBH Kehutanan	Total
2	Pencairan TDF 2023 (non Pendapatan LO)	76.507.400,00	0,00	0,00	0,00	76.507.400,00
3	Pengakuan TDF tahun 2024 (non realisasi)	4.174.000,00	0,00	0,00	83.000,00	4.257.000,00
4	Pendapatan DBH Pajak LO (1-2+3)	163.454.000,00	7.393.000,00	1.696.289.000,00	83.000,00	1.867.219.000,00

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO

Pendapatan Dana Alokasi Umum Operasional Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk periode tahun 2024 senilai Rp578.835.877.278,00 mengalami kenaikan senilai Rp56.304.742.621,00 atau bertambah 10,78 dari tahun sebelumnya yaitu Rp522.531.134.657,00.

5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus diklasifikasi menjadi dua jenis yakni:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Pendapatan DAK Fisik Operasional digunakan untuk pekerjaan pembangunan fisik yang meliputi DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Pada tahun 2024 terealisasi senilai Rp209.715.773.244,00 mengalami penurunan senilai Rp29.226.066.143,00 dari tahun lalu yang terealisasi senilai Rp238.941.839.387,00.

2. Dana Alokasi Khusus-Nonfisik

DAK Non Fisik TA 2024 digunakan untuk pelayanan jasa yang meliputi TPG, Tamsil, TKG, BOP, BOP PAUD, BOP Pendidikan kesetaraan, BOK, BOKKB, Ketahanan Pangan dan Pertanian juga Fasilitas Penanaman Modal senilai Rp177.371.795.544,00 mengalami kenaikan senilai Rp506.058.749,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp176.865.736.795,00.

5.4.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
19.587.672.000,00	27.470.913.000,00	(7.883.241.000,00)	(2,87)

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan penerimaan dari Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal (IF) pada Kabupaten Manggarai Timur untuk periode TA 2024 terealisasi senilai Rp19.587.672.000,00, sedangkan untuk tahun anggaran 2023 terealisasi senilai Rp27.470.913.000,00. atau berkurang senilai Rp7.883.241.000,00 pada tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH DAERAH-LAINNYA - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
26.606.408.444,04	25.294.527.305,00	1.061.881.139,04	5,19

Penerimaan Transfer Pemerintah provinsi untuk Periode TA 2024 senilai Rp26.606.408.444,04 mengalami kenaikan senilai Rp1.061.881.139,04 dibandingkan pendapatan pada tahun 2023 senilai Rp25.294.527.305,00 Penerimaan Transfer Provinsi Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 86. Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dan 2023

No	Transfer Pemerintah Provinsi LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan bagi Hasil	26.356.408.444,04	25.294.527.305,00	1.061.881.139,04	4,20
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	100,00
	Jumlah	26.606.408.444,04	25.294.527.305,00	1.311.881.139,04	5,19

Pendapatan Bagi Hasil

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari Pemerintah Provinsi NTT untuk periode TA 2024 terealisasi senilai Rp26.356.408.444,04 bertambah senilai Rp1.311.881.139,04 dari tahun 2023 senilai Rp25.294.527.305,00. Terdapat penerimaan atas Pelunasan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak yang tidak diakui sebagai penerimaan Operasional Tahun 2024 senilai Rp5.099.206.213,00. Penerimaan bagi hasil yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur periode tahun 2024 namun belum ditransfer akhir periode tahun buku senilai Rp0,00 diakui sebagai penerimaan operasional tahun 2024.

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp250.000.000,00.

5.4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
14.955.820.798,20	18.606.692.361,00	(3.650.871.562,80)	(19,62)

Lain lain pendapatan Daerah yang sah untuk TA 2024 bersumber dari Pendapatan Hibah dan pendapatan Dana Kapitasi JKN senilai Rp14.955.820.798,20. Pada tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp3.650.871.562,80 dibandingkan Pendapatan tahun 2023 senilai Rp18.606.692.361,00 dengan rincian sebagai Berikut:

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
1.003.248.206,00	4.964.300.181,00	(3.961.051.975,00)	(79,79)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan hibah operasional kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 sebagai berikut

a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mendapat Hibah dari Pemerintah Pusat yakni dari Kementerian Pendidikan berupa Blangko Ijazah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama senilai Rp18.331.550,00 . Berbeda dengan tahun 2023, di mana Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mendapat hibah senilai Rp2.833.424.081,00. Hibah ini merupakan hibah dari kementerian kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berupa alat-alat kesehatan yang di mutasi dari Aset Tetap Peralatan Mesin senilai Rp2.833.424.081,00.

b) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan hibah Barang dari BKKBN Provinsi yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga senilai Rp576.392.456,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa alat dan obat kontrasepsi, non kontrasepsi dan bahan medis Habis Pakai Lainnya.

c) Pendapatan Hibah dari kelompok Masyarakat

Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat tahun 2024 ini merupakan pendapatan hibah pada Dinas Kesehatan Senilai Rp344.791.000,00 dan pada Dinas Pertanian senilai Rp7.901.200,00. Pada Dinas Kesehatan terdapat hibah tanah senilai Rp26.105.000,00 yaitu Tanah Poskesdes Benteng Tabu, Watu Mundung, Dusun Purus Mundung, Desa Golo Meni senilai Rp1.105.000,00 dan Tanah Poskesdes Satar Mata, Dusun Satar Mata, Ds. Gunung senilai Rp25.000.000,00. Hibah peralatan dan mesin senilai Rp11.500.000,00 dari Pemerintah Desa. Hibah Gedung dan bangunan senilai Rp116.000.000,00 yaitu Gedung Poskesdes Benteng Tabu di Watu Mundung. Hibah jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kelurahan Lempang Paji senilai Rp191.186.000,00. Pada Dinas Pertanian ada hibah tanah dibawah Jaringan Irigasi senilai Rp7.901.200,00. Dan Pada Dinas Pendidikan berupa Tanah untuk bangunan sekolah pada SDN Kembur Kelurahan Peot Kec. Borong senilai Rp23.832.000,00

d) Sumbangan Pihak Ketiga-LO

Sumbangan pihak ketiga merupakan penerimaan sumbangan yang diterima pada Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan. Pada tahun 2024 terealisasi senilai Rp32.000.000,00 mengalami penurunan senilai Rp38.180.000,00 dari tahun lalu yang terealisasi senilai Rp70.180.000,00.

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
13.952.572.592,20	13.642.392.180,00	310.180.412,20	2,27

Pendapatan lainnya merupakan Pendapatan Dana kapitasi JKN pada FKTP yang pada tahun 2024 terealisasi senilai Rp13.952.572.592,20 mengalami kenaikan senilai Rp310.180.412,20 dari realisasi tahun lalu senilai Rp13.642.392.180,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.2

BEBAN - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
983.582.886.060,96	867.253.800.128,89	116.329.085.932,07	13,41

Beban- LO merupakan beban daerah yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Jumlah beban daerah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp983.582.886.060,96 yang menunjukkan kenaikan senilai Rp116.329.085.932,07 atau 13,41% dari beban yang terjadi pada tahun 2023 senilai Rp867.253.800.128,89. Beban yang terjadi pada tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 87. Beban Berdasarkan Jenis Tahun 2024 dan 2023

No	Beban Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan Rp	Tren %
1	Beban Pegawai	428.763.382.173,00	357.449.923.575,00	71.313.458.598,00	19,95
2	Beban Barang	126.305.634.205,18	116.043.881.353,99	10.261.752.851,19	8,84
3	Beban Jasa	98.338.712.076,14	97.195.020.811,71	1.143.691.264,43	1,18
4	Beban Pemeliharaan	5.312.146.259,08	4.783.686.399,00	528.459.860,08	11,05
5	Beban Perjalanan Dinas	30.891.084.546,00	31.763.868.495,00	(872.783.949,00)	(2,75)
6	Beban Hibah	56.381.490.164,07	21.971.361.399,00	34.410.128.765,07	156,61
7	Bantuan Sosial	0,00	12.964.193.661,00	(12.964.193.661,00)	(100,00)
8	Beban Penyisihan Piutang	176.918.403.356,86	168.842.164.346,54	8.076.239.010,32	4,78
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	866.021.700,63	2.032.344.258,65	(1.166.322.558,02)	(57,39)
10	Beban Transfer	59.806.011.580,00	54.207.355.829,00	5.598.655.751,00	10,33
	Jumlah	983.582.886.060,96	867.253.800.128,89	116.329.085.932,07	13,41

BEBAN OPERASI - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
983.582.886.060,96	867.253.800.128,89	116.329.085.932,07	13,41

Jumlah beban operasi untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp983.582.886.060,96 yang menunjukkan kenaikan senilai Rp116.329.085.932,07 atau 13,41% dari beban yang terjadi pada tahun 2023 senilai Rp867.253.800.128,89. Beban operasi yang terjadi pada tahun 2024 dan 2023 dijelaskan sebagai berikut:

5.4.2.1

Beban Pegawai - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
Rp428.763.382.173,00	Rp357.449.923.575,00	Rp71.313.458.598,00	19,95



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang senilai Rp428.763.382.173,00 dan mengalami kenaikan senilai Rp71.313.458.598,00 bila dibandingkan dengan beban pegawai Tahun 2023 senilai Rp357.449.923.575,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 88. Beban Pegawai per SKPD yang terjadi pada Tahun 2024 dan 2023

NO	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan Rp	Tren %
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	242.318.196.516,00	210.754.709.589,00	31.563.486.927,00	14,98
2	Dinas Kesehatan	78.187.607.234,00	51.260.287.050,00	26.927.320.184,00	52,53
3	Uptd Rsud Borong	12.850.514.014,00	9.094.338.461,00	3.756.175.553,00	41,30
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.684.817.899,00	4.687.577.847,00	(2.759.948,00)	(0,06)
5	Uptd Sistem Penyediaan Air Minum	268.296.995,00	-	268.296.995,00	100,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.780.274.526,00	1.332.302.328,00	447.972.198,00	25,16
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.380.468.511,00	1.237.217.101,00	143.251.410,00	10,38
8	Dinas Sosial	2.131.079.369,00	2.063.936.438,00	67.142.931,00	3,15
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.525.400.220,00	1.313.231.554,00	212.168.666,00	13,91
10	Dinas P2KBP3A	2.070.096.241,00	1.895.431.316,00	174.664.925,00	8,44
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.184.769.093,00	2.054.973.867,00	129.795.226,00	5,94
12	Dinas Pertanahan	957.929.377,00	972.911.608,00	(14.982.231,00)	(1,54)
13	Dinas Lingkungan Hidup	1.353.724.786,00	1.473.549.891,00	(119.825.105,00)	(8,85)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.745.292.619,00	1.553.122.656,00	192.169.963,00	11,01
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.735.280.780,00	1.564.503.709,00	170.777.071,00	9,84
16	Dinas Perhubungan	1.355.468.864,00	1.360.165.832,00	(4.696.968,00)	(0,35)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.635.589.813,00	1.500.871.592,00	134.718.221,00	8,24
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.615.542.286,00	1.444.574.892,00	170.967.394,00	10,58
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.467.832.142,00	1.258.832.831,00	208.999.311,00	14,24
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.253.571.936,00	2.062.214.771,00	191.357.165,00	8,49
21	Dinas Pertanian	8.143.539.360,00	7.414.341.598,00	729.197.762,00	9,83
22	Dinas Peternakan	2.439.575.899,00	2.542.534.471,00	(102.958.572,00)	(4,22)
23	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.943.415.313,00	1.884.061.073,00	59.354.240,00	3,05
24	Sekretariat Daerah	6.785.577.047,00	5.997.871.652,00	787.705.395,00	13,13
25	Sekretariat Dewan	12.949.813.551,00	12.621.789.298,00	328.024.253,00	2,60
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.907.853.356,00	1.848.694.731,00	59.158.625,00	3,10
27	Badan Keuangan Daerah	6.573.589.851,00	3.812.842.594,00	2.760.747.257,00	42,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan Rp	Tren %
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.321.570.045,00	2.060.539.010,00	261.031.035,00	11,24
29	Inspektorat	3.461.453.114,00	3.150.762.442,00	310.690.672,00	8,98
30	Kecamatan Borong	2.228.855.802,00	1.948.311.258,00	280.544.544,00	12,59
31	Kecamatan Rana Mese	1.361.672.940,00	1.345.706.977,00	15.965.963,00	1,17
32	Kecamatan Kota Komba	2.139.505.345,00	2.032.460.082,00	107.045.263,00	5,00
33	Kecamatan Lamba Leda Selatan	2.810.699.460,00	2.604.035.905,00	206.663.555,00	7,35
34	Kecamatan Lamba Leda	1.021.181.262,00	959.733.087,00	61.448.175,00	6,02
35	Kecamatan Sambi Rampas	2.022.764.989,00	1.658.391.478,00	364.373.511,00	18,01
36	Kecamatan Elar Selatan	799.902.855,00	839.129.177,00	(39.226.322,00)	(4,90)
37	Kecamatan Lamba Leda Timur	910.393.088,00	843.464.970,00	66.928.118,00	7,35
38	Kecamatan Elar	1.495.227.835,00	1.298.638.029,00	196.589.806,00	13,15
39	Kecamatan Kota Komba Utara	623.779.951,00	665.179.298,00	(41.399.347,00)	(6,64)
40	Kecamatan Congkar	1.194.535.212,00	1.097.985.877,00	96.549.335,00	8,08
41	Kecamatan Lamba Leda Utara	838.785.165,00	811.874.439,00	26.910.726,00	3,21
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.287.937.512,00	1.126.822.796,00	161.114.716,00	12,51
	Jumlah	428.763.382.173,00	357.449.923.575,00	71.313.458.598,00	19,95

Sedangkan beban pegawai menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 89. Beban Pegawai Berdasarkan Jenis Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Beban Pegawai		Kenaikan/Penurunan	Tren
		2024	2023		
1	Beban Gaji Pokok ASN	251.553.315.565,00	202.164.529.838,00	49.388.785.727,00	24,43
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	22.699.781.781,00	19.556.862.659,00	3.142.919.122,00	16,07
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.523.247.412,00	4.516.181.850,00	7.065.562,00	0,16
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	12.776.697.200,00	13.400.415.600,00	(623.718.400,00)	(4,65)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.568.899.600,00	4.147.699.195,00	2.421.200.405,00	58,37
6	Beban Tunjangan Beras ASN	14.293.082.557,00	12.817.998.763,00	1.475.083.794,00	11,51
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	276.505.831,00	453.798.344,00	(177.292.513,00)	(39,07)
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	4.091.598,00	3.137.380,00	954.218,00	30,41
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.261.470.039,00	8.453.831.783,00	1.807.638.256,00	21,38
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	519.402.096,00	420.426.376,00	98.975.720,00	23,54
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.558.193.790,00	1.261.287.379,00	296.906.411,00	23,54
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.999.987.364,00	7.592.274.709,00	8.407.712.655,00	110,74
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.229.098.782,00	922.846.441,00	1.306.252.341,00	141,55
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	10.705.412,00	6.117.378,00	4.588.034,00	75,00
15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	485.223.641,00	(485.223.641,00)	(100,00)
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	35.623.025,00	122.303.397,00	(86.680.372,00)	(70,87)
17	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	50.689.761.780,00	44.172.946.620,00	6.516.815.160,00	14,75



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Beban Pegawai		Kenaikan/Penurunan	Tren
		2024	2023		
18	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	16.208.135.000,00	18.044.240.900,00	(1.836.105.900,00)	(10,18)
19	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.652.500.000,00	2.100.000.000,00	(447.500.000,00)	(21,31)
20	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	960.000.000,00	920.000.000,00	40.000.000,00	4,35
21	Beban Honorarium	3.641.965.000,00	3.540.105.000,00	101.860.000,00	2,88
22	Beban Jasa Pengelolaan BMD	7.200.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	200,00
23	Beban Uang Representasi DPRD	774.415.800,00	671.790.000,00	102.625.800,00	15,28
24	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	76.594.700,00	81.370.800,00	(4.776.100,00)	(5,87)
25	Beban Tunjangan Beras DPRD	59.746.500,00	63.954.000,00	(4.207.500,00)	(6,58)
26	Beban Uang Paket DPRD	57.267.000,00	57.582.000,00	(315.000,00)	(0,55)
27	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	969.528.000,00	974.095.500,00	(4.567.500,00)	(0,47)
28	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	78.835.050,00	94.836.525,00	(16.001.475,00)	(16,87)
29	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.261.700.000,00	2.268.000.000,00	(6.300.000,00)	(0,28)
30	Beban Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	560.700.000,00	(182.700.000,00)	(32,58)
31	Beban Pembebaran PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	999.960,00	1.216.980,00	(217.020,00)	(17,83)
32	Beban Pembulatan Gaji DPRD	5.750,00	7.944,00	(2.194,00)	(27,62)
33	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.720.576.232,00	2.702.930.136,00	17.646.096,00	0,65
34	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.892.015.200,00	3.888.000.000,00	4.015.200,00	0,10
35	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	262.605.000,00	17.325.000,00	245.280.000,00	1.415,76
36	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	7.800.000,00	56.400.000,00	(48.600.000,00)	(86,17)
37	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	14.040.000,00	101.520.000,00	(87.480.000,00)	(86,17)
38	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	289.680,00	1.955.340,00	(1.665.660,00)	(85,19)
39	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	177.674,00	2.134.302,00	(1.956.628,00)	(91,68)
40	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	320,00	2.160,00	(1.840,00)	(85,19)
41	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	873.600,00	5.443.200,00	(4.569.600,00)	(83,95)
42	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	18.720,00	116.640,00	(97.920,00)	(83,95)
43	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	56.160,00	349.920,00	(293.760,00)	(83,95)
44	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	58.500.000,00	(58.500.000,00)	(100,00)
45	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	89.880.000,00	110.880.000,00	(21.000.000,00)	(18,94)
46	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	379.996.000,00	400.000.000,00	(20.004.000,00)	(5,00)
47	Beban Pegawai BLUD	268.296.995,00	226.185.875,00	42.111.120,00	18,62
	Jumlah	428.763.382.173,00	357.449.923.575,00	71.313.458.598,00	19,95

Beban pegawai LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai LO senilai belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai yang sudah dibebankan tahun sebelumnya dan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.2.2

Beban Barang - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
126.305.634.205,18	116.043.881.353,99	10.261.752.851,19	8,84

Beban persediaan merupakan saldo beban persediaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp126.305.634.205,18 dan mengalami kenaikan senilai Rp10.261.752.851,19 atau 8,84% dibandingkan beban tahun lalu senilai Rp116.043.881.353,99 dengan rincian beban persediaan menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 90. Beban Persediaan yang terjadi pada Tahun 2024 dan 2023

Klasifikasi Beban Barang	31 Desember 2024
Beban Bahan Pakai Habis	119.558.901.719,30
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Peralatan dan Mesin	4.197.836.767,74
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Gedung dan Bangunan	46.219.576,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan	2.498.161.642,14
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya	4.514.500,00
Jumlah	126.305.634.205,18

Dalam beban barang habis pakai sudah mencakupi Beban yang bersumber dari Dana BOSP senilai Rp31.886.268.293,00, terdiri dari beban Barang dan jasa BOS sekolah dasar dan menengah pertama senilai Rp31.479.868.593,00 dan BOP Paud/Kesetaraan senilai Rp406.399.700,00. Selain itu juga beban habis pakai bersumber dari Dana BLUD senilai Rp9.226.259.285,00, terdiri dari Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD senilai Rp6.499.663.513,00 dan Beban barang dan Jasa BLUD SPAM senilai Rp2.726.595.772,00.

Realisasi beban persediaan menurut SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 91. Beban Persediaan menurut SKPD yang terjadi pada Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Beban Persediaan		Kenaikan/ Penurunan	Tren
		2024	2023		
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	50.715.069.666,41	53.682.843.594,74	-2.967.773.928,33	-5,53
2	Dinas Kesehatan	18.405.041.452,32	17.109.570.202,73	1.295.471.249,59	7,57
3	RSUD Borong	10.479.580.035,65	7.861.829.445,49	2.617.750.590,16	33,30
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.185.203.861,00	8.568.485.607,00	616.718.254,00	7,20
5	UPTD BLUD SPAM	2.745.812.698,00	2.649.701.954,00	96.110.744,00	3,63
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	32.794.400,00	19.101.800,00	13.692.600,00	71,68
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	204.318.850,00	147.960.853,00	56.357.997,00	38,09
8	Dinas social	477.465.800,00	172.232.050,00	305.233.750,00	177,22
9	Dinas Pertanahan	62.714.400,00	83.548.000,00	-20.833.600,00	-24,94
10	Dinas Lingkungan Hidup	90.465.505,00	141.537.800,00	-51.072.295,00	-36,08
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	565.209.349,00	759.684.101,00	-194.474.752,00	-25,60
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	226.665.709,00	269.367.800,00	-42.702.091,00	-15,85
13	Dinas Perhubungan	719.063.100,00	1.259.799.800,00	-540.736.700,00	-42,92
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.455.300,00	44.238.159,00	28.217.141,00	63,78
15	DPMPTSP	98.902.250,00	200.353.750,00	-101.451.500,00	-50,64



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Beban Persediaan		Kenaikan/ Penurunan	Tren
		2024	2023		
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	117.492.250,00	56.663.672,00	60.828.578,00	107,35
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	160.639.000,00	255.635.880,00	-94.996.880,00	-37,16
18	DP2KBDP3A	1.390.787.884,80	509.466.299,00	881.321.585,80	172,99
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	920.356.892,00	264.704.783,00	655.652.109,00	247,69
20	Dinas Pariwisata dan kebudayaan	115.534.425,00	132.930.950,00	-17.396.525,00	-13,09
21	Dinas Pertanian	19.752.569.290,00	12.079.082.000,00	7.673.487.290,00	63,53
22	Dinas Peternakan	102.043.020,00	439.165.598,03	-337.122.578,03	-76,76
23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.148.530.094,00	197.657.076,00	950.873.018,00	481,07
24	Sekretariat Daerah	1.387.321.377,00	1.854.572.992,00	-467.251.615,00	-25,19
25	Sekretariat DPRD	2.979.127.470,00	3.441.123.500,00	-461.996.030,00	-13,43
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	260.506.650,00	278.733.950,00	-18.227.300,00	-6,54
27	Badan Keuangan Daerah	948.440.410,00	929.996.100,00	18.444.310,00	1,98
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	137.410.300,00	263.949.420,00	-126.539.120,00	-47,94
29	Inspektorat	96.801.050,00	117.474.500,00	-20.673.450,00	-17,60
30	Kecamatan Borong	233.003.152,00	254.055.300,00	-21.052.148,00	-8,29
31	Kecamatan Kota Komba Utara	47.040.150,00	40.557.500,00	6.482.650,00	15,98
32	Kecamatan Congkar	241.591.060,00	214.889.912,00	26.701.148,00	12,43
33	Kecamatan Lamba Leda Utara	52.739.200,00	48.453.300,00	4.285.900,00	8,85
34	Kecamatan Ranamese	31.069.550,00	31.032.000,00	37.550,00	0,12
35	Kecamatan Kota Komba	353.812.800,00	364.313.000,00	-10.500.200,00	-2,88
36	Kecamatan Lamba Leda Selatan	456.473.350,00	422.524.550,00	33.948.800,00	8,03
37	Kecamatan Lamba Leda	56.631.055,00	63.512.305,00	-6.881.250,00	-10,83
38	Kecamatan Sambi Rampas	465.910.849,00	390.626.900,00	75.283.949,00	19,27
39	Kecamatan Elar Selatan	155.749.600,00	144.039.200,00	11.710.400,00	8,13
40	Kecamatan Lamba Leda Timur	30.075.700,00	24.882.100,00	5.193.600,00	20,87
41	Kecamatan Elar	157.364.800,00	151.864.700,00	5.500.100,00	3,62
42	Badan Kesbangpol	425.850.450,00	101.718.950,00	324.131.500,00	318,65
	Jumlah	126.305.634.205,18	116.043.881.353,99	10.261.752.851,19	8,84

Beban persediaan LO disajikan dengan basis akrual. Beban persediaan dicatat senilai pemakaian persediaan. Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama. Jumlah beban persediaan diperoleh dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa yang diklasifikasi ke beban persediaan ditambah dengan persediaan awal tahun dikurangi dengan persediaan akhir tahun. Dengan demikian perhitungan beban persediaan yang sebenarnya yaitu Rp126.305.634.205,18.

Beban persediaan tahun 2024 senilai Rp126.305.634.205,18 lebih besar dari realisasi belanja **Barang Persediaan** dalam Jenis belanja Barang dan Jasa pada LRA yang tercatat senilai Rp120.944.737.688,08. Komponen belanja Barang persediaan terdiri dari Realisasi Belanja Persediaan senilai Rp120.944.737.688,08. Selisih nilai antara beban persediaan-



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

LO dengan Belanja persediaan-Belanja Barang dan Jasa LRA senilai Rp5.360.896.517,10 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penyesuaian Penambahan nilai pada Beban Persediaan_LO senilai Rp26.804.482.470,76.
 - 1) Penyesuaian penggunaan atas Persediaan Awal tahun 2024 menjadi beban persediaan tahun berjalan senilai Rp18.729.823.938,02.
 - 2) Reklasifikasi dari Realisasi Belanja Modal pada Dinas PPO, RSUD Borong, Dinas PUPR, Dinas Peternakan, dan Sekretariat DPRD yang merupakan Barang Pakai Habis senilai Rp581.552.480,86
 - 3) Pendapatan Hibah BHP pada Dinas PPO dan DP2KBP3A senilai Rp594.724.006,00.
 - 4) Beban Barang ekstrakomptabel senilai Rp6.746.732.485,88.
 - 5) Pengakuan utang atas pelaksanaan dana BLUD senilai Rp151.649.560,00
- b) Penyesuaian yang menyebabkan Pengurangan nilai pada beban Persediaan_LO senilai Rp20.764.225.793,66.
 - 1) Pengadaan belanja barang dan jasa yang menghasilkan persediaan tahun 2024 senilai Rp19.528.553.035,05.
 - 2) Koreksi awal persediaan pada BLUD RSUD Borong senilai Rp28.349.403,11.
 - 3) Koreksi persediaan yang kadaluarsa pada BLUD RSUD Borong senilai Rp160.802.095,50 yang menyebabkan defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
 - 4) Realisasi pengadaan belanja barang persediaan Belanja barang dan jasa tahun 2024 yang menghasilkan kapitalisasi pada Aset Tetap senilai Rp200.890.000,00.
 - 5) Peelunasan atas pembayaran utang pada BLUD senilai Rp845.631.260,00

Rincian beban persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 27a**.

5.4.2.3 Beban Jasa - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
98.338.712.076,14	97.195.020.811,71	1.143.691.264,43	1,18

Beban jasa merupakan beban yang antara lain meliputi beban jasa kantor, jasa premi asuransi, jasa konsultansi, beban sewa dan beban jasa Konsultasi dan beban kursus/pelatihan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp98.338.712.076,14 dan mengalami kenaikan senilai Rp1.143.691.264,43 atau 1,18% dibandingkan beban jasa tahun lalu senilai Rp97.195.020.811,71.

Tabel 92. Rincian Beban Jasa pada Tahun 2024 dan 2023

No	Klasifikasi Beban Jasa	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren
1	Beban Jasa Kantor	80.226.773.472,14	80.686.481.904,71	(459.708.432,57)	0,57
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	8.623.430.649,00	7.918.237.628,00	705.193.021,00	8,91



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Klasifikasi Beban Jasa	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	224.650.700,00	303.172.704,00	(78.522.004,00)	(25,90)
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	476.736.224,00	447.750.000,00	28.986.224,00	6,47
5	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.865.545.090,00	1.447.830.244,00	1.417.714.846,00	97,92
6	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.442.276.462,00	1.109.436.747,00	332.839.715,00	30,00
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	268.800.000,00	229.200.000,00	39.600.000,00	17,28
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.407.324.479,00	4.337.641.382,00	(930.316.903,00)	(21,45)
9	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	38.976.000,00	(38.976.000,00)	(100,00)
10	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	803.175.000,00	676.294.202,00	126.880.798,00	18,76
	Jumlah	98.338.712.076,14	97.195.020.811,71	1.143.691.264,43	1,18

Beban Jasa LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban jasa terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban Jasa LO sebesar belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan ke beban jasa yang dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja jasa tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja barang jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap. Realisasi beban jasa menurut SKPD adalah sebagai berikut;

Rincian beban barang dan jasa dapat dilihat pada *lampiran 27b*

Tabel 93. Rincian Beban Jasa Menurut SKPD pada Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Beban Jasa 2024 Rp	Beban Jasa 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan	Tren
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	16.152.550.934,00	15.020.665.021,00	1.131.885.913,00	7,54
2	Dinas Kesehatan	55.794.892.163,14	52.526.555.982,71	3.268.336.180,43	6,22
3	RSUD Borong	3.754.466.675,00	4.162.900.415,00	(408.433.740,00)	(9,81)
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.716.710.650,00	1.386.607.958,00	330.102.692,00	23,81
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	825.676.360,00	876.684.100,00	(51.007.740,00)	(5,82)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	135.000.200,00	106.929.940,00	28.070.260,00	26,25
7	Dinas social	95.989.120,00	166.267.940,00	(70.278.820,00)	(42,27)
8	Dinas Pertanahan	137.658.228,00	81.700.080,00	55.958.148,00	68,49
9	Dinas Lingkungan Hidup	606.241.320,00	722.377.980,00	(116.136.660,00)	(16,08)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	120.275.620,00	114.810.190,00	5.465.430,00	4,76
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	139.410.120,00	153.359.940,00	(13.949.820,00)	(9,10)
12	Dinas Perhubungan	153.473.960,00	167.628.340,00	(14.154.380,00)	(8,44)
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	206.159.788,00	172.064.500,00	34.095.288,00	19,82
14	DPMPTSP	177.678.285,00	156.110.832,00	21.567.453,00	13,82
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	163.795.890,00	102.387.340,00	61.408.550,00	59,98
16	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	563.161.120,00	404.888.940,00	158.272.180,00	39,09
17	DP2KBDP3A	6.010.676.160,00	8.183.084.360,00	(2.172.408.200,00)	(26,55)
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	76.172.596,00	83.905.687,00	(7.733.091,00)	(9,22)
19	Dinas Pariwisata dan kebudayaan	185.021.700,00	240.916.400,00	(55.894.700,00)	(23,20)
20	Dinas Pertanian	2.033.599.200,00	1.979.083.360,00	54.515.840,00	2,75



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Beban Jasa 2024 Rp	Beban Jasa 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan	Tren
21	Dinas Peternakan	334.156.966,00	582.373.680,00	(248.216.714,00)	(42,62)
22	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	452.176.530,00	296.710.840,00	155.465.690,00	52,40
23	Sekretariat Daerah	2.214.532.829,00	2.467.984.191,00	(253.451.362,00)	(10,27)
24	Sekretariat DPRD	928.517.350,00	799.040.278,00	129.477.072,00	16,20
25	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.188.209.620,00	1.250.174.580,00	(61.964.960,00)	(4,96)
26	Badan Keuangan Daerah	1.540.571.039,00	1.839.682.459,00	(299.111.420,00)	(16,26)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	244.397.108,00	1.245.223.098,00	(1.000.825.990,00)	(80,37)
28	Inspektorat	89.485.308,00	122.845.820,00	(33.360.512,00)	(27,16)
29	Kecamatan Borong	298.427.205,00	279.582.720,00	18.844.485,00	6,74
30	Kecamatan Kota Komba Utara	40.530.352,00	47.480.960,00	(6.950.608,00)	(14,64)
31	Kecamatan Congkar	135.803.800,00	127.505.000,00	8.298.800,00	6,51
32	Kecamatan Lamba Leda Utara	48.764.800,00	45.125.960,00	3.638.840,00	8,06
33	Kecamatan Ranamese	45.698.080,00	42.720.960,00	2.977.120,00	6,97
34	Kecamatan Kota Komba	251.590.080,00	241.355.960,00	10.234.120,00	4,24
35	Kecamatan Lamba Leda Selatan	170.388.080,00	158.851.960,00	11.536.120,00	7,26
36	Kecamatan Lamba Leda	39.744.320,00	40.385.960,00	(641.640,00)	(1,59)
37	Kecamatan Sambi Rampas	284.743.740,00	256.275.960,00	28.467.780,00	11,11
38	Kecamatan Elar Selatan	98.752.080,00	93.529.960,00	5.222.120,00	5,58
39	Kecamatan Lamba Leda Timur	40.361.340,00	42.775.960,00	(2.414.620,00)	(5,64)
40	Kecamatan Elar	91.674.080,00	102.525.960,00	(10.851.880,00)	(10,58)
41	Badan Kesbangpol	751.577.280,00	303.939.240,00	447.638.040,00	147,28
	Jumlah	98.338.712.076,14	97.195.020.811,71	1.143.691.264,43	1,18

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
5.312.146.259,08	4.783.686.399,00	528.459.860,08	11,05

Beban pemeliharaan merupakan beban pemeliharaan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi senilai Rp5.312.146.259,08 dan mengalami penurunan senilai Rp528.459.860,08 dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp4.783.686.399,00. Beban pemeliharaan ini merupakan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Peralatan Mesin, Gedung Bangunan, Pemeliharaan JIJ dan Beban pemeliharaan Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada SKPD.

Rincian beban pemeliharaan menurut SKPD terbagi dalam 4 kelompok sebagai berikut:

Tabel 94. Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD pada Tahun 2024

No	SKPD	Beban Pemeliharaan					
		Beban Pemeliharaan Tanah	Beban Pemeliharaan Peralatan Mesin	Beban Pemeliharaan Gedung/ Bangunan	Beban Pemeliharaan JIJ	Beban Pemeliharaan ATB	Jumlah
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan	52.790.000,00	28.290.000,00				81.080.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Beban Pemeliharaan					
		Beban Pemeliharaan Tanah	Beban Pemeliharaan Peralatan Mesin	Beban Pemeliharaan Gedung/ Bangunan	Beban Pemeliharaan JIJ	Beban Pemeliharaan ATB	Jumlah
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	Pemuda dan Olahraga						
2	Dinas Kesehatan		1.075.230.452,08	15.000.000,00	20.000.000,00		1.110.230.452,08
3	RSUD Borong						-
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		231.637.688,00				231.637.688,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja		48.688.225,00				48.688.225,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		123.877.033,00				123.877.033,00
7	Dinas social		45.140.000,00				45.140.000,00
8	Dinas Pertanahan		69.474.548,00				69.474.548,00
9	Dinas Lingkungan Hidup		265.739.279,00				265.739.279,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		45.860.000,00				45.860.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		37.979.425,00				37.979.425,00
12	Dinas Perhubungan		413.204.952,00				413.204.952,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika		42.972.500,00				42.972.500,00
14	DPMPTSP		53.740.000,00				53.740.000,00
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah		36.878.721,00				36.878.721,00
16	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		71.320.000,00				71.320.000,00
17	DP2KBDP3A		33.140.000,00				33.140.000,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		47.239.330,00				47.239.330,00
19	Dinas Pariwisata dan kebudayaan		44.165.880,00		15.000.000,00		59.165.880,00
20	Dinas Pertanian		39.902.198,00				39.902.198,00
21	Dinas Peternakan		33.135.475,00				33.135.475,00
22	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		17.800.000,00				17.800.000,00
23	Sekretariat Daerah		825.589.161,00	161.844.600,00			987.433.761,00
24	Sekretariat DPRD		216.410.147,00				216.410.147,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Beban Pemeliharaan					
		Beban Pemeliharaan Tanah	Beban Pemeliharaan Peralatan Mesin	Beban Pemeliharaan Gedung/ Bangunan	Beban Pemeliharaan JIJ	Beban Pemeliharaan ATB	Jumlah
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
25	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan		121.797.313,00				121.797.313,00
26	Badan Keuangan Daerah		160.762.722,00	6.920.000,00		153.000.000,00	320.682.722,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM		43.527.475,00				43.527.475,00
28	Inspektorat		46.996.000,00		9.000.000,00		55.996.000,00
29	Kecamatan Borong		53.098.628,00	2.000.000,00			55.098.628,00
30	Kecamatan Kota Komba Utara		42.709.778,00				42.709.778,00
31	Kecamatan Congkar		46.796.550,00	9.804.000,00			56.600.550,00
32	Kecamatan Lamba Leda Utara		38.950.000,00				38.950.000,00
33	Kecamatan Ranamese		58.380.000,00	120.000,00			58.500.000,00
34	Kecamatan Kota Komba		33.860.000,00	1.032.000,00			34.892.000,00
35	Kecamatan Lamba Leda Selatan		49.512.750,00				49.512.750,00
36	Kecamatan Lamba Leda		47.460.000,00				47.460.000,00
37	Kecamatan Sambi Rampas		59.108.000,00	29.485.000,00			88.593.000,00
38	Kecamatan Elar Selatan		55.946.887,00				55.946.887,00
39	Kecamatan Lamba Leda Timur		35.550.000,00				35.550.000,00
40	Kecamatan Elar		52.429.542,00	3.870.000,00			56.299.542,00
41	Badan Kesbangpol		37.980.000,00				37.980.000,00
	Total	52.790.000,00	4.832.280.659,08	230.075.600,00	44.000.000,00	153.000.000,00	5.312.146.259,08

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
30.891.084.546,00	31.763.868.495,00	(872.783.949,00)	(2,75)

Beban perjalanan dinas merupakan beban perjalanan dinas untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan realisasi senilai Rp30.891.084.546,00 dan mengalami penurunan senilai Rp872.783.949,00 dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp31.763.868.495,00.

Rincian beban perjalanan dinas menurut SKPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 95. Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD

No	SKPD	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	Tren
		Rp	Rp	(Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.860.054.258,00	3.069.833.932,00	(209.779.674,00)	(6,83)
2	Dinas Kesehatan	3.533.628.735,00	4.678.525.809,00	(1.144.897.074,00)	(24,47)
3	RSUD Borong	57.833.702,00	13.024.512,00	44.809.190,00	344,04
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.037.895.436,00	2.668.033.508,00	369.861.928,00	13,86
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	483.286.386,00	216.867.790,00	266.418.596,00	122,85
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	167.767.110,00	112.037.397,00	55.729.713,00	49,74
7	Dinas social	334.884.980,00	187.926.724,00	146.958.256,00	78,20
8	Dinas Pertanahan	110.580.000,00	105.535.000,00	5.045.000,00	4,78
9	Dinas Lingkungan Hidup	276.785.636,00	263.883.500,00	12.902.136,00	4,89
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	285.076.656,00	498.009.670,00	(212.933.014,00)	(42,76)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	427.881.845,00	1.053.174.679,00	(625.292.834,00)	(59,37)
12	Dinas Perhubungan	246.388.668,00	154.004.000,00	92.384.668,00	59,99
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	96.903.100,00	146.021.623,00	(49.118.523,00)	(33,64)
14	DPMPTSP	408.337.064,00	599.160.994,00	(190.823.930,00)	(31,85)
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	169.143.990,00	183.542.382,00	(14.398.392,00)	(7,84)
16	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	239.545.000,00	269.499.828,00	(29.954.828,00)	(11,11)
17	DP2KBDP3A	570.075.492,00	196.332.220,00	373.743.272,00	190,36
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	247.642.806,00	139.065.000,00	108.577.806,00	78,08
19	Dinas Pariwisata dan kebudayaan	150.891.539,00	85.625.000,00	65.266.539,00	76,22
20	Dinas Pertanian	1.007.880.921,00	732.293.051,00	275.587.870,00	37,63
21	Dinas Peternakan	64.750.000,00	186.881.800,00	(122.131.800,00)	(65,35)
22	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.215.411.944,00	533.355.537,00	682.056.407,00	127,88
23	Sekretariat Daerah	3.484.801.618,00	3.859.155.877,00	(374.354.259,00)	(9,70)
24	Sekretariat DPRD	4.693.084.773,00	4.163.753.891,00	529.330.882,00	12,71
25	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	917.362.904,00	963.566.677,00	(46.203.773,00)	(4,80)
26	Badan Keuangan Daerah	1.873.758.527,00	1.790.152.326,00	83.606.201,00	4,67
27	Badan Kepgawainan Dan Pengembangan SDM	1.029.666.774,00	1.574.997.548,00	(545.330.774,00)	(34,62)
28	Inspektorat	1.256.932.349,00	1.621.321.220,00	(364.388.871,00)	(22,47)
29	Kecamatan Borong	191.875.000,00	146.110.000,00	45.765.000,00	31,32
30	Kecamatan Kota Komba Utara	50.660.000,00	58.480.000,00	(7.820.000,00)	(13,37)
31	Kecamatan Congkar	180.310.000,00	158.440.000,00	21.870.000,00	13,80
32	Kecamatan Lamba Leda Utara	44.710.000,00	55.930.000,00	(11.220.000,00)	(20,06)
33	Kecamatan Ranamese	49.560.000,00	47.360.000,00	2.200.000,00	4,65
34	Kecamatan Kota Komba	150.960.000,00	142.460.000,00	8.500.000,00	5,97
35	Kecamatan Lamba Leda Selatan	118.185.000,00	197.100.000,00	(78.915.000,00)	(40,04)
36	Kecamatan Lamba Leda	34.190.000,00	35.725.000,00	(1.535.000,00)	(4,30)
37	Kecamatan Sambi Rampas	143.850.000,00	158.580.000,00	(14.730.000,00)	(9,29)
38	Kecamatan Elar Selatan	70.890.000,00	89.880.000,00	(18.990.000,00)	(21,13)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024		Tahun 2023		Kenaikan/ (Penurunan)	Tren
		Rp	Rp	(Rp)	(%)		
39	Kecamatan Lamba Leda Timur	65.260.000,00	64.620.000,00	640.000,00	0,99		
40	Kecamatan Elar	94.350.000,00	89.080.000,00	5.270.000,00	5,92		
41	Badan Kesbangpol	448.032.333,00	454.522.000,00	(6.489.667,00)	(1,43)		
	Total	30.891.084.546,00	31.763.868.495,00	(872.783.949,00)	(2,75)		

5.4.2.6 Beban Hibah - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
56.381.490.164,07	21.971.361.399,00	34.410.128.765,07	156,61

Beban hibah merupakan beban Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan realisasi senilai Rp56.381.490.164,07 dan mengalami kenaikan senilai Rp34.410.128.765,07 dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp21.971.361.399,00. Beban hibah ini merupakan realisasi Belanja Hibah pada Badan Keuangan dan penyesuaian realisasi dari penganggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria menambah perolehan Aset tetap Pemerintah Daerah dan secara substantif diserahkan ke masyarakat, sehingga ada kenaikan nilai hibah senilai Rp5.538.947.196,93 dari laporan realisasi senilai Rp61.920.437.361,00 sebagaimana diuraikan pada penjelasan realisasi Belanja Hibah pada LRA. Rincian beban hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 96. Rincian Beban Hibah

No	Uraian Beban Hibah	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	24.563.990,08	0,00	24.563.990,08	100,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.243.565.602,00	17.454.032.748,00	16.789.532.854,00	96,19
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	432.732.360,00	0,00	432.732.360,00	100,00
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.877.923.210,99	3.857.330.011,00	(979.406.800,01)	(25,39)
5	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
6	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sat Dikdas Swasta	12.551.294.300,00	0,00	12.551.294.300,00	100,00
7	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sat Dikmen Swasta	3.080.846.050,00	0,00	3.080.846.050,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian Beban Hibah	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren
8	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	562.779.761,00	559.998.640,00	2.781.121,00	0,50
9	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.598.484.890,00	0,00	2.598.484.890,00	100,00
10	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	100,00
	Jumlah	56.381.490.164,07	21.971.361.399,00	34.410.128.765,07	156,61

5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
0,00	12.964.193.661,00	(12.964.193.661,00)	(100,00)

Beban bantuan sosial merupakan beban Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam bentuk uang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social. Pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 tidak ada realisasi Bantuan Sosial, berbeda dengan realisasi tahun lalu senilai Rp12.964.193.661,00.

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
176.918.403.356,86	168.842.164.346,54	8.076.239.010,32	4,78

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Beban penyusutan dan amortisasi adalah nilai penyusutan aset tetap maupun aset tidak berwujud untuk tahun 2024 termasuk atas aset tetap dan aset tidak berwujud yang diperoleh selama periode berkenaan. Pada lembar muka Laporan Operasional tersaji nilai beban penyusutan secara gelondongan senilai Rp176.983.608.186,04. Nilai sebagaimana dimaksud terdiri dari tiga kelompok aset yakni antara lain:

1. Beban penyusutan Properti Investasi senilai Rp13.110.123,00
2. Beban penyusutan aset tetap senilai Rp174.330.626.429,42
3. Beban amortisasi aset tidak berwujud senilai Rp2.574.666.804,44.

Perhitungan penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Metode Garis Lurus, dengan Rincian berdasarkan kelompok asset yang dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut berikut:

- a) Beban Penyusutan Aset lain-Properti Investasi

Beban penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga ini merupakan penurunan nilai manfaat dari Gedung dan bangunan yang disewakan kepada Bank NTT yang berlokasi di Lehong dan Benteng Jawa. Beban penyusutan pada tahun 2024 yaitu senilai Rp13.110.123,00

- b) Beban Penyusutan Aset Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pada tahun 2024 Beban penyusutan aset tetap senilai Rp174.334.626.429,42 mengalami kenaikan senilai Rp8.012.661.426,42 atau sebesar 4,82% dari beban penyusutan aset tetap pada tahun 2023 senilai Rp166.321.965.003,00. Rincian beban penyusutannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 97. Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap menurut SKPD pada Tahun 2024

NO	SKPD	TOTAL BEBAN PENYUSUTAN TA 2024	PM	GB	JIJ	ATL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	18.625.008.300,92	9.657.199.384,35	8.289.695.331,13	678.113.585,44	0
2	Dinas Kesehatan	26.310.501.204,04	19.841.885.237,74	5.262.007.147,54	1.206.608.818,76	0
3	UPTD RSUD Borong	22.848.051.875,38	20.313.268.233,05	2.345.615.786,63	189.167.855,70	0
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	90.150.018.737,26	926.567.543,67	215.215.291,13	89.008.235.902,46	0
5	UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	1.104.298.848,23	86.208.400,00		1.018.090.448,23	0
6	Satuan Polisi Pamong Praja	86.150.292,86	86.150.292,86			0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	672.353.099,33	189.578.911,00	29.053.325,00	453.720.863,33	0
8	Dinas Sosial	15.070.714,29	15.070.714,29			0
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.216.916.376,76	5.932.571,43		1.210.983.805,33	0
10	Dinas P2KBP3A	347.089.515,45	199.367.427,97	147.722.087,48		0
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	77.875.458,33	2.602.000,00	35.040.275,00	40.233.183,33	0
12	Dinas Pertanahan	95.364.857,14	52.024.857,14		43.340.000,00	0
13	Dinas Lingkungan Hidup	402.890.331,93	149.019.400,46	94.129.751,48	159.741.179,99	0
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	223.544.007,84	187.823.404,29	32.465.998,92	3.254.604,63	0
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	98.340.352,57	68.416.028,57	29.924.324,00		0
16	Dinas Perhubungan	520.548.525,95	205.543.357,14	315.005.168,81		0
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	8.230.725,00		8.230.725,00		0
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	125.645.611,75	79.689.356,00	45.956.255,75		0
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	449.164.035,73	186.757.350,29	262.406.685,44		0
20	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	662.966.095,30	49.943.380,00	138.928.993,63	474.093.721,67	0
21	Dinas Pertanian	3.225.355.770,95	193.217.857,14	100.720.273,23	2.931.417.640,58	0
22	Dinas Peternakan	721.964.383,48	604.431.439,04	113.882.944,44	3.650.000,00	0
23	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.798.620.566,59	164.755.065,40	1.354.376.892,08	279.488.609,11	0
24	Sekretariat Daerah	1.437.401.696,45	496.370.618,57	871.428.577,88	69.602.500,00	0
25	Sekretariat Dewan	479.968.043,25	54.856.696,00	419.442.313,92	5.669.033,33	0
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	215.208.022,38	168.789.032,80	46.418.989,58	0,00	0
27	Badan Keuangan Daerah	291.468.756,03	211.953.110,20	66.087.312,50	13.428.333,33	0
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	84.005.761,20	46.685.511,20	37.320.250,00	0,00	0
29	Inspektorat	165.916.938,65	116.679.964,29	49.236.974,36	0,00	0
30	Kecamatan Borong	354.119.328,33	12.784.120,00	143.519.675,00	197.815.533,33	0
31	Kecamatan Rana Mese	43.809.579,10	6.223.000,00	37.586.579,10	0,00	0
32	Kecamatan Kota Komba	241.693.693,44	40.198.320,00	27.808.900,00	173.686.473,44	0
33	Kecamatan Lamba Leda Selatan	171.639.403,28	9.219.142,86	13.051.593,75	149.368.666,67	0



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	SKPD	TOTAL BEBAN PENYUSUTAN TA 2024	PM	GB	JIJ	ATL
34	Kecamatan Lamba Leda	15.612.435,71	11.216.685,71	4.395.750,00	0,00	0
35	Kecamatan Sambi Rampas	311.962.518,75	39.851.100,00	9.856.918,75	262.254.500,00	0
36	Kecamatan Elar Selatan	70.555.226,58	13.405.485,71	42.747.825,00	14.401.915,87	0
37	Kecamatan Lamba Leda Timur	60.327.786,67	16.793.400,00	39.967.720,00	3.566.666,67	0
38	Kecamatan Elar	74.497.714,29	25.432.914,29	25.564.800,00	23.500.000,00	0
39	Kecamatan Kota Komba Utara	100.328.742,71	100.328.742,71	0,00	0,00	0
40	Kecamatan Congkar	258.907.627,54	98.495.571,43	56.099.956,11	104.312.100,00	0
41	Kecamatan Lamba Leda Utara	128.728.272,55	88.645.364,29	38.302.068,13	1.780.840,13	0
42	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	38.505.195,43	8.563.671,43	29.941.524,00	0,00	0
	Jumlah	174.330.626.429,42	54.831.944.663,32	20.779.154.984,77	98.719.526.781,33	0,00

c). Beban Amortisasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
2.574.666.804,44	2.507.089.220,54	67.577.583,90	2,70

Beban amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset Tidak berwujud. Beban Amortisasi adalah nilai amortisasi aset tidak berwujud untuk tahun 2024 termasuk atas aset yang diperoleh selama periode berkenaan. Perhitungan amortisasi berdasarkan Metode Garis Lurus. Beban amortisasi yang terjadi pada tahun 2024 senilai Rp2.574.666.804,44 atau 2,70% dari beban yang terjadi pada tahun sebelumnya. Rincian Beban amortisasi per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 98. Beban Amortisasi

NO	SKPD	BEBAN AMORTISASI 2024
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	39.531.311,94
2	Dinas Kesehatan	129.918.120,00
3	UPTD Rsud Borong	190.640.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	1.219.682.821,10
5	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	22.617.170,00
6	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	384.718.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	84.246.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	99.283.000,00
9	Dinas Perhubungan	39.999.080,00
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	71.960.900,00
11	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	54.302.606,00
12	Dinas Pertanian	40.549.470,00
13	Sekretariat Daerah	1.332.920,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	123.945.850,00
15	Badan Keuangan Daerah	58.581.043,90
16	Badan Kepgawaihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.358.511,50
JUMLAH		2.574.666.804,44



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
866.021.700,63	2.032.344.258,65	(1.166.322.558,02)	(57,39)

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang merupakan beban penyisihan piutang untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan realisasi senilai Rp866.021.700,63 dan mengalami penurunan senilai Rp1.166.322.558,02 dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp2.032.344.258,65.

Beban Penyisihan Piutang dapat dijelaskan dalam 3 kelompok besar, yaitu:

a). Beban Penyisihan Piutang Pajak

Beban penyisihan pajak meliputi Pajak Hotel senilai Rp20.375,00; Pajak Restoran senilai Rp527.771,50; Pajak Hiburan senilai Rp115.000,00; Pajak Reklame senilai Rp99.165,13; dan Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp61.608.020,62.

b). Beban Penyisihan piutang Retribusi

Beban penyisihan piutang Retribusi merupakan penyisihan atas perubahan umur piutang retribusi pasar pelataran, pasar Los Permanen dan pasar kios permanen senilai Rp75.110.375,00.

c). Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

Merupakan penyisihan atas perubahan umur piutang pendapatan BLUD SPAM senilai Rp401.876.751,25 dan RSUD senilai Rp323.347.290,00

d). Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp887.611,70

e). Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan senilai Rp1.716.361,85

f). Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan senilai Rp712.978,58

Rincian realisasi penyisihan piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 99. Rincian Beban Penyisihan Piutang menurut SKPD pada Tahun 2024

No	SKPD	Jenis Piutang	Penyisihan Per 31 Desember 2024
1	Badan Keuangan	Pajak	62.370.332,25
		Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.316.952,13
2	PUPR & DINKES	Pendapatan BLUD	725.224.041,25
3	Dinas Koperasi dan UKM	Retribusi	75.110.375,00
		Jumlah	866.021.700,63

5.4.2.10 Beban Transfer - LO



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
59.806.011.580,00	54.207.355.829,00	5.598.655.751,00	10,33

Beban Transfer merupakan beban pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp59.806.011.580,00 dan mengalami kenaikan senilai Rp5.598.655.751,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp54.207.355.829,00. Realisasi beban transfer meliputi realisasi transfer bagi hasil pajak daerah, transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten Kota dan lain-lain sesuai penjelasan realisasi transfer LRA. Beban transfer Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 100. Beban Transfer

No	Uraian Beban Transfer	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	737.011.667,00	946.064.539,00	(209.052.872,00)	(22,10)
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	23.179.500,00	204.573.000,00	(181.393.500,00)	(88,67)
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	59.045.820.413,00	53.056.718.290,00	5.989.102.123,00	11,29
Total		59.806.011.580,00	54.207.355.829,00	5.598.655.751,00	10,33

SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASI

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
88.382.263.366,53	199.286.288.580,00	(110.904.025.213,46)	(55,65)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan Operasi. Surplus/defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 101. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi pada Tahun 2024 dan 2023

Surplus/Defisit dari Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
Pendapatan	1.071.965.149.427,49	1.066.540.088.708,89	5.425.060.718,60	0,51
Beban	983.582.886.060,96	867.253.800.128,89	116.329.085.932,07	13,41
Surplus/defisit dari Operasi	88.382.263.366,53	199.286.288.580,00	-110.904.025.213,47	(55,65)

5.4.3

SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
(1.443.270.501,09)	(845.489.711,98)	(597.780.789,11)	70,70



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pada tahun 2024 terdapat defisit dari kegiatan non operasional lainnya dan nilainya sebesar Rp1.480.577.578,84. Defisit ini berupa koreksi persediaan yang kadaluarsa pada RSUD BORONG senilai Rp160.802.095,50, pencatatan aset lain-lain pada dinas Sosial senilai Rp85.000.000,00, pada Dinas Pertanahan senilai Rp99.094.000,00, pada Dinas Perhubungan senilai Rp551.040.000,00, pada Dinas Pariwisata senilai Rp136.671.000,00, pada Dinas Koperasi senilai Rp2.000.000,00, dan penghapusan aset lain-lain Dinas Kesehatan senilai Rp348.670.483,34, penghapusan aset tetap GB Dinas PPO senilai Rp97.300.000,00.

5.4.4

POS LUAR BIASA

Pada tahun 2024 terdapat kegiatan pada Pos Luar Biasa atas realisasi belanja tidak terduga senilai Rp653.200.277,00

5.4.5

SURPLUS/ (DEFISIT)-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan	Tren (%)
86.285.792.588,44	198.440.798.868,02	(112.155.006.279,57)	(56,52)

Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 adalah Surplus senilai Rp86.285.72588,44 mengalami penurunan sebesar 112.155.006.279,57 dari TA 2023 surplus senilai Rp198.440.798.868,02 atau 56,52%.

5.5

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2024 yang diklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama satu tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD yang terdiri dari Kas pada RKUD, kas yang dikuasai oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada SKPD, Kas pada Bendahara BLUD, Kas pada Bendahara FKTP dan Kas pada Bendahara Dana BOSP serta Kas lainnya atas Utang PFK yang belum dibayar hingga tanggal neraca per 31 Desember 2024. Sisa kas di bendahara SKPD baik bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetor ke BUD. Namun terkait hal tersebut, sisa dana kas di bendahara penerimaan SKPD, merupakan bagian dari kas daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD.

Arus kas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur merupakan informasi penerimaan dan pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2024 yang berdasarkan klasifikasi aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas tersebut menggambarkan aliran arus kas pengelolaan keuangan Tahun 2024 yang terdiri dari:

1. Arus Masuk Kas merupakan informasi penerimaan kas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2024 senilai Rp1.231.991.351.782,59 yang terdiri dari penerimaan atas pendapatan Daerah senilai Rp1.231.991.351.782,59 dan penerimaan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

atas pembiayaan Pinjaman Daerah pada Bank NTT senilai Rp0,00. Arus Masuk Kas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dijabarkan dalam bentuk aktivitas yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 102. Arus Kas Masuk Tahun 2024 dan 2023

Uraian Aktivitas	2024	2023	Naik/(Turun)	
			Rp	%
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.231.923.358.282,59	1.217.070.113.924,73	14.853.244.357,86	1,22
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	67.993.500,00	41.400.000,00	26.593.500,00	64,24
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	98.686.195.700,00	(98.686.195.700,00)	(100,00)
Total	1.231.991.351.782,59	1.315.797.709.624,73	(83.806.357.842,14)	(6,37)

2. Arus Keluar Kas merupakan informasi pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2024 senilai Rp1.257.791.749.193,56 yang terdiri dari pengeluaran atas belanja daerah senilai Rp1.210.275.395.193,56 dan Pengeluaran Pendanaan atas pengeluaran pengembalian pokok Pinjaman TA 2024 ke pihak kreditur yakni Bank NTT senilai Rp47.516.354.000, sebagaimana tidak disajikan dalam belanja daerah, tetapi disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2024. Arus Keluar Kas pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan aktivitas dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 103. Arus Kas Keluar Tahun 2024 dan 2023

Uraian Aktivitas	2024	2023	Naik/(Turun)	
			Rp	%
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	976.033.714.444,56	855.470.367.824,58	120.563.346.619,98	14,09
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	234.241.680.749,00	363.359.367.994,87	129.117.687.245,87	(35,53)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	47.516.354.000,00	51.169.841.700,00	(3.653.487.700,00)	(7,14)
Total	1.257.791.749.193,56	1.269.999.577.519,45	(12.207.828.325,89)	(0,96)

3. Arus Kas Aktivitas Transitoris.

Aktivitas Transitoris Adalah mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang atau Dana Koreksi SiLPA tahun Sebelumnya. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas aktivitas transitoris pada tabel berikut:

Tabel 104. Aktivitas Transitoris

Uraian Aktivitas	2024	2023	Naik/(Turun)	
			Rp	%
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	11.971.889,87	81.152.058.473,14	(81.140.086.583,27)	(99,99)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	27.387.225,00	81.291.886.174,14	(81.264.498.949,14)	(99,97)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	(15.415.335,13)	(139.827.701,00)	124.412.365,87	(88,98)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.1 AKTIVITAS OPERASI

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.231.923.358.282,59	1.217.070.113.924,73

Arus masuk kas aktivitas operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024 merupakan seluruh aliran kas masuk yang dikuasai Bendahara Umum Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah, Kas Dana BOSP, Kas Dana Kapitasi, Kas BOK, Kas BLUD, dan Kas Bendahara Penerimaan dengan total keseluruhan senilai Rp1.231.923.358.282,59 yang mengalami kenaikan senilai Rp14.853.244.357,86 atau 1,22% dari Tahun Anggaran 2023 yang senilai Rp1.217.070.113.924,73.

Pada arus kas masuk operasi tidak termasuk realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah atas Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran senilai Rp67.993.500,00, namun disajikan sebagai Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi pada Laporan Arus Kas.

Aliran kas masuk aktivitas operasi atas penerimaan daerah tahun 2024 Senilai Rp1.231.923.358.282,59 yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 105. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

NO	Uraian Aktivitas	2024	2023	Naik/(Turun)	
				Rp	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	15.055.200.365,00	18.996.984.197,00	(3.941.783.832,00)	(20,75)
2	Penerimaan Retribusi Daerah	3.213.542.363,00	2.826.406.463,20	387.135.899,80	13,70
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.654.873.033,00	10.065.795.251,00	(5.410.922.218,00)	(53,76)
4	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	18.465.035.953,39	15.536.758.226,53	2.928.277.726,86	18,85
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.077.431.000,00	5.725.093.036,00	(647.662.036,00)	(11,31)
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	578.835.877.278,00	522.531.134.657,00	56.304.742.621,00	10,78
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	209.715.773.244,00	238.941.839.387,00	(29.226.066.143,00)	(12,23)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	177.371.795.544,00	176.865.736.795,00	506.058.749,00	0,29
9	Penerimaan Dana Insentif	-	27.470.913.000,00	(27.470.913.000,00)	(100,00)
10	Penerimaan Dana Desa	156.619.814.000,00	157.447.150.500,00	(827.336.500,00)	(0,53)
11	Penerimaan Insentif Fiskal	19.587.672.000,00	0,00	19.587.672.000,00	100,00
12	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	29.091.770.910,00	26.949.730.232,00	2.142.040.678,00	7,95
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	100,00
14	Penerimaan Hibah	32.000.000,00	70.180.000,00	(38.180.000,00)	(54,40)
15	Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.952.572.592,20	13.642.392.180,00	310.180.412,20	2,27
	Total	1.231.923.358.282,59	1.217.070.113.924,73	14.853.244.357,86	1,22



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Berdasarkan data di atas jika dilakukan pengujian analisis horizontal antara Pendapatan Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan total senilai Rp1.231.991.351.782,59 dengan Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi pada LAK senilai Rp1.231.923.358.282,59, terdapat Selisih senilai Rp67.993.500,00 yang merupakan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Lain-lain PAD yang sah pada LRA. Akun tersebut disajikan sebagai Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi pada Laporan Arus Kas. Berdasarkan mekanisme aliran kas dapat dikelompokan menjadi dua yakni:

1) Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Kas Daerah melalui RKUD

Tabel 106. Penerimaan Kas Melalui RKUD

NO	Uraian Aktivitas	2024	2023	Naik/(Turun)	
				Rp	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	15.055.200.365,00	18.996.984.197,00	(3.941.783.832,00)	(20,75)
2	Penerimaan Retribusi Daerah	3.213.542.363,00	2.826.406.463,20	387.135.899,80	13,70
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.654.873.033,00	10.065.795.251,00	(5.410.922.218,00)	(53,76)
4	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	6.244.936.208,57	6.443.830.294,63	(198.894.086,06)	(3,09)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.077.431.000,00	5.725.093.036,00	(647.662.036,00)	(11,31)
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	578.835.877.278,00	522.531.134.657,00	56.304.742.621,00	10,78
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	209.715.773.244,00	238.941.839.387,00	(29.226.066.143,00)	(12,23)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	87.724.633.265,00	81.393.949.880,00	6.330.683.385,00	7,78
9	Penerimaan Dana Insentif	-	27.470.913.000,00	(27.470.913.000,00)	(100,00)
10	Penerimaan Insentif Fiskal	19.587.672.000,00	0,00	19.587.672.000,00	100,00
11	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	29.091.770.910,00	26.949.730.232,00	2.142.040.678,00	7,95
12	Penerimaan Bantuan Keuangan	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	100,00
13	Penerimaan Hibah	32.000.000,00	70.180.000,00	(38.180.000,00)	(54,40)
Total		959.483.709.666,57	941.415.856.397,83	18.067.853.268,74	1,92

2) Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi melalui Non RKUD

Tabel 107. Penerimaan Non RKUD

No	Uraian Aktivitas	2024	2023	Naik/(Turun)	
				Rp	%
1	Penerimaan Dana Desa	156.619.814.000,00	157.447.150.500,00	(827.336.500,00)	(0,53)
2	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik (BOSP)	60.796.692.673,00	62.052.199.915,00	(1.255.507.242,00)	(2,02)
3	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik (BOK)	28.850.469.606,00	33.419.587.000,00	(4.569.117.394,00)	(13,67)
4	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah (BLUD)	12.220.099.744,82	9.092.927.931,90	3.127.171.812,92	34,39
5	Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana Kapitasi)	13.952.572.592,20	13.642.392.180,00	310.180.412,20	2,27
6	Total Non RKUD	272.439.648.616,02	275.654.257.526,90	(3.214.608.910,88)	(1,17)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
976.033.714.444,56	855.470.367.824,58

Arus keluar kas aktivitas operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan keuangan membiayai kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024 yaitu senilai Rp976.033.714.444,46 yang mengalami kenaikan senilai Rp120.563.356.619,98 atau 14,09% dari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp855.470.367.824,58. Rincian sumber arus kas keluar dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 108. Sumber Arus Kas Keluar Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian Aktivitas	2024	2023	Naik/(Turun)	
				Rp	%
1	Pembayaran Pegawai	429.193.586.037,00	357.673.767.875,00	71.519.818.162,00	20,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	266.584.651.960,74	250.174.150.039,29	16.410.501.921,45	6,56
3	Pembayaran Bunga	1.256.013.228,82	2.675.666.416,29	(1.419.653.187,47)	(53,06)
4	Pembayaran Belanja Hibah	61.920.437.361,00	19.960.286.802,00	41.960.150.559,00	210,22
5	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	-	12.964.193.661,00	(12.964.193.661,00)	(100,00)
6	Pembayaran Tak Terduga	653.200.277,00	367.796.702,00	285.403.575,00	77,60
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	760.191.167,00	1.150.637.539,00	(390.446.372,00)	(33,93)
8	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	215.665.634.413,00	210.503.868.790,00	5.161.765.623,00	2,45
TOTAL		976.033.714.444,56	855.470.367.824,58	120.563.346.619,98	14,09

Pada tabel Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi di atas mencakupi pengeluaran transaksi Non RKUD yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 109. Transaksi Non RKUD

NO	URAIAN	Belanja Pegawai	Barang dan Jasa	Hibah	Bantuan Keuangan	Total
1	Belanja Dana Desa				156.619.814.000,00	156.619.814.000,00
2	Belanja Dana BOSP Paud/Kesetaraan		406.399.700,00	2.607.784.890,00		3.014.184.590,00
3	Belanja Dana BOSP SD & SMP		31.479.868.593,00	15.632.140.350,00		47.112.008.943,00
4	Belanja Dana BOK FKTP		30.306.065.087,00			30.306.065.087,00
5	Belanja BLUD	268.296.995,00	9.920.240.985,00			10.188.537.980,00
6	Belanja Dana Kapitasi JKN		13.225.150.022,72			13.225.150.022,72
Total Non RKUD		268.296.995,00	85.337.724.387,72	18.239.925.240,00	156.619.814.000,00	260.465.760.622,72



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
255.889.643.838,03	361.599.746.100,15

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Saldo arus kas bersih aktivitas operasi Pemerintah Manggarai Timur Tahun 2024 senilai Rp255.889.643.838,03 mengalami penurunan senilai Rp105.710.102.262,12 atau 29,23% dari tahun 2023 senilai Rp361.599.746.100,15. Arus kas bersih aktivitas operasi tahun 2024 mengalami surplus karena arus kas masuk senilai Rp1.231.923.358.282,59 lebih besar dari arus kas keluar senilai Rp976.033.714.444,56. Arus kas bersih aktivitas operasi telah mencakupi transaksi penerimaan dan pengeluaran mekanisme Dana Non RKUD.

5.5.2 AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

5.5.2.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
67.993.500,00	41.400.000,00

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: penjualan Aset Tetap, penjualan Aset Lainnya, pencairan Dana Cadangan, penerimaan dari Divestasi, penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas. Arus kas masuk aktivitas ini pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 senilai Rp67.993.500,00 mengalami kenaikan senilai Rp26.593.500,00 atau 64,24% dari 2023 senilai Rp41.400.000,00,00. Penerimaan Aktivitas investasi bersumber dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
234.241.680.749,00	363.359.367.994,87

Arus kas keluar Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 senilai Rp234.241.680.749,00 yang meliputi belanja peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya Pemerintah Daerah. Arus kas keluar Tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp129.117.687.245,87



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

atau 35,53% dari tahun 2023 yang kas keluarnya senilai Rp363.359.367.994,87. Penurunan ini disebabkan tahun 2023 terdapat belanja yang dibiayai dari Pinjaman daerah dan adanya penyertaan Modal di Bank NTT.

Tabel 110. Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis	2024	2023	Naik/(Turun)	
				Rp	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.800.276.096,00	57.499.818.824,00	(1.699.542.728,00)	(2,96)
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.562.513.574,00	79.522.079.374,00	5.040.434.200,00	6,34
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.216.452.076,00	213.233.845.684,87	(127.017.393.608,87)	(59,57)
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.453.439.003,00	6.627.338.997,00	(173.899.994,00)	(2,62)
5	Belanja Modal Aset Lainnya	1.209.000.000,00	2.476.285.115,00	(1.267.285.115,00)	(51,18)
6	Penyertaan Modal Daerah	0,00	4.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)	(100,00)
Total		234.241.680.749,00	363.359.367.994,87	(129.117.687.245,87)	(35,53)

Pada arus kas keluar aktivitas investasi mencakup realisasi belanja Modal yang bersumber dari mekanisme non RKUD.

Tabel 111. Belanja Modal yang bersumber dari mekanisme non RKUD

No	Uraian	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Total
1	Belanja Dana BOSP Paud/Kesetaraan	51.874.700,00		51.874.700,00
2	Belanja Dana BOSP SD & SMP	4.483.455.544,00	6.126.439.003,00	10.609.894.547,00
3	Belanja BLUD	1.447.413.873,00		1.447.413.873,00
4	Belanja Dana Kapitasi JKN	529.920.960,00		529.920.960,00
Total		6.512.665.077,00	6.126.439.003,00	12.639.104.080,00

5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(234.173.687.249,00)	(363.317.967.994,87)

Saldo arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2024 mengalami defisit senilai Rp255.889.594.902,95 yang disebabkan arus kas masuk lebih besar dibandingkan arus kas keluar Investasi. Jika dibandingkan defisit arus kas bersih tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp129.144.280.745,87 dari arus bersih kas investasi tahun 2023. Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur mengalami Penurunan dari tahun 2023 dikarenakan yakni:

- 1) Kenaikan atas penerimaan dari Penjualan Aset senilai Rp26.593.500,00
- 2) Penurunan perolehan Aset Peralatan dan mesin senilai Rp1.699.542.728,00
- 3) Kenaikan perolehan Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp5.040.434.200,00
- 4) Penurunan perolehan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp127.017.393.608,87
- 5) Penurunan atas perolehan Aset tetap Lainnya senilai Rp173.899.994,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 6) Penurunan atas perolehan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud senilai Rp1.267.285.115,00
- 7) Penurunan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank NTT selaku Bank Pembangunan Daerah senilai Rp4.000.000.000,00

5.5.3 AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	98.686.195.700,00

Arus Masuk Kas Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 yang mencerminkan penerimaan kas yang berasal dari hasil penerimaan pinjaman Pinjaman dari Bank NTT. Penerimaan Pinjaman tersebut tahun 2024 senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp98.686.195.700,00, atau 100% dari Penerimaan pembiayaan Pinjaman tahun lalu senilai Rp98.686.195.700,00.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
47.516.354.000,00	51.169.841.700,00

Arus Keluar Kas dari aktivitas pendanaan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 senilai Rp47.516.354.000,00 atas pelunasan Jatuh tempo Pokok Pinjaman Tahun 2022.

5.5.3.3 Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan

Saldo Arus kas bersih aktivitas pendanaan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2024 mengalami defisit senilai Rp47.516.354.000,00. Defisit tersebut terjadi karena adanya pelunasan Pokok Pinjaman yang telah jatuh tempo Tahun 2024.

5.5.4 AKTIVITAS TRANSITORIS

Adalah mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) dan kiriman uang. PKF menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Rincian arus kas dari aktivitas transitoris diuraikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 112. Arus Kas Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023

Uraian Aktivitas	2024	2023	Naik/(Turun)	
			Rp	%
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	11.971.889,87	81.152.058.473,14	(81.140.086.583,27)	(99,99)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	27.387.225,00	81.291.886.174,14	(81.264.498.949,14)	(99,97)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	(15.415.335,13)	(139.827.701,00)	124.412.365,87	(88,98)

5.5.4.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

31 Desember 2024	31 Desember 2023
11.971.889,87	81.152.058.473,14

Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris adalah arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Penerimaan Kas tersebut tahun 2024 senilai Rp11.971.889,87 mengalami penurunan senilai Rp81.140.086.583,27, atau 99,99% dari Penerimaan Kas Transitoris tahun lalu senilai Rp81.152.058.473,14.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

31 Desember 2024	31 Desember 2023
27.387.225,00	81.291.886.174,14

Arus Keluar Kas Transitoris adalah penyetoran kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes ke Kas di Kas Daerah. Pengeluaran Kas tersebut tahun 2024 senilai Rp27.387.225,00 mengalami penurunan senilai Rp81.264.498.949,14, atau 99,97% dari Penerimaan Kas Transitoris tahun lalu senilai Rp81.291.886.174,14.

5.5.4.3 Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2024 mengalami defisit senilai Rp15.415.335,13. Defisit tersebut terjadi karena adanya Perhitungan Fihak Ketiga yang belum disetorkan ke Kas di Kas Daerah.

5.5.5 KENAIKAN/ (PENURUNAN) KAS

Aliran bersih kas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2024 mengalami defisit senilai Rp25.815.812.746,10. Defisit ini terjadi karena aliran kas masuk dari aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan aktivitas Transitoris tahun 2024 senilai Rp1.232.003.323.672,46 lebih kecil dibandingkan aliran kas keluar dari aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan aktivitas transitoris Tahun 2024 senilai Rp1.257.819.136.418,56. Penurunan kas pada Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024 mencakupi hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1. Perubahan kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
2. Perubahan kas pada bendahara penerimaan yang belum setor ke RKUD
3. Perubahan Kas yang diterima langsung SKPD tanpa melalui RKUD atas Dana BOSP
4. Perubahan Kas yang diterima langsung SKPD tanpa melalui RKUD atas Dana BOK
5. Perubahan Kas yang diterima langsung SKPD tanpa melalui RKUD atas Dana Kapitasi FKTP
6. Perubahan Kas yang diterima langsung SKPD tanpa melalui RKUD atas Dana BLUD
7. Perubahan Kas Lainnya pada bendahara SKPD yang merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PKF belum) disetor per 31 Desember 2024.

5.5.6 SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur periode 1 Januari 2024 senilai Rp95.007.351.613,57. Saldo Awal kas ini merupakan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur per 31 Desember 2023. Tidak ada perubahan atas saldo tersebut.

5.5.7 KOREKSI SiLPA

Koreksi SiLPA tahun 2024 senilai Rp12.370.069,33 jika dibandingkan tahun 2023 Rp42.877.355,00.

5.5.8 SALDO AWAL KAS SETELAH KOREKSI

Nilai saldo awal kas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengalami kenaikan setelah terkoreksi senilai Rp12.370.069,33 menjadi senilai Rp95.019.721.682,90 dari semua senilai Rp95.007.351.613,57.

5.5.9 SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas merupakan uang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai akhir periode pelaporan 31 Desember 2024 senilai Rp69.203.908.936,80 mengalami penurunan senilai Rp25.803.442.676,77 atau 27,16 % dari saldo akhir tahun 2023 senilai Rp95.007.351.613,57. Mutasi kas tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 113. Mutasi Kas Tahun 2024

NO	URAIAN	2024	2023
A	Saldo Awal Kas	95.007.351.613,57	49.306.169.854,29
B	Koreksi SiLPA	12.370.069,33	42.877.355,00
C	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	(A+B)	95.019.721.682,90
D	Kenaikan/Penurunan Kas TA 2024	(25.815.812.746,10)	45.658.304.404,28
E	Saldo Akhir Kas (C-D)	69.203.908.936,80	95.007.351.613,57

Berdasarkan mutasi kas sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, saldo kas akhir pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Per 31 Desember 2024 dapat dirincikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 114. Rincian Saldo Akhir Kas

No	Jenis	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah (RKUD)	58.227.112.260,11	83.318.769.144,28	(25.091.656.884,17)	(30,12)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	28.408.453,53	71.975.793,51	(43.567.339,98)	0,00
4	Kas di Bendahara FKTP	1.401.194.027,02	1.203.692.417,56	197.501.609,46	16,41
5	Kas di Bendahara BOS	135.927.632,00	127.197.739,00	8.729.893,00	6,86
6	Kas di Bendahara BOK	6.614.604.913,00	8.070.200.394,00	(1.455.595.481,00)	(18,04)
7	Kas di Bendahara BLUD	2.772.276.792,04	2.188.128.900,22	584.147.891,82	26,70
8	Kas Lainnya	24.384.859,10	27.387.225,00	(3.002.365,90)	(10,96)
	SALDO KAS AKHIR	69.203.908.936,80	95.007.351.613,57	(25.803.442.676,77)	(27,16)

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal per 31 Desember 2024 senilai Rp2.145.511.004.824,90.

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Surplus Laporan Operasional periode 31 Desember 2024 senilai Rp86.285.792.588,44 merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penambahan ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2024. Terjadinya Surplus Laporan Operasional disebabkan Pendapatan Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 senilai Rp1.071.965.149.427,49 dan surplus kegiatan non Operasional lainnya senilai Rp37.307.077,75 mampu membiayai kebutuhan beban operasional Pemerintah tahun berjalan yang senilai Rp983.582.886.060,96. dan menutupi defisit baik defisit kegiatan non operasional senilai Rp1.480.577.578,84 maupun defisit Pos Luar atas pengeluaran belanja tidak terduga senilai Rp653.200.277,00.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar senilai Rp3.452.241.370,45 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.3.1 Koreksi Ekutias - Kas

Koreksi kas tahun 2024 senilai Rp12.370.069,33 atas pengakuan atas sisa saldo 59 rekening bank yang tidak digunakan, belum ditutup pada tahun 2024.

5.6.3.2 Koreksi Ekuitas - Piutang

Koreksi Ekuitas Piutang bersaldo senilai Rp91.108.436,00 yang disebabkan karena kesalahan perhitungan jumlah piutang BLUD RSUD ke BPJS pada tahun sebelumnya. Saldo Akhir Piutang Pajak BLUD RSUD pada tahun 2023 senilai Rp2.475.621.736,00. Setelah melakukan koordinasi ke BPJS terdapat item pengajuan yang tidak diverifikasi oleh BPJS dan tidak dibayarkan. Atas hal tersebut Nilai Piutang yang tercatat pada Neraca



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BLUD RSUD TA 2023 terjadi kelebihan, sehingga dilakukan pengurangan saldo awal melalui koreksi nilai dengan mengurangi ekuitas.

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang

Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang senilai Rp256.681.568,48, atas perubahan kebijakan akuntansi dalam metode perhitungan penyisihan tahun 2024.

5.6.3.4 Koreksi Ekuitas - Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan pada tahun 2024 terjadi karena adanya persediaan pada Lembaga Badan Layanan Umum Daerah RSUD Borong, berupa obat-obatan tahun sebelumnya yang pencatatannya tidak sesuai keadaan dan harga satuan yang sebenarnya, sehingga berdampak kelebihan nilai pada penyajian persedian neraca tahun 2023. Oleh karena itu maka perlu dilakukan Koreksi Negatif tahun 2024 sejumlah senilai Rp28.349.403,11. Lampiran koreksi persediaan *Lampiran 27a*.

5.6.3.5 Koreksi Ekuitas- Aset Tetap Tanah

Koreksi Ekuitas Aset Tetap Tanah bersaldo positif senilai Rp1.010.054.640,00 yang disebabkan karena terdapat aset tetap baru yang ditemukan saat inventarisasi internal yakni:

- 1) Sebidang tanah di Lenda/Golo Wangkung Utara/Kec. Sambi Rampas senilai Rp137.180.640,00;
- 2) Sebidang tanah di Golo Nila/Ulung Baras/Kec. Sambi Rampas senilai Rp64.400.000,00;
- 3) Sebidang Tanah Non Pertanian yang dipergunakan untuk SMPN 16 Borong senilai Rp273.980.000,00;
- 4) Sebidang Tanah untuk SMPN 11 Lamba Leda senilai Rp79.142.000,00;
- 5) Sebidang Tanah untuk SMPN 18 Borong senilai Rp121.032.000,00; dan
- 6) Sebidang Tanah untuk SDN Bantuk senilai Rp334.320.000,00.

5.6.3.6 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Koreksi ekuitas Aset Tetap Peralatan dan mesin tahun 2024 senilai Rp0,00.

5.6.3.7 Koreksi Ekuitas- Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Koreksi Ekuitas Aset Tetap Gedung dan Bangunan bersaldo positif senilai Rp4.274.848.700,00 atas 17 Gedung yang belum dicatat dalam KIB. Aset tersebut ditemukan saat inventarisasi Internal SKPD Tahun 2024 yakni 1 (satu) Gedung berlokasi di Bangunan Kantor Kelurahan Golo Wangkung Utara, 1 (satu) Gedung berlokasi di Bangunan Kantor Kelurahan Ulung Baras, 1 (satu) Gedung berlokasi di SDI Nggari, 1 (satu) Gedung berlokasi di SDI Wae Nunung, 4(Empat) Gedung berlokasi di SMPN 5 Borong, 6 (Enam) Gedung berlokasi di SMPN 5 Elar dan 3(Tiga) Gedung berlokasi di SMPN 3 Sambi Rampas.

5.6.3.8 Koreksi Ekuitas-Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Koreksi Ekuitas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan bersaldo Positif senilai Rp244.000.000,00, yang disebabkan karena terdapat aset tetap baru yang ditemukan saat



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

inventarisasi yakni 1 (satu) bangunan pembuangan Jamban (Toilet) berlokasi di SMPN 5 Borong, 1 (satu) bangunan pembuangan Jamban (Toilet) berlokasi di SMPN 5 Elar dan 1 (satu) bangunan pembuangan Jamban (Toilet) berlokasi di SMPN 3 Sambi Rampas.

5.6.3.9 Koreksi Ekuitas- Akumulasi Penyusutan

Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2024 senilai Rp2.300.696.037,31, yang terdiri dari:

- 1) Koreksi Ekuitas- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan bersaldo negatif senilai Rp1.711.553.674,63 yang disebabkan perhitungan penyusutan sesuai tahun perolehan atas 17 Gedung dan Bangunan yang baru ditemukan saat inventarisasi internal tahun 2024 senilai Rp1.680.159.905,00 dan kesalahan perhitungan penyusutan tahun sebelumnya yang berdampak kurang saji 5 (Lima) Bangunan Gedung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2024 senilai Rp31.393.769,63.
- 2) Koreksi Ekuitas- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp589.142.362,68 yang disebabkan antara lain:
 - a) Mutasi Tambah/Koreksi Positif senilai Rp1.136.704.509,88 karena terdapat koreksi nilai atas kesalahan perhitungan tahun sebelumnya pada jaringan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b) Mutasi Kurang /Koreksi Negatif senilai Rp547.562.147,20 yakni: Koreksi nilai atas kesalahan perhitungan penyusutan tahun sebelumnya pada Ruas Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5.6.3.10 Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya

Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud senilai Rp576.057,94 yang disebabkan karena kesalahan perhitungan tahun sebelumnya.

5.6.3.11 Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya-Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain

Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset lain - lain (rusak berat) senilai Rp6.382.900,00 yang disebabkan karena kesalahan perhitungan tahun sebelumnya pada BLUD UPTD SPAM.

5.6.3.12 Koreksi Ekuitas Kewajiban

Koreksi Ekuitas utang Belanja Barang dan Jasa BLUD senilai Rp80.247.111,12 pada BLUD RSUD Borong, yang disebabkan karena kesalahan perhitungan tahun 2023. Kesalahan perhitungan ini terjadi karena piutang yang diakui tahun 2023 tidak semuanya disetujui oleh BPJS. Sedangkan Presentasi pengakuan utang tahun 2023 berdasarkan persentase tertentu dari Piutang yang diakui. Utang ini terkait dengan utang jasa pelayanan kepada anggota medis.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

PENYISIHAN PIUTANG BPJS RSUD BORONG TAHUN 2023

Keterangan	Utang Jasa Pelayanan	Pembayaran Jasa Pelayanan	Selisih
- BPJS Kesehatan Reguler Oktober 2023	272,411,202.00	247,754,600.00	24,656,602.00
- BPJS Kesehatan Reguler November 2023	292,160,442.00	278,246,880.00	13,913,562.00
- BPJS Kesehatan Reguler Desember 2023	230,813,730.00	212,927,440.00	17,886,290.00
- BPJS Kesehatan Pending Agustus dan September 2023	113,867,433.12	92,710,840.00	21,156,593.12
- BPJS Kesehatan Pending Oktober 2023	10,625,664.00	7,991,600.00	2,634,064.00
Jumlah	919,878,471.12	839,631,360.00	80,247,111.12

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir pada tahun 2024 disajikan senilai Rp2.235.249.038.783,79 merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Ekuitas akhir mengalami kenaikan senilai Rp89.738.033.958,89 atau 4,18% dari tahun 2023 senilai Rp2.145.511.004.824,90. Kenaikan tersebut karena adanya surplus kegiatan operasional pada tahun 2023 senilai Rp86.285.792.588,44 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar senilai Rp3.452.241.370,45.

BAB VI

PENGUNGKAPAN LAINNYA

6.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

a. Letak Wilayah

1. Posisi Astronomis

Secara astronomis wilayah Kabupaten Manggarai Timur terletak antara: $8^{\circ}14'$ Lintang Selatan – $9^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}20'$ Bujur Timur – $120^{\circ}55'$ Bujur Timur. Kabupaten Manggarai Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

2. Posisi Geostrategis

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai pada Tahun 2007.

b. Luas dan Batas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar $2.642,93 \text{ km}^2$. Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Manggarai Timur Sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan Kabupaten Ngada

Barat : berbatasan dengan Kabupaten Manggarai

Utara : berbatasan dengan Laut Flores

Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu

c. Geologi dan Topografi

1. Geologi

Kabupaten Manggarai Timur mempunyai kondisi geologi yang cukup kompleks. Satuan geologi yang dijumpai dalam wilayah Manggarai Timur dibagi dalam 4 jenis yaitu:

- a) *Intermediate basic* (basah menengah)
- b) *Neogen*
- c) *Alluvial terrace deposits and coral reefs (alluvium undak dan terumbu koral)*
- d) *Silific efusives (efisiva berasam kersik)*

Wilayah Manggarai Timur bagian Selatan sepanjang arah Barat –Timur banyak ditemukan jenis intermediate basic (basah menengah). Sedangkan pada bagian

Utara banyak ditemukan batuan kapur pada formasi neogen. Jenis tanah di Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari:

a) Latosol

Tanah latosol semula tergolong tanah mineral yang sudah mempunyai perkembangan profil dalam horizon terselubung merah hingga kuning, liat, lemah hingga gumpal. Jenis tanah ini meliputi 3 golongan yaitu: latosol coklat, latosol coklat merah dan latosol merah kuning.

b) Mediteran

Tanah mempunyai lapisan solum yang tebal. Kadar unsur basah yang terkandung umumnya tinggi, daya menahan airnya sedang, sehingga kepekaan terhadap erosi juga sedang.

c) Litosol

Merupakan tanah mineral dengan sedikit perkembangan di atas batuan kukuh, dengan kedalaman profil kurang dari 50 cm.

d) Topografi

Bentang alam wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebagian besar berada di atas 100 meter dari permukaan laut (dpl) dan didominasi oleh lereng-lereng dengan kemiringan di atas 40° sebesar 81,60 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur.

d. Jumlah Penduduk

Selain memiliki wilayah yang luas, Kabupaten Manggarai Timur juga memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Penduduk dalam jumlah yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional maupun daerah. Sampai dengan keadaan bulan Desember 2022 jumlah penduduk Manggarai Timur sebanyak 280.732 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 115. Jumlah Penduduk

	Jumlah Penduduk (Jiwa)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	283.313	287.207	289.836	277.914	285.374	290.790	296.174

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2024

6.2. PEMERINTAHAN

a. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Secara administratif, sampai dengan keadaan tahun 2024 wilayah Kabupaten Manggarai Timur dibagi menjadi 12 Kecamatan, yang mana Pusat Pemerintahan berada di Lehong Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong. Daftar nama-nama kecamatan pada Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut:

Tabel 116. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Manggarai Timur TA 2024

No	Kecamatan	Ibu Kota
1.	Borong	Borong

No	Kecamatan	Ibu Kota
2.	Rana Mese	Golo Mongkok
3.	Lamba Leda Selatan	Mano
4.	Lamba Leda Timur	Lawir
5.	Lamba Leda	Benteng jawa
6.	Sambi Rampas	Pota
7.	Elar	Lengko Elar
8.	Elar Selatan	Wukir
9.	Kota Komba	Wae lengga
10.	Lamba Leda Utara	Dampek
11.	Congkar	Watunggong
12.	Kota Komba Utara	Rana Mbeling

Sumber: BPS Kab. Manggarai Timur TA 2024

b. Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur

Sejak berdirinya Kabupaten Manggarai Timur pada Tanggal 17 Juli 2007 Bupati dan Wakil Bupati yang menjabat di Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 117. Nama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur

No	Periode	Bupati	Wakil Bupati
1.	Tahun 2007 s/d 13 Februari 2009	(Penjabat Bupati) Drs. Fransiskus B. Paju Leok	-
2.	Tahun 2009 – 2014	Drs. Yoseph Tote, M.Si	Agas Andreas, SH, M.Hum
3.	Tahun 2014 – 2019	Drs. Yoseph Tote, M.Si	Agas Andreas, SH, M.Hum
4.	Tahun 2019 – 30 Maret 2022	Agas Andreas, SH, M.Hum	Drs. Jaghur Stefanus
5.	07 Desember 2022 – 2024	Agas Andreas, SH, M.Hum	Siprianus Habur, S.Sos
6.	16 Februari 2024-2025	Penjabat Bupati Ir.Boni Hasudungan	-
7.	Tahun 2025-2029	Agas Andreas, SH, M.Hum	Tarsisius Syukur,SS

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih rinci. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan selanjutnya.

Terima kasih kepada semua pihak termasuk Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang telah mendukung, berperan aktif dan bekerja sama dalam menyediakan waktu dan data yang diperlukan sehingga laporan keuangan ini telah selesai disusun dengan tepat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.





LAMPIRAN CALK

BELANJA OPERASI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TA 2024
BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
		Rp	RP	%	Rp
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	356,887,828,410.00	328,755,442,770.00	92.12	297,731,153,260.00
2	Dinas Kesehatan	212,005,869,096.00	188,518,725,085.74	88.92	145,040,302,017.29
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	28,377,706,449.00	26,893,666,270.00	94.77	27,187,621,964.00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	3,256,838,874.00	3,170,719,897.00	97.36	2,497,456,018.00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,096,325,395.00	2,011,431,704.00	95.95	1,630,112,739.00
6	Dinas Sosial	3,422,658,146.00	3,185,239,269.00	93.06	2,940,963,152.00
7	Dinas Pertanahan	1,573,945,648.00	1,344,029,329.00	85.39	1,270,694,688.00
8	Dinas Lingkungan Hidup	3,053,123,187.00	2,592,186,776.00	84.9	2,850,559,671.00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2,563,215,114.00	2,490,364,395.00	97.16	2,480,938,275.00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2,731,394,793.00	2,594,467,879.00	94.99	3,077,585,553.00
11	Dinas Perhubungan	3,074,385,273.00	2,893,229,544.00	94.11	3,180,958,924.00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2,169,844,311.00	2,056,740,501.00	94.79	1,906,623,102.00
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,530,067,193.00	2,360,728,137.00	93.31	2,494,039,718.00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2,011,266,764.00	1,947,668,493.00	96.84	2,139,188,003.00
15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2,661,751,364.00	2,559,869,340.00	96.17	2,303,387,202.00
16	Dinas P2KBP3A	9,597,801,875.00	9,342,096,543.00	97.34	10,853,496,316.00
17	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	4,038,181,969.00	3,498,287,411.00	86.63	2,578,649,337.00
18	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2,864,566,086.00	2,766,322,105.00	96.57	2,557,353,826.00
19	Dinas Pertanian	31,641,092,082.00	31,066,374,369.00	98.18	22,271,828,759.00
20	Dinas Peternakan	3,244,967,617.00	3,004,250,410.00	92.58	3,538,457,151.00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	5,323,348,179.00	4,791,405,497.00	90.01	15,808,790,142.00
22	Sekretariat Daerah	17,551,805,379.00	16,853,008,404.00	96.02	16,123,803,970.00
23	Sekretariat DPRD	23,590,232,946.00	21,734,585,803.00	92.13	21,210,072,519.00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	4,625,704,514.00	4,413,474,843.00	95.41	4,451,669,938.00
25	Badan Keuangan Daerah	16,607,214,228.00	12,543,142,977.82	75.53	10,930,496,260.29
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4,410,545,852.00	3,870,504,300.00	87.76	5,262,444,946.00
27	Inspektorat	5,182,422,286.00	4,973,782,473.00	95.97	5,063,877,802.00
28	Kecamatan Borong	3,107,639,401.00	3,009,744,787.00	96.85	2,678,518,327.00
29	Kecamatan Kota Komba Utara	981,626,135.00	805,320,231.00	82.04	851,297,758.00
30	Kecamatan Congkar	1,960,212,891.00	1,806,456,622.00	92.16	1,644,018,241.00
31	Kecamatan Lamba Leda Utara	1,155,283,419.00	1,023,949,165.00	88.63	998,828,699.00
32	Kecamatan Rana Mese	1,662,512,458.00	1,546,500,570.00	93.02	1,525,193,737.00
33	Kecamatan Kota Komba	3,091,842,756.00	2,930,760,225.00	94.79	2,818,482,042.00
34	Kecamatan Lamba Leda Selatan	3,854,884,109.00	3,607,558,640.00	93.58	3,397,332,415.00
35	Kecamatan Lamba Leda	1,281,375,274.00	1,199,206,637.00	93.59	1,143,456,352.00
36	Kecamatan Sambi Rampas	3,163,363,103.00	2,984,817,978.00	94.36	2,497,415,288.00
37	Kecamatan Elar Selatan	1,344,384,586.00	1,181,241,422.00	87.86	1,228,783,337.00
38	Kecamatan Lamba Leda Timur	1,202,329,788.00	1,081,640,128.00	89.96	1,015,343,030.00
39	Kecamatan Elar	2,010,958,478.00	1,865,792,257.00	92.78	1,681,708,689.00
40	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	43,867,965,301.00	43,679,955,400.00	99.57	2,585,161,626.00
	Total	825,778,480,729.00	758,954,688,587.56	91.91	643,448,064,793.58

BELANJA PEGAWAI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TA 2024
BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
		Rp	RP	%	Rp
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	270,345,484,940.00	242,427,466,900.00	89.67	210,754,709,589.00
2	Dinas Kesehatan	100,298,526,690.00	91,129,604,648.00	90.86	60,451,485,511.00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	5,542,167,971.00	5,095,554,894.00	91.94	4,745,757,847.00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1,858,378,734.00	1,780,274,526.00	95.8	1,332,302,328.00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,463,923,145.00	1,380,468,511.00	94.3	1,237,217,101.00
6	Dinas Sosial	2,362,572,226.00	2,131,079,369.00	90.2	2,063,936,438.00
7	Dinas Pertanahan	1,131,709,564.00	958,792,153.00	84.72	972,911,608.00
8	Dinas Lingkungan Hidup	1,610,010,622.00	1,353,724,786.00	84.08	1,478,449,891.00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,809,989,294.00	1,745,292,619.00	96.43	1,553,122,656.00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1,859,758,710.00	1,735,280,780.00	93.31	1,565,683,709.00
11	Dinas Perhubungan	1,524,699,253.00	1,355,468,864.00	88.9	1,291,451,684.00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1,713,284,361.00	1,635,589,813.00	95.47	1,500,871,592.00
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,721,041,795.00	1,619,082,286.00	94.08	1,444,574,892.00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1,526,038,044.00	1,472,372,142.00	96.48	1,279,332,831.00
15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1,624,315,444.00	1,525,400,220.00	93.91	1,313,731,554.00
16	Dinas P2KBP3A	2,176,178,115.00	2,070,096,241.00	95.13	1,904,251,316.00
17	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	2,402,089,553.00	2,184,769,093.00	90.95	2,054,973,867.00
18	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2,352,525,886.00	2,256,291,936.00	95.91	2,062,214,771.00
19	Dinas Pertanian	8,394,017,586.00	8,161,745,760.00	97.23	7,414,341,598.00
20	Dinas Peternakan	2,620,438,169.00	2,447,535,899.00	93.4	2,559,094,471.00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2,040,000,159.00	1,954,105,313.00	95.79	1,884,061,073.00
22	Sekretariat Daerah	7,157,184,708.00	6,798,093,919.00	94.98	5,997,871,652.00
23	Sekretariat DPRD	13,553,540,246.00	12,966,947,583.00	95.67	12,621,789,298.00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	2,055,628,584.00	1,907,853,356.00	92.81	1,848,694,731.00
25	Badan Keuangan Daerah	10,257,509,628.00	6,581,749,851.00	64.17	3,895,861,042.00
26	Badan Kepergawaihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2,430,515,768.00	2,322,250,045.00	95.55	2,060,539,010.00
27	Inspektorat	3,642,786,666.00	3,461,453,114.00	95.02	3,152,802,442.00
28	Kecamatan Borong	2,324,216,621.00	2,228,855,802.00	95.9	1,948,311,258.00
29	Kecamatan Kota Komba Utara	800,027,233.00	623,779,951.00	77.97	665,179,298.00
30	Kecamatan Congkar	1,295,243,551.00	1,194,535,212.00	92.22	1,097,985,877.00
31	Kecamatan Lamba Leda Utara	967,209,439.00	838,785,165.00	86.72	811,874,439.00
32	Kecamatan Rana Mese	1,473,808,778.00	1,361,672,940.00	92.39	1,345,706,977.00
33	Kecamatan Kota Komba	2,300,539,026.00	2,139,505,345.00	93	2,032,460,082.00
34	Kecamatan Lamba Leda Selatan	3,055,620,229.00	2,810,699,460.00	91.98	2,604,035,905.00
35	Kecamatan Lamba Leda	1,098,557,354.00	1,021,181,262.00	92.96	959,733,087.00
36	Kecamatan Sambi Rampas	2,198,613,123.00	2,022,764,989.00	92	1,658,391,478.00
37	Kecamatan Elar Selatan	951,825,606.00	799,902,855.00	84.04	839,129,177.00
38	Kecamatan Lamba Leda Timur	1,019,652,808.00	910,393,088.00	89.28	843,464,970.00
39	Kecamatan Elar	1,640,393,523.00	1,495,227,835.00	91.15	1,298,638,029.00
40	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1,380,949,397.00	1,287,937,512.00	93.26	1,126,822,796.00
	Total	475,980,972,549.00	429,193,586,037.00	90.17	357,673,767,875.00

BELANJA BARANG DAN JASA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TA 2024
BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
		Rp	RP	%	Rp
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	67,192,629,326.00	67,205,318,270.00	100.02	68,779,413,923.00
2	Dinas Kesehatan	111,707,342,406.00	97,389,120,437.74	87.18	84,588,816,506.29
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	22,835,538,478.00	21,798,111,376.00	95.46	22,378,364,117.00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1,398,460,140.00	1,390,445,371.00	99.43	1,165,153,690.00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	632,402,250.00	630,963,193.00	99.77	392,895,638.00
6	Dinas Sosial	960,085,920.00	954,159,900.00	99.38	602,026,714.00
7	Dinas Pertanahan	442,236,084.00	385,237,176.00	87.11	297,783,080.00
8	Dinas Lingkungan Hidup	1,443,112,565.00	1,238,461,990.00	85.82	1,372,109,780.00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	753,225,820.00	745,071,776.00	98.92	927,815,619.00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	871,636,083.00	859,187,099.00	98.57	1,511,901,844.00
11	Dinas Perhubungan	1,549,686,020.00	1,537,760,680.00	99.23	1,889,507,240.00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	456,559,950.00	421,150,688.00	92.24	405,751,510.00
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	809,025,398.00	741,645,851.00	91.67	1,049,464,826.00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	485,228,720.00	475,296,351.00	97.95	859,855,172.00
15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1,037,435,920.00	1,034,469,120.00	99.71	989,655,648.00
16	Dinas P2KBP3A	7,421,623,780.00	7,272,000,302.00	97.98	8,949,245,000.00
17	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	1,636,092,416.00	1,313,518,318.00	80.28	523,675,470.00
18	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	512,040,200.00	510,030,169.00	99.61	495,139,055.00
19	Dinas Pertanian	23,247,074,496.00	22,904,628,609.00	98.53	14,857,487,161.00
20	Dinas Peternakan	624,529,448.00	556,714,511.00	89.14	979,362,680.00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3,283,348,020.00	2,837,300,184.00	86.41	1,084,729,069.00
22	Sekretariat Daerah	8,377,620,671.00	8,072,914,485.00	96.36	9,136,980,243.00
23	Sekretariat DPRD	10,036,692,700.00	8,767,638,220.00	87.36	8,588,283,221.00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	2,570,075,930.00	2,505,621,487.00	97.49	2,602,975,207.00
25	Badan Keuangan Daerah	5,089,704,600.00	4,705,379,898.00	92.45	4,358,968,802.00
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1,980,030,084.00	1,548,254,255.00	78.19	3,201,905,936.00
27	Inspektorat	1,539,635,620.00	1,512,329,359.00	98.23	1,911,075,360.00
28	Kecamatan Borong	783,422,780.00	780,888,985.00	99.68	730,207,069.00
29	Kecamatan Kota Komba Utara	181,598,902.00	181,540,280.00	99.97	186,118,460.00
30	Kecamatan Congkar	664,969,340.00	611,921,410.00	92.02	546,032,364.00
31	Kecamatan Lamba Leda Utara	188,073,980.00	185,164,000.00	98.45	186,954,260.00
32	Kecamatan Rana Mese	188,703,680.00	184,827,630.00	97.95	179,486,760.00
33	Kecamatan Kota Komba	791,303,730.00	791,254,880.00	99.99	786,021,960.00
34	Kecamatan Lamba Leda Selatan	799,263,880.00	796,859,180.00	99.7	793,296,510.00
35	Kecamatan Lamba Leda	182,817,920.00	178,025,375.00	97.38	183,723,265.00
36	Kecamatan Sambi Rampas	964,749,980.00	962,052,989.00	99.72	839,023,810.00
37	Kecamatan Elar Selatan	392,558,980.00	381,338,567.00	97.14	389,654,160.00
38	Kecamatan Lamba Leda Timur	182,676,980.00	171,247,040.00	93.74	171,878,060.00
39	Kecamatan Elar	370,564,955.00	370,564,422.00	100	383,070,660.00
40	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1,677,498,542.00	1,676,238,127.00	99.92	898,340,190.00
	Total	286,261,276,674.00	266,584,651,960.74	93.13	250,174,150,039.29

BELANJA HIBAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TA 2024
BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
		Rp	RP	%	Rp
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	19,349,714,144.00	19,122,657,600.00	98.83	18,197,029,748.00
2	Dinas Sosial	100,000,000.00	100,000,000.00	100	275,000,000.00
3	Sekretariat Daerah	2,017,000,000.00	1,982,000,000.00	98.26	928,258,414.00
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	40,809,517,362.00	40,715,779,761.00	99.77	559,998,640.00
	Total	62,276,231,506.00	61,920,437,361.00	99.43	19,960,286,802.00

BELANJA MODAL KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TA 2024
BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

No	Perangkat Daerah	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
		Rp	Rp	%	Rp
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	71,077,650,263.00	65,453,140,173.00	92.09	58,502,098,445.00
2	Dinas Kesehatan	98,908,390,284.00	91,574,349,338.00	92.59	80,765,140,939.00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	76,739,771,648.00	73,721,990,402.00	96.07	202,234,970,911.87
4	Satuan Polisi Pamong Praja				-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				-
6	Dinas Sosial				-
7	Dinas Pertanahan				-
8	Dinas Lingkungan Hidup	150,000,000.00	150,000,000.00	100	656,242,000.00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		-	-	6,930,000.00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		-	-	25,543,000.00
11	Dinas Perhubungan		-	-	194,500,000.00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika				-
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,000,000.00	88,786,680.00	99.76	444,778,200.00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	94,465,500.00	91,000,000.00	96.33	10,271,621,400.00
15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	-	2,835,000.00
16	Dinas P2KBP3A	-	-	-	1,869,802,384.00
17	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	4,263,000.00	-	-	-
18	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	185,500,000.00	185,500,000.00	100	-
19	Dinas Pertanian	1,034,550,000.00	1,034,124,000.00	99.96	997,576,000.00
20	Dinas Peternakan	333,803,000.00	330,496,700.00	99.01	2,952,583,000.00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	342,418,000.00	342,338,000.00	99.98	-
22	Sekretariat Daerah	209,453,400.00	208,092,600.00	99.35	81,256,000.00
23	Sekretariat DPRD	745,548,000.00	744,179,000.00	99.82	-
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	-			59,124,700.00
25	Badan Keuangan Daerah	120,825,000.00	119,825,000.00	99.17	44,917,300.00
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8,526,000.00	8,509,256.00	99.8	114,991,115.00
27	Inspektorat	-	-	-	35,520,000.00
28	Kecamatan Borong	16,712,000.00	16,712,000.00	100	15,501,600.00
29	Kecamatan Kota Komba Utara	1,025,000.00	-	-	4,275,000.00
30	Kecamatan Congkar	12,584,000.00	12,584,000.00	100	12,830,000.00
31	Kecamatan Lamba Leda Utara				-
32	Kecamatan Rana Mese				-
33	Kecamatan Kota Komba				-
34	Kecamatan Lamba Leda Selatan				-
35	Kecamatan Lamba Leda				-
36	Kecamatan Sambi Rampas	92,292,100.00	92,292,100.00	100	66,331,000.00
37	Kecamatan Elar Selatan	5,000,000.00	-	-	-
38	Kecamatan Lamba Leda Timur	13,227,000.00	13,227,000.00	100	-
39	Kecamatan Elar	39,278,000.00	29,124,000.00	74.15	-
40	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	25,410,500.00	25,410,500.00	100	-
	Total	250,249,692,695.00	234,241,680,749.00	93.6	359,359,367,994.87

BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TA 2024
BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Penanggung Jawab
		Rp	Rp	
	Belanja Tidak Terduga	1,138,860,254.00		
1	Bantuan dana untuk korban kebakaran rumah di Kecamatan Sambi Rampas		Rp10,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Belanja TU RKB Pendropingan Logistik Bencana Banjir Bandang di Kec. Lamba Leda Utara		Rp10,721,700.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Belanja TU BTT RKB Korban Banjir Bandang di Kec. Lamba Leda Utara & Sambi Rampas		Rp40,697,000.00	Dinas Sosial
4	Belanja TU BTT RKB Bansos yang Tidak Direncanakan dari Nining Astriyani		Rp16,850,000.00	PEMKESRA(SETDA)
5	Pembayaran Pengembalian Setoran Pajak MBLB ke Rekening Giro Bank NTT dengan Nomor Rekening Giro: 00601130014891 atas nama CV. Ntala Gregorio dengan alasan Pendobelan Pembayaran		Rp13,298,000.00	Badan Keuangan Daerah
6	Belanja TU BTT RKB Bagi Bencana Korban Angin Puting Bander Belitung Di Desa Satar Kampas, Kec. Lamba Leda Utara		Rp16,000,000.00	Badan Keuangan Daerah
7	Belanja TU BTT RKB bagi Korban Kebakaran Rumah di Desa Golo Ngawan Kec. Congkar		Rp10,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Belanja TU BTT RKB Bagi Korban Kebakaran Rumah Di Desa Golo Meleng, Kec. Rana Mese		Rp10,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Belanja TU BTT RKB Bagi Korban Kebakaran Tempat Usaha di Tengku Leda, Kec. Lamba Leda		Rp10,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Rumah Di Desa Satar Punda Kec. Lamba Leda Utara		Rp5,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Belanja TU BTT RKB Bagi Korban Rumah Longsor Daerah Di Kel. Tanah Rata, Kec. Kota Komba		Rp10,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Daerah Rumah Di Desa Compang Wunis Kec. Lamba Leda Timur		Rp5,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Daerah Rumah Di Kel. Lempang Paji Kec. Elar Selatan		Rp10,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Daerah Rumah Di Gunung Baru Kec. Kota Komba Utara		Rp10,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Daerah Rumah Di Golo Lebo Kec. Elar		Rp10,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Belanja TU BTT RKB bagi Korban Kebakaran Rumah di Kel. Kota Ndora, Kec. Borong		Rp10,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Rumah Di Desa Satar Nawang Kec. Congkar		Rp5,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Rumah Di Desa Lenang Kec. Lamba Leda Selatan		Rp5,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
19	Belanja TU BTT RKB untuk Pengelolaan KLB Rabies di Kab. Manggarai Timur		Rp157,741,000.00	Dinas Peternakan
20	Belanja Langsung (LS) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) atas BTT Bantuan Sosial yang Tidak direncanakan dari Aloysius Mawong dan Sebastianus Darwin		Rp11,855,000.00	PEMKESRA(SETDA)
21	Belanja TU BTT RKB Bencana Korban Kebakaran Rumah Di Desa Nanga Puan Kec. Elar Selatan		Rp10,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	Belanja Langsung Pembayaran Pasien Tidak Mampu a.n. Sarbela Bamut Natalia, Frederikus Roga dan Asgarus Masten Gelang TA 2024		Rp15,801,833.00	PEMKESRA(SETDA)
23	Belanja Langsung (LS) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) atas BTT Bantuan Sosial yang Tidak direncanakan dari Stefanus Sudirman Laus, Robert Fredi Rumondor, Said Daeno Pelalo dan Edison Ngawang		Rp67,694,744.00	PEMKESRA(SETDA)
24	Belanja TU BTT untuk penanganan Bencana Alam Akibat Gelombang Ekstrim di Dermaga Borong, Kel. Kota Ndora, Kab. Manggarai Timur		Rp30,000,000.00	PUPR
25	Belanja TU BTT bagi Korban Kebakaran Rumah di Desa Satar Padut Kec. Lamba Leda Utara		Rp26,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	Belanja TU BTT Kegiatan Tanggap Darurat Ruas Jalan Waelengga Lete, Kab. Manggarai Timur TA 2024		Rp66,541,000.00	PUPR
27	Belanja TU BTT bagi Korban Kebakaran Rumah di Desa Mokel, Kec. Kota Komba Utara		Rp21,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Belanja TU BTT bagi korban Kebakaran Rumah di Dusun Pau, Desa Ruan, Kec. Kota Komba, Kab. Manggarai Timur		Rp31,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Total	1,138,860,254.00	Rp653,200,277.00	

SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN			
NO	Uraian	Jenis Pajak	Saldo per 31 Desember 2024
1	Pembayaran PBB Desa Rana Gapang, Mosi Ngaran, Haju Wangi, Wangkar Welu, Deno, Adrianus Patrik dkk Tahun 2024	Pajak Bumi & Bangunan	20,754.415,00
2	Penerimaan Jasa Giro Rekening Penerimaan Pemda Kab. Manggarai Timur TA. 2024	Penerimaan Jasa Giro	6,922,61
3	Penerimaan PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering dari SDI Ngusu, SDN Waru Soda, SDI Luwuk, SDI Pelus Ara, SMPN 8 Kota Komba, SMPN 3 Sambi Rampas, dkk Tahun 2024	Penerimaan Pajak Makan & Minum	7,641,100,00
4	Penerimaan Jasa Giro pada Rekening Pemda	Pendapatan Jasa Bunga Bank Rekening Bank	6,015,92
TOTAL			28,408,453,53

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Perhitungan TU					Perhitungan UP					Total Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024
		SP2D TU	TU Nihil	Sisa TU Yang Harus Disetor	Setor TU Sebelum 31 Desember 2024	Sisa TU Tahun 2024 yang belum disetor	SP2D UP	GU Nihil	Sisa UP Harus Disetor	Setor UP Sebelum 31 Desember 2024	Sisa UP Belum di Setor Tahun 2024	
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5-6	8	9	10 = 8-9	11	12 = 10-11	24 = 7+12
1	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	163,000,000.00	163,000,000.00	-	-	-	360,179,241.00	360,179,241.00	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	257,948,423.00	257,948,423.00	-	-	-	193,618,056.00	159,805,200.00	33,812,856.00	33,812,856.00	-	-
3	UPTD RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	681,968,968.00	662,591,703.00	19,377,265.00	19,377,265.00	-	457,124,928.00	454,267,120.00	2,857,808.00	2,857,808.00	-	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	353,930,465.00	353,442,789.00	487,676.00	487,676.00	-	17,918,210.00	17,881,350.00	36,860.00	36,860.00	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	47,244,854.00	30,231,880.00	17,012,974.00	17,012,974.00	-	-
7	Dinas Sosial	575,428,500.00	575,428,500.00	-	-	-	49,461,326.00	47,872,180.00	1,589,146.00	1,589,146.00	-	-
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	582,555,000.00	582,555,000.00	-	-	-	76,891,650.00	74,253,800.00	2,637,850.00	2,637,850.00	-	-
9	DP2KBP3A	-	-	-	-	-	455,186,483.00	436,699,754.00	18,486,729.00	18,486,729.00	-	-
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	-	-	-	-	-	43,182,385.00	16,168,684.00	27,015,701.00	27,015,701.00	-	-
11	Dinas Pertanian	85,190,000.00	39,780,000.00	45,410,000.00	45,410,000.00	-	26,853,007.00	26,237,210.00	615,797.00	615,797.00	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	374,779,342.00	313,946,120.00	61,433,222.00	61,433,222.00	-	37,641,637.00	37,641,637.00	-	-	-	-
13	Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil	247,466,000.00	247,333,740.00	132,260.00	132,260.00	-	26,888,485.00	4,518,000.00	22,370,485.00	22,370,485.00	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	315,434,700.00	315,434,700.00	-	-	-	67,219,673.00	67,219,673.00	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	149,312,614.00	149,312,614.00	-	-	-	57,674,141.00	57,671,100.00	3,041.00	3,041.00	-	-
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	47,424,000.00	47,424,000.00	-	-	-	22,588,329.00	22,474,000.00	114,329.00	114,329.00	-	-
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	397,530,000.00	397,530,000.00	-	-	-	58,632,045.00	58,632,045.00	-	-	-	-
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	119,896,250.00	99,988,250.00	20,808,000.00	20,808,000.00	-	31,914,085.00	31,502,163.00	11,922.00	11,922.00	-	-
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	157,466,400.00	157,466,400.00	-	-	-	44,721,683.00	42,730,850.00	1,990,833.00	1,990,833.00	-	-
20	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	157,381,501.00	157,302,400.00	79,101.00	79,101.00	-	-
21	Dinas Peternakan	-	-	-	-	-	51,253,620.00	51,253,620.00	-	-	-	-
22	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	200,186,335.00	97,685,950.00	102,500,385.00	102,500,385.00	-	-
23	Sekretariat Daerah	994,179,904.00	974,645,466.00	19,534,438.00	19,534,438.00	-	382,375,748.00	379,964,144.00	2,411,604.00	2,411,604.00	-	-
24	Secretariat DPRD	2,265,015,000.00	1,999,496,475.00	265,518,525.00	265,518,525.00	-	529,965,225.00	519,535,598.00	10,429,627.00	10,429,627.00	-	-
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	171,256,882.00	95,618,420.00	75,638,462.00	75,638,462.00	-	-
26	Badan Keuangan Daerah	367,841,174.00	331,669,013.00	36,172,161.00	36,172,161.00	-	115,654,512.00	114,383,526.00	1,270,986.00	1,270,986.00	-	-
27	Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	520,420,000.00	505,754,860.00	14,665,140.00	14,665,140.00	-	91,178,007.00	91,173,795.00	4,212.00	4,212.00	-	-
28	Inspektorat Daerah	142,991,500.00	141,179,254.00	1,812,246.00	1,812,246.00	-	118,317,155.00	117,563,951.00	753,204.00	753,204.00	-	-
29	Kecamatan Borong	190,886,720.00	124,688,720.00	66,200,000.00	66,200,000.00	-	61,985,335.00	31,649,000.00	30,336,335.00	30,336,335.00	-	-
30	Kecamatan Rana Mese	-	-	-	-	-	13,225,327.00	13,225,080.00	247.00	247.00	-	-
31	Kecamatan Kota Komba	-	-	-	-	-	63,435,310.00	63,434,840.00	470.00	470.00	-	-
32	Kecamatan Lamiba Leda Selatan	328,850,000.00	328,850,000.00	-	-	-	60,199,983.00	57,795,283.00	2,404,700.00	2,404,700.00	-	-
33	Kecamatan Lamiba Leda	5,640,000.00	5,640,000.00	-	-	-	13,434,835.00	13,434,835.00	-	-	-	-
34	Kecamatan Sambi Rampas	-	-	-	-	-	73,205,781.00	73,205,000.00	781.00	781.00	-	-
35	Kecamatan Elar Selatan	180,380,500.00	180,380,500.00	-	-	-	30,971,998.00	30,869,500.00	111,498.00	111,498.00	-	-
36	Kecamatan Lamiba Leda Timur	-	-	-	-	-	12,723,081.00	12,721,740.00	1,341.00	1,341.00	-	-
37	Kecamatan Elar	-	-	-	-	-	24,730,504.00	15,414,000.00	9,316,504.00	9,316,504.00	-	-
38	Kecamatan Kota Komba Utara	21,355,000.00	21,355,000.00	-	-	-	13,349,908.00	12,998,000.00	351,908.00	351,908.00	-	-
39	Kecamatan Congkar	160,949,500.00	160,949,500.00	-	-	-	51,768,670.00	51,768,900.00	1,770.00	1,770.00	-	-
40	Kecamatan Lamiba Leda Utara	-	-	-	-	-	13,465,331.00	13,343,800.00	141,531.00	141,531.00	-	-
41	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	295,250,000.00	295,250,000.00	-	-	-	132,924,375.00	117,102,372.00	15,822,003.00	15,822,003.00	-	-
	Jumlah	9,983,091,960.00	9,431,541,027.00	551,550,933.00	551,550,933.00	-	4,457,549,641.00	4,077,416,641.00	380,133,000.00	380,133,000.00	-	-

RINCIAN KAS KAPITASI

NO	NAMA FKTP	Kas Tunai	Kas Bank	TOTAL KAS
1	Sita		45,379,894.83	45,379,894.83
2	Lempang Paji		20,209,060.81	20,209,060.81
3	Tilir		24,771,451.65	24,771,451.65
4	Wae Lengga		57,061,356.01	57,061,356.01
5	Mukun		104,744,377.19	104,744,377.19
6	Mok	-	55,595,896.14	55,595,896.14
7	Ketang		3,173,116.95	3,173,116.95
8	Mano		121,810,356.50	121,810,356.50
9	Lawir		104,604,272.62	104,604,272.62
10	Colol		30,732,403.87	30,732,403.87
11	Bea Muring		120,780,313.61	120,780,313.61
12	Benteng Jawa		34,639,580.77	34,639,580.77
13	Dampek		45,183,190.36	45,183,190.36
14	Weleng		16,220,818.89	16,220,818.89
15	Pota		73,612,790.74	73,612,790.74
16	Watu Nggong		8,387,467.87	8,387,467.87
17	Lengko Ajang		61,394,975.84	61,394,975.84
18	Elar		99,085,830.70	99,085,830.70
19	Mamba		22,677,691.80	22,677,691.80
20	Wukir		16,022,928.30	16,022,928.30
21	Borong		117,404,990.92	117,404,990.92
22	Lalang		7,093,169.08	7,093,169.08
23	Lebi		9,291,017.89	9,291,017.89
24	Mombok		87,157,524.10	87,157,524.10
25	Wae Nenda		306,947.75	306,947.75
26	Kisol		20,313,265.68	20,313,265.68
27	Lenang		8,797,457.65	8,797,457.65
28	Peot		70,694,235.65	70,694,235.65
29	Runus		14,047,642.85	14,047,642.85
TOTAL			1,401,194,027.02	1,401,194,027.02

RINCIAN KAS SEKOLAH

NO	SEKOLAH	JENIS	KAS DI BANK (BKU)	KAS TUNAI	TOTAL KAS
1	PAUD SKB	TK/PAUD	395,000.00	17,000.00	412,000.00
2	TKN MOK	TK/PAUD	28,500.00	21,500.00	50,000.00
3	TKN KISOL	TK/PAUD	19,000.00	-	19,000.00
4	TKN DAMPEK	TK/PAUD	697,500.00	-	697,500.00
5	TKN LENGKO ELAR	TK/PAUD	-	4,830,000.00	4,830,000.00
6	TKN POTA	TK/PAUD		70,000.00	70,000.00
7	KESETARAAN SKB	TK/PAUD	30,000.00	10,000.00	40,000.00
8	SD INPRES WATU MESE	SD	-	1,000,000.00	1,000,000.00
9	SDN TANJUNG	SD	960,000.00	19,000.00	979,000.00
10	SD INPRES LINDI TANGGO	SD	600.00	-	600.00
11	SD INPRES BAPANG	SD	500,000.00	-	500,000.00
12	SD INPRES CEPIWATU	SD	2,150,000.00	-	2,150,000.00
13	SD INPRES TENDA TUANG	SD	809,490.00	1,000.00	810,490.00
14	SD INPRES RENTUNG BENTENG RIWU	SD	350,000.00	-	350,000.00
15	SD INPRES PEL	SD	630,000.00	-	630,000.00
16	SD NEGERI MBOENG	SD	900,000.00	-	900,000.00
17	SD INPRES LENGKO TOE	SD	1,750,000.00	-	1,750,000.00
18	SD INPRES RANTANG	SD	2,100,000.00	-	2,100,000.00
19	SDN WAE MAMBA	SD	2,800,000.00	-	2,800,000.00
20	SDN LADAR KAONG	SD	200,000.00	-	200,000.00
21	SD INPRES GOLO TAWA	SD	2,304,000.00	-	2,304,000.00
22	SDN SELEK	SD	4,900,000.00	-	4,900,000.00
23	SD INPRES BENTENG SIPI	SD	500,000.00	-	500,000.00
24	SDN LIKAN TELU	SD	500.00	-	500.00
25	SD INPRES TOANG	SD	650,000.00	-	650,000.00
26	SDN TETES TANAH	SD	4,243,000.00	14,773,537.00	19,016,537.00
27	SD INPRES BAJA	SD	300,000.00	-	300,000.00
28	SD INPRES GISING	SD	-	75,000.00	75,000.00
29	SD INPRES DUJUK	SD	400,000.00	-	400,000.00
30	SD INPRES DERUK	SD	360,001.00	-	360,001.00
31	SD INPRES WAE MAMA	SD	700,000.00	-	700,000.00
32	SDN WOKO LEDU	SD	4,200,000.00	-	4,200,000.00
33	SDN LEKO TONG	SD	400,000.00	-	400,000.00
34	SDN LEKO NEKO	SD	2,500,000.00	-	2,500,000.00
35	SDN WATU DERU	SD	2,000.00	-	2,000.00
36	SD INPRES WATU MUNDUNG	SD	1,440,000.00	4,000.00	1,444,000.00
37	SD INPRES RATEMOMANG	SD	22,500,000.00	-	22,500,000.00
38	SD NEGERI LETE	SD	576,000.00	-	576,000.00
39	SD INPRES WATUMINGAN	SD	665,000.00	-	665,000.00
40	SD INPRES MUNDE	SD	-	1,152,000.00	1,152,000.00
41	SDI SATAR MATA	SD	-	900.00	900.00
42	SD INPRES LENGKO TEGOL	SD	750,000.00	-	750,000.00
43	SDI ROKAT	SD	800,000.00	-	800,000.00
44	SD INPRES LUWUK	SD	288,000.00	-	288,000.00
45	SD INPRES BEA NANGA	SD	1,800,000.00	-	1,800,000.00
46	SDN INA HASA	SD	882,000.00	-	882,000.00
47	SDN POCONG	SD	989,800.00	-	989,800.00
48	SDI HELUNG	SD	800,000.00	-	800,000.00
49	SDN BANGKA WERU	SD	3,800.00	-	3,800.00
50	SD NEGERI REJO	SD	4,435,200.00	-	4,435,200.00
51	SDN GOLO NDOL	SD	925,000.00	-	925,000.00
52	SDI NGGOLA	SD	342,000.00	-	342,000.00
53	SDI WATU LANUR	SD	260,000.00	-	260,000.00
54	SD INPRES MAWE	SD	700,000.00	-	700,000.00
55	SD NEGERI WEJANG NENDONG	SD	475,000.00	-	475,000.00
56	SD INPRES DANGKA PARA	SD	2,000,000.00	-	2,000,000.00

NO	SEKOLAH	JENIS	KAS DI BANK (BKU)	KAS TUNAI	TOTAL KAS
57	SDI WAE NUNUNG	SD	1,500,000.00	-	1,500,000.00
58	SDI TANGKUL	SD	494,000.00	-	494,000.00
59	SDI WAE DARA	SD	8,760,100.00	8,000.00	8,768,100.00
60	SDN WANGKUNG	SD	288,000.00	-	288,000.00
61	SD INPRES LENDA	SD	300,000.00	-	300,000.00
62	SDN LENGKO TANA	SD	100.00	-	100.00
63	SDI LOGO	SD	500,000.00	-	500,000.00
64	SD INPRES KEMBANG LALA	SD	-	288,000.00	288,000.00
65	SD INPRES WEA	SD	920.00	-	920.00
66	SDN RANA WOE	SD	700,000.00	-	700,000.00
67	SMP NEGERI 9 BORONG	SMP	400,000.00	-	400,000.00
68	SMP NEGERI 13 BORONG	SMP	400,000.00	-	400,000.00
69	SMP NEGERI 15 BORONG	SMP	250,000.00	620,000.00	870,000.00
70	SMP NEGERI 5 ELAR	SMP	750,000.00	-	750,000.00
71	SMP NEGERI 4 ELAR	SMP	3,180,000.00	530,000.00	3,710,000.00
72	SMP NEGERI 7 ELAR	SMP	500,000.00	-	500,000.00
73	SMP NEGERI SATAP BENTENG SIPI	SMP	275,000.00	-	275,000.00
74	SMP NEGERI 6 KOTA KOMBA	SMP	300,000.00	-	300,000.00
75	SMP SATAP NEGERI WATU MINGAN	SMP	650,000.00	-	650,000.00
76	SMPN SATU ATAP TAGALAGA BURU	SMP	3,600,000.00	-	3,600,000.00
77	SMP NEGERI SATU ATAP MUNDE	SMP	-	122,146.00	122,146.00
78	SMPN SATAP WATU MUNDUNG	SMP	275,000.00	-	275,000.00
79	SMP NEGERI SATAP GOLO UTUR	SMP	250,000.00	-	250,000.00
80	SMP NEGERI 1 LAMBA LEDA	SMP	425,000.00	-	425,000.00
81	SMP NEGERI 6 LAMBA LEDA	SMP	-	9,600.00	9,600.00
82	SMPN SATAP NEMPONG	SMP	200,000.00	-	200,000.00
83	SMPN 8 LAMBA LEDA	SMP	500,000.00	-	500,000.00
84	SMP NEGERI 2 POCO RANAKA	SMP	600,000.00	-	600,000.00
85	SMP NEGERI 4 POCO RANAKA	SMP	-	1,280,000.00	1,280,000.00
86	SMP SATAP NEGERI MONCOK	SMP	540,000.00	-	540,000.00
87	SMP NEGERI SATAP LENTO	SMP	-	267,000.00	267,000.00
88	SMP NEGERI 6 POCO RANAKA	SMP	900,000.00	-	900,000.00
89	SMPN 8 POCO RANAKA	SMP	600,000.00	-	600,000.00
90	SMP NEGERI 5 POCO RANAKA	SMP	800,000.00	-	800,000.00
91	SMPN SATAP TANGKUL	SMP	-	818.00	818.00
92	SMP NEGERI SATAP NANGA LANANG	SMP	1,100,000.00	-	1,100,000.00
93	SMP NEGERI SATAP RAMA	SMP	300,000.00	-	300,000.00
94	SMP NEGERI 3 SAMBI RAMPAS	SMP	-	1,785,000.00	1,785,000.00
95	SMP NEGERI 4 SAMBI RAMPAS	SMP	350,000.00	-	350,000.00
96	SMP NEGERI SATAP KEMBANG LALA	SMP	325,000.00	-	325,000.00
97	SMP NEGERI 5 SAMBI RAMPAS	SMP	1,618,398.00	-	1,618,398.00
98	SMP NEGERI SATAP MENI LONTONG	SMP	-	1,000,000.00	1,000,000.00
99	SMP NEGERI 7 SAMBI RAMPAS	SMP	-	222.00	222.00
	TOTAL KAS		108,042,909.00	27,884,723.00	135,927,632.00

RINCIAN KAS BOK

NO	Nama FKTP	JUMLAH KAS 31 DESEMBER 2024		
		Bank	Tunai	JUMLAH KAS
1	FKTP SITA	196,178,035.00		196,178,035.00
2	FKTP LEMPANG PAJI	147,995,493.00		147,995,493.00
3	FKTP TILIR	303,136,912.00		303,136,912.00
4	FKTP WAE LENGGA	252,462,011.00		252,462,011.00
5	FKTP MUKUN	150,960,902.00		150,960,902.00
6	FKTP MOK	145,275,155.00		145,275,155.00
7	FKTP KETANG	148,756,863.00		148,756,863.00
8	FKTP MANO	194,892,744.00		194,892,744.00
9	FKTP LAWIR	219,489,671.00		219,489,671.00
10	FKTP COLOL	215,914,003.00		215,914,003.00
11	FKTP MURING	149,555,710.00		149,555,710.00
12	FKTP BENTENG JAWA	480,734,315.00		480,734,315.00
13	FKTP DAMPEK	641,100,330.00		641,100,330.00
14	FKTP WELENG	208,673,904.00		208,673,904.00
15	FKTP POTA	243,815,531.00		243,815,531.00
16	FKTP WATU NGGONG	256,935,670.00		256,935,670.00
17	FKTP LENGKO AJANG	164,745,679.00		164,745,679.00
18	FKTP ELAR	242,619,000.00		242,619,000.00
19	FKTP MAMBA	330,778,275.00		330,778,275.00
20	FKTP WUKIR	134,680,828.00		134,680,828.00
21	FKTP BORONG	186,830,045.00		186,830,045.00
22	FKTP LALANG	126,270,389.00		126,270,389.00
23	FKTP LEBI	108,948,815.00		108,948,815.00
24	FKTP MOMBOK	227,564,270.00		227,564,270.00
25	FKTP WAE NENDA	279,435,089.00		279,435,089.00
26	FKTP KISOL	146,820,242.00		146,820,242.00
27	FKTP LENANG	174,960,629.00		174,960,629.00
28	FKTP PEOT	228,736,980.00		228,736,980.00
29	FKTP RUNUS	306,337,423.00		306,337,423.00
	Jumlah	6,614,604,913.00	-	6,614,604,913.00

KAS LAINNYA ATAS UTANG NEGARA

NO	NAMA SEKOLAH	PPH 21	PPH 23	PPN	Non RKUD	TOTAL
1	SD INPRES PEL	-	-	306,161.00		306,161.00
2	SD INPRES NGUSU	-	122,800.00	679,224.00		802,024.00
3	SDN WARU SODA	-	56,400.00	326,135.00		382,535.00
4	SDN LEKO NEKO	-	311,680.00	-		311,680.00
5	SDN RANDANG	-	28,400.00	284,117.00		312,517.00
6	SDI AJANG	-	-	965,120.00		965,120.00
7	SD INPRES RUJUNG	-	50,000.00	-		50,000.00
8	SD INPRES WATU CEPANG	-	-	1,098,810.00		1,098,810.00
9	SDI ROKAT	-	98,880.00	-		98,880.00
10	SDI PELUS ARA	-	345,600.00	2,338,551.00		2,684,151.00
11	SDI WAE DARA	18,000.00	918,056.00	-		936,056.00
12	SDN LENGKO TANA	-	48,000.00	-		48,000.00
13	SD INPRES LENGKO AJANG	-	177,200.00	-		177,200.00
14	SD INPRES WAE REWENG	-	220,800.00	-		220,800.00
15	SMP NEGERI 10 BORONG	218,000.00	124,000.00	-		342,000.00
16	SMP NEGERI 9 ELAR	-	84,000.00	-		84,000.00
17	SMP NEGERI 6 LAMBA LEDA	-	161,200.00	-		161,200.00
18	SMP SATAP NEGERI MONCOK	292,500.00	-	-		292,500.00
19	SMP NEGERI 5 POCO RANAKA	-	272,000.00	-		272,000.00
20	FKTP WAE LENGGA	-	144,000.00	-		144,000.00
21	FKTP MAMBA	952,045.00	434,233.00	-		1,386,278.00
22	FKTP WAE NENDA	321,251.87	-	-		321,251.87
23	FKTP RUNUS	574,726.00	-	-		574,726.00
24	BADAN KEUANGAN DAERAH				12,370,069.33	12,370,069.33
24	BADAN KEUANGAN DAERAH				42,899.90	42,899.90
	Jumlah	2,376,522.87	3,597,249.00	5,998,118.00	12,412,969.23	24,384,859.10

NILAI PIUTANG DAN PENYISIHAN PAJAK HOTEL
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

NO	TAHUN	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Nilai Piutang	PENYISIHAN
		0 sd 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 - 5 tahun	5 Tahun		
1	2016			-	1,505,000.00	1,505,000.00	1,505,000.00
2	2022		-			-	-
3	2023	-	-	-	-	-	-
4	2024	4,075,000.00				4,075,000.00	20,375.00
Jumlah		4,075,000.00	-	-	1,505,000.00	5,580,000.00	1,525,375.00

NILAI PIUTANG DAN PENYISIHAN PAJAK RESTORAN / RUMAH MAKAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

NO	TAHUN	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Nilai Piutang	PENYISIHAN
		0 sd 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 - 5 tahun	5 Tahun		
1	2013	-	-	-	8,060,000.00	8,060,000.00	8,060,000.00
2	2014	-	-	-	21,605,000.00	21,605,000.00	21,605,000.00
3	2015	-	-	-	14,300,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00
4	2019	-	-	-	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
5	2020	-	-	150,000.00	-	150,000.00	75,000.00
6	2021	-	-	2,625,000.00	-	2,625,000.00	1,312,500.00
7	2022	-	-	422,000.00	-	422,000.00	211,000.00
8	2023	-	4,310,000.00	-	-	4,310,000.00	431,000.00
9	2024	13,254,300.00			-	13,254,300.00	66,271.50
Jumlah		13,254,300.00	4,310,000.00	3,197,000.00	46,065,000.00	66,826,300.00	48,160,771.50

NILAI PIUTANG DAN PENYISIHAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

NO	TAHUN	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Nilai Piutang	PENYISIHAN
		0 sd 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 - 5 tahun	5 Tahun		
1	2011	-	-	-	22,958,083.15	22,958,083.15	22,958,083.15
2	2012	-	-	-	217,051,035.19	217,051,035.19	217,051,035.19
3	2013	-	-	-	35,475,541.23	35,475,541.23	35,475,541.23
4	2014	-	-	-	38,212,853.00	38,212,853.00	38,212,853.00
5	2015			-	2,941,000.00	2,941,000.00	2,941,000.00
6	2016	-	-	-	114,545,000.00	114,545,000.00	114,545,000.00
7	2019	-	-	-	281,093,000.00	281,093,000.00	281,093,000.00
8	2020	-	-	566,261,000.00	-	566,261,000.00	283,130,500.00
9	2021	-		29,239,000.00	-	29,239,000.00	14,619,500.00
10	2022		-	69,272,000.00	-	69,272,000.00	34,636,000.00
11	2023	-	55,876,475.00	-	-	55,876,475.00	5,587,647.50
12	2024	720,846,804.25				720,846,804.25	3,604,234.02
JUMLAH		720,846,804.25	55,876,475.00	664,772,000.00	712,276,512.57	2,153,771,791.82	1,053,854,394.09

NILAI PIUTANG DAN PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

NO	TAHUN	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Nilai Piutang	PENYISIHAN
		0 sd 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 - 5 tahun	5 Tahun		
1	2011	-	-	-	140,311,085.26	140,311,085.26	140,311,085.26
2	2012	-	-	-	453,966,733.00	453,966,733.00	453,966,733.00
3	2013	-	-	-	426,401,388.00	426,401,388.00	426,401,388.00
4	2014	-	-	-	632,091,803.00	632,091,803.00	632,091,803.00
5	2015	-	-	-	586,377,854.00	586,377,854.00	586,377,854.00
6	2016	-	-	-	322,136,189.00	322,136,189.00	322,136,189.00
7	2017	-	-	-	343,190,457.00	343,190,457.00	343,190,457.00
8	2018	-	-	-	522,254,197.00	522,254,197.00	522,254,197.00
9	2019	-	-	-	339,069,914.00	339,069,914.00	339,069,914.00
10	2020	-	-	388,853,239.00	-	388,853,239.00	194,426,619.50
11	2021	-	-	658,876,708.00	-	658,876,708.00	329,438,354.00
12	2022	-	-	488,400,404.60	-	488,400,404.60	244,200,202.30
13	2023	-	1,258,379,188.20	-	-	1,258,379,188.20	125,837,918.82
13	2024	1,619,324,030.00	-	-	-	1,619,324,030.00	8,096,620.15
JUMLAH		1,619,324,030.00	1,258,379,188.20	1,536,130,351.60	3,765,799,620.26	8,179,633,190.06	4,667,799,335.03

NILAI PIUTANG DAN PENYISIHAN PAJAK AIR TANAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

NO	TAHUN	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Nilai Piutang	PENYISIHAN
		0 sd 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 - 5 tahun	5 Tahun		
1	2017	-	-	-	130,000.00	130,000.00	130,000.00
2	2018	-	-	-	157,000.00	157,000.00	157,000.00
3	2019	-	-	-	182,000.00	182,000.00	182,000.00
4	2020	-	-	306,000.00	-	306,000.00	153,000.00
5	2021	-	-	248,000.00	-	248,000.00	124,000.00
6	2022	-	-	287,000.00	-	287,000.00	143,500.00
7	2023	-	182,000.00	-	-	182,000.00	18,200.00
8	2024	420,000.00	-	-	-	420,000.00	2,100.00
JUMLAH		420,000.00	182,000.00	841,000.00	469,000.00	1,912,000.00	909,800.00

NILAI PIUTANG DAN PENYISIHAN PAJAK REKLAME
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

NO	TAHUN	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Nilai Piutang	PENYISIHAN
		0 sd 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 - 5 tahun	5 Tahun		
1	2021	-		-	130,000.00	130,000.00	130,000.00
2	2022	-	-	-	-	-	-
3	2023	-	-	-	-	-	-
4	2024	6,833,025.00	-	-	-	6,833,025.00	34,165.13
JUMLAH		6,833,025.00	-	-	130,000.00	6,963,025.00	164,165.13

NILAI PIUTANG DAN PENYISIHAN PAJAK HIBURAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

NO	TAHUN	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Nilai Piutang	PENYISIHAN
		0 sd 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 - 5 tahun	5 Tahun		
1	2023	-	1,150,000.00	-	-	1,150,000.00	115,000.00
2	2024	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	1,150,000.00	-	-	1,150,000.00	115,000.00

NILAI PIUTANG DAN PENYISIHAN RETRIBUSI PASAR
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

NO	TAHUN	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Nilai Piutang	PENYISIHAN
		0 sd 3 Bulan	1 sd 3 Bulan	3 sd 12 Bulan	12 Bulan		
1	2012	-	-	-	64,202,008.00	64,202,008.00	64,202,008.00
2	2013	-	-	-	81,779,740.00	81,779,740.00	81,779,740.00
3	2014	-	-	-	107,013,620.00	107,013,620.00	107,013,620.00
4	2015	-	-	-	87,048,640.00	87,048,640.00	87,048,640.00
5	2016	-	-	-	39,120,860.00	39,120,860.00	39,120,860.00
6	2017	-	-	-	57,848,040.00	57,848,040.00	57,848,040.00
7	2018	-	-	-	122,573,123.00	122,573,123.00	122,573,123.00
8	2019	-	-	-	11,640,000.00	11,640,000.00	11,640,000.00
9	2020	-	-	-	12,566,275.00	12,566,275.00	12,566,275.00
10	2021	-	-	-	60,627,000.00	60,627,000.00	60,627,000.00
11	2022	-	-	-	22,246,500.00	22,246,500.00	22,246,500.00
12	2023	-	-	-	18,020,000.00	18,020,000.00	18,020,000.00
13	2024	20,184,000.00	-	-	-	20,184,000.00	10,092,000.00
Jumlah		20,184,000.00	-	-	684,685,806.00	704,869,806.00	694,777,806.00

NILAI PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH BLUD SPAM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

NO	IKK	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Nilai Piutang	Penyisihan
		0 sd 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 - 3 tahun	>3 Tahun		
1	Borong	128,727,000.00	53,587,500.00	23,799,750.00	1,409,139,950.00	1,615,254,200.00	1,427,042,210.00
2	Elar	10,330,750.00	974,500.00	402,000.00	3,668,250.00	15,375,500.00	4,018,353.75
3	Kisol	2,044,250.00	792,750.00	412,500.00	218,524,850.00	221,774,350.00	218,820,596.25
4	Lawir	5,168,500.00	1,491,250.00	381,000.00	142,425,950.00	149,466,700.00	142,791,417.50
5	Mano	22,830,750.00	9,525,750.00	4,027,500.00	747,225,300.00	783,609,300.00	750,305,778.75
6	Mawe	-	-	-	94,040,150.00	94,040,150.00	94,040,150.00
7	Mukun	-	-	-	155,837,897.00	155,837,897.00	155,837,897.00
8	Pota	-	-	-	782,114,350.00	782,114,350.00	782,114,350.00
9	Rana Mese	13,062,500.00	6,561,500.00	3,688,500.00	109,332,900.00	132,645,400.00	111,898,612.50
10	Wae Lengga	-	-	-	209,896,131.00	209,896,131.00	209,896,131.00
11	Watunggong	28,421,000.00	6,646,750.00	1,565,000.00	522,503,300.00	559,136,050.00	524,092,580.00
12	Wukir	4,996,750.00	2,374,500.00	501,250.00	3,963,750.00	11,836,250.00	4,476,808.75
13	Dampek	2,858,750.00	366,000.00	303,500.00	2,805,500.00	6,333,750.00	3,008,143.75
Jumlah		218,440,250.00	82,320,500.00	35,081,000.00	4,401,478,278.00	4,737,320,028.00	4,428,343,029.25

NILAI PIUTANG DAN PENYISIHAN UPTD RSUD BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

NO	TAHUN	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Nilai Piutang	Penyisihan
		0 sd 1 bulan	0 sd 1 bulan	0 sd 1 bulan	>1 bulan		
1	2023				285,434,900.00	285,434,900.00	285,434,900.00
2	2024	379,123,900.00				379,123,900.00	37,912,390.00
JUMLAH		379,123,900.00		-	-	664,558,800.00	323,347,290.00

**NILAI PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024**

NO	Keterangan	Tahun	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Nilai Piutang	Penyisihan
			0 sd 1 bulan	> 1 Bulan Tagihan 1	> 1 Bulan Tagihan 2	> 1 Bulan Tagihan 3		
1	Koreksi atas Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah atas temuan kurang volume Gedung Bangunan	2024	114,645,193.32				114,645,193.32	573,225.97
2	Koreksi atas Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah atas temuan kurang volume Jalan Irigasi dan Jaringan	2024	343,272,370.76				343,272,370.76	1,716,361.85
3	Koreksi atas Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah atas temuan Kurang Volume konstruksi dalam pengerejan atas Belanja Modal Gedung Bangunan	2024	10,384,585.05				10,384,585.05	51,922.93
4	Koreksi atas Penetapan Denda Keterlambatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2024	2024	142,595,716.86				142,595,716.86	712,978.58
5	Koreksi atas 2 Paket Pekerjaan Belanja Modal GB yang di PHK pada Dinas PPO dan Jaminan Pelaksanaan Belum Dicairkan	2024	52,492,560.00				52,492,560.00	262,462.80
JUMLAH			663,390,425.99	-	-	-	663,390,425.99	3,316,952.13

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DATA PERSEDIAAN KEDALUARSA/USANG PER 31 DESEMBER 2024

No	IFK/PUSKESMAS	NAMA OBAT/BMHP	SATUAN	SUMBER OBAT	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	TANGGAL ED		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	GFK	Acyclovir krim 5%	Tube	APBD	400	Rp 3.977	Rp 1.590.600	Oct-20		
		Acyclovir 400 mg	Tablet	APBD	20.600	Rp 473	Rp 9.743.800	Nov-22		
		Albendazol 400 mg	Tablet	Program	70.300	Rp 380	Rp 26.714.000	Apr-23		
		Albendazol syrup	Botol	Program	5.243	Rp 4.300	Rp 22.544.900	Apr-23		
		Albendazole Syr	Botol	Program	3.480	Rp 5.000	Rp 17.400.000	Mar-21		
		Cefadroxil 500 mg	Kapsul	APBD	31.800	Rp 417	Rp 13.177.200	Jul-23		
		Cefadroxil Syr Kering	Botol	APBD	40	Rp 6.215	Rp 246.600	Mei 2021		
		Cefadroxil syrup	Botol	APBD	160	Rp 4.370	Rp 699.200	Jul-23		
		Cefixim	Tablet	APBD	200	Rp 2.490	Rp 498.000	Mei 2021		
		Cefixim Syrup	Botol	APBD	100	Rp 5.678	Rp 567.800	Maret 2022		
		Cotrimoksasole 480 mg	Tablet	APBD	304.800	Rp 130	Rp 39.598.000	Sep-23		
		Ergotiamin tartrat	Tablet	APBD	44.700	Rp 372	Rp 16.619.460	Sep-23		
		Erlamyctein (cloramfenicol tetes mata)	Botol	APBD	408	Rp 11.000	Rp 4.488.000	Sep-19		
		Erlamyctein (cloramfenicol tetes Telinga)	Botol	APBD	1.008	Rp 8.498	Rp 8.565.480	Jan-20		
		Etil Klorida	Botol	APBD	12	Rp 143.000	Rp 1.716.000	Desember 2022		
		Fenobarbital Injeksi	Ampul	APBD	90	Rp 1.700	Rp 153.000	Desember 2021		
		Fitomenadion Injeksi	Ampul	APBD	6.390	Rp 1.595	Rp 10.192.050	Feb-24		
		Furosemide 40 mg	Tablet	APBD	8.300	Rp 94	Rp 780.200	Januari 2022		
		Gentamisin Tetes Mata	Botol	APBD	744	Rp 5.315	Rp 3.954.360	Mei 2022		
		H202	Botol	APBD	55	Rp 32.500	Rp 1.787.500	Sep-20		
		Haloperidol Injeksi	Ampul	Program	400	Rp 97.500	Rp 39.000.000	Jan-20		
		Haloperidol	Tablet	APBD	3.500	Rp 63	Rp 220.500	Aug-18		
		Haloperidol decanat	Ampul	APBD	280	Rp 109.000	Rp 30.520.000	Desember 2022		
		Haloperidol decanate	box @5Ampul	Program	18	Rp 545.000	Rp 9.810.000	Mar-23		
		Haloperidol decanoate	box @5Ampul	Program	36	Rp 545.000	Rp 19.620.000	Oct-23		
		Haloperidol injeksi 5 mg/ml	Ampul	Program	485	Rp 1.190	Rp 577.150	Juli 2022		
		HCL 0,1 N	Botol	APBD	75	Rp 31.460	Rp 2.359.500	Jul-20		
		Hidrokortisone Krim	Tube	APBD	704	Rp 2.846	Rp 2.003.584	Juni 2021		
		Hiper RAB	Ampul	Program	6	Rp 10.900.000	Rp 65.400.000	Dec-20		
		Ibuprofen Syrup 100 mg/ 5 ml	Botol	APBD	5.719	Rp 3.048	Rp 17.431.512	Juni 2022		
		Ibuprofen Syrup 200 mg/ 5 ml	Botol	APBD	162	Rp 5.939	Rp 962.118	Juli 2021		
		Infusion Set Anak	pcs	APBD	950	Rp 4.375	Rp 4.156.250	Agustus 2022		
		ISDN	Tablet	APBD	40.600	Rp 103	Rp 4.181.800	Mar-23		
		Iososorbid Dinitrate	Tablet	APBD	22.000	Rp 270	Rp 5.930.100	Sep-21		
		Iososorbid Dinitrate	Tablet	APBD	6.700	Rp 253	Rp 1.695.100	Maret 2022		
		IV Catheter no. 18	pcs	APBD	650	Rp 7.194	Rp 4.676.100	Apr-21		
		IV Catheter no. 18	pcs	APBD	900	Rp 7.194	Rp 6.474.600	Agustus 2021		
		Kalium Diklofenak	Tablet	APBD	14.820	Rp 1.056	Rp 15.649.920	Mar-23		
		Katheter Karet Nelaton No. 14	Pcs	APBD	126	Rp 9.933	Rp 1.251.558	Jun-18		
		Ketokonazole krim	Tube	APBD	2.325	Rp 2.499	Rp 5.810.175	Juni 2021		
		Ketokonazole Krim	APBD		1.023	Rp 280	Rp 286.440	Mar-23		
		Ketokonazole tablet	Tablet	APBD	77.400	Rp 280	Rp 21.672.000	Jul-23		
		Ketorolac Injeksi	Ampul	APBD	1.205	Rp 1.444	Rp 1.740.020	Sep-20		
		Kloramfenikol Salep Mata	Tube	APBD	696	Rp 2.305	Rp 1.604.280	Maret 2021		
		Kloramfenikol Salep Mata	Tube	APBD	2.136	Rp 2.305	Rp 4.923.480	Maret 2022		
		Kodein Tablet	Tablet	APBD	1.000	Rp 687	Rp 687.000	Jul-20		
		Lar. Rees Ecker	Botol	APBD	14	Rp 151.130	Rp 2.115.820	Nov-20		
		Lar.Benedict	Botol	APBD	11	Rp 96.250	Rp 1.058.750	Jul-20		
		Lar.Na.Citrat	Botol	APBD	9	Rp 165.200	Rp 1.486.800	Nov-20		
		Lantau HCL 0,1 N	Botol	APBD	97	Rp 13.728	Rp 1.331.616	Juni 2021		
		Loperamid	Tablet	APBD	700	Rp 138	Rp 95.250	Sep-18		
		Lysol	Botol	APBD	60	Rp 53.300	Rp 3.198.000	Apr-20		
		Lysol	Botol	APBD	159	Rp 53.300	Rp 8.474.700	Jun-20		
		Mdt Comby Adult	Blister	Program	6	Rp 31.760	Rp 190.560	Aug-20		
		MR	Ampul	Program	917	Rp 130.000	Rp 119.210.000	Mar-20		
		NaCl 0.9%	Botol	APBD	11.580	Rp 6.963	Rp 80.628.382	May-23		
		Natrium Bikarbonat Injik	Vial	APBD	120	Rp 7.523	Rp 902.760	Oct-20		
		Natrium Diklofenak	Tablet	APBD	300	Rp 160	Rp 48.000	Dec-20		
		Nifedipin	Tablet	APBD	1.100	Rp 135	Rp 146.500	Aug-20		
		Nystatin 100.000 IU	Tablet	APBD	7.900	Rp 747	Rp 5.901.300	Juli 2021		
		Nystatin 100.000 IU	Tablet	APBD	2.100	Rp 747	Rp 1.568.700	Mei 2022		
		OAT Anak	Paket	APBD	4	Rp 203.259	Rp 813.036	Aug-20		
		Obat Batuk Hitam	Botol	APBD	256	Rp 17.160	Rp 4.392.960	Desember 2022		
		Oftoxacin	Tablet	APBD	3.100	Rp 534	Rp 1.655.400	Mei 2022		
		Oksiterasikin Salep Mata	Tube	APBD	920	Rp 2.774	Rp 2.552.080	Juli 2022		
		Ondancentron	Tablet	APBD	760	Rp 8.791	Rp 6.681.008	Jul-23		
		Oxytocin Inj	Ampul	APBD	800	Rp 1.900	Rp 1.520.000	Apr-20		
		Pheno Glycerol	Tube	APBD	918	Rp 2.500	Rp 2.295.000	Jun-19		
		Phytomenadion tablet	Tablet	APBD	2.200	Rp 847	Rp 1.863.400	Oktober 2021		
		Pirantel Pamoat	Tablet	APBD	8.400	Rp 334	Rp 2.805.600	Jul-20		
		Tabung EDTA	Pcs	APBD	7.000	Rp 1.699	Rp 11.893.000	Feb-20		
		Tabung Tutup Ungu	pak	APBD	28	Rp 110.000	Rp 3.080.000	Sep-23		
		Tabung Tutup Merah	Pak	APBD	15	Rp 100.000	Rp 1.500.000	Mar-23		
		Tramadol	Tablet	APBD	48.000	Rp 105	Rp 5.040.000	Jun-23		
		Trihexysphenidil	Tab	Program	900	Rp 85	Rp 76.500	May-20		
		Urine Bag	pcs	APBD	850	Rp 3.750	Rp 3.187.500	Juni 2021		
		Wing Needle 23 G	Pcs	APBD	1.010	Rp 3.000	Rp 3.030.000	Mar-18		
		Wing Needle 25 G	Pcs	APBD	1.000	Rp 8.880	Rp 8.880.000	Jun-18		
		Yodium Povidone 60 ml	Botol	APBD	389	Rp 4.810	Rp 1.871.090	Maret 2021		
		Zield Nelsen	Paket	Program	881	Rp 116.875	Rp 102.966.875	Jul-18		
		Zirk	Tablet	APBD	402	Rp 644	Rp 256.888	Aug-20		
		2	Puskesmas Lengko Ajang	Acyclovir	Tab	APBD	300	Rp 465	Rp 139.500	Jun-20
				Acyclovir Salf	Tube	JKN	30	Rp 3.345	Rp 100.350	Sep-18
				Acyclovir Salf	Tube	JKN	17	Rp 3.345	Rp 56.865	Mar-19
				Adalat Oros	Tab	JKN	900	Rp 3.700	Rp 3.330.000	Dec-20
				Aminofilin Tablet	Tab	APBD	390	Rp 107	Rp 41.730	May-20
				Amiodipin	Tab	APBD	240	Rp 83	Rp 19.920	Jun-19
				Amoxicillin Syl	Botol	APBD	102	Rp 1.993	Rp 203.286	Aug-19

	Antasida 500 Mg	Tab	APBD	100	Rp 85	Rp 8,500	May-17	
	Antasida 500 Mg	Tab	APBD	300	Rp 85	Rp 25,500	Jul-18	
	Asam Folat	Tab	JKN	3,300	Rp 68	Rp 224,400	Sep-19	
	Betadine	Botol	APBD	24	Rp 23,400	Rp 561,600	Apr-20	
	Camabion	Tab	APBD	1,890	Rp 445	Rp 841,050	Mar-19	
	Captopril 25 Mg	Tab	APBD	800	Rp 171	Rp 136,400	Jun-19	
	Captopril 50 Mg	Tablet	JKN	50	Rp 141	Rp 7,050	Mar-21	
	Catgut 2/0	Tab	Buffer	21	Rp 3,425	Rp 71,915	Feb-18	
	Cotrimoksasol Suspensi	Botol	APBD	53	Rp 2,155	Rp 114,215	May-20	
	Dex. 10%	Botol	APBD	20	Rp 7,500	Rp 150,000	Jan-21	
	Dexametasone Injeksi	Ampul	APBD	60	Rp 1,725	Rp 103,473	Nov-17	
	DHP firmal	tablet	Program	23	Rp 2,160	Rp 49,680	Mar-21	
	Diazepam 5 Mg	Tab	APBD	102	Rp 110	Rp 11,220	Feb-21	
	Difenhidramin	Ampul	APBD	50	Rp 1,321	Rp 66,050	Jun-20	
	Difenhidramin Injeksi	Ampul	APBD	30	Rp 1,321	Rp 39,630	May-17	
	Difenhidramin Injeksi	Ampul	APBD	30	Rp 1,321	Rp 39,630	Mar-21	
	Dmp	Tab	APBD	400	Rp 115	Rp 46,000	Aug-17	
	Domperidon	Botol	APBD	11	Rp 3,105	Rp 34,155	Jun-20	
	Domperidone	tablet	APBD	90	Rp 90	Rp 8,100	Mar-21	
	Epinefrin	Ampul	APBD	75	Rp 2,486	Rp 186,450	Sep-20	
	Epinefrin	Ampul	APBD	97	Rp 2,486	Rp 241,142	Jan-21	
	Etil Klorida	Botol	APBD	3	Rp 275,000	Rp 825,000	Mar-17	
	Fenobarbital 30 Mg	Tab	APBD	200	Rp 214	Rp 42,800	Jul-19	
	Fenol Glicerol	Botol	JKN	20	Rp 2,355	Rp 47,100	Feb-20	
	Glukoprotein Tes	Strip	JKN	48	Rp 1,306	Rp 62,688	Sep-20	
	Glukosa 5%	Botol	APBD	60	Rp 7,500	Rp 450,000	May-20	
	Infus Set Anak	Pcs	APBD	170	Rp 5,600	Rp 952,000	Mar-18	
	Ketokonazole 200 Mg	Tab	APBD	500	Rp 322	Rp 161,000	Nov-17	
	Kloramfenikol 250 Mg	Tab	APBD	3,000	Rp 272	Rp 816,000	Sep-18	
	Kloramfenikol Tetes Telinga	Tube	APBD	7	Rp 8,498	Rp 59,483	Jan-20	
	Kotrimoksasol Suspensi	Botol	APBD	3	Rp 2,155	Rp 6,465	Jul-19	
	Loperamid	Tab	APBD	20	Rp 95	Rp 1,900	Jul-20	
	Metergin Injeksi	Ampul	JKN	40	Rp 8,000	Rp 320,000	Jan-18	
	Metergin Injeksi	Ampul	APBD	88	Rp 3,520	Rp 309,760	Apr-20	
	Metformin 850 Mg	Tab	JKN	1,000	Rp 168	Rp 168,000	Apr-20	
	Mettlergeometrin Injeksi	Ampul	APBD	98	Rp 3,696	Rp 362,208	Nov-19	
	Mgs04	Vial	APBD	10	Rp 3,328	Rp 33,280	Jun-20	
	Mineral Mix	Bungkus	APBD	196	Rp 2,920	Rp 572,320	Mar-17	
	Natrium Dicklofenak 50 Mg	Tab	APBD	50	Rp 160	Rp 8,000	Dec-20	
	Nifedipine	Tab	APBD	300	Rp 135	Rp 40,500	Aug-20	
	Nistatin Tab Vaginal	Tab	JKN	543	Rp 725	Rp 393,539	Nov-18	
	Oksitosin	Ampul	JKN	259	Rp 1,900	Rp 492,100	Aug-20	
	Omeprazole	Caps	APBD	180	Rp 150	Rp 27,000	Aug-20	
	Paracetamol Syr	Botol	APBD	19	Rp 1,252	Rp 23,788	Oct-19	
	Pirantel	Tab	APBD	500	Rp 334	Rp 167,000	Jul-20	
	Pirantel Pamoat 125 Mg	Tab	APBD	88	Rp 334	Rp 29,392	May-18	
	Povidon Iodine 60 ml	botol	APBD	40	Rp 4,810	Rp 192,400	Mar-21	
	Ranitidine	Ampul	APBD	14	Rp 204	Rp 2,849	Jul-20	
	Rdt	Pcs	APBD	40	Rp 5,271	Rp 210,840	Dec-17	
	Retinol Merah	Kapsul	APBD	150	Rp 519	Rp 77,850	Jul-18	
	Ringer Laktat	Botol	APBD	6	Rp 6,969	Rp 41,813	Jun-18	
	Sinvastatin	Tab	JKN	220	Rp 466	Rp 102,520	May-20	
	Supernoid	Suppo	JKN	42	Rp 4,646	Rp 195,132	Dec-18	
	Tld	Tab	APBD	2,280	Rp 445	Rp 1,014,600	Sep-20	
	Uji Dengue	Strip	JKN	20	Rp 36,286	Rp 725,720	Jun-20	
	Uric Acid Test	Strip	JKN	50	Rp 6,862	Rp 343,100	Feb-21	
	Usg Gel	Botol	JKN	84	Rp 16,359	Rp 1,374,156	Jan-20	
	Vit K Injeksi	Ampul	APBD	26	Rp 4,595	Rp 119,470	Sep-18	
	Vit K Injeksi	Ampul	APBD	30	Rp 4,595	Rp 137,850	Nov-19	
	Vit K Neo	Ampul	JKN	120	Rp 22,000	Rp 2,640,000	Jul-17	
	Zink	Tab	APBD	1,070	Rp 644	Rp 689,080	Aug-20	
3	Puskesmas Benteng Jawa	Acyclovir 200 Mg	Tablet	APBD	110	Rp 287	Rp 31,570	Jun-20
	Albendazole	Tablet	APBD	3,200	Rp 271	Rp 867,200	Jun-18	
	Ambrroxol 30 Mg	Tablet	APBD	74	Rp 127	Rp 9,361	Jun-20	
	Aminophylline 200 Mg	Tablet	APBD	90	Rp 107	Rp 9,630	May-20	
	Aminophylline Injeksi	Ampul	APBD	30	Rp 3,520	Rp 105,600	Aug-18	
	Amiodopine 5 Mg	Tablet	APBD	300	Rp 83	Rp 24,900	Jun-19	
	Amoxicillin 250 Mg	Kaplet	APBD	670	Rp 212	Rp 142,040	Jun-20	
	Amoxicillin 500 Mg	Kaplet	APBD	790	Rp 192	Rp 151,680	Jun-20	
	Antasida Doen	Tablet	JKN	2,590	Rp 85	Rp 220,150	Juli 2018	
	Aqua Pro Injeksi	Botol	APBD	12	Rp 2,860	Rp 34,320	Nov-17	
	Asam Folat	Tablet	APBD	100	Rp 81	Rp 8,100	Mar-21	
	Bedak Salicyl	Klk	APBD	62	Rp 1,450	Rp 89,900	Okt 2018	
	Betamethazone Zalf	Tube	JKN	67	Rp 1,520	Rp 101,840	Oct-20	
	Captopril 25 Mg	Tablet	APBD	400	Rp 94	Rp 37,800	Jun-19	
	Catguth Cromic 2/0	Pcs	APBD	24	Rp 3,425	Rp 82,210	Nov-17	
	Catguth Cromic 2/0	Pcs	JKN	14	Rp 3,425	Rp 47,956	Feb-18	
	Cimetidine 200 Mg	Tablet	APBD	260	Rp 231	Rp 60,060	Jul-18	
	Cloramphenicol Kaps 250 Mg	Kapsul	APBD	1,770	Rp 272	Rp 481,440	Sep-18	
	Cloramphenicol Sip Mata 1 %	Tube	APBD	24	Rp 2,160	Rp 51,840	May-18	
	Cotrimoxazole Syr	Botol	APBD	113	Rp 2,155	Rp 243,515	Jul-19	
	Cotrimoxazole Syr	Botol	APBD	140	Rp 2,155	Rp 301,700	May-20	
	Dexa Injeksi	Ampul	APBD	130	Rp 1,725	Rp 224,192	Jan-19	
	Dexamethazone 0,5 Mg	Tablet	APBD	900	Rp 37	Rp 33,300	Aug-18	
	Dexamethazone Injeksi	Ampul	APBD	56	Rp 1,725	Rp 96,575	Dec-17	
	Diazepam Injeksi	Ampul	APBD	4	Rp 2,150	Rp 8,600	Jun-18	
	Diphendramin Injeksi	Ampul	APBD	82	Rp 1,329	Rp 108,978	May-20	
	Domperidone	Tablet	APBD	260	Rp 90	Rp 23,400	Apr-20	
	Domperidone	Tablet	APBD	700	Rp 90	Rp 63,000	Mar-21	
	Dulcolax	Tablet	APBD	2,372	Rp 6,000	Rp 14,232,000	Nov-18	
	Epinefrin Injeksi	Ampul	JKN	73	Rp 2,486	Rp 181,478	Mar-20	
	Erlamyctein Tetes Mata	Botol	APBD	16	Rp 11,000	Rp 176,000	Sep-19	
	Erlamyctein Tetes Telinga	Botol	APBD	27	Rp 8,498	Rp 229,433	Jan-20	
	Furosemide	Tablet	JKN	2,075	Rp 94	Rp 195,050	May-20	

		Glucosa 10 %	Flakon	APBD	14	Rp 7.500	Rp 105.000	Jan-21
		Glukosa 5 %	Botol	APBD	15	Rp 7.500	Rp 112.500	May-19
		Glukosa 5 %	Botol	APBD	15	Rp 7.500	Rp 112.500	May-20
		Griseovulvin 125 Mg	Tablet	APBD	1.000	Rp 283	Rp 283.000	Jul-20
		Infuset 20 Drops Perl	Pcs	APBD	91	Rp 5.400	Rp 491.400	Mar-18
		Ketorolac Inj	Ampul	APBD	168	Rp 1.444	Rp 242.592	Sep-20
		Kotrimoxazole Pediatrik	Tablet	APBD	20	Rp 135	Rp 2.700	Oct-18
		Lidocain Injeksi	Ampul	APBD	119	Rp 2.424	Rp 288.456	Jun-20
		Lisol	Botol	APBD	7	Rp 53.300	Rp 373.100	Apr-20
		Loperamide	Tablet	JKN	1.900	Rp 138	Rp 261.250	Sep-19
		Loperamide Hcl 2 Mg	Tablet	APBD	500	Rp 138	Rp 68.750	Jul-20
		Metformin 500 Mg	Tablet	APBD	75	Rp 115	Rp 8.625	Aug-17
		Metformin 500 Mg	Tablet	APBD	1.280	Rp 115	Rp 147.200	Mar-20
		Metylgerometrin Injeksi	Ampul	JKN	70	Rp 3.699	Rp 258.720	Apr-20
		Mgso4 25 Ml 20 %	Botol	APBD	4	Rp 3.328	Rp 13.312	Sep-17
		Mineral Mix	Sachet	APBD	80	Rp 2.920	Rp 233.600	Aug-20
		Nifedipine 10 Mg	Tablet	APBD	260	Rp 135	Rp 35.100	Aug-20
		Omeprazole 20 Mg	Kapsul	APBD	100	Rp 150	Rp 15.000	Aug-20
		Oralt	Bnrgks	APBD	14	Rp 600	Rp 8.393	Nov-17
		Oxitosin Injeksi	Ampul	APBD	93	Rp 1.900	Rp 176.700	Apr-18
		Oxitosin Injeksi	Ampul	APBD	6	Rp 1.900	Rp 11.400	Oct-19
		Oxitosin Injeksi	Ampul	JKN	110	Rp 1.900	Rp 209.000	Apr-20
		Paracetamol Syr	Botol	APBD	20	Rp 1.260	Rp 25.200	Oct-19
		Phenobarbital	Tablet	APBD	100	Rp 214	Rp 21.400	Jul-19
		Phytomenadin Inj	Ampul	APBD	187	Rp 4.980	Rp 931.260	Aug-20
		Phytomenadon Injeksi	Ampul	APBD	30	Rp 4.980	Rp 149.400	Jul-19
		Povidon 300 Ml	Botol	APBD	24	Rp 23.400	Rp 561.600	Apr-20
		Povidone Iodine 300 Ml	Botol	APBD	5	Rp 23.400	Rp 117.000	Sep-20
		Propylthiouracil	Tablet	APBD	86	Rp 324	Rp 27.864	Sep-18
		Pyrantel Pamoat 125 Mg	Tablet	APBD	82	Rp 334	Rp 27.388	Aug-18
		Pyrantel Pamoat 125 Mg	Tablet	APBD	100	Rp 334	Rp 33.400	Jun-19
		Pyrantel Pamoat 125 Mg	Tablet	APBD	16	Rp 334	Rp 5.344	Jul-20
		Ranitidine Injek	Ampul	APBD	9	Rp 1.540	Rp 13.860	Jul-20
		Ringer Laktat	Botol	APBD	28	Rp 6.969	Rp 195.129	May-18
		Ringer Laktat	Botol	APBD	9	Rp 6.969	Rp 62.720	Jun-18
		Tablet Tambah Darah	Tablet	APBD	450	Rp 445	Rp 200.250	Sep-20
		Tablet Tambah Darah Neo	Tablet	APBD	1.000	Rp 445	Rp 445.000	Jun-19
		Ultrasoris Gel	Botol	JKN	5	Rp 16.359	Rp 81.795	Feb-20
		Urine Protein	Pcs	APBD	300	Rp 1.306	Rp 391.800	Sep-20
		Vitamin A Merah	Kapsul	APBD	703	Rp 519	Rp 364.857	May-19
		Vitamin B1 Inj	Ampul	APBD	30	Rp 2.475	Rp 74.250	Nov-20
		Zink 20 Mg	Tablet	APBD	810	Rp 644	Rp 521.640	Jul-20
4	Puskesmas Lalang	Abcath No.20	Pcs	APBD	21	Rp 4.743	Rp 99.599	Aug-20
		Allipurinol 10 Mg Tablet	Tab	APBD	500	Rp 127	Rp 63.500	Sep-17
		Amoksinil Sirup Kering	Botol	APBD	39	Rp 1.993	Rp 77.727	May-16
		Antasida Doen Tablet	Tablet	APBD	668	Rp 85	Rp 56.780	Jun-16
		Aquadeast Steril	Botol	JKN	4	Rp 20.000	Rp 80.000	Aug-19
		Asam Traneksamat	Ampul	JKN	45	Rp 2.025	Rp 91.105	Aug-18
		Betahtin Mesilat	Tablet	JKN	790	Rp 115	Rp 90.481	Feb-15
		Biomaxima Alat (Gpt)3X20 Ml	Kit	JKN	1	Rp 566.280	Rp 566.280	Jan-21
		Biomaxima Asat (Got)3X20 Ml	Kit	JKN	2	Rp 566.280	Rp 1.132.560	Oct-20
		Biomaxima Glucosa 4X100 Ml	Kit	JKN	1	Rp 741.312	Rp 741.312	Dec-20
		Biomaxima Triglycerides 4X50 Ml	Kit	JKN	1	Rp 2.007.720	Rp 2.007.720	Feb-21
		Biomaxima Uric Acid 4X50 Ml	Kit	JKN	1	Rp 720.720	Rp 720.720	Sep-20
		Bisakofyl	Tablet	JKN	160	Rp 341	Rp 54.560	Feb-21
		Chlorpromazine 100 Mg	Tablet	JKN	1.000	Rp 168	Rp 168.180	Oct-20
		Cholamphenikol Salep Mata	Tube	JKN	18	Rp 1.920	Rp 34.560	Jul-20
		Cimetidin	Tablet	APBD	9.300	Rp 231	Rp 2.148.300	Mar-20
		Cimetidin Tablet 200 Mg	Tab	APBD	5.000	Rp 231	Rp 1.155.000	Oct-16
		Cimetidin Tablet 200Mg	Tablet	APBD	564	Rp 231	Rp 130.284	Jun-16
		Citrezine 10 Mg	Tab	APBD	6.800	Rp 103	Rp 700.400	Jun-16
		Clindamycin Kapsul 150 Mg	Kapsul	JKN	1.000	Rp 812	Rp 811.818	Jul-18
		Combantin	Tab	JKN	248	Rp 6.300	Rp 1.562.400	Jul-16
		Combantin Syrup	Botol	JKN	12	Rp 16.725	Rp 200.700	Jun-20
		Deksametason Inj.5Mg/Ml-1Ml	Amp	APBD	75	Rp 1.725	Rp 129.341	Sep-16
		Dexametason Inj.5Mg/Ml-1Ml	Ampul	APBD	28	Rp 1.725	Rp 48.287	Nov-16
		Dexosimetasone Krim	Tube	JKN	70	Rp 11.291	Rp 793.364	Feb-15
		Diazepam Tablet 2 Mg	Tablet	APBD	164	Rp 110	Rp 18.040	Jan-19
		Difenhydramin Inj.10Mg/Ml-1Ml	Ampul	APBD	75	Rp 1.321	Rp 99.075	Jun-20
		Difenhydramin Inj.10Mg/Ml-1Ml	Ampul	APBD	53	Rp 1.321	Rp 70.013	Dec-16
		Dispo 5 Cc	Pcs	JKN	77	Rp 750	Rp 57.750	May-17
		Domperidon Syr	Botol	JKN	106	Rp 2.823	Rp 299.238	May-20
		Dulcolax 5Mg Suppo Inf	Suppo	JKN	72	Rp 5.455	Rp 392.724	Jun-20
		Emerton Oil	Btl	APBD	13	Rp 650.000	Rp 8.450.000	Sep-20
		Éphinephrine Inj	Ampul	APBD	6	Rp 2.486	Rp 14.916	Aug-19
		Erlamicet Ts Teltinga (Kloramfenikol)	Botol	APBD	3	Rp 8.498	Rp 25.493	Jul-16
		Fitomenadon Injeksi 10 Mg/Ml -1Ml	Amp	APBD	1.680	Rp 4.438	Rp 7.455.940	Mar-17
		Fitomenadon Injeksi 10 Mg/Ml-1Ml	Ampul	APBD	80	Rp 4.438	Rp 355.040	Jan-20
		Fitomenadon Tablet Salut 10 Mg	Tab	APBD	400	Rp 890	Rp 356.000	Dec-15
		Furosemide 40 Mg (Duo 200 Tab)	Tablet	JKN	1.800	Rp 80	Rp 144.000	Jul-19
		Glibenklamida Tablet 5 Mg	Tab	APBD	800	Rp 149	Rp 119.200	Dec-15
		Glibenklamida Tablet 5 Mg	Tab	APBD	250	Rp 149	Rp 37.250	May-20
		Glukosa 5%	Flacon	APBD	30	Rp 6.900	Rp 207.000	Jun-14
		Hidroklortiazida Cairan	Botol	APBD	8	Rp 12.496	Rp 99.968	Jun-15
		Hidrokortisazida (Hct) Tablet 25 Mg	Tab	APBD	1.000	Rp 194	Rp 194.000	Oct-15
		Ibuprofen Syr	Botol	APBD	16	Rp 5.739	Rp 91.824	Dec-19
		Infus Set Makro	Pcs	JKN	250	Rp 3.500	Rp 875.000	Jun-16
		Infus Set Mikro	Pcs	JKN	300	Rp 3.200	Rp 960.000	Mar-20
		Katefer No 18	Pcs	APBD	1	Rp 15.625	Rp 15.625	Jun-20
		Ketorolac Injek	Ampul	JKN	117	Rp 1.444	Rp 168.948	Jun-20
		Kloramfenikol	Botol	APBD	15	Rp 5.405	Rp 81.075	Jun-17
		Kloramfenikol Kapsul 250Mg	Kaplet	APBD	500	Rp 272	Rp 136.000	Sep-20
		Kloramfenikol Salep Mata	Tube	APBD	16	Rp 2.160	Rp 34.560	Jul-20
		Kloramfenikol Tetes Mata	Botol	APBD	1	Rp 11.000	Rp 11.000	Jul-16

		Lidokain Kompositum Injeksi-2Ml	Amp	APBD	95	Rp 1,380	Rp 131,100	May-18
		Lisol Tersabut 50% -1 Liter	Botol	APBD	1	Rp 53,300	Rp 53,300	Sep-19
		Methylermetrine Maleat Inj 0.2Mg/Ml	Ampul	JKN	100	Rp 3,564	Rp 356,400	Jun-16
		Mgs04 20%	Fls	APBD	8	Rp 3,328	Rp 26,624	Sep-17
		Mgs04 20%	Fls	APBD	22	Rp 3,328	Rp 73,216	Apr-20
		Miniaspi	Tablet	JKN	500	Rp 95	Rp 47,275	Nov-20
		Neurobion Inj	Amp	JKN	8	Rp 10,035	Rp 80,280	Aug-20
		Nifedipin	Tablet	APBD	20	Rp 135	Rp 2,700	Aug-20
		Oat Kategori Dewasa	Paket	Program	2	Rp 409,075	Rp 818,151	Jun-16
		Onemed Test Kehamilan	Pcs	JKN	750	Rp 1,939	Rp 1,454,250	Aug-20
		Oxytetracillina Salep Mata	Tube	APBD	13	Rp 2,600	Rp 33,800	Oct-17
		Oxytetracyclin 1% Salep Mata	Tube	JKN	50	Rp 3,200	Rp 160,000	Oct-19
		Oxytocin	Ampul	JKN	87	Rp 1,900	Rp 165,300	Jun-16
		Oxytocin	Ampul	JKN	56	Rp 1,900	Rp 106,400	Jul-16
		Oxytocin Inj	Amp	JKN	56	Rp 3,438	Rp 192,528	Jul-20
		Oxytocin Inj	Amp	JKN	100	Rp 3,438	Rp 343,800	Aug-20
		Peryo Kin Spray	Botol	JKN	16	Rp 113,050	Rp 1,808,800	Jan-17
		Phenol Giserol Telis Telinga	Botol	JKN	24	Rp 2,355	Rp 56,520	Jun-16
		Povidon Iodine 1000 Ml	Botol	JKN	1	Rp 75,000	Rp 75,000	Nov-20
		Primaquen	Tablet	APBD	500	Rp 324	Rp 162,000	Feb-20
		Protein Urin Strip Test	Strip	JKN	40	Rp 13,062	Rp 522,480	Sep-16
		Pyrantel Palmoat	Tablet	APBD	35	Rp 334	Rp 11,690	Sep-17
		Pyrantel Palmoat	Tablet	JKN	880	Rp 334	Rp 293,920	Sep-20
		Ranitidin	Amp	APBD	100	Rp 121	Rp 12,100	Jul-20
		Ranitidin Injek	Ampul	APBD	23	Rp 1,540	Rp 35,420	Nov-17
		Ringer Laktat Larutan Infus Steril 500 Ml	Fls	APBD	23	Rp 6,969	Rp 160,284	May-16
		Rivanol	Botol	APBD	22	Rp 3,900	Rp 85,800	Jul-20
		Salisil Spiritus	Bl	APBD	3	Rp 7,497	Rp 22,490	Jun-18
		Sianocobalamin (Vit B12.) Inj.k.500Mcg	Ampul	APBD	48	Rp 1,315	Rp 63,142	Oct-16
		Simvastatin	Tablet	APBD	30	Rp 110	Rp 3,300	Jun-16
		Sukralfat	Botol	JKN	29	Rp 7,435	Rp 215,615	Aug-18
		Test Kehamilan Instant	Pcs	JKN	200	Rp 1,400	Rp 280,000	May-20
		Tetrasiklina Hcl Kapsul 250 Mg	Kaplet	APBD	3,000	Rp 216	Rp 648,000	Aug-20
		Vit K Inj	Amp	JKN	3	Rp 1,969	Rp 5,907	Nov-16
		Vit K Injek	Ampul	APBD	19	Rp 4,438	Rp 84,322	Jun-16
		Vitamin B1 Inj	Ampul	APBD	15	Rp 2,475	Rp 37,125	Dec-16
		Zield Nelsen	Botol	APBD	1	Rp 116,875	Rp 116,875	Aug-20
		Zinc	Tablet	APBD	14	Rp 658	Rp 9,212	Nov-20
		Zinc Sirup	Botol	JKN	48	Rp 3,725	Rp 178,800	Jul-18
5	Puskesmas Lebi	Acyclovir	Tablet	APBD	1,900	Rp 287	Rp 545,300	Aug-20
		Allopurinol 100 Mg	Tablet	APBD	200	Rp 127	Rp 25,400	Mar-20
		Allopurinol 100 Mg	Tablet	APBD	50	Rp 127	Rp 6,350	Jun-20
		Amboxol 30 Mg	Tablet	APBD	1,165	Rp 127	Rp 147,373	Jul-20
		Amiodipin 5 Mg	Tablet	APBD	15	Rp 83	Rp 1,245	Sep-16
		Amoksalin Syrup Kering 125 Mg	Botol	APBD	19	Rp 1,993	Rp 37,867	Jun-20
		Antasida Doen	Tablet	APBD	178	Rp 85	Rp 15,130	Jun-19
		Cairan Glukosa 5 %	Flakon	APBD	1	Rp 6,900	Rp 6,900	Aug-19
		Cairan Glukosa 5%	Flakon	APBD	7	Rp 6,900	Rp 48,300	Aug-18
		Captopril 25 Mg	Tablet	APBD	200	Rp 171	Rp 34,100	Jul-16
		Catgut Cromik 3/0 150 Cm	Pcs	APBD	2	Rp 3,562	Rp 7,123	Feb-20
		Cetirizine Hidrochloride 10 Mg	Tablet	APBD	450	Rp 103	Rp 46,350	Jun-19
		Chlorampenicol Kapsul 250 Mg	Kaplet	APBD	500	Rp 272	Rp 136,000	Sep-16
		Chloramphenocol	Botol	APBD	38	Rp 5,405	Rp 205,390	May-20
		Cimetidine	Tablet	APBD	260	Rp 231	Rp 60,060	Oct-16
		Ciprofloxacin 500 Mg	Tablet	APBD	245	Rp 323	Rp 79,135	Aug-20
		Cotrimoxazol Suspensi 200 Mg	Botol	APBD	53	Rp 2,155	Rp 114,215	Jul-16
		Cotrimoxazol 480 Mg	Tablet	APBD	180	Rp 135	Rp 24,300	Dec-19
		Cotrimoxazol Suspensi 200 Mg	Botol	APBD	17	Rp 2,155	Rp 36,635	Jul-19
		Cyanocobalamin (Vit B12 Injek)	Ampul	APBD	152	Rp 1,315	Rp 199,950	Jun-18
		Dexametazone Injeksi 1 Ml	Ampul	APBD	141	Rp 1,725	Rp 243,162	May-20
		Dhp Frimai	Tablet	PROGRAM	27	Rp 2,160	Rp 58,320	Sep-19
		Diazepam 5 Mg	Tablet	APBD	80	Rp 110	Rp 8,800	Jun-18
		Diclofenac Sodium 50 Mg	Tablet	APBD	1,550	Rp 164	Rp 254,200	May-19
		Domperidone 10 Mg	Tablet	APBD	150	Rp 90	Rp 13,500	Feb-21
		Domperidone 10 Mg	Tablet	APBD	140	Rp 90	Rp 12,600	Dec-20
		Domperidone 60 Ml	Botol	APBD	10	Rp 3,105	Rp 31,050	Apr-20
		Dypenhidramin Inj 10 Mg/Ml	Ampul	APBD	60	Rp 1,321	Rp 79,260	Mar-21
		Erlamytein Chlomphenicol	Tube	APBD	23	Rp 11,000	Rp 253,000	Aug-20
		Hidrogen peroksid	Botol	APBD	10	Rp 32,500	Rp 325,000	May-20
		Hcpg Urine Test	Pcs	APBD	6	Rp 2,427	Rp 14,561	Sep-19
		Hcl 0.1 N	Botol	APBD	1	Rp 31,460	Rp 31,460	Dec-19
		Ibuprofen Syrup	Botol	APBD	26	Rp 5,739	Rp 149,214	Oct-16
		Infuset	Pcs	APBD	45	Rp 5,400	Rp 243,000	Jul-16
		Kotrimoxazol 480 Mg	Tablet	APBD	50	Rp 135	Rp 6,750	Mar-20
		Lidocaine 2 Ml	Ampul	APBD	6	Rp 1,380	Rp 8,280	Oct-16
		Loperamide	Tablet	APBD	400	Rp 95	Rp 38,000	Jul-19
		Loperamide Hcl 2 Mg	Tablet	APBD	350	Rp 95	Rp 32,250	Jun-16
		Methylergometrine Injeksi I.M.V 0.2 Mg	Ampul	APBD	55	Rp 3,520	Rp 193,600	Jul-20
		Metronidazole	Tablet	APBD	10	Rp 151	Rp 1,510	Jul-19
		Metylorgemetrin 0,125 Mg	Tablet	APBD	90	Rp 283	Rp 25,470	Apr-20
		Metylpredesone	Tablet	APBD	380	Rp 180	Rp 68,400	Jul-16
		Mgs04	Flakon	APBD	15	Rp 3,328	Rp 49,920	Mar-17
		Miconazole	Tube	APBD	1	Rp 3,450	Rp 3,450	Aug-20
		Mineralmix	Saset	APBD	160	Rp 2,920	Rp 467,200	Jun-20
		Nifedipin	Tablet	APBD	580	Rp 135	Rp 78,300	Jun-16
		Omeprazole 20 Mg	Kapsul	APBD	390	Rp 150	Rp 58,500	Aug-20
		Otxoxin Injek 2 Ml	Ampul	APBD	12	Rp 1,337	Rp 22,044	Aug-20
		Oxytoxin	Ampul	APBD	5	Rp 1,837	Rp 9,185	Aug-20
		Paracetamol 500 Mg	Tablet	APBD	150	Rp 66	Rp 9,900	Aug-20
		Paracetamol syrup	Botol	APBD	1	Rp 1,260	Rp 1,260	Jul 2016
		Povidone Iodine 300 Ml	Botol	APBD	12	Rp 23,400	Rp 280,800	Mar-17
		Prednisone 5 Mg	Tablet	APBD	300	Rp 91	Rp 27,300	Oct-19
		Pyrantel Pamoat 125 Mg Basa	Tablet	APBD	92	Rp 334	Rp 30,728	Apr-20

		Ranitidin 2 Ml	Ampul	APBD	20	Rp 1.540	Rp 30.800	Jun-20
		Rdt	Pcs	PROGRAM	3	Rp 5.271	Rp 15.813	Jul-19
		Salbutamol 2 Mg	Tablet	APBD	944	Rp 87	Rp 82.128	Jul-20
		Tablet Tambah Darah	Tablet	PROGRAM	47	Rp 445	Rp 20.915	Mar-16
		Vit.A Merah 200.000 Iu	Botol	APBD	20	Rp 519	Rp 10.380	Jul-19
		Vitamin B1 Injeksi	Ampul	APBD	2	Rp 2.475	Rp 4.950	Aug-20
		Zhiel Nielsen	Pcs	APBD	2	Rp 263.556	Rp 527.112	Jun-20
		Zinc 20 Mg	Tablet	APBD	340	Rp 638	Rp 216.920	Sep-16
6	Puskesmas Lenang	Acylovir 200 Mg	Tablet	APBD	310	Rp 287	Rp 88.970	Jul-18
		Ambroksol syr	Botol	JKN	61	Rp 3.999	Rp 243.909	Aug-20
		Amoxilin syr	Botol	APBD	6	Rp 1.993	Rp 11.958	Jun-20
		Betadine 300 ml	Botol	APBD	12	Rp 23.400	Rp 280.800	Jun-20
		Cotrimoksasol syr	Botol	APBD	20	Rp 2.155	Rp 43.100	Aug-19
		Diclofenat Sodium 50 Mg	Tablet	APBD	900	Rp 164	Rp 147.800	Apr-20
		Diphenidramin Hcl Inj.	Ampul	APBD	27	Rp 1.321	Rp 35.667	May-20
		Domperidon 10 Mg	Tablet	APBD	150	Rp 90	Rp 13.500	Dec-20
		Fitomenadion	Ampul	JKN	86	Rp 4.438	Rp 381.668	May-17
		Lidokain Injeksi	Ampul	JKN	29	Rp 1.380	Rp 40.020	Apr-20
		Loperamide	Tablet	JKN	100	Rp 95	Rp 9.500	Jul-17
		Metylergometrin	Ampul	APBD	85	Rp 3.520	Rp 299.200	Jun-20
		Oat Kategori Anak	Paket	APBD	1	Rp 203.259	Rp 203.259	Jul-20
		Oat Kategori I	Paket	APBD	1	Rp 409.075	Rp 409.075	Apr-20
		Oksitosin Inj.	Ampul	JKN	22	Rp 1.837	Rp 40.414	Oct-17
		Oksitosin Inj.	Ampul	APBD	57	Rp 1.837	Rp 104.709	Oct-17
7	Puskesmas Mok	Paracetamol Syr	Botol	APBD	24	Rp 1.260	Rp 30.240	Aug-20
		Vit A merah	Capsul	APBD	1	Rp 519	Rp 519	Oct-19
		Acylovir 400 Mg	Tablet	APBD	170	Rp 465	Rp 79.050	Oct-19
		Acylovir 200 Mg	Tablet	JKN	600	Rp 287	Rp 172.200	Jul-18
		Acylovir 400 Mg	Tablet	JKN	300	Rp 465	Rp 139.500	Jun-20
		Ambraxol	Tablet	APBD	200	Rp 127	Rp 25.300	Nov-17
		Ambraxol	Tablet	JKN 2017	6.700	Rp 127	Rp 847.550	Nov-17
		Amoxicilin 500 Mg	Tablet	APBD	200	Rp 192	Rp 38.400	Jun-20
		Amoxilin Syr Kering	Bl	APBD	111	Rp 1.993	Rp 221.223	Nov-20
		Amoxilin 250 Mg	Kapsul	APBD	300	Rp 212	Rp 63.600	Nov-18
		Amoxilin 500 Mg	Kapsul	APBD	4.060	Rp 192	Rp 779.520	Aug-19
		Antalgin	Kaplet	JKN 2017	3.700	Rp 171	Rp 632.700	Jun-20
		Antasida	Tablet	APBD	4.000	Rp 85	Rp 340.000	Jun-20
		Bedak Salicyl	Bks	APBD	10	Rp 1.450	Rp 14.500	Oct-20
		Catheter No.18	Pcs	APBD	10	Rp 15.625	Rp 156.250	Jul-18
		Cetirizin	Bl	APBD	2	Rp 3.192	Rp 6.384	Sep-19
8	Puskesmas Weleng	Cotrymoksazole	Tablet	APBD	400	Rp 135	Rp 54.000	Dec-18
		Desoximetasone 0,25%	Tube	JKN 2017	81	Rp 11.291	Rp 914.564	Aug-19
		Dexamethason 0,5 Mg	Tablet	APBD	100	Rp 48	Rp 4.800	Aug-19
		Dexamethason Inj	Ampul	APBD	100	Rp 1.725	Rp 172.455	Jun-20
		Diphenidramin	Ampul	APBD	24	Rp 1.321	Rp 31.704	Aug-18
		Domperidon	Tablet	APBD	2.200	Rp 90	Rp 198.000	Feb-19
		Domperidon Syr	Bl	APBD	6	Rp 3.105	Rp 18.630	Feb-21
		Epinephrin	Ampul	APBD	100	Rp 2.486	Rp 246.600	Apr-20
		Furosemid	Tablet	APBD	200	Rp 80	Rp 16.000	Jun-20
		Infus Set Pkd-2	Pcs	APBD	200	Rp 3.500	Rp 700.000	Jan-21
		Loperamide Hcl	Tablet	JKN 2017	1.700	Rp 95	Rp 161.500	May-20
		Loperamide Hcl	Tablet	JKN 2017	1.700	Rp 95	Rp 161.500	Nov-18
		Nifedipin	Tablet	JKN 2017	4.100	Rp 135	Rp 553.500	Sep-19
		Omeprazole	Kapsul	APBD	300	Rp 150	Rp 45.000	Jul-20
		Paket Stop Tb Kat I	Box	APBD	1	Rp 409.075	Rp 409.075	Aug-20
		Phenol Glycerol 10%	Botol	APBD	57	Rp 2.355	Rp 134.235	Aug-20
9	Puskesmas Sidoarjo	Povidon Iodine	Botol	APBD	3	Rp 23.400	Rp 70.200	Nov-17
		Profolat	Strip	JKN 2017	4	Rp 81	Rp 324	Feb-20
		Propylthiouracil	Bl	APBD	1	Rp 324	Rp 324	Apr-20
		Pyrantel	Tablet	APBD	300	Rp 334	Rp 102.200	Aug-19
		Rivandol 0,1% 100 Ml	Bl	APBD	2	Rp 3.900	Rp 7.800	Sep-18
		Salep 2-4	Pot	JKN	2	Rp 3.277	Rp 6.554	Sep-18
		Salicyl Spiritus 10%	Bl	APBD	72	Rp 7.497	Rp 539.748	Dec-20
		Tablet Tambah Darah	Tablet	APBD	658	Rp 445	Rp 292.810	Nov-17
		Ttd	Tablet	APBD	2.760	Rp 445	Rp 1.228.200	Jul-17
		Vit A.100.000Ui	Capsul	APBD	250	Rp 260	Rp 65.000	Jun-19
		Vit A.200.000Ui (Merah)	Kapsul	APBD	450	Rp 519	Rp 23.550	Sep-20
		Vit B1	Ampul	APBD	39	Rp 220	Rp 8.580	May-19
		Zirk	Tablet	APBD	2.100	Rp 644	Rp 1.352.400	Jun-20
		Abate Gr	Botol	Program	1	Rp 59.400	Rp 59.400	Jun-20
		Acylovir Krim, 5 %	Tube	APBD	7	Rp 3.977	Rp 27.836	Aug-20
		Acylovir 400mg Tablet	Tablet	APBD	50	Rp 353	Rp 17.650	Apr-19
		Acylovir Tablet 200 Mg	Tablet	APBD	100	Rp 287	Rp 28.700	Oct-20
10	Puskesmas Sidoarjo	Albendazole Tab. 400 Mg	Tablet	Program	962	Rp 271	Rp 260.702	Jul-20
		Allopurinol Tablet 100 Mg	Tablet	APBD	430	Rp 108	Rp 46.440	Jun-20
		Ambraxol Hcl Tablet 30 Mg	Tablet	APBD	2.120	Rp 127	Rp 268.180	Jul-18
		Ambraxol Syrup	Botol	APBD	5	Rp 3.999	Rp 19.993	Sep-16
		Aminofilin Tab. 150 Mg	Tablet	APBD	100	Rp 171	Rp 17.100	Jun-20
		Aminofilin Tablet	Tablet	APBD	410	Rp 171	Rp 70.110	May-16
		Amoxilin Kapsul 250 Mg	Kapsul	APBD	80	Rp 212	Rp 16.960	May-20
		Amoxilin Syrup Kering	Botol	APBD	31	Rp 1.993	Rp 61.783	Apr-18
		Antasida Doen Suspensi	Botol	APBD	8	Rp 2.038	Rp 16.304	Jul-20
		Antasida Doen Tablet	Tablet	APBD	200	Rp 171	Rp 34.200	Aug-19
		Antasida Doen Tablet	Tablet	APBD	6.740	Rp 171	Rp 1.152.540	Jul-18
		Asam Asetat 6 %	Botol	APBD	1	Rp 20.000	Rp 20.000	Apr-17
		Asam Askorbat (Vit. C) Tablet	Tablet	APBD	100	Rp 131	Rp 13.100	Jul-18
		Asam Folat (Profolat) Tablet	Tablet	JKN	710	Rp 68	Rp 46.280	Jan-18
		Attapupigit (Akita) Tablet	Tablet	JKN	110	Rp 265	Rp 29.150	Mar-18
		Bedaik Salicyl	Kotak	APBD	6	Rp 1.450	Rp 8.700	Aug-19
		Bedaik Salicyl	Kotak	APBD	134	Rp 1.450	Rp 194.300	Dec-18
11	Puskesmas Sidoarjo	Bisakodyl (Laxana) Tablet	Tablet	JKN	20	Rp 320	Rp 6.400	Jul-17
		Captopril Tab. 25 Mg	Tablet	APBD	90	Rp 94	Rp 8.460	Sep-18
		Captopril Tab. 25 Mg	Tablet	APBD	570	Rp 94	Rp 53.580	Oct-19
		Captopril Tab. 25 Mg	Tablet	APBD	130	Rp 94	Rp 12.220	Jul-16

Cat Gut Plain	Pcs	APBD	1	Rp 3.425	Rp 3.425	Jun-17
Cat Gut Plain 2/0	Pcs	JKN	28	Rp 8.191	Rp 229,348	Jul-19
Cat Gut Plain 3/0	Pcs	JKN	28	Rp 8.191	Rp 229,348	Jul-16
Cetirizine Tab.	Tablet	APBD	7,130	Rp 94	Rp 670,220	Oct-19
Cetirizine Tablet	Tablet	APBD	100	Rp 94	Rp 9,400	Oct-19
Cetirizine Tablet	Tablet	JKN	500	Rp 94	Rp 47,000	Jul-16
Chloramfenikol Kaps.250 Mg	Kapsul	APBD	2,720	Rp 272	Rp 739,840	May-20
Cimetidin Tab. 20 Mg	Tablet	APBD	510	Rp 231	Rp 117,810	Aug-20
Ciprofloxacin Infus	Botol	JKN	37	Rp 12,148	Rp 449,476	Sep-18
Comrimoxazole Pediatric Tablet	Tablet	APBD	870	Rp 135	Rp 117,450	Jul-18
Comrimoxazole Suspensi	Botol	APBD	7	Rp 2,155	Rp 15,085	Mar-20
Comrimoxazole Suspensi	Botol	APBD	50	Rp 2,155	Rp 107,750	Jul-17
Comrimoxazole Suspensi	Botol	APBD	11	Rp 2,155	Rp 23,705	Jul-17
Comrimoxazole Suspensi	Botol	APBD	50	Rp 2,155	Rp 107,750	Jul-19
Comrimoxazole Tab. 480 Mg	Tablet	APBD	390	Rp 135	Rp 52,850	Aug-19
Comrimoxazole Tab. 480 Mg	Tablet	APBD	890	Rp 135	Rp 120,150	May-20
Desoximetasan, Krim 0,25 %	Tube	JKN	349	Rp 11,291	Rp 3,940,528	Jul-16
Desametasan Injeksi	Ampul	APBD	80	Rp 1,725	Rp 137,960	Jul-18
Desametasan Injeksi	Ampul	APBD	60	Rp 1,725	Rp 103,470	Jun-20
Desametasan Injeksi	Ampul	APBD	11	Rp 1,725	Rp 18,970	Jul-16
Desametasan Tablet 0,5 Mg	Tablet	APBD	1,080	Rp 48	Rp 51,840	Dec-17
Diazepam Tab. 2 Mg	Tablet	APBD	80	Rp 110	Rp 8,800	Jul-17
Dileylkarbamazin Citrat Tablet 100 Mg	Tablet	Program	6,670	Rp 119	Rp 793,730	Aug-18
Diphenhydramine Injeksi	Ampul	APBD	17	Rp 1,321	Rp 22,457	Jul-16
Diphenhydramin Hcl, Injeksi	Ampul	APBD	14	Rp 1,321	Rp 18,494	Nov-20
Disposable 0,05 Cc	Pcs	Program	48	Rp 1,321	Rp 63,408	Jul-17
Disposable 1 Cc/Ml	Pcs	APBD	152	Rp 893	Rp 135,703	May-20
Disposable 5 Cc/Ml	Pcs	APBD	413	Rp 1,124	Rp 464,006	May-20
Domperidon Suspensi, 60 Ml	Botol	APBD	3	Rp 3,105	Rp 9,315	Nov-19
Furosemida Tablet	Tablet	APBD	200	Rp 94	Rp 18,800	Nov-19
Garam Oralit	Sachset	APBD	320	Rp 600	Rp 191,840	Aug-20
Glibenklamid Tab. 5 Mg	Tablet	APBD	200	Rp 149	Rp 29,800	Jun-16
Glukosa 10 %	Botol	APBD	6	Rp 7,500	Rp 45,000	Nov-17
Glukosa 10 %	Botol	APBD	10	Rp 7,500	Rp 75,000	Sep-16
Glukosa 5 %	Botol	APBD	2	Rp 6,900	Rp 13,800	Jul-17
Glukosa 5 %	Botol	APBD	12	Rp 6,900	Rp 82,800	Jun-19
Glukosa 5 %	Botol	APBD	11	Rp 6,900	Rp 75,900	Jul-16
H2O2 3 %	Botol	APBD	24	Rp 12,496	Rp 299,904	Sep-17
Ibuprofen Suspensi	Botol	APBD	2	Rp 5,739	Rp 11,478	May-20
Ibuprofen Suspensi	Botol	APBD	51	Rp 5,739	Rp 292,689	Dec-19
Infus Set Anak	Pcs	APBD	310	Rp 5,600	Rp 1,736,000	Jul-19
Infus Set Anak	Pcs	APBD	244	Rp 5,600	Rp 1,366,400	Mar-20
Infus Set Dewasa	Pcs	APBD	473	Rp 7,200	Rp 3,405,600	Jun-16
Kalk	Tablet	APBD	200	Rp 89	Rp 17,800	Mar-18
Kloramfenikol 3 %, Tl	Botol	APBD	5	Rp 5,405	Rp 27,025	Oct-16
Kloramfenikol Kapsul 250 Mg	Kapsul	APBD	1,470	Rp 272	Rp 399,840	Jul-19
Kodein Tablet	Tablet	APBD	250	Rp 687	Rp 171,750	Jan-20
Lanutan Benedict	Botol	Program	2	Rp 19,950	Rp 39,900	Oct-16
Lanutan Hcl 0,1 N	Botol	APBD	3	Rp 31,460	Rp 94,380	Jul-16
Lanutan Hcl 0,1 N, 100 Ml	Botol	APBD	1	Rp 31,460	Rp 31,460	Dec-17
Lidokain Injeksi	Ampul	APBD	43	Rp 1,380	Rp 59,340	Jul-20
Lisol, 1000 Ml	Botol	APBD	1	Rp 53,300	Rp 53,300	Jul-16
Lysol	Botol	APBD	3	Rp 53,300	Rp 159,900	Jul-16
Metformin Hcl Tab. 500 Mg	Tablet	APBD	500	Rp 115	Rp 57,500	Jun-20
Methanol	Botol	Program	2	Rp 79,888	Rp 159,775	Jul-19
Metyl Ergometrin Maleat Injek.	Ampul	APBD	200	Rp 3,520	Rp 704,000	Mar-20
Mikronazole 3 %, Sk	Tube	APBD	4	Rp 3,450	Rp 13,800	Jun-17
Natrium Diklofenat Tablet 25 Mg	Tablet	APBD	400	Rp 160	Rp 64,000	Apr-20
Nifedipin Tablet 10 Mg	Tablet	APBD	320	Rp 135	Rp 43,200	Jul-16
Oat Anak	Paket	Program	1	Rp 290,650	Rp 290,650	Dec-20
Oat Kategori I	Paket	Program	1	Rp 409,075	Rp 409,075	Aug-20
Oat Kategori I	Paket	Program	7	Rp 409,075	Rp 2,863,528	Aug-20
Oat Kategori I	Paket	Program	4	Rp 409,075	Rp 1,636,302	Jul-16
Oat Kategori II	Paket	Program	1	Rp 290,650	Rp 290,650	May-17
Oat Kategori II	Paket	Program	1	Rp 290,650	Rp 290,650	Jan-20
Oksitosin Injeksi	Ampul	JKN	53	Rp 1,900	Rp 100,700	Aug-16
Omeprazole Kapsul 20 Mg	Kapsul	APBD	440	Rp 150	Rp 66,000	May-17
Paracetamol Syrup	Botol	APBD	1	Rp 1,252	Rp 1,252	Apr-20
Phenobarbital Tablet	Tablet	APBD	100	Rp 214	Rp 21,400	Aug-20
Pheno! Glicerol, Tl	Botol	APBD	14	Rp 2,355	Rp 32,970	Jul-19
Phytomenadion (Vit. K) Injeksi	Ampul	APBD	5	Rp 4,438	Rp 22,190	Jun-19
Phytomenadion (Vit. K) Injeksi	Ampul	APBD	12	Rp 4,438	Rp 53,256	Jul-19
Phytomenadion Injeksi	Ampul	APBD	170	Rp 4,438	Rp 754,460	Jul-16
Phytomenadion Injeksi	Ampul	JKN	180	Rp 4,167	Rp 750,060	Jul-20
Povidon Iodida, 300 Ml	Botol	APBD	3	Rp 23,400	Rp 70,200	Oct-18
Primaquine Tablet	Tablet	Program	1,250	Rp 324	Rp 405,000	Jul-19
Pyrantel Pamoat Tablet	Tablet	APBD	36	Rp 334	Rp 12,024	Feb-20
Pyrantel Pamoat Tablet 125 Mg	Tablet	APBD	26	Rp 334	Rp 8,684	Sep-17
Ranitidin Hcl Injeksi	Ampul	APBD	10	Rp 1,823	Rp 18,230	Jul-18
Ranitidin Injeksi	Ampul	APBD	75	Rp 1,823	Rp 136,725	May-20
Ranitidin Tab. 150 Mg	Tablet	APBD	310	Rp 121	Rp 37,510	Jul-20
Ranitidin Tablet 150 Mg	Tablet	APBD	300	Rp 121	Rp 36,300	May-16
Reagen Giemsa	Botol	Program	1	Rp 367,750	Rp 367,750	Jul-19
Reagen Giemsa	Botol	Program	4	Rp 367,750	Rp 1,471,000	Jul-18
Reagen Golongan Darah	Botol	APBD	3	Rp 682,000	Rp 2,046,000	Feb-16
Retinol (Vit. A) 100.000 Iu	Kapsul	Program	297	Rp 260	Rp 77,220	Oct-19
Retinol (Vit. A) 200.000 Iu	Kapsul	Program	300	Rp 519	Rp 155,700	Jul-16
Retinol (Vit. A) 200.000 Iu	Kapsul	Program	650	Rp 519	Rp 337,350	May-19
Retinol (Vit. A) 200.000 Iu	Kapsul	Program	50	Rp 519	Rp 25,950	Jun-16
Ringer Laktat	Botol	APBD	9	Rp 6,969	Rp 62,720	May-19
Ringer Laktat, Larutan Infus	Botol	APBD	18	Rp 6,969	Rp 125,440	Jun-20
Rivanol, 300 Ml	Botol	APBD	8	Rp 3,900	Rp 31,200	Jul-19
Salicyl Spiritus	Botol	APBD	24	Rp 3,900	Rp 93,600	Jun-18
Sianokobalamin (Vit. B12) Injek.	Ampul	APBD	15	Rp 1,315	Rp 19,732	Dec-20

		Sianokobalamin (Vit.B12) Injeksi	Ampul	APBD	27	Rp 1.315	Rp 35.517	Jul-16
		Tablet Tambah Darah	Tablet	Program	1,000	Rp 445	Rp 445.000	Jul-19
		Tablet Tambah Darah	Tablet	Program	1,214	Rp 445	Rp 540.230	Aug-18
		Tetraskin Hcl Kapsul 500 Mg	Kapsul	APBD	200	Rp 357	Rp 71.400	Jun-19
		Vigel	Tube	APBD	2	Rp 16,359	Rp 32.718	Sep-19
		Wing Needle No. 23 G	Pcs	APBD	88	Rp 3.000	Rp 264.000	Aug-20
		Winged Infus Set 25 G	Pcs	APBD	50	Rp 8.880	Rp 444.000	Sep-17
		Zield Nielsen	Paket	Program	2	Rp 116.875	Rp 233.750	Mar-18
		Zield Nielsen	Paket	Program	6	Rp 116.875	Rp 701.250	May-17
		Zink Tab. 20 Mg	Tablet	APBD	120	Rp 550	Rp 66.000	Jan-17
		Zink Tablet 20 Mg	Tablet	JKN	5,400	Rp 550	Rp 2.970.000	Jul-18
		Zink Tablet 20 Mg	Tablet	APBD	370	Rp 550	Rp 203.500	Jul-16
9	Puskesmas Wukir	Cotrimoxazole Syr 60 Ml	Botol	APBD	64	Rp 2.650	Rp 169.600	Sep-17
		Hydrogen Peroxida 3 % 100 Ml	Botol	APBD	38	Rp 32.500	Rp 1.235.000	Aug-20
		Phenol Glycerol Tetes Telinga 10%	Botol	APBD	36	Rp 2.500	Rp 90.000	Jul-19
		Erlamycein Tetes Mata (Chloramphenicol 0,5 %)	Botol	APBD	28	Rp 8.498	Rp 237.930	Jun-16
		Cotrimoxazole Tab 480 Mg	Tablet	APBD	1,200	Rp 135	Rp 162.000	Jul-19
		Paket Reagen Ziel Melsen	Box	Program	12	Rp 116.875	Rp 1.402.500	Sep-19
		Chloramphenicol Kapsul 250 Mg	Kapsul	APBD	1,000	Rp 272	Rp 272.000	Aug-19
		Captopril Tab 25 Mg	Tablet	APBD	2,070	Rp 94	Rp 194.580	Jul-18
		Amlodipine Tab 5 Mg	Tablet	APBD	420	Rp 95	Rp 39.900	Sep-18
		Tablet Tambah Darah Nee	Tablet	Program	1,150	Rp 444	Rp 510.600	Jun-19
		Dexametasone Inj. 5 Mg/Ml	Ampul	APBD	88	Rp 1.725	Rp 151.756	Jun-19
		Cynocobalamin Inj.	Ampul	APBD	86	Rp 1.315	Rp 113.130	Jun-19
		Phytomenadion Inj.	Ampul	APBD	21	Rp 4.438	Rp 93.198	Jan-19
		Vitamin A Biru	Kapsul	Program	90	Rp 260	Rp 23.400	Sep-19
		Ranitidine Tab 150 Mg	Tablet	APBD	70	Rp 121	Rp 8.470	Aug-19
		Ringer Lactat	Botol	APBD	63	Rp 6,969	Rp 439.039	Aug-19
		Oxytocin Inj.	Ampul	APBD	158	Rp 1.837	Rp 290.246	07 - 2020 (Obat Rusak/Berubah Warna)
		Methylergometrin Maleat Inj.	Ampul	APBD	327	Rp 3.520	Rp 1.151.140	
		Ituprofen Suspensi 60 Ml	Botol	APBD	7	Rp 5.739	Rp 40.173	Apr-20
		Amoxicilline Sirup Kering 60 Ml	Botol	APBD	6	Rp 1.993	Rp 11.958	Apr-20
		Cotrimoxazole Syr 60 Ml	Botol	APBD	67	Rp 2.155	Rp 144.385	Mar-20
		Paracetamol Tab 500 Mg	Tablet	APBD	230	Rp 54	Rp 12.420	Aug-19
		Ultrasonic Gel	Botol	JKN	183	Rp 16,359	Rp 2.993.697	May-20
		Albendazole Tab 400 Mg	Tablet	Program	1,020	Rp 271	Rp 276.420	Oct-19
		Albendazole Tab 400 Mg	Tablet	Program	600	Rp 271	Rp 162.600	Feb-20
		Diethyl Carbamazine Tab 100 Mg	Tablet	Program	488	Rp 119	Rp 56.072	Apr-18
		Hexagon Syphilis	Pcs	Program	60	Rp 20.400	Rp 1.224.000	Jun-18
		Diphenhydramine Hcl Inj. 1 Ml	Ampul	APBD	54	Rp 1.321	Rp 71.134	Nov-19
		Phenol Glycerol Tetes Telinga 10%	Botol	APBD	24	Rp 2.500	Rp 60.000	Apr-19
		Catgut Chromic	Pcs	APBD	2	Rp 2.803	Rp 5.606	May-20
		Prednison Tab 5 Mg	Tablet	APBD	690	Rp 81	Rp 55.890	Feb-20
		Cimetidine Tab 200 Mg	Tablet	APBD	650	Rp 231	Rp 150.150	Jul-19
		Ambrroxol Tab 30 Mg	Tablet	APBD	350	Rp 127	Rp 44.275	Apr-20
		Loperamid Hcl Tab 2 Mg	Tablet	APBD	300	Rp 95	Rp 28.500	Mar-20
		Metformin Hcl Tab 850 Mg	Tablet	JKN	520	Rp 113	Rp 58.760	Jun-20
		Ketoconazole Tab 200 Mg	Tablet	APBD	300	Rp 322	Rp 96.600	Jul-19
		Domperidone Tab 10 Mg	Tablet	APBD	1,040	Rp 122	Rp 126.880	Apr-20
		Pyrantel Pamoat Tab	Tablet	APBD	408	Rp 334	Rp 136.272	May-20
		Erlamycein Tetes Telinga (Chloramphenicol 0,5 %)	Botol	APBD	19	Rp 8.498	Rp 161.453	Apr-20
		Acyclovir Tab 200 Mg	Tablet	APBD	200	Rp 287	Rp 57.400	Jun-19
		Furosemid Tab 40 Mg	Tablet	JKN	1,400	Rp 94	Rp 131.600	Jan-20
		Aminophylline 200 Mg	Tablet	APBD	1,000	Rp 107	Rp 107.000	Jun-20
		Povidone Iodine 300 Ml	Botol	APBD	5	Rp 23.400	Rp 117.000	May-20
		Natrium Diklofenak	Tablet	APBD	1,250	Rp 160	Rp 200.000	May-20
		Omeprazole	Tablet	APBD	50	Rp 150	Rp 7.500	Apr-20
		Tetracikline 500 Mg	Tablet	APBD	360	Rp 357	Rp 128.820	Dec-20
		Zink 20 Mg	Tablet	APBD	290	Rp 644	Rp 186.760	Aug-20
		Ciprofloxacin	Tablet	APBD	100	Rp 323	Rp 32.300	Aug-20
		Nifedipine	Tablet	APBD	360	Rp 135	Rp 46.600	Aug-20
		Captopril Tab 50 Mg	Tablet	APBD	240	Rp 94	Rp 22.560	Nov-20
		Paracetamol Drops	Botol	JKN	2	Rp 54	Rp 108	Aug-20
		Asam Folat	Tablet	APBD	1,000	Rp 81	Rp 81.000	Aug-20
10	Puskesmas Waelengga	Infus set anak	Pcs	APBD	400	Rp 5.600	Rp 2.240.000	Oct-20
		Zield Nielsen	Paket	APBD	2	Rp 116.875	Rp 233.750	Aug-20
		ISDN	Tablet	APBD	90	Rp 89	Rp 8.010	Mar-17
		Chloramphenicol 250mg	Kapsul	APBD	3,900	Rp 272	Rp 1.060.800	Jan-17
		Zield Nielsen	Paket	APBD	4	Rp 116.875	Rp 467.500	Mar-18
		Antasida	Tablet	APBD	4,000	Rp 85	Rp 340.000	Sep-18
		FDC kat I	Paket	APBD	3	Rp 1.622.369	Rp 4.867.107	Jul-18
		FDC Kat II	Paket	APBD	1	Rp 1.622.369	Rp 1.622.369	Jul-18
		Bedak Salysil	Kotak	APBD	37	Rp 1.450	Rp 53.850	Nov-17
		Bedak Salycil	Kotak	APBD	70	Rp 1.450	Rp 101.500	Jan-18
		NaCl0,1N @ 500ml	Botol	JKN	12	Rp 5,627	Rp 67.524	Oct-18
		Vit A, Merah	Botol	APBD	18	Rp 519	Rp 9.342	Jan-19
		Cotrimokasazol suspensi	Botol	APBD	32	Rp 2.155	Rp 68.960	Apr-19
		Prednison 5mg	Tablet	JKN	1,200	Rp 8,273	Rp 9.927.600	Aug-19
		Vit K Inj	Ampul	APBD	146	Rp 4,438	Rp 647.948	Jul-19
		Cyanocobalamin Inj	Ampul	APBD	100	Rp 1.315	Rp 131.546	Jul-19
		Zield Nielsen	Paket	APBD	1	Rp 116.875	Rp 116.875	Sep-19
		Oxytoxin Inj	Ampul	APBD	74	Rp 1.837	Rp 135.938	Sep-19
		Lidocain Inj	Ampul	APBD	5	Rp 1.380	Rp 6.900	Sep-17
		Glukosa 5% 500ml	Botol	APBD	13	Rp 6,900	Rp 89.700	Sep-19
		Oxytoxin Inj	Ampul	JKN	54	Rp 1.670	Rp 90.180	Sep-19
		Diazepam Inj	Ampul	APBD	10	Rp 110	Rp 1.100	Feb-20
		Metformin 500mg	Tablet	APBD	1,200	Rp 113	Rp 135.600	Apr-20
		Cotrimokasazol suspensi	Botol	APBD	91	Rp 2.155	Rp 196.105	Mar-20
		Povidon 300 ml	Botol	APBD	24	Rp 23.400	Rp 561.600	Mar-20
		Methylergometrin inj	Ampul	APBD	54	Rp 3.520	Rp 190.080	May-20
		Cetirizine 10 mg	Tablet	APBD	400	Rp 103	Rp 41.200	Apr-20
		Domperidon susp	Botol	APBD	24	Rp 90	Rp 2.160	Apr-20

		Vit A- Merah	Kapsul	APBD	900	Rp 519	Rp 467,100	May-20
		Lisol	Botol	APBD	2	Rp 53.300	Rp 106,600	Jun-20
		MgSo4 5 ml 20%	Botol	APBD	24	Rp 3.328	Rp 79,872	Jun-20
		Amoxicillin 500mg	Tablet	APBD	3,400	Rp 192	Rp 652,800	Jun-20
		Zink 20mg	Tablet	APBD	1,550	Rp 644	Rp 998,200	Jun-20
		Nifedipin 10mg	Ampul	APBD	200	Rp 135	Rp 27,000	Jun-20
		Tablet Tambah Darah	Tablet	APBD	1,080	Rp 444	Rp 479,520	Aug-20
		DHP	Tablet	APBD	18	Rp 2,160	Rp 38,880	Aug-20
		Difenhydramin inj	Ampul	APBD	44	Rp 1.321	Rp 58,124	Aug-20
		Vit B6	Tablet	APBD	200	Rp 148	Rp 29,600	Aug-20
		Difenhydramin inj	Ampul	APBD	10	Rp 1.321	Rp 13,210	May-20
		MgSo4 5 ml 20%	Botol	APBD	18	Rp 3.328	Rp 59,904	Sep-20
		Phenol Glycerol 10%	Botol	APBD	144	Rp 2.500	Rp 360,000	Aug-20
		Furosemide 40mg	Tablet	APBD	400	Rp 94	Rp 37,600	Aug-20
		Vit B6	Tablet	APBD	900	Rp 148	Rp 133,200	Feb-20
		Epinephrine Inj	Ampul	JKN	70	Rp 2.260	Rp 158,200	May-20
		DEC	Tablet	APBD	400	Rp 119	Rp 47,600	Sep-20
		Disposable 0,01ml	Pcs	JKN	200	Rp 1.567	Rp 313,400	Sep-20
		MgSo4 5 ml 20%	Botol	APBD	36	Rp 2.500	Rp 90,000	Oct-20
		Diazepam 5mg	Tablet	APBD	218	Rp 110	Rp 23,980	May-20
		Diklofenak Sodium 50mg	Tablet	APBD	1,700	Rp 160	Rp 272,000	Nov-20
		Rivanda 300ml	Botol	APBD	16	Rp 3,900	Rp 62,400	Feb-21
		RDT Malaria	Pcs	APBD	25	Rp 5,271	Rp 131,775	Dec-20
		Difenhydramin inj	Ampul	APBD	60	Rp 1.321	Rp 79,260	Dec-20
		Chloramphenicol 1%	Tube	APBD	29	Rp 1,920	Rp 55,680	Feb-21
		DHP	Tablet	APBD	18	Rp 2,160	Rp 38,880	Feb-21
		Folic acid 1mg	Tablet	APBD	1,400	Rp 81	Rp 113,400	Mar-21
		Domperidon 10mg	Tablet	APBD	400	Rp 122	Rp 48,800	Mar-21
		Oxytocin inj	Ampul	APBD	88	Rp 1,900	Rp 167,200	Mar-21
11	Puskesmas Elar	Abate 1 G	Botol	APBD	1	Rp 2.755	Rp 2,755	Sep-21
		Abboctath-T 22 G	Pcs	APBD	3	Rp 4,743	Rp 14,228	Jul-18
		Acyclovir 5 % Cream	Tube	APBD	7	Rp 3.977	Rp 27,836	Apr-19
		Albendazole 400 Mg	Tablet	APBD	1,506	Rp 271	Rp 408,126	Feb-20
		Ambrosksol 30 Mg	Tablet	APBD	655	Rp 127	Rp 82,858	Sep-18
		Ambroxol 30 Mg	Tablet	APBD	1,345	Rp 127	Rp 170,143	Jun-18
		Aminophylline 200 mg	Tablet	APBD	457	Rp 107	Rp 48,899	Jun-20
		Amlodipine Besilate 5 Mg	Tablet	APBD	160	Rp 83	Rp 13,280	Jun-20
		Amoxicillin 125 Mg	Syrup	JKN	22	Rp 1.993	Rp 43,846	May-20
		Amoxicillin 250 Mg	Syrup	JKN	714	Rp 212	Rp 151,368	Jun-19
		Antasida Doen	Tablet	APBD	2,912	Rp 85	Rp 247,520	Aug-19
		Aqua pro Injeksi	Botol	APBD	13	Rp 1,920	Rp 24,960	Jun-20
		Bedak Salicyl 2 %	Botol	APBD	150	Rp 1,450	Rp 217,500	May-18
		Benecheck Cholesterol	Pcs	JKN	9	Rp 23,100	Rp 207,900	Nov-17
		Benecheck Glucose	Pcs	JKN	50	Rp 5,984	Rp 299,200	Oct-18
		Benecheck Urid Acid	Pcs	JKN	25	Rp 5,060	Rp 125,500	Feb-21
		Captopril 25 Mg	Tablet	APBD	568	Rp 94	Rp 53,392	Feb-21
		Chloramphenicol 1 %	Zalf	APBD	19	Rp 8,497	Rp 161,443	Feb-21
		Chloramphenicol 125 Mg	Syrup	APBD	35	Rp 5,405	Rp 189,175	Jun-19
		Chloramphenicol 250 Mg	Kapsul	APBD	3,600	Rp 272	Rp 979,200	May-18
		Cimetidine 200 Mg	Tablet	APBD	198	Rp 231	Rp 45,738	Aug-20
		Ciprofloxacin 500 Mg	Tablet	JKN	154	Rp 125	Rp 19,250	Sep-18
		Citerizin	Tablet	APBD	50	Rp 103	Rp 5,150	Jul-18
		Cotrimoksazole 480 mg	Tablet	APBD	90	Rp 135	Rp 12,150	Sep-20
		Cotrimoxazole 240 Mg	Syrup	APBD	196	Rp 135	Rp 26,460	Oct-16
		Dexa Injeksi 1 MI	Ampl	APBD	51	Rp 1,725	Rp 87,952	Aug-19
		Dexamethasone 0,5 Mg	Tablet	APBD	471	Rp 48	Rp 22,608	Aug-19
		Diazepam 5 Mg	Injeksi	APBD	20	Rp 2,150	Rp 43,000	Nov-17
		Diazepam	Tablet	APBD	210	Rp 110	Rp 23,100	Aug-18
		Diethylcarbamazine	Tablet	Program	1,290	Rp 119	Rp 153,510	Jun-18
		Diklofenac Sodium	Tablet	APBD	1,500	Rp 160	Rp 240,000	Feb-21
		Diphenhydramine Inj 10 Mg/Ml	Ampl	APBD	51	Rp 1,321	Rp 67,371	Sep-20
		Disposable 1 Cc	Pcs	JKN	233	Rp 700	Rp 163,100	Dec-20
		Domperidon 10 Mg	Tablet	JKN	1,230	Rp 90	Rp 110,700	May-17
		Dumolab Anil Ab (10 Ml)	Botol	APBD	2	Rp 115,637	Rp 231,274	Aug-19
		Easy Touch Strip Asam Urat	Pcs	JKN	25	Rp 5,060	Rp 125,500	Jun-20
		Epinefrin	Ampl	APBD	100	Rp 2,486	Rp 246,600	Jul-17
		Foly Catheter	pcs	APBD	2	Rp 15,625	Rp 31,250	Feb-21
		Furosemide	Tablet	JKN	10	Rp 94	Rp 940	Sep-20
		Glucosa 10 %	Botol	APBD	2	Rp 6,900	Rp 13,800	Jun-17
		Glucosa 5 %	Botol	APBD	13	Rp 6,900	Rp 89,700	May-20
		Griseofulvin 125 Mg	Tablet	JKN	589	Rp 283	Rp 166,687	Jan-21
		H2O2	Botol	APBD	3	Rp 12,498	Rp 37,488	May-20
		Infuse Set Dewasa	Pcs	APBD	12	Rp 5,400	Rp 64,800	Jul-20
		Infuse Set Ped	Pcs	APBD	4	Rp 5,600	Rp 22,400	Jun-17
		Isoplas 5cm x 4,5 m	Pcs	JKN	3	Rp 14,300	Rp 42,900	Mar-18
		Urokan 2 %	Tablet	APBD	322	Rp 1,380	Rp 458,160	Mar-18
		Loperamide 2 Mg	Injeksi		41	Rp 95	Rp 3,895	Jan-19
		Metylgerometrine Maleat 0,2 Mg/Ml	Injeksi	APBD	42	Rp 3,520	Rp 147,840	Jun-20
		Metylgerometrine Maleat 0,2 Mg/Ml	Injeksi	JKN	69	Rp 3,520	Rp 242,880	Jul-20
		Metylprednisolon 4 Mg	Tablet	APBD	680	Rp 180	Rp 122,400	Nov-19
		Mineral Mix (8G)	Sacht	APBD	122	Rp 2,920	Rp 352,240	Jan-18
		Nasal Oxygen Canula	Pcs	JKN	14	Rp 6,484	Rp 90,776	Aug-20
		Natrium Diklofenak 50 Mg	Tablet	APBD	225	Rp 160	Rp 36,000	Mar-17
		Nifedipine 10 Mg	Tablet	APBD	519	Rp 135	Rp 70,065	Nov-17
		Oat Anak -Kdt	Paket	Program	1	Rp 203,259	Rp 203,259	Dec-20
		Obat Batuk Hitam	Syrup	APBD	1	Rp 3,998	Rp 3,998	Aug-20
		Oralt 200 Mg	Bungkus	APBD	124	Rp 599	Rp 74,276	Oct-17
		Otsu-Mgs04 20 %	Vial	APBD	45	Rp 3,328	Rp 149,760	Aug-19
		Otsu-Mgs04 40 %	Vial	JKN	33	Rp 3,796	Rp 125,268	Nov-17
		Oxitetrasik Salep Kulit	Tube	APBD	1	Rp 6,996	Rp 6,996	Sep-17
		Oxytocin 10 lu	Ampl	JKN	115	Rp 1,837	Rp 211,255	Jun-20
		Paracetamol 120 Mg	Botol	APBD	5	Rp 1,252	Rp 6,260	Jun-16
		Pheno Glycerol 10 %	Pcs	APBD	100	Rp 2,500	Rp 250,000	Aug-20
		Phytomenadione 2 Mg	Tablet	APBD	39	Rp 890	Rp 34,710	Oct-19

		Phytomenadione 2 Mg	Tablet	JKN	978	Rp 890	Rp 870,420	Feb-20
		Phytomenadione Inj	Amp1	JKN	22	Rp 4,438	Rp 97,636	Sep-18
		Plain Catgut	Pcs	APBD	2	Rp 3,522	Rp 7,044	Nov-19
		Plain/Simple	Pcs	APBD	9	Rp 3,522	Rp 31,698	Jul-17
		Povidon 300 Ml	Bolol	JKN	81	Rp 23,400	Rp 1,895,400	Sep-17
		Prednison 5 Mg	Tablet	APBD	44	Rp 81	Rp 3,564	Nov-16
		Propylthiouracil 100 mg	Tablet	JKN	100	Rp 324	Rp 32,400	Apr-20
		Protein Urine Test	Amp1	APBD	22	Rp 99,000	Rp 2,178,000	Dec-18
		Pyrantel Palmoate 125 Mg		JKN	18	Rp 334	Rp 6,012	Sep-18
		Ramolit	Sacht	APBD	24	Rp 599	Rp 14,376	Sep-20
		Ranitidin	Amp1	APBD	167	Rp 121	Rp 20,207	May-18
		Rdt Malaria	Bolol	Program	17	Rp 5,271	Rp 89,607	rusak
		Rdt Malaria	Bolol	Program	1	Rp 5,271	Rp 5,271	Jul-20
		Rivanol 300Ml	Bolol	JKN	34	Rp 3,900	Rp 132,600	Apr-20
		RI	Tablet	APBD	110	Rp 6,968	Rp 766,480	Sep-19
		Salbutamol Sulfat 2Mg	Tablet	APBD	43	Rp 87	Rp 3,741	May-20
		Silk Braided 3/0 500 Cm	Pcs	JKN	4	Rp 311,458	Rp 1,245,832	Jun-18
		Simvastatin	Tab	APBD	100	Rp 110	Rp 11,000	Jul-19
		Tablet Tambah Darah	Kaps	APBD	4,991	Rp 444	Rp 2,216,004	Aug-20
		Tetracycline 250 Mg	Bolol	APBD	3	Rp 216	Rp 648	May-20
		Tetracycline 500 Mg	Tablet	APBD	100	Rp 348	Rp 34,800	Sep-20
		Ultrasonic Gel	Tablet	JKN	40	Rp 16,359	Rp 654,360	Jun-16
		Urine Bag	Pcs	APBD	2	Rp 3,887	Rp 7,774	Nov-16
		Urine Gluko Protein Tes	Pcs	JKN	23	Rp 9,900	Rp 227,700	Sep-18
		Vitamin A Biru	Tablet	APBD	1,362	Rp 260	Rp 354,120	Dec-18
		Vitamin A Merah	Kapsul	APBD	1,207	Rp 519	Rp 626,433	Sep-20
		Vitamin B 1 Inj	Amp1	APBD	5	Rp 2,475	Rp 12,375	Dec-18
		Vitamin B 6	Tablet	APBD	48	Rp 148	Rp 7,104	Jun-20
		Vitamin B12	Tablet	APBD	215	Rp 53	Rp 11,395	Nov-19
		Wing Nedle 23Gx 3/4	Pcs	APBD	1	Rp 3,000	Rp 3,000	Dec-17
		Winged Infusion Set 23 Gx3%	Pcs	JKN	16	Rp 3,000	Rp 48,000	Aug-18
		Ziel Nelsen	Bolol	JKN	2	Rp 116,875	Rp 233,750	Jun-20
		Zink	Tablet	APBD	200	Rp 644	Rp 128,800	Jun-19
		Zirk	Tablet	JKN	62	Rp 644	Rp 39,928	Jul-18
12	Puskesmas Colol	Acyclovir	Tube	APBD	33	Rp 3,977	Rp 131,225	Jul-16
		Ambroxol Sirup	Bolol	APBD	3	Rp 3,520	Rp 10,560	Sep-15
		Amoxicillin 500 mg	Tab	APBD	40,000	Rp 192	Rp 7,680,000	Sep-18
		Cefixime	Bolol	JKN	14	Rp 2,490	Rp 34,860	Jun-20
		Cotrimoksasole sirup	Bolol	APBD	117	Rp 5,405	Rp 632,385	Jun-20
		Dextrose Infus 10 %	Bolol	APBD	14	Rp 7,500	Rp 105,000	Mar-20
		Difenhidramine Hcl Inj	Amp	APBD	135	Rp 1,321	Rp 178,335	May-20
		Domperidone	Tab	APBD	340	Rp 90	Rp 30,600	Jan-21
		Folic Acid	Tab	APBD	100	Rp 81	Rp 8,100	May-17
		Glukosa 5 %	Bolol	APBD	38	Rp 6,900	Rp 262,200	Apr-20
		Ibuprofen Sirup	Bolol	JKN	13	Rp 2,596	Rp 33,748	Mar-21
		Methylergometrine Maleate Inj	Amp	APBD	524	Rp 3,520	Rp 1,844,480	May-20
		MgSO4 20%	Bolol	APBD	18	Rp 3,328	Rp 59,904	Oct-20
		Mineral Mix	Sachet	APBD	40	Rp 2,920	Rp 116,800	Nov-19
		Nifedipin Tab 10 mg	Tab	APBD	2,270	Rp 135	Rp 306,450	Jun-20
		Oxytocin Inj	Amp	APBD	287	Rp 1,837	Rp 527,219	Mar-17
		Paracetamol 500 mg	Tab	APBD	45	Rp 66	Rp 2,970	Aug-20
		Phytomenadione	Amp	APBD	47	Rp 4,438	Rp 208,586	Aug-20
		Prednison 5 mg	Tab	APBD	1,400	Rp 81	Rp 113,400	Mar-17
		Ranitidin Inj	Amp	APBD	27	Rp 1,823	Rp 49,221	Jun-20
		Salbutamol 2 mg	Tab	APBD	50	Rp 87	Rp 4,350	Dec-18
		Sodium Bikarbonat Inj	Bolol	APBD	24	Rp 30,360	Rp 728,640	Jul-20
		Tablet Tambah Darah	Tab	APBD	3,742	Rp 445	Rp 1,665,190	Jul-19
		Ultrasonic Gel	Bolol	APBD	24	Rp 16,359	Rp 392,616	Aug-19
		Vit A Merah	Capsul	APBD	300	Rp 519	Rp 155,700	Sep-20
		Zink	Tab	APBD	500	Rp 644	Rp 322,000	Jan-20
		TOTAL						-
	GFK							
1		Albendazole syrup	Bolol	Program	220	Rp 4,300,00	Rp 946,000	Apr-24
2		Alkohol swab	box	Program	111	Rp 35,090,00	Rp 3,894,990	Mar-24
3		Alkohol swab	pcs	APBD	86	Rp 11,100,00	Rp 954,600	Nov-24
4		ALT/GPT Liquiform	paket	APBD	3	Rp 1,213,000,00	Rp 3,639,000	Dec-24
5		Ambroskol Syrup	Bolol	APBD	4,909	Rp 8,998,77	Rp 44,174,962	Aug-24
6		Antiasida tablet	tablet	APBD	3,700	Rp 55,50	Rp 205,350	Des-24
7		Asam Acetat	Bolol	APBD	58	Rp 27,000,00	Rp 1,566,000	Aug-24
8		Asam Traneksamat	Tablet	APBD	2,100	Rp 2,895,99	Rp 6,081,579	Jul-24
9		Atropin injeksi	Ampul	APBD	2,100	Rp 1,718,00	Rp 3,607,800	Apr-24
10		Benecheck Glukosa test	box @50pcs	APBD	2,794	Rp 16,350,00	Rp 45,681,900	Apr-24
11		Benzatin Benzil penisilin	Vial	APBD	220	Rp 11,604,55	Rp 2,553,000	Aug-24
12		Betadine Kumur	Bolol	APBD	112	Rp 47,465,00	Rp 5,316,080	Apr-24
13		Bili D liquiform	paket	APBD	10	Rp 769,500,00	Rp 7,695,000	Aug-24
14		Blood split pack	pcs	APBD	50	Rp 44,400,00	Rp 2,220,000	Dec-23
15		Captopril 12.5 mg	tablet	APBD	69,800	Rp 75,68	Rp 5,282,591	Mar-24
16		Catgut chromic 3/0	saset	APBD	320	Rp 34,844,00	Rp 11,150,080	May-24
17		Catgut plain 2/0	saset	APBD	218	Rp 42,265,00	Rp 9,213,770	Jun-24
18		Cefadroxil suspensi	Bolol	APBD	342	Rp 4,409,73	Rp 1,508,127	May-24
19		Cefadroxil suspensi	Bolol	APBD	92	Rp 13,410,00	Rp 1,233,720	Oct-24
20		Cimetidine	Tablet	APBD	66,100	Rp 598,29	Rp 39,546,969	Aug-24
21		Clozapine	Tablet	Program	23	Rp 23,650,00	Rp 543,950	Dec-23
22		Clozapine	Tablet	Program	59	Rp 23,650,00	Rp 1,395,350	Mar-24
23		DBD Combo	box	Program	22	Rp 453,660,00	Rp 9,980,520	Aug-24
24		DBD Combo	box	Program	48	Rp 453,660,00	Rp 21,775,680	Sep-24
25		Desinfektan Spray	Bolol	APBD	492	Rp 48,100,00	Rp 23,665,200	Apr-24
26		DHP Firmal	Tablet	Program	90	Rp 1,960,00	Rp 176,400	May-24
27		Diazepam Injeksi	Ampul	APBD	350	Rp 1,609,50	Rp 563,325	Sep-24
28		Dimenidrinat	Tablet	APBD	19,600	Rp 118,06	Rp 2,314,047	Jul-24
29		Emersol Oil	Bolol	APBD	37	Rp 400,500,00	Rp 14,818,500	Jul-24
30		Epinefrin	Ampul	APBD	460	Rp 1,893,00	Rp 870,780	Nov-23
31		Eugenol	Bolol	APBD	8	Rp 25,188,00	Rp 201,504	Rusak/Pecah
32		Fenobarbital	Tablet	APBD	500	Rp 184,66	Rp 92,332	Mar-24

33	Fenol Glicerol tetes telinga	Botol	APBD	48	3,330.00	Rp 159,840	Jun-24		
34	Folley Caileter no 14	pcs	APBD	960	11,050.00	Rp 10,608,000	Oct-24		
35	Garam Orali	pcs	APBD	200	666.00	Rp 133,200	Aug-24		
36	Gentamicin injeksi	Ampul	APBD	2355	3,385.50	Rp 7,972,853	Apr-24		
37	Giemska	Botol	APBD	4	303,139.20	Rp 1,212,557	Rusak/Pecah		
38	Giemska	Botol	APBD	43	303,139.20	Rp 13,034,986	Aug-24		
39	Glukoprotein urine test	pcs	APBD	30	1,526.25	Rp 45,788	Jul-24		
40	Glukoprotein urine test	pcs	APBD	310	1,526.25	Rp 473,138	Oct-24		
41	Glukosa 5 %	Botol	APBD	820	6,687.25	Rp 5,483,541	Jul-24		
42	Griseofulvin	Tablet	APBD	42000	220.00	Rp 9,240,000	Feb-24		
43	Haloperidol 0.5 mg	Tablet	APBD	107700	55.00	Rp 5,923,500	Aug-24		
44	Haloperidol decanoate	Ampul	APBD	495	109,000.00	Rp 53,955,000	Oct-24		
45	HDL LE	Paket	APBD	9	3,933,000.00	Rp 35,397,000	Feb-24		
46	Insektisida Zeta	liter	Program	50	200,000.00	Rp 10,000,000	Sep-24		
47	Ketokonazole	Tablet	APBD	19600	280.00	Rp 5,488,000	Jan-24		
48	Kloremfenikol Suspensi	Botol	APBD	300	19,423.89	Rp 5,827,167	Sep-24		
49	Kotrimoksasole suspensi	Botol	APBD	690	Rp 2,163	Rp 1,492,470	Oct-23		
50	Larutan HCl 0.1 N	Botol	APBD	4	13,728.00	Rp 54,912	Rusak/Pecah		
51	Lugol	Botol	APBD	20	88,400.00	Rp 1,768,000	May-24		
52	Malation	liter	APBD	180	267,500.00	Rp 48,150,000	Jun-24		
53	Masker	box	APBD	1401	58,510.00	Rp 81,972,510	Apr-24		
54	Masker	pcs	APBD	2374	54,110.00	Rp 128,457,140	Des-24		
55	Methanol	Botol	APBD	2	49,140.00	Rp 98,280	Rusak/Pecah		
56	Methisoprinol	Tablet	APBD	24000	4,827.39	Rp 115,857,360	Aug-24		
57	Metronidazol	Tablet	APBD	2300	160.00	Rp 368,000	Jul-24		
58	Metronidazol	Tablet	APBD	49200	465.09	Rp 22,882,428	Sep-24		
59	Metyldopa/Dopamet	Tablet	APBD	19900	3,289.00	Rp 65,451,100	Mar-24		
60	MgSO4 20%	Vial	APBD	1638	4,521.03	Rp 7,405,447	Apr-24		
61	MgSO4 20%	Vial	Program	450	4,973.00	Rp 2,237,850	Apr-24		
62	MgSO4 40%	Vial	APBD	1740	5,100.00	Rp 8,874,000	Dec-23		
63	MgSO4 40%	Vial	Program	138	5,661.00	Rp 781,218	Apr-24		
64	Mineral mix	saset	Program	1880	2,981.00	Rp 5,604,280	Apr-24		
65	Mineral mix	pcs	Program	3480	4,700.00	Rp 16,356,000	Oct-24		
66	Miniaspi	Tablet	APBD	38100	92.00	Rp 3,505,200	Sep-24		
67	Multivitamin syrup	Botol	APBD	832	40,236.39	Rp 33,476,676	May-24		
68	N- Acetyl sistein	Tablet	APBD	10560	350.15	Rp 3,697,632	Aug-24		
69	Nasal Caruila Anak	pcs	APBD	200	Rp 9,600.00	Rp 1,920,000	Apr-24		
70	Natrium Bikarbonat (Meylon)	Vial	APBD	558	6,750.00	Rp 3,766,500	Nov-23		
71	Natrium Diklofenak	Tablet	APBD	900	119.00	Rp 107,100	Mar-24		
72	New Diatab	Tablet	APBD	5300	891.00	Rp 4,722,300	Jun-24		
73	Nistatin vaginal 500.000 IU	Tablet	APBD	500	957.00	Rp 478,500	Jan-24		
74	Norepinefrin	Ampul	APBD	375	30,841.35	Rp 11,565,506	Apr-24		
75	Obat Batuk Kombinasi	Botol	APBD	482	33,798.39	Rp 16,290,824	Oct-24		
76	Oksitosin	Ampul	APBD	9900	1,608.00	Rp 15,919,200	Dec-25		
77	Ondancentron injeksi	Ampul	APBD	80	8,800.00	Rp 704,000	Apr-24		
78	Phenobarbital Injeksi	Ampul	APBD	210	1,700.00	Rp 357,000	Nov-23		
79	Piridoksin	Tablet	APBD	45400	76.69	Rp 3,481,767	Sep-24		
80	Primakuin	Tablet	Program	70	296.00	Rp 20,720	Jul-24		
81	Protein totais	paket	APBD	15	1,000,000.00	Rp 15,000,000	Oct-24		
82	Ranitidine	Tablet	APBD	287500	96.00	Rp 27,600,000	Apr-24		
83	Rapid Antigen	box @20pcs	APBD	97	820,000.00	Rp 79,540,000	Jan-24		
84	RTD HCV	pcs	Program	200	9,920.00	Rp 1,984,000	Oct-24		
85	Reagen Zield Nielsen	paket	Program	49	194,000.00	Rp 9,506,000	Aug-24		
86	Risperidone 1 mg	Tablet	APBD	5500	134.00	Rp 737,000	May-24		
87	Salbutamol 4 mg	Tablet	APBD	47700	72.65	Rp 3,465,622	Aug-24		
88	Serum Anti Bisa Ular	box	APBD	183	521,833.20	Rp 95,495,476	Mar-24		
89	Sianokobalamine B12	tablet	APBD	16300	48.44	Rp 789,513	Apr-24		
90	Sianokobalamine injeksi	Ampul	APBD	2100	1,135.53	Rp 2,384,613	Aug-24		
91	Simvastatin	Tablet	APBD	800	93.00	Rp 74,400	Aug-24		
92	Steri one 1 L	Botol	APBD	161	65,000.00	Rp 10,465,000	Apr-24		
93	Stesolid	suppo	APBD	70	13,546.00	Rp 948,220	Dec-24		
94	Stomach tube no 16	pcs	APBD	1	81,742.50	Rp 81,743	Jul-24		
95	Suplemen Probiotik	saset	APBD	30360	1,072.82	Rp 32,570,663	Apr-24		
96	Tabung EDTA	pak	APBD	1	110,000.00	Rp 110,000	May-24		
97	Tecnoct no 10	box	APBD	10	258,910.00	Rp 2,589,100	Jul-24		
98	Tetagan	box	APBD	43	148,135.00	Rp 6,369,805	Aug-24		
99	Tetrasiklin 500 mg	Tablet	APBD	14400	1,441.89	Rp 20,763,216	Aug-24		
100	Thiamin Injeksi	Ampul	APBD	1620	1,884.78	Rp 3,430,300	Dec-23		
101	Tramadol	Tablet	APBD	9300	1,221.00	Rp 11,355,300	Jul-24		
102	Trihexikifendil	tablet	APBD	57200	65.00	Rp 3,718,000	Jun-24		
103	Urea UV	Paket	APBD	11	1,370,500.00	Rp 15,075,500	Nov-23		
104	Vitamin B-Compleks	Tablet	APBD	6000	66.60	Rp 399,600	Jun-24		
105	Zink Syrup	Botol	APBD	50	9,546.00	Rp 477,300	Oct-24		
JUMLAH						Rp 2,461,435,289			
2	RSUD BORONG	NAMA OBAT/BMHP	SATUAN	SUMBER OBAT	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TANGGAL ED		
				DID	2020	6,100	240,90	1,469,490,00	31-Jan-24
		Ambrosiol tablet 30 mg	tablet	DID	2020	27,300	83.00	2,265,900,00	31-Dec-24
		Amlodipin tablet 5 mg	tablet	DID	2020	190	3,778.00	717,820,00	31-Dec-24
		Atropin Sulfat injeksi 0,25mg/ml	ampul	DAU RS	2023	38,000	228.00	8,664,000,00	31-Dec-24
		Betahistin tablet 6 mg	tablet	DAU RS	2023	280	8,350.00	2,338,000,00	31-Dec-24
		Dekstrosa 10% - 500 mL	botol	DAU RS	2023	120	890.00	106,800,00	31-Dec-24
		Fenofibrat tablet 300 mg	tablet	DAU RS	2023	180	3,950.00	711,000,00	28-Feb-24
		Gelofusin - 500 mL	buah	DID	2022	30	146,340.49	4,390,214.72	31-Dec-24
		Haloperidol tablet 2 mg	tablet	DAU RS	2023	300	192.00	57,600,00	30-Nov-24
		HES 6% + NaCl 0,9% - 500 mL	botol	DAU RS	2023	40	91,020.00	3,640,800,00	31-Dec-24
		Hidrokortizazid tablet 25 mg	buah	DAU RS	2023	2,200	149.00	327,800,00	31-Dec-24
		Kaptopril tablet 25 mg	tablet	DAU RS	2023	1,000	137.00	137,000,00	31-Dec-24
		Benang bedah T-Vio 2-0 (Polyglycolide 2-0, 90cm, Round Bodie	buah	DID	2022	216	83,333.25	17,999,982,00	31-Dec-24
		Elektroda Anak	pak : 50	DID	2021	174	68,750.00	11,962,500,00	15-Mar-24
		Elektroda Dewasa	pak : 50	DID	2021	102	68,750.00	7,012,500,00	31-May-24
		Folley Catheter Nomor 18	buah	DID	2021	30	9,831.26	294,937.67	
		Kertas USG Ukuran 110 x 18	buah	DID	2021	1	518,848.00	518,848,00	
		Nasal Canul Anak	buah	DID	2021	45	7,139.00	321,255,00	30-Sep-24

NGT / Stomach tube Nomor 08	bahan	DID 2021	10	20.735,00	207.350,00	31-Mar-24
NGT / Stomach tube Nomor 10	bahan	DID 2021	10	55.455,40	554.554,00	31-May-26
NGT / Stomach tube Nomor 12	bahan	DID 2021	32	9.680,00	309.760,00	31-Jan-24
Saliva Ejector	boks : 100 bu	DAU 2020	4	166.705,00	666.820,00	17-Jun-24
Acetylsisstein kapsul 200 mg	Kapsul	IFK	9620	350,15	3.368.486,69	2/28/2024
Akarbose tablet 50 mg	tablet	IFK	400	737,00	294.800,00	2/28/2024
Alteplase injeksi 50 mg	vial	IFK	17	4.500.545,00	76.509.265,00	3/31/2024
Antasida DOEN tablet	Tablet	IFK	700	55,50	38.850,00	4/1/2024
Asiklovir krim 5%	tube	IFK	48	5.436,78	260.965,44	7/31/2024
Benang bedah Catgut Chromic No 2-0	bahan	IFK	48	34.844,00	1.672.512,00	5/31/2024
Benang bedah Catgut Chromic No 3-0	bahan	IFK	24	34.844,00	836.256,00	5/30/2024
Benang bedah Catgut Plain No 2-0 (Plain Catgut 75 cm, 1/2 circ)	bahan	IFK	70	42.265,00	2.958.550,00	5/31/2024
Bupivakain	Ampul	IFK	150	27.215,00	4.082.250,00	6/1/2024
Dimenidrinat tablet 50 mg	tablet	IFK	100	174,00	17.400,00	6/30/2024
Giseril Guaikrolat tablet 100 mg	tablet	IFK	100	287,49	28.749,00	1/31/2024
Kotrimoksazole combination tablet 480 mg	Tablet	IFK	1700	247,23	420.291,51	
Magnesium Sulfat injeksi 20% (MgSO4 20%)	vial	IFK	49	4.521,03	221.530,47	4/30/2024
Oksitosin Injeksi 10 IU/ml - 1 ml	Ampul	IFK	100	1.608,00	160.800,00	
Sefadroxil sirup kering (25 mg/5mL)	botol	IFK	55	13.410,00	737.550,00	5/30/2024
Sterione 1 liter (cairan antisepтик)	botol	IFK	69	65.000,00	4.485.000,00	-
Vitamin B12 tablet 50 mcg	tablet	IFK	700	48,44	33.908,00	7/31/2024
JUMLAH						Rp 160.802.096

3. DINAS PETERNAKAN

No	Dinas Peternakan	NAMA OBAT/BMHP	SATUAN	SUMBER OBAT	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	TANGGAL ED
1		Vaksin Rabies	Dosis	APBD	3.000	18.000	Rp 54.000.000	
JUMLAH								

4. DP2KBP3A

No	Dinas P2KBP3A	NAMA OBAT/BMHP	SATUAN	SUMBER OBAT	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	TANGGAL ED
1		Asam Meferamat	Dosis		498	1.080	Rp 537.640	Jun-22
2		Kondom	Gross		20	134.400	Rp 2.688.000	Nov-24
3		Fallope Ring	Set		400	13.717	Rp 5.485.600	Apr-24
JUMLAH								

5. BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Badan Keuangan Daerah	NAMA BARANG	SATUAN	SUMBER DANA	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	KETERANGAN
		Barang Sisa Yang Tidak Terpakai 2015 (SKRD Dinas Infokom)	Blok		40	43.750	Rp 1.750.000	Rusak
		Barang Sisa Yang Tidak Terpakai 2015 (STBP)	Blok		32	43.750	Rp 1.400.000	Rusak
		Barang Sisa Yang Tidak Terpakai 2017 (BPHTB)	Jepit		37	2.400	Rp 86.800	Rusak
		Barang Sisa Yang Tidak Terpakai 2017 (SP3 Pos)	Blok		40	55.000	Rp 2.200.000	Rusak
		Barang Sisa Yang Tidak Terpakai 2016 (Retribusi Galian C Dinas ESDM)	Lembar		13	1.300	Rp 16.900	Rusak
		Barang Sisa Yang Tidak Terpakai 2016 (Retribusi Galian C Dinas ESDM)	Lembar		20	1.300	Rp 26.000	Rusak
		Barang Sisa Yang Tidak Terpakai 2016 (Retribusi Galian C Dinas ESDM)	Lembar		21	1.300	Rp 27.300	Rusak
		Barang Sisa Yang Tidak Terpakai 2016 (Retribusi Galian C Dinas ESDM)	Lembar		12	1.300	Rp 15.600	Rusak
		Barang Sisa Yang Tidak Terpakai 2016 (Retribusi Galian C Dinas ESDM)	Lembar		18	1.300	Rp 23.400	Rusak
		Barang Sisa Yang Tidak Terpakai 2016 (SKPD Dinas ESDM)	Lembar		14	1.750	Rp 24.500	Rusak
		Barang Sisa Yang Tidak Terpakai 2016 (SKPD Dinas ESDM)	Blok		4	43.750	Rp 175.000	Rusak
		Barang Sisa Yang Tidak Terpakai 2016 (STS Dinas ESDM)	Blok		23	43.750	Rp 1.006.250	Rusak
		Barang Sisa Yang Tidak Terpakai 2018 (SKRD)	Jepit		104	1.750	Rp 182.000	Rusak
			Jepit		775	2.200	Rp 1.705.000	Rusak
		Barang Sisa Yang Tidak Terpakai 2018 (SSRD)	Jepit		279	1.750	Rp 482.250	Rusak
			Jepit		600	2.200	Rp 1.320.000	Rusak
		STS	Jepit		3	2.400	Rp 7.200	Rusak
		SKPD (2023)	Jepit		11	2.400	Rp 26.400	Rusak
		SSPD (2023)	Jepit		1	2.400	Rp 2.400	Rusak
JUMLAH							Rp 10.485.000	

6. DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

No	Dinas Nakertrans	NAMA BARANG	SATUAN	NOMOR SERI	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	KETERANGAN
		KARTU KUNING	LEMBAR	000001-000599	599	1000	599.000	Rusak
JUMLAH								

7. DINAS KOPERASI

No	DINAS KOPERASI	NAMA BARANG	SATUAN	NOMOR SERI	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	KETERANGAN
1		SKRD	Jepit		16	2.400	Rp 38.400	Rusak
2		SSRD	Jepit		16	2.664	Rp 42.624	Rusak
3		STS	Jepit		24	2.400	Rp 57.600	Rusak
JUMLAH								

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	BPBD	NAMA BARANG	SATUAN	NOMOR SERI	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	KETERANGAN
1		Mie Instan	Dos		37	120.000	Rp 4.440.000	Kadaluarsa
JUMLAH							Rp 4.440.000	
TOTAL BARANG PERSEDIAAN YANG RUSAK							Rp 2.700.612.649	

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN LEMBAGA PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM	BENTUK	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN S/D TAHUN LALU	JUMLAH PENYERTAAN TAHUN INI	JUMLAH YANG DISERTAKAN S/D TAHUN INI	SISA YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN TAHUN INI (Dividen)	JUMLAH MODAL YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13
1	2009	BANK NTT		SAHAM	2,000,000,000	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000
2	2010	BANK NTT	Perda Kab. M. Timur No. 5 Tahun 2010	SAHAM	3,500,000,000	2,000,000,000	3,500,000,000	5,500,000,000	-	1,116,661,633.18	-	5,500,000,000
3	2011	BANK NTT	Perda Kab. M. Timur No. 5 Tahun 2010	SAHAM	4,500,000,000	5,500,000,000	4,500,000,000	10,000,000,000	-	1,427,808,758.00	-	10,000,000,000
4	2012	BANK NTT	Perda Kab. M. Timur No. 5 Tahun 2010	SAHAM	5,000,000,000	10,000,000,000	5,000,000,000	15,000,000,000	-	2,313,565,101.00	-	15,000,000,000
5	2013	BANK NTT	Perda Kab. M. Timur No. 5 Tahun 2010	SAHAM	5,000,000,000	15,000,000,000	5,000,000,000	20,000,000,000	-	4,664,815,376.68	-	20,000,000,000
6	2014	BANK NTT	Perda Kab. M. Timur No. 5 Tahun 2010	SAHAM	-	20,000,000,000	-	20,000,000,000	-	5,683,353,055.00	-	20,000,000,000
7	2015	BANK NTT	Perda Kab. M. Timur No.3 Tahun 2014	SAHAM	10,000,000,000	20,000,000,000	10,000,000,000	30,000,000,000	-	6,005,131,513.00	-	30,000,000,000
8	2016	BANK NTT	Perda Kab. M. Timur No.3 Tahun 2014	SAHAM	10,000,000,000	30,000,000,000	10,000,000,000	40,000,000,000	-	7,756,215,361.00	-	40,000,000,000
9	2017	BANK NTT	Perda Kab. M. Timur No.3 Tahun 2014	SAHAM	10,000,000,000	40,000,000,000	10,000,000,000	50,000,000,000	-	7,498,720,325.00	-	50,000,000,000
10	2018	BANK NTT	Perda Kab. M. Timur No.3 Tahun 2014	SAHAM	10,000,000,000	50,000,000,000	10,000,000,000	60,000,000,000	-	8,762,717,194.00	-	60,000,000,000
11	2019	BANK NTT	Perda Kab. M. Timur No.3 Tahun 2014	SAHAM	10,000,000,000	60,000,000,000	10,000,000,000	70,000,000,000	-	9,927,249,503.00	-	70,000,000,000
12	2020	BANK NTT	Perda Kab. M. Timur No.3 Tahun 2014	SAHAM	14,082,820,000	70,000,000,000	14,082,820,000	84,082,820,000	-	10,437,225,306.01	-	84,082,820,000
13	2021	Bank NTT	Perda Kab. Manggarai Timur No 2 Tahun 2020	SAHAM	12,500,000,000	84,082,820,000	12,500,000,000	96,582,820,000	-	10,261,866,180.00	0	96,582,820,000
14	2022	Bank NTT	Perda Kab. Manggarai Timur No 2 Tahun 2020	SAHAM	-	96,582,820,000	-	96,582,820,000	-	6,335,890,845.00	-	96,582,820,000
15	2023	Bank NTT	Perda Kab. Manggarai Timur No 2 Tahun 2020	SAHAM	4,000,000,000	96,582,820,000	4,000,000,000	100,582,820,000	-	10,065,795,251.00	-	100,582,820,000
16	2024		Perda Kab. Manggarai Timur No 2 Tahun 2020		-	100,582,820,000	-	100,582,820,000	-	4,654,873,033.00	-	100,582,820,000
			TOTAL		100,582,820,000	100,582,820,000	100,582,820,000	100,582,820,000	-	96,911,888,434.87	-	100,582,820,000

PENDAPATAN HIBAH ASET TETAP TANAH

No.	Perangkat Daerah	Nama Barang	Tanggal Perolehan	Letak / Alamat	Luas (M ²)	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat	Harga Perolehan
1	Dinas Kesehatan	Tanah Poskesdes Benteng Tabu	2024	Watu Mundung, Dusun Purus Mundung, Desa Golo Meni	110.5		Penyerahan Pemerintah Desa BAST HIBAH : Pem.042.2/09/I/20 24 Tanggal 22 Januari 2024	1,105,000.00
2	Dinas Kesehatan	Tanah Poskesde Satar Mata	2024	Dusun Satar Mata, Ds. Gunung	2,500		Penyerahan Masyarakat A.n. Martinus Agus berdasarkan Berita Acara Penyerahan Tanah Tanpa nomor tanggal 22 Maret 2024	25,000,000.00
3	Dinas PPO	Tanah bangunan SDN Kembur Lokasi 2	2024	Kembur, Kel. Peot, Kec. Borong	662	7/4/2024	24.20.01.12.4.00012	23,832,000.00
4	Dinas Pertanian	Tanah Untuk Pembangunan Irigasi Persawahan di Longko, Desa Bangka Kantar, Kec.Borong	2024	Desa Bangka Kantar, Kec.Borong	111.6			3,013,200.00
5	Dinas Pertanian	Tanah Untuk Pembangunan Irigasi Persawahan di Wae Laban, Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar	2024	Desa Rana Gapang, Kecamatan Elar	111.15			1,111,500.00
6	Dinas Pertanian	Tanah Untuk Pembangunan Irigasi Wae Dingin Lempos,Desa Sita Kecamatan Rana Mese	2024	Desa Sita Kecamatan Rana Mese	135.85			1,901,900.00
7	Dinas Pertanian	Tanah Untuk Pembangunan Irigasi Wae Dingin Persawahan Noang Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese	2024	Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese	133.9			1,874,600.00
JUMLAH								57,838,200.00

Pendapatan Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Desa Golo Meni

No	Nama Dinas	Nama Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Dinas Kesehatan	Tempat tidur periksa	2024	7,000,000.00
2	Dinas Kesehatan	Meja 1/2 Biro	2024	1,500,000.00
3	Dinas Kesehatan	Meja 1/2 Biro	2024	1,500,000.00
4	Dinas Kesehatan	Meja 1/2 Biro	2024	1,500,000.00
JUMLAH				11,500,000.00

Pendapatan Hibah Aset Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Desa Golo Meni

No	Nama Dinas	Nama Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Dinas Kesehatan	Gedung Poskesdes Bentang Tabu	2024	116,000,000.00
JUMLAH				116,000,000.00

PENDAPATAN HIBAH ASET TETAP_JARINGAN

No	Kode Lokasi	Nama Barang	Letak/Alamat	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Dinas Kesehatan	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Lempang Paji	2024	191,186,000.00
Jumlah					191,186,000.00

SALDO AKHIR AKTIVA TETAP

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2024)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	439,591,247,793.71	79,186,610,925.86	10,301,773,789.80	508,476,084,929.77
2	Dinas Kesehatan	391,807,201,754.59	34,700,059,596.48	12,103,428,470.15	414,403,832,880.92
3	BLUD RSUD BORONG	165,625,610,542.05	77,712,236,200.36	4,598,355,942.43	238,739,490,799.98
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1,768,321,379,658.04	99,920,364,310.13	211,929,979,414.40	1,656,311,764,553.77
5	BLUD UPTD SPAM	1,955,844,533.00	30,152,752,214.00	12,750,000.00	32,095,846,747.00
6	Satuan Pol. Pamong Praja	765,570,300.00	-	-	765,570,300.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19,995,945,121.67	-	-	19,995,945,121.67
8	Dinas Sosial	1,189,938,858.00	-	-	1,189,938,858.00
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	36,620,077,960.00	-	-	36,620,077,960.00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11,076,066,904.00	-	-	11,076,066,904.00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4,290,512,855.00	-	-	4,290,512,855.00
12	Dinas Pertanahan	1,421,458,750.00	-	-	1,421,458,750.00
13	Dinas Lingkungan Hidup	11,896,939,046.81	-	-	11,896,939,046.81
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,167,422,444.00	-	-	4,167,422,444.00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1,917,171,260.00	-	36,196,200.00	1,880,975,060.00
16	Dinas Perhubungan	20,992,303,462.00	-	-	20,992,303,462.00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,174,884,478.93	-	-	2,174,884,478.93
18	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu	3,178,035,609.00	92,326,680.00	-	3,270,362,289.00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12,915,652,139.18	95,540,000.00	19,922,500.00	12,991,269,639.18
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	28,449,988,737.00	188,220,000.00	-	28,638,208,737.00
21	Dinas Pertanian	91,774,177,351.60	1,109,105,200.00	6,250,000.00	92,877,032,551.60
22	Dinas Peternakan	9,311,960,508.45	343,056,700.00	7,149,950.00	9,647,867,258.45
23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	79,780,229,289.10	353,028,000.00	-	80,133,257,289.10
24	Sekretariat Daerah	53,797,056,707.76	220,322,600.00	97,720,606.08	53,919,658,701.68
25	Sekretariat DPRD	23,950,546,030.00	759,639,000.00	51,456,520.00	24,658,728,510.00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5,047,688,244.00	-	-	5,047,688,244.00
27	Badan Keuangan Daerah	7,796,611,321.13	46,143,627.89	84,290,488.89	7,758,464,460.13
28	Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3,900,802,321.82	9,189,256.00	-	3,909,991,577.82
29	Inspektorat	4,018,665,450.00	-	-	4,018,665,450.00
30	Kec. Borong	12,731,867,307.67	16,712,000.00	-	12,748,579,307.67
31	Kec. Rana Mese	2,486,133,864.00	-	-	2,486,133,864.00
32	Kec. Kota Komba	6,081,928,908.00	-	-	6,081,928,908.00
33	Kec. Lamba Leda Selatan	4,512,918,267.70	-	-	4,512,918,267.70
34	Kec. Lamba Leda	1,210,456,333.11	11,189,466.89	-	1,221,645,800.00
35	Kec. Sambi Rampas	4,986,492,477.00	498,332,740.00	51,683,600.00	5,433,141,617.00
36	Kec. Elar Selatan	3,274,719,076.00	-	-	3,274,719,076.00
37	Kec. Lamba Leda Timur	2,839,678,800.00	13,227,000.00	-	2,852,905,800.00
38	Kec. Elar	2,997,438,424.00	29,124,000.00	54,483,250.00	2,972,079,174.00

39	Kec. Kota Komba Utara	1,121,828,999.00	-	-	1,121,828,999.00
40	Kec. Congkar	4,280,362,244.33	12,584,000.00	2,384,000.00	4,290,562,244.33
41	Kec. Lamba Leda Utara	2,227,804,326.92	-	-	2,227,804,326.92
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,902,010,960.00	25,410,500.00	-	1,927,421,460.00
NILAI KONSOLIDASI		3,258,384,629,418.57	325,495,174,017.61	239,357,824,731.75	3,344,521,978,704.43

PERHITUNGAN JUMLAH ASET TETAP TANAH

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2024)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	29,329,690,885.58	4,713,779,233.00	-	34,043,470,118.58
2	Dinas Kesehatan	4,488,484,842.58	26,105,000.00	-	4,514,589,842.58
3	BLUD RSUD BORONG	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	77,009,651,049.60	-	9,149,544,000.00	67,860,107,049.60
5	BLUD UPTD SPAM	-	-	-	-
6	Satuan Pol. Pamong Praja	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	260,000,000.00	-	-	260,000,000.00
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	-	-	-	-
10	Dinas Pengendalian Penduduk,Kelurga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	414,730,000.00	-	-	414,730,000.00
12	Dinas Pertanahan	-	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	382,717,600.00	-	-	382,717,600.00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	1,926,413,500.00	-	-	1,926,413,500.00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	187,413,477.93	-	-	187,413,477.93
18	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu	-	-	-	-
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14,457,002,100.00	-	-	14,457,002,100.00
21	Dinas Pertanian	8,736,373,173.60	7,901,200.00	-	8,744,274,373.60
22	Dinas Peternakan	866,002,821.48	-	-	866,002,821.48
23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	17,061,661,000.00	-	-	17,061,661,000.00
24	Sekretariat Daerah	1,770,308,257.77	2,030,000.00	24,563,990.08	1,747,774,267.69
25	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
27	Badan Keuangan Daerah	284,098,000.00	13,219,466.89	13,219,466.89	284,098,000.00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
29	Inspektorat	-	-	-	-
30	Kec. Borong	4,823,851,710.00	-	-	4,823,851,710.00
31	Kec. Rana Mese	309,437,700.00	-	-	309,437,700.00
32	Kec. Kota Komba	1,722,216,399.00	-	-	1,722,216,399.00
33	Kec. Lamba Leda Selatan	1,271,382,267.70	-	-	1,271,382,267.70
34	Kec. Lamba Leda	453,870,533.11	11,189,466.89	-	465,060,000.00
35	Kec. Sambi Rampas	618,396,480.00	201,580,640.00	-	819,977,120.00
36	Kec. Elar Selatan	337,740,500.00	-	-	337,740,500.00
37	Kec. Lamba Leda Timur	433,520,000.00	-	-	433,520,000.00
38	Kec. Elar	907,800,507.00	-	-	907,800,507.00

39	Kec. Kota Komba Utara	470,613,000.00	-	-	470,613,000.00
40	Kec. Congkar	82,100,000.00	-	-	82,100,000.00
41	Kec. Lamba Leda Utara	54,249,547.92	-	-	54,249,547.92
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
NILAI KONSOLIDASI		168,659,725,353.27	4,975,805,006.78	9,187,327,456.97	164,448,202,903.08

PERHITUNGAN JUMLAH ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2024)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	71,650,495,574.30	11,943,884,439.13	4,938,805,414.41	78,655,574,599.02
2	Dinas Kesehatan	156,540,393,091.18	3,586,530,410.00	76,335,600.00	160,050,587,901.18
3	BLUD RSUD BORONG	91,829,794,035.92	40,265,121,436.00	217,128,827.33	131,877,786,644.59
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	12,267,867,968.34	790,333,350.00	1,198,240,000.00	11,859,961,318.34
5	BLUD UPTD SPAM	1,308,170,100.00	109,408,400.00	12,750,000.00	1,404,828,500.00
6	Satuan Pol. Pamong Praja	761,880,300.00	-	-	761,880,300.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,062,107,221.67	-	-	5,062,107,221.67
8	Dinas Sosial	929,938,858.00	-	-	929,938,858.00
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	872,368,800.00	-	-	872,368,800.00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,161,304,905.00	-	-	5,161,304,905.00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1,267,176,355.00	-	-	1,267,176,355.00
12	Dinas Pertanian	988,058,750.00	-	-	988,058,750.00
13	Dinas Lingkungan Hidup	2,936,465,988.04	-	-	2,936,465,988.04
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,621,782,336.00	-	-	2,621,782,336.00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	720,198,300.00	-	36,196,200.00	684,002,100.00
16	Dinas Perhubungan	6,275,102,372.00	-	-	6,275,102,372.00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,658,242,001.00	-	-	1,658,242,001.00
18	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1,286,694,509.00	92,326,680.00	-	1,379,021,189.00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,524,976,080.00	-	15,408,000.00	1,509,568,080.00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1,227,025,270.00	26,360,000.00	-	1,253,385,270.00
21	Dinas Pertanian	4,841,982,081.00	250,550,000.00	2,250,000.00	5,090,282,081.00
22	Dinas Peternakan	3,432,729,359.50	276,195,000.00	1,969,950.00	3,706,954,409.50
23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2,228,222,241.00	-	-	2,228,222,241.00
24	Sekretariat Daerah	14,898,782,716.99	218,292,600.00	73,156,616.00	15,043,918,700.99
25	Sekretariat DPRD	4,892,017,711.00	245,380,000.00	51,056,520.00	5,086,341,191.00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2,821,889,338.00	-	-	2,821,889,338.00
27	Badan Keuangan Daerah	4,466,170,821.13	32,924,161.00	71,071,022.00	4,428,023,960.13
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2,405,096,663.00	9,189,256.00	-	2,414,285,919.00
29	Inspektorat	1,787,551,450.00	-	-	1,787,551,450.00
30	Kec. Borong	869,778,597.67	16,712,000.00	-	886,490,597.67
31	Kec. Rana Mese	673,233,000.00	-	-	673,233,000.00
32	Kec. Kota Komba	1,046,306,600.00	-	-	1,046,306,600.00
33	Kec. Lamba Leda Selatan	704,956,000.00	-	-	704,956,000.00
34	Kec. Lamba Leda	580,755,800.00	-	-	580,755,800.00
35	Kec. Sambi Rampas	799,140,997.00	87,792,100.00	47,183,600.00	839,749,497.00
36	Kec. Elar Selatan	795,008,100.00	-	-	795,008,100.00
37	Kec. Lamba Leda Timur	700,450,000.00	13,227,000.00	-	713,677,000.00
38	Kec. Elar	832,045,917.00	-	25,359,250.00	806,686,667.00
39	Kec. Kota Komba Utara	651,215,999.00	-	-	651,215,999.00
40	Kec. Congkar	693,997,000.00	12,584,000.00	2,384,000.00	704,197,000.00
41	Kec. Lamba Leda Utara	582,228,350.00	-	-	582,228,350.00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	704,350,000.00	25,410,500.00	-	729,760,500.00
NILAI KONSOLIDASI		418,297,951,557.74	58,002,221,332.13	6,769,294,999.74	469,530,877,890.13

PERHITUNGAN JUMLAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2024)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	293,816,207,213.86	51,129,833,829.00	2,517,177,892.25	342,428,663,150.61
2	Dinas Kesehatan	193,645,550,906.99	21,719,983,136.48	585,921,166.67	214,779,612,876.80
3	BLUD RSUD BORONG	69,140,121,238.40	32,311,219,248.00	4,370,842,530.05	97,080,497,956.35
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8,268,524,814.00	406,740,000.00	-	8,675,264,814.00
5	BLUD UPTD SPAM	0	-	-	-
6	Satuan Pol. Pamong Praja	0	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,322,212,000.00	-	-	1,322,212,000.00
8	Dinas Sosial	0	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	0	-	-	-
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,914,761,999.00	-	-	5,914,761,999.00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1,401,611,000.00	-	-	1,401,611,000.00
12	Dinas Pertanahan	0	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	3,765,190,059.11	-	-	3,765,190,059.11
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,448,001,969.00	-	-	1,448,001,969.00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1,196,972,960.00	-	-	1,196,972,960.00
16	Dinas Perhubungan	12,790,787,590.00	-	-	12,790,787,590.00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	329,229,000.00	-	-	329,229,000.00
18	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1,881,941,100.00	-	-	1,881,941,100.00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10,496,267,417.51	-	-	10,496,267,417.51
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5,479,039,691.00	107,680,000.00	-	5,586,719,691.00
21	Dinas Pertanian	4,104,573,237.00	-	-	4,104,573,237.00
22	Dinas Peternakan	4,614,978,327.47	-	-	4,614,978,327.47
23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	53,954,937,683.32	220,138,000.00	-	54,175,075,683.32
24	Sekretariat Daerah	34,975,374,733.00	-	-	34,975,374,733.00
25	Sekretariat DPRD	18,948,057,319.00	454,259,000.00	-	19,402,316,319.00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2,225,798,906.00	-	-	2,225,798,906.00
27	Badan Keuangan Daerah	2,643,492,500.00	-	-	2,643,492,500.00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1,492,810,000.00	-	-	1,492,810,000.00
29	Inspektorat	2,231,114,000.00	-	-	2,231,114,000.00
30	Kec. Borong	4,993,415,000.00	-	-	4,993,415,000.00
31	Kec. Rana Mese	1,503,463,164.00	-	-	1,503,463,164.00
32	Kec. Kota Komba	1,090,240,000.00	-	-	1,090,240,000.00
33	Kec. Lamba Leda Selatan	561,360,000.00	-	-	561,360,000.00
34	Kec. Lamba Leda	175,830,000.00	-	-	175,830,000.00
35	Kec. Sambi Rampas	647,910,000.00	204,460,000.00	-	852,370,000.00
36	Kec. Elar Selatan	1,709,913,000.00	-	-	1,709,913,000.00

37	Kec. Lamba Leda Timur	1,598,708,800.00	-	-	1,598,708,800.00
38	Kec. Elar	1,022,592,000.00	-	-	1,022,592,000.00
39	Kec. Kota Komba Utara	0	-	-	-
40	Kec. Congkar	2,243,998,244.33	-	-	2,243,998,244.33
41	Kec. Lamba Leda Utara	1,537,901,225.00	-	-	1,537,901,225.00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,197,660,960.00	-	-	1,197,660,960.00
NILAI KONSOLIDASI		754,370,548,057.99	106,554,313,213.48	7,473,941,588.97	853,450,919,682.50

PERHITUNGAN JUMLAH ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2024)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	15,087,536,007.68	4,485,394,085.00	142,183,600.00	19,430,746,492.68
2	Dinas Kesehatan	25,692,935,648.36	9,367,441,050.00	157,000,000.00	34,903,376,698.36
3	BLUD RSUD BORONG	4,655,695,267.73	528,458,500.00	-	5,184,153,767.73
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1,647,079,862,296.15	91,967,018,757.53	185,027,239,791.87	1,554,019,641,261.81
5	BLUD UPTD SPAM	499,369,633.00	30,043,343,814.00	-	30,542,713,447.00
6	Satuan Pol. Pamong Praja	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13,611,625,900.00	-	-	13,611,625,900.00
8	Dinas Sosial	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	35,737,314,160.00	-	-	35,737,314,160.00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1,206,995,500.00	-	-	1,206,995,500.00
12	Dinas Pertanian	433,400,000.00	-	-	433,400,000.00
13	Dinas Lingkungan Hidup	4,812,365,399.66	-	-	4,812,365,399.66
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97,638,139.00	-	-	97,638,139.00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
18	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu	-	-	-	-
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7,226,020,676.00	54,180,000.00	-	7,280,200,676.00
21	Dinas Pertanian	73,916,973,860.00	850,654,000.00	4,000,000.00	74,763,627,860.00
22	Dinas Peternakan	334,500,000.00	66,861,700.00	5,180,000.00	396,181,700.00
23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	6,061,396,921.65	132,890,000.00	-	6,194,286,921.65
24	Sekretariat Daerah	2,088,075,000.00	-	-	2,088,075,000.00
25	Sekretariat DPRD	110,471,000.00	60,000,000.00	400,000.00	170,071,000.00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
27	Badan Keuangan Daerah	402,850,000.00	-	-	402,850,000.00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
29	Inspektorat	-	-	-	-
30	Kec. Borong	2,044,822,000.00	-	-	2,044,822,000.00
31	Kec. Rana Mese	-	-	-	-
32	Kec. Kota Komba	2,223,165,909.00	-	-	2,223,165,909.00
33	Kec. Lamba Leda Selatan	1,975,220,000.00	-	-	1,975,220,000.00
34	Kec. Lamba Leda	-	-	-	-
35	Kec. Sambi Rampas	2,921,045,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	2,921,045,000.00
36	Kec. Elar Selatan	432,057,476.00	-	-	432,057,476.00
37	Kec. Lamba Leda Timur	107,000,000.00	-	-	107,000,000.00
38	Kec. Elar	235,000,000.00	29,124,000.00	29,124,000.00	235,000,000.00
39	Kec. Kota Komba Utara	-	-	-	-
40	Kec. Congkar	1,260,267,000.00	-	-	1,260,267,000.00
41	Kec. Lamba Leda Utara	53,425,204.00	-	-	53,425,204.00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
NILAI KONSOLIDASI		1,850,307,027,998.23	137,589,865,906.53	185,369,627,391.87	1,802,527,266,512.89

PERHITUNGAN JUMLAH ASET TETAP ASET TETAP LAINNYA

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2024)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	29,480,966,321.29	6,400,147,319.00	2,631,755,092.14	33,249,358,548.15
2	Dinas Kesehatan	155,665,562.00	-	-	155,665,562.00
3	BLUD RSUD BORONG	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-	-
5	BLUD UPTD SPAM	148,304,800.00	-	-	148,304,800.00
6	Satuan Pol. Pamong Praja	3,690,000.00	-	-	3,690,000.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	10,395,000.00	-	-	10,395,000.00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	-	-	-
12	Dinas Pertanahan	-	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	200,000.00	-	-	200,000.00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
18	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu	9,400,000.00	-	-	9,400,000.00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	874,608,641.67	95,540,000.00	4,514,500.00	965,634,141.67
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	60,901,000.00	-	-	60,901,000.00
21	Dinas Pertanian	174,275,000.00	-	-	174,275,000.00
22	Dinas Peternakan	63,750,000.00	-	-	63,750,000.00
23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	38,516,666.00	-	-	38,516,666.00
24	Sekretariat Daerah	64,516,000.00	-	-	64,516,000.00
25	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
27	Badan Keuangan Daerah	-	-	-	-
28	Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2,895,658.82	-	-	2,895,658.82
29	Inspektorat	-	-	-	-
30	Kec. Borong	-	-	-	-
31	Kec. Rana Mese	-	-	-	-
32	Kec. Kota Komba	-	-	-	-
33	Kec. Lamba Leda Selatan	-	-	-	-
34	Kec. Lamba Leda	-	-	-	-
35	Kec. Sambi Rampas	-	-	-	-

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2024)
36	Kec. Elar Selatan	-	-	-	-
37	Kec. Lamba Leda Timur	-	-	-	-
38	Kec. Elar	-	-	-	-
39	Kec. Kota Komba Utara	-	-	-	-
40	Kec. Congkar	-	-	-	-
41	Kec. Lamba Leda Utara	-	-	-	-
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
NILAI KONSOLIDASI		31,088,084,649.78	6,495,687,319.00	2,636,269,592.14	34,947,502,376.64

PERHITUNGAN JUMLAH ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2024)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	226,351,791.00	513,572,020.73	71,851,791.00	668,072,020.73
2	Dinas Kesehatan	11,284,171,703.48	-	11,284,171,703.48	-
3	BLUD RSUD BORONG	-	4,607,437,016.36	10,384,585.05	4,597,052,431.31
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	23,695,473,529.95	6,756,272,202.60	16,554,955,622.53	13,896,790,110.02
5	BLUD UPTD SPAM	-	-	-	-
6	Satuan Pol. Pamong Praja	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	-	-	-	-
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	-	-	-
12	Dinas Pertanahan	-	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
18	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu	-	-	-	-
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19,800,000.00	-	-	19,800,000.00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	-	-
21	Dinas Pertanian	-	-	-	-
22	Dinas Peternakan	-	-	-	-
23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	435,494,777.13	-	-	435,494,777.13
24	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
25	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
27	Badan Keuangan Daerah	-	-	-	-
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
29	Inspektorat	-	-	-	-
30	Kec. Borong	-	-	-	-
31	Kec. Rana Mese	-	-	-	-
32	Kec. Kota Komba	-	-	-	-
33	Kec. Lamba Leda Selatan	-	-	-	-
34	Kec. Lamba Leda	-	-	-	-
35	Kec. Sambi Rampas	-	-	-	-

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2024)
36	Kec. Elar Selatan	-	-	-	-
37	Kec. Lamba Leda Timur	-	-	-	-
38	Kec. Elar	-	-	-	-
39	Kec. Kota Komba Utara	-	-	-	-
40	Kec. Congkar	-	-	-	-
41	Kec. Lamba Leda Utara	-	-	-	-
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
NILAI KONSOLIDASI		35,661,291,801.56	11,877,281,239.69	27,921,363,702.06	19,617,209,339.19

DAFTAR SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

NO	OPD	PERALATAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	63,623,611,700.80	70,026,923,546.13	2,327,142,920.93	-	135,977,678,167.86
2	Dinas Kesehatan	128,007,281,238.00	36,353,845,584.84	4,341,509,128.69	155,665,562.00	168,858,301,513.53
3	BLUD RSUD BORONG	83,247,061,682.26	10,501,922,372.83	1,070,940,548.38	-	94,819,924,603.47
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9,179,254,155.43	1,533,802,642.55	782,874,933,100.07	-	793,587,989,898.05
5	BLUD UPTD SPAM	1,381,628,500.00	-	9,491,105,317.45	148,304,800.00	11,021,038,617.45
6	Satuan Pol. Pamong Praja	738,642,300.02	-	-	-	738,642,300.02
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,758,329,399.67	247,238,975.00	3,677,362,116.65	-	8,682,930,491.32
8	Dinas Sosial	929,398,858.00	-	-	-	929,398,858.00
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	869,080,800.01	-	14,018,690,535.98	-	14,887,771,335.99
10	Dinas Pengendalian Penduduk,Kelurga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,729,532,906.20	1,356,679,571.59	-	-	6,086,212,477.79
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1,262,456,355.00	391,332,350.00	791,019,233.32	-	2,444,807,938.32
12	Dinas Pertanahan	964,898,750.02	-	346,720,000.00	-	1,311,618,750.02
13	Dinas Lingkungan Hidup	2,441,376,216.62	887,730,683.88	1,579,199,021.08	-	4,908,305,921.58
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,281,981,978.90	474,022,001.35	16,273,023.15	-	2,772,277,003.40
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	541,825,442.85	448,864,860.00	-	-	990,690,302.85
16	Dinas Perhubungan	5,747,773,300.56	3,406,565,583.47	-	-	9,154,338,884.03
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,658,242,001.02	115,230,150.00	-	-	1,773,472,151.02
18	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1,156,890,565.00	406,832,416.00	-	-	1,563,722,981.00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,085,848,703.44	611,982,240.88	-	-	1,697,830,944.32
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1,200,712,270.00	1,161,304,694.55	4,836,852,394.55	60,901,000.00	7,259,770,359.10
21	Dinas Pertanian	4,873,235,681.00	1,143,982,020.10	26,320,137,787.21	-	32,337,355,488.31
22	Dinas Peternakan	2,108,912,615.50	1,255,938,395.15	249,016,666.67	-	3,613,867,677.32
23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1,913,240,490.24	12,240,180,581.04	2,575,060,843.45	38,516,666.00	16,766,998,580.73
24	Sekretariat Daerah	13,976,405,268.16	13,118,619,107.49	835,230,000.00	49,980,000.00	27,980,234,375.65
25	Sekretariat DPRD	4,914,890,407.01	5,982,388,276.92	24,080,866.68	-	10,921,359,550.61
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2,407,786,810.92	526,296,291.59	-	-	2,934,083,102.51
27	Badan Keuangan Daerah	4,202,774,119.89	827,615,787.50	128,321,666.65	-	5,158,711,574.04
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2,356,001,054.20	485,163,250.00	-	-	2,841,164,304.20
29	Inspektorat	1,425,148,414.29	507,819,897.44	-	-	1,932,968,311.73
30	Kec. Borong	860,618,637.66	2,259,430,400.00	1,098,249,666.65	-	4,218,298,704.31
31	Kec. Rana Mese	668,410,000.00	413,452,370.10	-	-	1,081,862,370.10
32	Kec. Kota Komba	1,014,373,200.00	500,560,200.00	957,941,700.53	-	2,472,875,100.53
33	Kec. Lamba Leda Selatan	695,917,714.28	94,731,281.25	836,284,666.68	-	1,626,933,662.21
34	Kec. Lamba Leda	573,605,799.99	79,123,500.00	-	-	652,729,299.99
35	Kec. Sambi Rampas	741,434,697.00	571,233,681.25	1,435,542,500.00	-	2,748,210,878.25
36	Kec. Elar Selatan	791,638,100.00	461,726,075.00	74,143,161.88	-	1,327,507,336.88
37	Kec. Lamba Leda Timur	694,475,400.00	439,644,920.00	39,233,333.35	-	1,173,353,653.35
38	Kec. Elar	783,963,238.45	206,808,000.00	117,500,000.00	-	1,108,271,238.45
39	Kec. Kota Komba Utara	392,972,970.84	-	-	-	392,972,970.84
40	Kec. Congkar	441,494,342.86	659,523,719.95	565,279,766.67	-	1,666,297,829.48
41	Kec. Lamba Leda Utara	349,575,457.16	450,253,765.64	10,685,040.79	-	810,514,263.59
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	709,432,100.01	449,122,860.00	-	-	1,158,554,960.01
Jumlah		362,702,133,643.26	170,597,892,053.49	860,638,455,007.46	453,368,028.00	1,394,391,848,732.21

PERHITUNGAN JUMLAH SALDO AKHIR AKTIVA TAK BERWUJUD

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2024)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	463,587,689.43	-	-	463,587,689.43
2	Dinas Kesehatan	1,029,181,200.00	270,000,000.00	-	1,299,181,200.00
3	BLUD RSUD BORONG	2,300,825,000.00	-	-	2,300,825,000.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	10,889,028,211.00	1,307,800,000.00	-	12,196,828,211.00
5	BLUD UPTD SPAM	-	-	-	-
6	Satuan Pol. Pamong Praja	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	226,171,700.00	-	-	226,171,700.00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4,479,380,000.00	-	-	4,479,380,000.00
12	Dinas Pertanahan	-	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	807,160,000.00	150,000,000.00	-	957,160,000.00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	992,830,000.00	-	-	992,830,000.00
16	Dinas Perhubungan	3,841,226,696.00	-	-	3,841,226,696.00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
18	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu	719,609,000.00	-	-	719,609,000.00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	543,026,060.00	-	-	543,026,060.00
21	Dinas Pertanian	405,494,700.00	-	-	405,494,700.00
22	Dinas Peternakan	-	-	-	-
23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	13,329,200.00	-	-	13,329,200.00
25	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	2,079,453,370.00	-	-	2,079,453,370.00
27	Badan Keuangan Daerah	780,881,207.00	95,060,839.00	-	875,942,046.00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	133,585,115.00	-	-	133,585,115.00
29	Inspektorat	-	-	-	-
30	Kec. Borong	-	-	-	-
31	Kec. Rana Mese	-	-	-	-
32	Kec. Kota Komba	-	-	-	-
33	Kec. Lamba Leda Selatan	-	-	-	-
34	Kec. Lamba Leda	-	-	-	-
35	Kec. Sambi Rampus	-	-	-	-
36	Kec. Elar Selatan	-	-	-	-
37	Kec. Lamba Leda Timur	-	-	-	-
38	Kec. Elar	-	-	-	-
39	Kec. Kota Komba Utara	-	-	-	-
40	Kec. Congkar	-	-	-	-
41	Kec. Lamba Leda Utara	-	-	-	-
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
NILAI KONSOLIDASI		29,704,769,148.43	1,822,860,839.00	-	31,527,629,987.43

KONSOLIDASI ASET LAIN-LAIN RUSAK BERAT TA. 2024				
NO	OPD	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	700,505,776.32	453,258,854.42	247,246,921.90
2	Dinas Kesehatan	9,386,681,109.00	8,338,066,623.28	1,048,614,485.72
3	BLUD RSUD BORONG	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5,583,279,633.33	3,944,683,254.00	1,638,596,379.33
5	BLUD UPTD SPAM	136,823,625.00	133,318,900.00	3,504,725.00
6	Satuan Pol. Pamong Praja	414,230,200.00	414,230,200.00	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	283,096,833.33	276,846,833.33	6,250,000.00
8	Dinas Sosial	280,440,500.00	272,486,214.29	7,954,285.71
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	532,068,000.00	451,388,000.00	80,680,000.00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,681,124,042.00	1,449,098,042.00	232,026,000.00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1,321,947,265.0	1,285,592,265.00	36,355,000.00
12	Dinas Pertanahan	21,391,250.00	15,807,250.00	5,584,000.00
13	Dinas Lingkungan Hidup	1,389,602,698.73	1,389,602,698.73	0.00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	182,584,278.00	182,584,278.00	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	534,842,200.00	534,092,200.00	750,000.00
16	Dinas Perhubungan	1,787,214,900.46	391,836,500.09	1,395,378,400.37
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	368,702,000.00	368,702,000.00	-
18	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu	33,900,000.00	33,900,000.00	-
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	167,239,372.72	160,831,474.12	6,407,898.60
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	195,844,830.00	191,018,163.33	4,826,666.67
21	Dinas Pertanian	2,227,466,181.00	2,115,618,181.00	111,848,000.00
22	Dinas Peternakan	127,292,300.00	118,787,900.00	8,504,400.00
23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	91,271,500.00	91,271,500.00	-
24	Sekretariat Daerah	3,309,121,737.60	2,802,164,156.40	506,957,581.20
25	Sekretariat DPRD	1,632,301,665.00	1,632,301,665.00	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	321,889,072.00	315,209,177.60	6,679,894.40
27	Badan Keuangan Daerah	1,303,338,440.00	1,273,968,699.60	29,369,740.40
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	223,936,924.88	223,285,724.88	651,200.00
29	Inspektorat	126,221,100.00	126,221,100.00	-
30	Kec. Borong	140,859,754.33	123,169,354.33	17,690,400.00
31	Kec. Rana Mese	106,217,000.00	97,945,000.00	8,272,000.00
32	Kec. Kota Komba	98,548,000.00	97,082,000.00	1,466,000.00
33	Kec. Lamba Leda Selatan	205,986,457.00	205,118,457.00	868,000.00
34	Kec. Lamba Leda	162,272,800.00	157,752,000.00	4,520,800.00
35	Kec. Sambi Rampas	263,424,652.00	247,363,052.00	16,061,600.00
36	Kec. Elar Selatan	29,850,000.00	29,850,000.00	-
37	Kec. Lamba Leda Timur	45,323,000.00	45,323,000.00	-
38	Kec. Elar	311,652,333.00	299,841,416.20	11,810,916.80
39	Kec. Kota Komba Utara	-	-	-
40	Kec. Congkar	-	-	-
41	Kec. Lamba Leda Utara	-	-	-
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39,150,000.00	39,150,000.00	-
NILAI KONSOLIDASI		35,767,641,430.71	30,328,766,134.60	5,438,875,296.11

KONSOLIDASI ASET LAIN-LAIN TIDAK DIOPERASIONALKAN TA. 2024

NO	OPD	AT Tidak dioperasionalkan			Kekurangan Volume Pekerjaan	Kelebihan Beban Pegawai	Kelebihan Beban Barang dan Jasa	JUMLAH
		Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku				
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga			-		16,630,384.00	65,491,398.00	82,121,782.00
2	Dinas Kesehatan			-		10,193,400.00	542,933,725.84	553,127,125.84
3	BLUD RSUD BORONG			-		530,000.00		530,000.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	158,110,000,581.11	87,749,894,556.04	70,360,106,025.07			39,857,500.00	158,149,858,081.11
5	BLUD UPTD SPAM			-				-
6	Satuan Pol. Pamong Praja			-				-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			-			680,000.00	680,000.00
8	Dinas Sosial			-			4,810,000.00	4,810,000.00
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi			-			840,000.00	840,000.00
10	Dinas Pengendalian Penduduk,Kelurga Berencana, Pemberdayaan Permuadian Perlindungan Anak			-			22,106,694.00	22,106,694.00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			-			275,000.00	275,000.00
12	Dinas Pertanahan			-		862,776.00		862,776.00
13	Dinas Lingkungan Hidup			-				-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			-			27,250,000.00	27,250,000.00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa			-			460,000.00	460,000.00
16	Dinas Perhubungan			-			2,660,000.00	2,660,000.00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika			-			3,014,652.00	3,014,652.00
18	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu			-				-
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			-				-
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			-			260,000.00	260,000.00
21	Dinas Pertanian			-		5,726,400.00	11,515,000.00	17,241,400.00
22	Dinas Peternakan			-			460,000.00	460,000.00
23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			-				-
24	Sekretariat Daerah			-		2,316,872.00	1,555,000.00	3,871,872.00
25	Sekretariat DPRD			-		2,074,032.00	17,745,000.00	19,819,032.00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan			-			22,535,000.00	22,535,000.00
27	Badan Keuangan Daerah			-	210,019,325.21		93,252,598.00	303,271,923.21
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			-			13,114,652.00	13,114,652.00
29	Inspektorat			-			2,485,000.00	2,485,000.00
30	Kec. Borong			-			600,000.00	600,000.00
31	Kec. Rana Mese			-				-
32	Kec. Kota Komba			-			2,300,000.00	2,300,000.00
33	Kec. Lamba Leda Selatan			-				-

NO	OPD	AT Tidak dioperasionalkan			Kekurangan Volume Pekerjaan	Kelebihan Beban Pegawai	Kelebihan Beban Barang dan Jasa	JUMLAH
		Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku				
34	Kec. Lamba Leda			-				-
35	Kec. Sambi Rampas			-				-
36	Kec. Elar Selatan			-				-
37	Kec. Lamba Leda Timur			-				-
38	Kec. Elar			-				-
39	Kec. Kota Komba Utara			-				-
40	Kec. Congkar			-				-
41	Kec. Lamba Leda Utara			-				-
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						12,798,064.00	12,798,064.00
NILAI KONSOLIDASI		158,110,000,581.11	87,749,894,556.04	70,360,106,025.07	210,019,325.21	38,333,864.00	888,999,283.84	159,247,353,054.16

PERHITUNGAN JUMLAH AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2023)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	319,798,549.37	39,531,311.94	288,057.94	359,041,803.37
2	Dinas Kesehatan	335,052,480.00	129,918,120.00	-	464,970,600.00
3	BLUD RSUD BORONG	2,011,285,000.00	190,640,000.00		2,201,925,000.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5,314,562,776.80	1,219,682,821.10	-	6,534,245,597.90
5	BLUD UPTD SPAM	-	-		-
6	Satuan Pol. Pamong Praja	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	74,665,360.00	22,617,170.00	-	97,282,530.00
10	Dinas Pengendalian Penduduk,Kelurga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3,955,394,000.00	384,718,000.00	-	4,340,112,000.00
12	Dinas Pertahanan	-	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	230,334,000.00	84,246,000.00	288,000.00	314,292,000.00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	694,981,000.00	99,283,000.00	-	794,264,000.00
16	Dinas Perhubungan	3,761,228,536.00	39,999,080.00	-	3,801,227,616.00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
18	Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu	302,415,400.00	71,960,900.00	-	374,376,300.00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	342,385,424.00	54,302,606.00	-	396,688,030.00
21	Dinas Pertanian	285,782,720.00	40,549,470.00	-	326,332,190.00
22	Dinas Peternakan	-	-	-	-
23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	10,663,360.00	1,332,920.00	-	11,996,280.00
25	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1,820,109,020.00	123,945,850.00	-	1,944,054,870.00
27	Badan Keuangan Daerah	413,528,527.00	58,581,043.90	-	472,109,570.90
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20,118,511.50	13,358,511.50	-	33,477,023.00
NILAI KONSOLIDASI		19,892,304,664.67	2,574,666,804.44	576,057.94	22,466,395,411.17

RINCIAN UTANG BELANJA TA 2024

NO	OPD	JENIS	URAIAN	TAHUN	NILAI
1	RSUD	Utang Barang dan Jasa	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	2024	271,532,318,00
2	Dinkes	Utang Barang dan Jasa	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan	2024	23,951,667,40
3	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan Jalan (Pengurasan) Rewung - Golo Pau Ds.Tanggo Molas, Kec. Poco Ranaka Timur	2016	4,400,000,00
4	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Jaringan Irigasi Wae wera (saluran tersier), Kel. Nanga Baras, Kec. Sambi Rampas	2017	5,000,000,00
5	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Wae Warungwae (Kec. Elar Selatan)	2018	4,857,350,00
6	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Irigasi Wae Ngopero Ds.Wejang Mall	2018	8,626,800,00
7	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan AMB Paleng Desa Mokel Kecamatan Kota Komba	2018	7,500,000,00
8	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan AMB Lengko Loko, Desa Satar Punda, Kec. Lamba Leda	2018	9,200,000,00
9	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan Jalan Benteng Jawa - Dampeik (Luncuran T.A.2018)	2018	118,936,647,59
10	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Jalan Sopang Rajong-Lete	2019	157,862,988,00
11	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan MCK Karungku Karang Kec. Lamba Ieda	2021	3,617,000,00
12	PUJP	Gedung dan Bangunan	Pembangunan Taman Berman Anak di Golo Lada Kecamatan Borong	2024	139,500,000,00
13	PUJP	Gedung dan Bangunan	Pengawasahan Pembangunan Taman Berman Anak di Golo Lada Kecamatan Borong	2024	7,500,000,00
14	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan Crossway di Wae Ara Jeluk Benteng Jawa - Wae Naong Kec. Lamba Leda	2024	11,511,140,00
15	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan TPT Jalan Simpang Lima Elar Selatan menuju kota Komba Desa Mosi Ngoran Kec.Elar Selatan	2024	18,600,000,00
16	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Status Jalan (pasir) Simpang Ndureng - Kampung Ngeklol (Lingko Gentom)	2024	6,000,000,00
17	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pengawasahan Peningkatan Status Jalan (Pengurasan) di Poco Ndeki Kel. Kita Ndora Kec. Borong	2024	4,500,000,00
18	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Pemasangan Bronjong di Hulu Jembatan Wae Reca	2024	4,600,000,00
19	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pengawasahan Pemasangan Bronjong di Hulu Jembatan Wae Reca	2024	3,400,000,00
20	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Pemasangan Bronjong Penggarisan Kampung Maki Kali Wae Laing Desa Satar Kampas Kec. Lamba Leda Utara	2024	8,000,000,00
21	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan Pemasangan Bronjong Kampung Ngopek - Wae Bobo Kec. Rana Loba Kec. Borong	2024	8,000,000,00
22	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Lengkuas (1 DAK)	2024	32,463,900,00
23	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Jaringan Irigasi Lingko Lukar Wae Reca Desa Gurung Iluut Kec. Borong	2024	8,000,000,00
24	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Lanjutkan Irigasi Wae Bobo Persawahan Loba Kel. Rana Loba Kec. Borong	2024	12,320,000,00
25	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Pembangunan Irigasi Coca Desa Bangka Masa Kec. Rana Mese (Dana DIF & DAU)	2024	8,000,000,00
26	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Pembangunan Irigasi Di Luma Persawahan Ngagor Desa Mokel Kita Komba Utara	2024	4,000,000,00
27	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Pembangunan Irigasi Kete Moarang Desa Pong Ruan	2024	4,000,000,00
28	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Pembangunan Irigasi (Penyirian) Jaringan Irigasi sumber (DAU Perubahan) Paket 1 3 Paket)	2024	14,280,000,00
29	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Pembangunan Irigasi Wae Dangg Persawahan Arjuna, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese dan Pembangunan Irigasi Wae Dangi Persawahan Mutu, Desa Saka Kecamatan Rana Mese	2024	14,400,000,00
30	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Pembangunan Saluran Irigasi Wae Wangge, Desa Golo Munde, Kecamatan Elar, Rehabilitasi D.I. We Wul Suplesi Wae Tirrok Kec. Elar dan Lanjutkan Pembangunan Jaringan Irigasi Wae Rana Hulu Kiri, Desa Golo Wutes, Kecamatan Elar Selatan	2024	11,350,000,00
31	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pengawasahan Pembangunan Saluran Irigasi Wae Wangge, Desa Golo Munde, Kecamatan Elar, Rehabilitasi D.I. We Wul Suplesi Wae Tirrok Kec. Elar dan Lanjutkan Lanjutkan Pembangunan Saluran Irigasi Wae Wangge, Desa Golo Munde, Kecamatan Rana Mese	2024	8,500,000,00
32	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan Irigasi Wae Dangg Persawahan Anjuna, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese	2024	25,200,000,00
33	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan Irigasi Wae Masing Lembo Desa mokel, Kecamatan Kita Komba Utara	2024	17,248,000,00
35	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan Irigasi Wae Sele (Lanjutan) Desa Rana Mbata Kecamatan Kita Komba Utara	2024	83,700,000,00
36	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pengawasahan Pembangunan Irigasi (Wae Sele Lanjutan) Desa Rana Mbata Kecamatan Kita Komba Utara	2024	7,200,000,00
37	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pengawasahan Pembangunan Irigasi Wae Sosot (Lanjutan) Persawahan Dampelk, Desa Satu Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara	2024	6,600,000,00
38	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan Saluran Irigasi Wae Wangge, Desa Golo Munde, Kecamatan Elar	2024	12,000,000,00
39	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rehabilitasi D.I. Wae Wul Suplesi Wae Tsoek	2024	77,850,000,00
40	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Lanjutkan Pembangunan Jaringan Irigasi Wae Rana Hulu Kiri, Desa Golo Wutes, Kecamatan Elar Selatan	2024	19,200,000,00
41	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Pembangunan Irigasi Liang Lelo Ngoko Desa Watu Mori Kec. Rana Mese (DIF)	2024	8,000,000,00
42	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pengawasahan Pembangunan Irigasi Liang Lelo Ngoko Desa Watu Mori Kec. Rana Mese (DIF)	2024	6,000,000,00
43	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Perbaikan SPAM Jaringan Perbaikan AMB Desa Gurung Lutut (Segmen Mbeling - Pesak), Kecamatan Borong	2024	8,650,000,00
44	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Perbaikan Jaringan Perbaikan AMB Segmen Golo Cipir - Wae Baru	2024	9,000,000,00
45	PUJP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rehabilitasi Jaringan Perbaikan AMB Wae Golo Wulu Meruut Kampung Lenteng Reweng	2024	4,185,000,00
46	KDP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan Bangunan Pergaman Sungai Wae Bobo, Kel. Kita Ndora, Kec. Borong (Lanjutan Segmen Golput + Segmen Jembatan Paleng) (DIF)	2024	57,049,213,00
47	KDP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pengolokan Jaringan Irigasi D.I Wae Nescok (DAK)	2024	46,054,768,10
48	KDP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pengolokan Jaringan Irigasi D.I Wae Muting (DAK)	2024	132,441,676,60
49	KDP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Wae Muting (DAK)	2024	195,332,993,00
50	DINKES	Gedung dan Bangunan	Peningkatan SPAM Jaringan Perbaikan AMB Kalurahan Watu Ngogene	2021	16,600,100,00
51	DINKES	Gedung dan Bangunan	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Bea Muring	2024	89,785,280,00
52	DINKES	Gedung dan Bangunan	Bangunan Sarana Prasaranan Puskesmas Pembantu Golo Ros (DAK)	2024	17,798,250,00
53	DINKES	Gedung dan Bangunan	Bangunan Sarana Prasaranan Puskesmas Pembantu Arus	2024	53,457,900,00
54	DINKES	Gedung dan Bangunan	Bangunan Sarana Prasaranan Puskesmas Pembantu Gunung Mute	2024	54,658,735,00
55	DINKES	Gedung dan Bangunan	Bangunan Sarana Prasaranan Puskesmas Pembantu Wangkar Wali	2024	17,400,300,00
56	DINKES	Gedung dan Bangunan	Bangunan Sarana Prasaranan Puskesmas Pembantu Rana Kulan	2024	64,672,390,00
57	DINKES	Gedung dan Bangunan	Bangunan Sarana Prasaranan Puskesmas Pembantu Rana Gapang	2024	17,359,300,00
58	DINKES	Gedung dan Bangunan	Bangunan Sarana Prasaranan Puskesmas Pembantu Golo Ngawan	2024	17,477,800,00
59	DINKES	Gedung dan Bangunan	Bangunan Sarana Prasaranan Puskesmas Pembantu Buli	2024	762,614,196,00
60	RSUD	Gedung dan Bangunan	Perbaikan Rumah Radiologi RSD Borong	2024	831,851,600,00
61	RSUD	Gedung dan Bangunan	Pembangunan Sarana Gedung Rawat Inap RSDU Borong	2024	336,031,003,00
62	RSUD	KDP Gedung dan Bangunan	Pembangunan Sarana Gedung Rehabilitasi Medik RSUD Borong	2024	496,189,874,36
63	RSUD	KDP Gedung dan Bangunan	Pembangunan sarana Gedung CSSD RSUD Borong	2024	3,848,067,00
64	PPO	Gedung dan Bangunan	CV. TULUS KARYA ATAU PEMBANGUNAN RUANG UKS BESERTA PERABOTNYA SDI WAE TAENG (DAK REGULER BIDANG SD 2023)	2023	16,600,000,00
65	PPO	Tanah	PENGGERALIAN / PERATANAN TANAH LAPANGAN UPACARA / KEGIATAN SDI GISING	2024	67,500,000,00
66	PPO	Tanah	PENGGERALIAN / PERATANAN TANAH LAPANGAN UPACARA / KEGIATAN SDI GOLO POPO	2024	6,499,990,00
67	PPO	Tanah	PENGGERALIAN / PERATANAN TANAH LAPANGAN UPACARA / KEGIATAN SDI MOSO KUKUN	2024	8,999,996,00
68	PPO	Tanah	PENGGERALIAN / PERATANAN TANAH LAPANGAN UPACARA / KEGIATAN SDI NENGKAL	2024	5,499,456,00
69	PPO	Tanah	PENGGERALIAN / PERATANAN TANAH LAPANGAN UPACARA / KEGIATAN SDI WAE BUKA	2024	49,999,647,00
70	PPO	Tanah	PENGGERALIAN /PERATANAN TANAH LAPANGAN UPACARA / KEGIATAN SMPH 8 POCO RANAKA	2024	54,999,843,00
71	PPO	Gedung dan Bangunan	REHABILITASI SEDANG / BERAT RUANG KELAS SDI BAJU	2024	89,972,667,00
72	PPO	Gedung dan Bangunan	REHABILITASI SEDANG / BERAT RUANG KELAS SDI KIGIT	2024	9,149,197,00
73	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG GURU / KEPALA SEKOLAH/SDI KOTA NDORA	2024	9,149,164,00
74	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU / RKB BESERTA PERABOTNYA SDI MARO	2024	19,012,131,00
75	PPO	Gedung dan Bangunan	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SDI MARO	2024	33,236,164,50
76	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU / RKB / BESERTA PERABOTNYA SDI REWUNG	2024	6,129,187,23
77	PPO	Gedung dan Bangunan	REHABILITASI SEDANG / BERAT RUANG KELAS SDI TIWI LENANG	2024	9,149,370,00
78	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG LKS BESERTA PERABOTNYA SDI WAE RUEK	2024	6,948,418,00
79	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU / RKB / BESERTA PERABOTNYA SDI WAE WARU	2024	11,322,296,00
80	PPO	Gedung dan Bangunan	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SDI WATU LING	2024	339,374,239,00
81	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SDI WATU LING	2024	11,511,971,00
82	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG LKS BESERTA PERABOTNYA SDI WATU LING	2024	6,947,418,00
83	PPO	Gedung dan Bangunan	REHABILITASI SEDANG / BERAT RUANG KELAS SDI WOKO LEDU	2024	91,497,875,00
84	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SDN BEA WELU	2024	8,997,657,00
85	PPO	Gedung dan Bangunan	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SMPN 1 ELAR	2024	22,740,254,00
86	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 11 LAMBIA LEDA	2024	9,049,950,00
87	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 11 LAMBIA LEDA	2024	7,500,000,00
88	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SMPN 12 BORONG	2024	100,407,308,00
89	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 12 KOTA KOMBA	2024	9,244,783,00
90	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN LAB KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 12 POCO RANAKA	2024	14,741,604,00
91	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG TATA USAHA BESERTA PERABOTNYA SMPN 12 POCO RANAKA	2024	152,444,509,00
92	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN LAB KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 14 ELAR	2024	16,882,000,00
93	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 ELAR	2024	14,756,958,00
94	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG LKS BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 KOTA KOMBA	2024	105,000,000,00
95	PPO	Gedung dan Bangunan	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 KOTA KOMBA	2024	13,372,295,00
96	PPO	Gedung dan Bangunan	PENAMBANGAN RUANG KELAS BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 LAMBIA LEDA	2024	11,912,500,00
97	PPO	Gedung dan Bangunan	REHABILITASI RUANG UKS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 LAMBIA LEDA	2024	3,500,000,00
98	PPO	Gedung dan Bangunan	REHABILITASI RUANG KEPALA SEKOLAH / PIMPINAN DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 LAMBIA LEDA	2024	2,000,000,00
99	PPO	Gedung dan Bangunan	PENAMBANGAN RUANG KELAS BARU BESERTA PERABOTNYA SMPN 4 BORONG	2024	12,124,810,00
100	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG LKS BESERTA PERABOTNYA SMPN 4 POCO RANAKA	2024	7,000,000,00
101	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 4 POCO RANAKA	2024	14,832,588,00
102	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG TATA USAHA BESERTA PERABOTNYA SMPN 6 SAMBI RAMPAS	2024	12,666,346,00
103	PPO	Gedung dan Bangunan	REHABILITASI SEDANG / BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH SMPN 6 SAMBI RAMPAS	2024	6,500,000,00
104	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG QURUO TU / KEPALA SEKOLAH SMPN 8 LAMBIA LEDA	2024	88,500,000,00
105	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG TATA USAHA BESERTA PERABOTNYA SMPN 8 POCO RANAKA	2024	13,408,141,00
106	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SMPN 9 KOTA KOMBA	2024	17,005,050,00
107	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG GURU TU / KEPALA SEKOLAH SMPN 10 SATAP BAWE	2024	88,500,000,00
108	PPO	Gedung dan Bangunan	REHABILITASI RUANG KEPALA SEKOLAH / PIMPINAN DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SMPN 10 SATAP BAWE	2024	2,000,000,00
109	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RKG SMPN SATAP JONGKOS	2024	90,000,000,00
110	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RKG SMPN SATAP MAKI	2024	90,000,000,00
111	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU BESERTA PERABOTNYA SMPN 10 SATAP PEDAK	2024	23,670,891,00
112	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 10 SATAP PERANG WINIS	2024	14,167,853,00
113	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG GURU / KEPALA SEKOLAH TRK BANGKA LONI	2024	9,145,932,00
114	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU TRK BANGKA LONI	2024	9,149,955,00
115	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 LAMBIA LEDA	2024	9,000,000,00
116	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SMPN 3 POCO RANAKA	2024	9,000,000,00
117	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SMPN 4 POCO RANAKA	2024	9,000,000,00

NO	OPD	JENIS	URAIAN	TAHUN	NILAI
118	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU BESERTA PERABOTNYA SMPN SATAP PERANG WUNIS	2024	9,000,000.00
119	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN PAGAR KELILING SEKOLAH MTA NEGERI 2 BORONG	2024	45,000,000.00
120	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN PAGAR KELILING SEKOLAH SMPN 11 BORONG	2024	6,750,000.00
121	PPO	Gedung dan Bangunan	PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SMPN 2 BORONG	2024	91,994,411.00
122	PPO	Gedung dan Bangunan	REHABILITASI RUANG LABORATORIUM ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SMPK ROSS MISTIKA WAE RANA	2024	11,500,000.00
123	PPO	Jalan, Irigasi dan Jaringan	REHABILITASI SEDANG / BERAT TOILET SEKOLAH SMPN 6 LAMBA LEDA	2024	4,000,000.00
124	PPO	Jalan, Irigasi dan Jaringan	REHABILITASI SEDANG / BERAT TOILET SEKOLAH SMPN 14 ELAR	2024	4,000,000.00
125	PPO	Jalan, Irigasi dan Jaringan	PEMBANGUNAN TPT LAPANGAN SDI NGKONGA DORA	2024	4,499,097.00
126	PPO	Jalan, Irigasi dan Jaringan	PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH (TPT) TRIK BANGKA LONI	2024	4,481,941.00
127	PPO	Jalan, Irigasi dan Jaringan	PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH (TPT) SDI TANGKUL	2024	4,499,988.00
128	PPO	Jalan, Irigasi dan Jaringan	PEMBANGUNAN TPT LAPANGAN UPACARA SMPN SATAP RANTANG	2024	8,249,687.00
129	PPO	Jalan, Irigasi dan Jaringan	PEMBANGUNAN TPT SDI LAME	2024	6,497,867.00
130	PPO	Jalan, Irigasi dan Jaringan	PEMBANGUNAN TPT SDN WATU LANDO	2024	6,749,967.00
131	PPO	Jalan, Irigasi dan Jaringan	PEMBANGUNAN TPT SDN GOLO NDOLO	2024	5,249,660.00
132	SETWAN	Gedung dan Bangunan	Belanja Rehab sedang Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur	2018	5,000,000.00
TOTAL UTANG BELANJA TAHUN 2024					6,659,743,327.68

No	OPD	REALISASI LRA										BEBAN BARANG-PERSEDIAAN										FACE LO
		REALISASI LRA					MUTASI TAMBAH LAINNYA					MUTASI KURANG LAINNYA					TOTAL PENYESUAIAN PENGURANGAN BEBAN					
		Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis	Realisasi Belanja barang Dara BOS	Realisasi dan Barang Jasa BLUD	Total Realisasi Belanja Persediaan Awal	Stok ke Belakang Pakai (dari belanja modal Tahun Berjalan)	Reklasifikasi Aset Bahan Baku dan Ertacan	Pendapatan Hibah BHP	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	TOTAL PENYESUAIAN PENAMBAHAN BEBAN	Persediaan Akhir Tahun	Koreksi Awal Persediaan	Ocas Expired	Pelunasan Utang BLUD	Reklasifikasi BHP ke Belanja Modal	PENYESUAIAN PENGURANGAN BEBAN	Bulan Persediaan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	12,211,459,380,00	31,886,268,293,00		44,097,727,673,00	-	299,758,091,86	6,495,682,511,55	18,331,550,00		6,813,772,153,41	140,160,00				196,290,000,00	196,430,160,00		50,715,069,666,41			
2	DINAS KESIHATAN	18,669,678,260,08			18,669,678,260,08	14,381,625,645,15		83,835,600,00			14,465,461,245,15	14,730,098,052,91						14,730,098,052,91	18,405,041,452,32			
3	BLUD RSUD Borong	4,932,010,279,00		7,187,645,213,00	12,119,655,492,00	2,151,430,354,07	11,129,000,00	84,557,794,33		151,649,560,00	2,398,766,708,40	3,010,059,408,14	28,349,403,11	160,802,095,50	839,631,260,00		4,038,842,164,75	10,479,580,035,65				
4	DINAS PERSEJUJUAN UMMAM DAN PERURUHAN RAKYAT	9,631,757,462,00			9,631,757,462,00	5,655,000,00	231,321,399,00				236,876,399,00	683,430,000,00						683,430,000,00	9,185,203,861,00			
5	BLUD SPAM			2,732,595,772,00	2,732,595,772,00	128,234,349,00					128,234,349,00	109,017,423,00				6,000,000,00	115,017,423,00	2,745,812,698,00				
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	32,794,400,00			32,794,400,00														32,794,400,00			
7	RADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	204,318,850,00				204,318,850,00	14,445,343,00				14,445,343,00	14,445,343,00						14,445,343,00	204,318,850,00			
8	DINAS SOSIAL	477,465,800,00			477,465,800,00	1,488,000,00					1,488,000,00	1,488,000,00						1,488,000,00	477,465,800,00			
9	DINAS PERTANAHAN	62,714,400,00			62,714,400,00														62,714,400,00			
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	89,695,755,00			89,695,755,00	2,694,750,00					2,694,750,00	1,925,000,00						1,925,000,00	90,465,505,00			
11	DINAS KERENDELUKAN DAN PENCATATAN EPAL	293,859,500,00			293,859,500,00	711,238,769,00					711,238,769,00	439,888,920,00						439,888,920,00	565,209,349,00			
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	226,665,709,00			226,665,709,00														226,665,709,00			
13	DINAS PERHIBURBUNGAN	724,233,100,00			724,233,100,00	43,448,500,00					43,448,500,00	48,618,500,00						48,618,500,00	719,063,100,00			
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72,455,300,00			72,455,300,00														72,455,300,00			
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	98,875,850,00			98,875,850,00	3,909,160,00					3,909,160,00	3,882,760,00						3,882,760,00	98,902,250,00			
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KARSIPAN	112,977,750,00			112,977,750,00		4,514,500,00				4,514,500,00								117,492,250,00			
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSIMORASI	160,443,000,00			160,443,000,00	871,000,00					871,000,00	675,000,00						675,000,00	160,639,000,00			
18	DINAS PJKBP3A	657,268,650,00			657,268,650,00	938,454,901,80			576,392,456,00		1,514,847,357,80	781,328,123,00							781,328,123,00	1,390,787,884,80		
19	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERKANAN	920,356,892,00			920,356,892,00	189,387,200,00					189,387,200,00	189,387,200,00						189,387,200,00	920,356,892,00			
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	114,676,050,00			114,676,050,00	113,218,100,00					113,218,100,00	112,359,725,00						112,359,725,00	115,534,425,00			
21	DINAS PERTANIAN	19,768,386,200,00			19,768,386,290,00	2,033,000,00		6,250,000,00			9,183,000,00	25,000,000,00						25,000,000,00	19,752,569,290,00			
22	DINAS PETERNAKAN	113,157,070,00			113,157,070,00	31,000,000,00	1,969,950,00	5,180,000,00			38,149,950,00	44,664,000,00					4,600,000,00	49,264,000,00	102,043,020,00			
23	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,151,451,710,00			1,151,451,710,00	1,205,616,00					1,205,616,00	4,127,232,00						4,127,232,00	1,148,530,094,00			
24	SEKRETARIAAT DAERAH	1,386,146,277,00			1,386,146,277,00	859,100,00	477,000,00				1,336,100,00	161,000,00						161,000,00	1,387,321,377,00			
25	SEKRETARIAAT DPRD	2,928,070,950,00			2,928,070,950,00	-	37,034,040,00	14,022,480,00			51,056,520,00								2,979,127,470,00			
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	260,506,650,00			260,506,650,00														260,506,650,00			
27	BADAN KELUHAN DAERAH (SPKD)	947,832,610,00			947,832,610,00	7,825,150,00					7,825,150,00	7,217,350,00						7,217,350,00	948,440,410,00			
28	BADAN KEGEGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSA	137,410,300,00			137,410,300,00														137,410,300,00			
29	INSPEKTORAT	96,801,050,00			96,801,050,00														96,801,050,00			
30	KECAMATAN BORONG	233,003,152,00			233,003,152,00		-												233,003,152,00			
31	KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA	47,040,150,00			47,040,150,00														47,040,150,00			
32	KECAMATAN CONGKAR	239,207,060,00			239,207,060,00		2,384,000,00				2,384,000,00								241,591,060,00			
33	KECAMATAN LAMBA LEDA UTARA	52,739,200,00			52,739,200,00														52,739,200,00			
34	KECAMATAN RANA MESE	31,069,550,00			31,069,550,00														31,069,550,00			
35	KECAMATAN KOTA KOMBA	353,812,800,00			353,812,800,00														353,812,800,00			
36	KECAMATAN LAMBA LEDA SELATAN	456,473,350,00			456,473,350,00														456,473,350,00			
37	KECAMATAN LAMBA LEDA	56,631,055,00			56,631,055,00														56,631,055,00			
38	KECAMATAN SAMBI RAMPAS	444,866,249,00			444,866,249,00			21,044,600,00			21,044,600,00								465,910,849,00			
39	KECAMATAN ELAR SELATAN	155,749,600,00			155,749,600,00														155,749,600,00			
40	KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR	30,075,700,00			30,075,700,00		340,000,00	26,784,000,00			29,124,000,00								30,075,700,00			
41	KECAMATAN ELAR	128,240,800,00			128,240,800,00														157,364,800,00			
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	425,850,450,00			425,850,450,00														425,850,450,00			
	Jumlah	75,136,228,410,08			31,886,268,203,00	9,620,240,985,00	120,944,737,698,08	18,729,823,938,02	581,552,480,86	6,746,732,485,88	594,724,006,00	151,649,560,00	26,804,682,470,76	20,207,913,195,05	28,349,403,11	160,802,095,50	845,631,260,00	200,890,000,00	21,443,585,953,67	126,305,634,205,18		

N	OPD	BESAN BARANG DAN JASA																		MUTASI KURANG LAINNYA										FADE LO	
		BELANJA BERDASARAN REALASI ANGGARAN-FACE LIMA																		MUTASI TAMBAH LAINNYA											
		Realisasi Belanja Barang-Pendeksa	Realisasi Belanja Jasa	Realisasi Belanja Peralihan	Realisasi Belanja Pimpinan Daerah	Belanja Untuk Pembelian dan/atau Dikembalikan ke Kepala Daerah	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja barang BOS	Total Realisasi Belanja Barang dan Jasa	Konsekuensi Awal Perubahan	Obat Expired	Belanja atas Perbaikan Aset	Pendapatan Habis barang	Raksa ke Bahan Habis Pakai dan/atau Bahan Habis Pakai pada Tahun Berjalan	Uang Seluruh	Pengembalian Aset Bahan Baku dan/atau Bahan Bahan Tidak Boleh Dikembalikan	TOTAL PENYESUAIAN PENGETAHUAN DAN SISTEM SEBAN	Persediaan Akhir Tahun	Pelunasan Utang	Kepatuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Bahan Tidak Boleh Dikembalikan	Raksa ke Bahan Habis Pakai dan/atau Bahan Bahan Tidak Boleh Dikembalikan	Kepatuhan Belanja Jasa	Kepatuhan Pengeluaran atas Belanja Modal	TOTAL PENYESUAIAN PENGETAHUAN DAN SISTEM SEBAN	Bahan Barang dan Jasa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
25	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	12,211,459,380.00	16,505,300,934.00	3,705,564,007.00	2,887,650,656.00	2,075,000	31,886,268,230.00	67,205,318,270				18,331,550.00	259,754,091.86		-	6,495,842,511.55	8,613,372,153.41	140,160.00	3,533,234,007.00	65,491,389.00	199,250,000.00	95,250,000.00	72,000,000.00	247,930,200.00	4,210,336,565.00	69,808,754,856.41					
26	DINAS KESEHATAN	18,693,678,260.00	56,620,322,618.50	1,190,230,452.08	3,550,252,736.00		79,052,200,065.74				14,381,625,654.07		-	23,951,667.40	83,835,800.00	14,466,412,912.55	14,730,098,052.91		542,933,725.84	191,398,600.00	131,479,800.00	15,597,101,178.75		78,635,792,802.54							
27	KLHK BORNEO	5,259,341,175.00		57,823,702.00	7,187,645,213.00		17,436,830,369	28,349,403.11	160,802,095.00	2,151,430,654.07	-	11,129,000.00		151,646,580.00	94,537,794.33	2,386,798,708.40	3,010,059,406.14	839,831,260.00		-	689,700,000.00	815,174,500.00	5,354,562,164.14		14,261,860,412.00						
28	DINAS PISICULAN LUMIK DAN KERUJAHAN RAKYAT	9,631,757,462.00	5,832,050,018.00	346,777,688.00	3,042,800,436.00	213,000.00	19,065,515,604				5,555,000.00	231,321,399.00			236,876,399.00	683,420,000.00		-	114,140,000.00	39,857,500.00	547,875,000.00	2,046,623,868.00	1,899,018,000.00	5,130,344,368.00	14,171,447,838.00						
29	SLBUD SPAM						2,732,595,772.00				129,234,349.00				129,234,349.00	109,017,423.00	6,000,000.00		-						116,017,423.00		2,745,812,698.00				
30	SULTAN POLIS PAMONG PRABU	32,794,400.00	825,676,360.00	48,688,225.00	482,396,386.00		1,390,445,371																						1,390,445,371.00		
31	BADAN PENANAMAN UNTUK ANGGARAN	204,816,850.00	135,000,000.00	127,877,033.00	167,761,116.00																								15,125,343.00	450,285,193.00	
32	DINAS SOSIAL	477,465,800.00	92,089,520.00	45,140,000.00	336,564,980.00	3,900,000	954,159,500				1,448,000.00				1,448,000.00															6,298,000.00	94,349,900.00
33	DINAS PERTANIAN	62,714,400.00	137,938,228.00	69,474,548.00	115,110,000.00			385,237,176																						385,237,176.00	
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	89,695,755.00	606,241,320.00	265,739,279.00	276,786,836.00		1,238,461,990				2,894,700.00																		1,925,000.00	1,220,231,740.00	
35	DINAS KEPERLUANAN DILAN DAN PENCAKATAN SPIL	293,859,650.00	130,275,620.00	45,860,000.00	285,076,656.00		745,071,776				711,238,769.00				711,238,769.00	439,886,920.00														27,250,000.00	467,171,820.00
36	DINAS PEMERDIAHAN	226,665,700.00	166,460,000.00	37,075,425.00	437,870,945.00		895,187,000																						400,000.00	454,777,000.00	
37	DINAS PERHILUNGAN	724,233,100.00	153,473,000.00	415,204,952.00	248,646,668.00		1,537,760,680				43,448,500.00				43,448,500.00														51,276,500.00	1,520,935,689.00	
38	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72,495,300.00	206,199,788.00	42,972,950.00	99,963,100.00		421,150,698																						3,014,652.00	418,136,026.00	
39	DINAS PENDIDIKAN MIZAL	98,675,850.00	177,678,285.00	53,740,000.00	41,351,716.00		741,845,851				3,909,160.00				3,909,160.00														3,882,760.00	741,672,251.00	
40	DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	112,977,750.00	151,795,310.00	36,878,721.00	163,116,996.00	4,500,000	475,296,351																						431,311,851.00	510,624,544.00	
41	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	160,443,000.00	563,181,200.00	71,320,000.00	239,540,000.00		1,024,469,120				871,000.00				871,000.00														1,515,000.00	1,023,825,120.00	
42	DINAS POKIRPSA	657,268,650.00	6,010,876,160.00	33,140,000.00	57,915,542.00		3,727,000,302				938,454,501,80	576,362,456.00			1,514,847,357.80	781,328,123.00			2,860,000.00									803,434,817.00	7,863,412,840.00		
43	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERKAKAN	923,355,822.00	93,992,598.00	47,233,330.00	251,958,500.00		1,313,518,318				189,387,200.00				189,387,200.00														199,892,200.00	1,313,343,318.00	
44	DINAS PARAPAKETA DAN KESULITAN	114,876,050.00	171,721,700.00	59,165,880.00	151,165,530.00	13,300.00	510,036,169				113,118,100.00				113,118,100.00														112,919,725.00	510,824,544.00	
45	DINAS PERTANIAN	15,768,386,290.00	2,086,199,200.00	39,902,198.00	1,026,140,921.00		22,904,628,869				2,933,000.00				6,250,000.00	9,183,000.00	25,000,000.00		11,919,000.00								31,200,000.00	23,400,000.00	91,115,000.00	22,822,696,669.00	
46	DINAS PERTANAKAN	113,157,070.00	334,056,000.00	33,135,475.00	75,765,000.00		556,714,511				31,000,000.00	1,969,950.00			5,180,000.00	34,149,950.00			460,000.00								47,740,000.00	545,140,461.00			
47	DINAS KEPERLUANAN DAN SUMBER DAYA MASA	1,151,451,710.00	452,119,630.00	17,800,000.00	1,215,811,944.00		2,837,300,184				1,209,16.00								1,205,816.00	4,127,232.00								4,127,232.00	2,834,378,568.00		
48	SEKRETARAT DAERAH	1,388,146,277.00	1,648,132,320.00	987,433,761.00	3,644,830,818.00	566,400.00	8,072,314,485				859,100.00					477,000.00	1,338,100.00	161,000.00		1,555,000.00								1,716,000.00	8,072,534,585.00		
49	SEKRETARAT DIPRED	2,928,070,950.00	928,517,305.00	218,410,147.00	4,694,839,773.00		8,767,838,220				37,034,040.00				14,022,480.00	51,056,520.00			17,740,000.00								17,745,000.00	8,800,949,740.00			
50	DEPARTEMEN KERJA DAN SUMBER DAYA MASA	260,506,650.00	1,188,209,820.00	121,797,313.00	935,107,904.00		2,509,621,487																				22,530,000.00	2,530,000.00			
51	DEPARTEMEN KESANJANAN DAERAH	947,832,610.00	1,562,081,000.00	320,882,722.00	1,874,528,527.00		7,075,379,898				7,825,150.00								7,825,150.00	7,217,350.00								100,036,948.00	4,671,750,100.00		
52	DINAS KEPERLUANAN DAN SUMBER DAYA MASA	137,416,300.00	325,829,630.00	43,527,475.00	1,041,486,872.00		1,548,254,255																					13,114,852.00	1,525,159,632.00		
53	INSPEKTORAT	96,801,050.00	89,485,330.00	55,996,000.00	1,270,410,001.00		1,512,329,359																					2,485,000.00	1,509,844,359.00		
54	KECAMATAN BORONG	233,003,152.00	296,427,205.00	55,098,428.00	194,360,000.00		785,888,985																					600,000.00	790,289,965.00		
55	KECAMATAN KOTA KOMBUTA	47,040,150.00	41,130,352.00	42,709,778.00	50,500,000.00		181,540,280																					181,540,280.00	181,540,280.00		
56	KECAMATAN CONGKAR	239,207,060.00	135,803,800.00	56,600,550.00	181,310,000.00		611,921,410										2,384,000.00	2,384,000.00									81,305,410.00				
57	KECAMATAN LAMBIA LEDA UTAMA	52,739,200.00	48,764,800.00	38,950,000.00	44,730,000.00		188,164,000																					186,164,000.00			
58	KECAMATAN LAMBIA LEDA MELALU	31,069,550.00	45,698,080.00	58,500,000.00	49,360,000.00		184,827,630																					184,827,630.00			
59	KECAMATAN LAMBIA LEDA TAUAR	30,075,700.00	40,813,240.00	35,500,000.00	65,520,000.00		171,247,040																				171,247,040.00				
60	KECAMATAN ELAR	128,240,800.00	91,874,080.00	56,299,542.00	94,350,000.00		370,564,422				340,000.00						28,794,000.00	29,124,000.00									309,688,422.00				
61	BAJAD KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	425,850,450.00	751,577,000.00	37,980,000.00	403,824,397.00		1,676,238,127																				12,798,054.00	1,883,446,063.00			
62	BAJAD KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000																										

Beban Persediaan

No	OPD	Beban Persediaan		Kenaikan/ Penurunan	Trend
		2024	2023		
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	50,715,069,666.41	53,682,843,594.74	(2,967,773,928.33)	(5.53)
2	Dinas Kesehatan	18,405,261,452.32	17,109,570,202.73	1,295,691,249.59	7.57
3	RSUD Borong	10,479,580,035.65	7,861,829,445.49	2,617,750,590.16	33.30
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9,883,420,787.00	8,568,485,607.00	1,314,935,180.00	15.35
5	UPTD BLUD SPAM	2,745,812,698.00	2,649,701,954.00	96,110,744.00	3.63
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	32,794,400.00	19,101,800.00	13,692,600.00	71.68
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	204,318,850.00	147,960,853.00	56,357,997.00	38.09
8	Dinas social	477,465,800.00	172,232,050.00	305,233,750.00	177.22
9	Dinas Pertanahan	62,714,400.00	83,548,000.00	(20,833,600.00)	(24.94)
10	Dinas Lingkungan Hidup	90,465,505.00	141,537,800.00	(51,072,295.00)	(36.08)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	565,209,349.00	759,684,101.00	(194,474,752.00)	(25.60)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	226,665,709.00	269,367,800.00	(42,702,091.00)	(15.85)
13	Dinas Perhubungan	719,063,100.00	1,259,799,800.00	(540,736,700.00)	(42.92)
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	72,455,300.00	44,238,159.00	28,217,141.00	63.78
15	DPMPTSP	98,902,250.00	200,353,750.00	(101,451,500.00)	(50.64)
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	117,492,250.00	56,663,672.00	60,828,578.00	107.35
17	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	160,639,000.00	255,635,880.00	(94,996,880.00)	(37.16)
18	DP2KBDP3A	1,390,787,884.80	509,466,299.00	881,321,585.80	172.99
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	920,356,892.00	264,704,783.00	655,652,109.00	247.69
20	Dinas Pariwisata dan kebudayaan	115,534,425.00	132,930,950.00	(17,396,525.00)	(13.09)
21	Dinas Pertanian	19,752,569,290.00	12,079,082,000.00	7,673,487,290.00	63.53
22	Dinas Peternakan	102,043,020.00	439,165,598.03	(337,122,578.03)	(76.76)
23	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1,148,530,094.00	197,657,076.00	950,873,018.00	481.07
24	Sekretariat Daerah	1,387,321,377.00	1,854,572,992.00	(467,251,615.00)	(25.19)
25	Sekretariat DPRD	2,979,127,470.00	3,441,123,500.00	(461,996,030.00)	(13.43)
26	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	260,506,650.00	278,733,950.00	(18,227,300.00)	(6.54)
27	Badan Keuangan Daerah	948,440,410.00	929,996,100.00	18,444,310.00	1.98
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	137,410,300.00	263,949,420.00	(126,539,120.00)	(47.94)
29	Inspektorat	96,801,050.00	117,474,500.00	(20,673,450.00)	(17.60)
30	Kecamatan Borong	233,003,152.00	254,055,300.00	(21,052,148.00)	(8.29)
31	Kecamatan Kota Komba Utara	47,040,150.00	40,557,500.00	6,482,650.00	15.98
32	Kecamatan Congkar	241,591,060.00	214,889,912.00	26,701,148.00	12.43
33	Kecamatan Lamba Leda Utara	52,739,200.00	48,453,300.00	4,285,900.00	8.85
34	Kecamatan Ranamese	31,069,550.00	31,032,000.00	37,550.00	0.12
35	Kecamatan Kota Komba	353,812,800.00	364,313,000.00	(10,500,200.00)	(2.88)
36	Kecamatan Lamba Leda Selatan	456,473,350.00	422,524,550.00	33,948,800.00	8.03
37	Kecamatan Lamba Leda	56,631,055.00	63,512,305.00	(6,881,250.00)	(10.83)
38	Kecamatan Sambi Rampas	465,910,849.00	390,626,900.00	75,283,949.00	19.27
39	Kecamatan Elar Selatan	155,749,600.00	144,039,200.00	11,710,400.00	8.13
40	Kecamatan Lamba Leda Timur	30,075,700.00	24,882,100.00	5,193,600.00	20.87
41	Kecamatan Elar	157,364,800.00	151,864,700.00	5,500,100.00	3.62
42	Badan Kesbangpol	425,850,450.00	101,718,950.00	324,131,500.00	318.65
	Jumlah	127,004,071,131.18	116,043,881,353.99	10,960,189,777.19	9.44